



# AKUNTANSI HIJAU



Erlyna Tri Rohmiatur  
Syifa Vidya Sofwan  
Fipiariny .S  
Siska Aprianti  
Rafrini Amyulianthy  
Fadilla Purwitasari  
Nurmala Ahmar  
Mira  
Tri Astuti  
Yevi Dwitayanti  
Santi Rahmawaty  
Muhammad Ikbal  
Fauzan Fuadi  
Monika Handayani  
Mahsina  
Ayu Puspitasari  
Dien Ajeng Fauziah

# AKUNTANSI HIJAU

Dalam menghadapi krisis lingkungan global dan meningkatnya tuntutan akan praktik bisnis berkelanjutan, dunia akuntansi tidak lagi hanya berfokus pada pelaporan keuangan semata. Buku "Akuntansi Hijau" hadir sebagai panduan penting yang menjawab kebutuhan akan integrasi antara tanggung jawab lingkungan dan sistem akuntansi modern. Buku Akuntansi Hijau mengangkat konsep dasar **akuntansi lingkungan (green accounting)** yang melibatkan pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan atas aktivitas dan dampak lingkungan perusahaan. Melalui pendekatan teoritis dan praktis, pembaca akan diajak memahami bagaimana biaya lingkungan dihitung, bagaimana pelaporan keberlanjutan disusun, serta bagaimana informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab.

Bab dalam Buku ini terdiri dari: Akuntansi Hijau: Sebuah Pengantar, Krisis Ekologi dan Urgensi Akuntansi Hijau, Konsep Akuntansi Hijau Untuk Keberlanjutan Bisnis dan Lingkungan, Strategi Keberlanjutan Bisnis: Akuntansi Hijau dan Identitas Organisasi, Keberlanjutan dan Akuntansi Hijau dalam Transformasi Bisnis Internasional, Akuntansi Hijau: Integrasi Keberlanjutan ke dalam Pelaporan keuangan, Metode Akuntansi Hijau dalam Praktik Bisnis, Akuntansi Hijau Berbasis Etika Bisnis, Manajemen Akuntansi Hijau Dalam Efisiensi Biaya Lingkungan, Akuntansi Hijau dan Kinerja Lingkungan, Akuntansi Hijau: Strategi Penggabungan Bisnis dengan Kelestarian Lingkungan, Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak, Penerapan Akuntansi Hijau dan Aturannya, Penerapan Akuntansi Hijau Pada Perusahaan perkebunan, Akuntansi Hijau Pertambangan, Peran Akuntan Hijau: Akuntansi Karbon dan Isu Perubahan Iklim, Isu Perbankan Hijau dan Kinerja Keuangan Bank.

"Akuntansi Hijau" ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, auditor, manajer keuangan, dan pelaku usaha yang ingin memahami bagaimana praktik akuntansi dapat berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan pembahasan yang relevan dengan konteks Indonesia maupun global, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam menjawab tantangan era ekonomi hijau.



Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992

eurekamediaakarsa@gmail.com

Jl. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMERUSAHAWA

EC002025079859

ISBN 978-634-221-907-2



9

786342

219072

# **AKUNTANSI HIJAU**

**Erlyna Tri Rohmiantun, S.E., M.Ak., Ak.**

**Syifa Vidya Sofwan, S.E., M.Ak., CA.**

**Fipiariny, S, S.E., M.Si., Ak.**

**Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA., CRP**

**Rafrini Amyulianthy, Ph.D., CSRS., AseanCPA.**

**Fadilla Purwitasari, S.E., M.Ak**

**Dr. Nurmala Ahmar, M.Si., Ak., CA**

**Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak**

**Dr. Tri Astuti, S.E., M.M., A.k., C.A., CERA.**

**Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc.,CGAA**

**Santi Rahmawaty, S.E., M.Ak**

**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ikbal, M.SA., CSRA., CIAS., CTT**

**Fauzan Fuadi, S.Ak., M.Sc**

**Dr. Monika Handayani, S.E., Ak.,C.A., M.M.**

**Dr. Mahsina, S.E., M.Si**

**Ayu Puspitasari, S.Ak., M.Ak**

**Dien Ajeng Fauziah, S.E., M.Ak., CSRS., CSRA**



**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

## AKUNTANSI HIJAU

<b>Penulis</b>	: Erlyna Tri Rohmiantun, S.E., M.Ak., Ak.   Syifa Vidya Sofwan, S.E., M.Ak., CA.   Fipiariny.S, S.E., M.Si., Ak.   Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA., CRP   Rafrini Amyulianthy, Ph.D., CSRS., AseanCPA.   Fadilla Purwitasari, S.E., M.Ak   Dr. Nurmala Ahmar, M.Si., Ak., CA   Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak   Dr. Tri Astuti, S.E., M.M., A.k., C.A., CERA.   Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc.,CGAA   Santi Rahmawaty, S.E., M.Ak   Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ikbal, M.SA., CSRA., CIAS., CIT   Fauzan Fuadi, S.Ak., M.Sc   Dr. Monika Handayani, S.E., Ak.,C.A., M.M.   Dr. Mahsina, S.E., M.Si   Ayu Puspitasari, S.Ak., M.Ak   Dien Ajeng Fauziah, S.E., M.Ak., CSRS., CSRA
<b>Editor</b>	: Rafles Ginting, S.E., M.Ak
<b>Desain Sampul</b>	: Firman Isma'il
<b>Tata Letak</b>	: Husnun Nur Afifah
<b>ISBN</b>	: 978-634-221-907-2
<b>No. HKI</b>	: EC002025079859
Diterbitkan oleh	: <b>EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2025</b> <b>ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH</b> <b>NO. 225/JTE/2021</b>

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2025

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul "**Akuntansi Hijau**" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis dalam merespons semakin mendesaknya isu lingkungan yang berkaitan erat dengan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di era modern.

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan telah mendorong perubahan besar dalam cara perusahaan beroperasi. Dunia usaha tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Oleh karena itu, akuntansi sebagai sistem informasi utama dalam dunia bisnis perlu bertransformasi—tidak hanya mencatat nilai ekonomi, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai ekologis.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang berorientasi pada keberlanjutan. Pembahasan mencakup landasan teoritis, regulasi dan standar pelaporan lingkungan, serta implementasi akuntansi hijau dalam konteks dunia usaha. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi akuntansi, serta pihak manajemen yang peduli terhadap isu keberlanjutan.

Buku ini terdiri dari 17 Bab, yaitu:

- Bab 1 Akuntansi Hijau – Sebuah Pengantar
- Bab 2 Krisis Ekologi dan Urgensi Akuntansi Hijau
- Bab 3 Konsep Akuntansi Hijau untuk Keberlanjutan Bisnis dan Lingkungan
- Bab 4 Strategi Keberlanjutan Bisnis: Akuntansi Hijau dan Identitas Organisasi
- Bab 5 Keberlanjutan dan Akuntansi Hijau dalam Transformasi Bisnis Internasional
- Bab 6 Akuntansi Hijau: Integrasi Keberlanjutan ke dalam Pelaporan Keuangan

- Bab 7 Metode Akuntansi Hijau dalam Praktik Bisnis
- Bab 8 Akuntansi Hijau Berbasis Etika Bisnis
- Bab 9 Manajemen Akuntansi Hijau dalam Efisiensi Biaya Lingkungan
- Bab 10 Akuntansi Hijau dan Kinerja Lingkungan
- Bab 11 Akuntansi Hijau: Strategi Penggabungan Bisnis dengan Kelestarian Lingkungan
- Bab 12 Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak: Keterkaitan, Tantangan, dan Solusi
- Bab 13 Penerapan Akuntansi Hijau dan Aturannya
- Bab 14 Penerapan Akuntansi Hijau pada Perusahaan Perkebunan
- Bab 15 Akuntansi Hijau Pertambangan
- Bab 16 Peran Akuntansi Hijau: Akuntansi Karbon dan Isu Perubahan Iklim
- Bab 17 Isu Perbankan Hijau dan Kinerja Keuangan Bank

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu akuntansi yang lebih manusiawi, beretika, dan berkelanjutan.

Surabaya, 4 Mei 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB 1 AKUNTANSI HIJAU - SEBUAH PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Konsep Dasar dan Teori terkait Akuntansi Hijau.....	3
C. Simpulan.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18
TENTANG PENULIS .....	21
<b>BAB 2 KRISIS EKOLOGI DAN URGENSI AKUNTANSI HIJAU .....</b>	<b>23</b>
A. Pendahuluan .....	23
B. Krisis Ekologi .....	23
C. Urgensi Akuntansi Hijau.....	25
D. Tantangan Implementasi Akuntansi Hijau.....	32
E. Strategi Mendorong Implementasi Akuntansi Hijau .....	35
F. Studi Kasus Implementasi Akuntansi Hijau.....	38
G. Kesimpulan.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42
TENTANG PENULIS .....	44
<b>BAB 3 KONSEP AKUNTANSI HIJAU UNTUK KEBERLANJUTAN BISNIS DAN LINGKUNGAN ....</b>	<b>45</b>
A. Pendahuluan .....	45
B. Sejarah Akuntansi Hijau .....	46
C. Pengertian Konsep Akuntansi Hijau .....	47
D. Kerangka Kerja Akuntansi Hijau .....	48
E. Konsep dalam Akuntansi Hijau .....	54
F. Kesimpulan.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
TENTANG PENULIS .....	62

<b>BAB 4 STRATEGI KEBERLANJUTAN BISNIS: AKUNTANSI HIJAU DAN IDENTITAS ORGANISASI .....</b>	<b>63</b>
A. Pendahuluan.....	63
B. Strategi Keberlanjutan Bisnis Melalui Akuntansi Hijau.....	64
C. Identitas Organisasi dan Implementasi Akuntansi Hijau.....	74
D. Kesimpulan .....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
TENTANG PENULIS .....	84
<b>BAB 5 KEBERLANJUTAN DAN AKUNTANSI HIJAU DALAM TRANSFORMASI BISNIS INTERNASIONAL.....</b>	<b>85</b>
A. Pendahuluan.....	85
B. Globalisasi dan Tantangan Lingkungan .....	87
C. Transformasi Bisnis Menuju Keberlanjutan .....	92
D. Peran Akuntansi Hijau dalam Bisnis Internasional... <td>96</td>	96
E. Inovasi dan Teknologi dalam Akuntansi Hijau Global.....	98
F. Tantangan dan Peluang.....	99
G. Studi Kasus Internasional Perusahaan Global .....	101
H. Penutup .....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105
TENTANG PENULIS .....	110
<b>BAB 6 AKUNTANSI HIJAU: INTEGRASI KEBERLANJUTAN KE DALAM PELAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>111</b>
A. Pendahuluan.....	111
B. Standar Pelaporan Keuangan oleh <i>Global Reporting Initiatives (GRI)</i> .....	112
C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan .....	121
D. Simpulan.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
TENTANG PENULIS .....	124

<b>BAB 7</b>	<b>METODE AKUNTANSI HIJAU DALAM PRAKTIK BISNIS.....</b>	<b>125</b>
A.	Pendahuluan .....	125
B.	Konsep Dasar Akuntansi Hijau .....	127
C.	Kerangka Metodologi Akuntansi Hijau: Prinsip-Prinsip Dasar dalam Akuntansi Hijau.....	132
D.	Penerapan Akuntansi Hijau dalam Praktik Bisnis: Contoh Studi Kasus .....	142
E.	Manfaat Penerapan Akuntansi Hijau: Dampak Positif terhadap Lingkungan dan Keberlanjutan.....	150
F.	Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Akuntansi Hijau: Hambatan Regulasi dan Kebijakan .....	158
G.	Kesimpulan.....	169
	DAFTAR PUSTAKA.....	173
	TENTANG PENULIS .....	180
<b>BAB 8</b>	<b>AKUNTANSI HIJAU BERBASIS ETIKA BISNIS.....</b>	<b>181</b>
A.	Pendahuluan .....	181
B.	Tantangan Moral dalam Praktik Akuntansi Lingkungan .....	183
C.	Dilema Etis dalam Praktik <i>Green Accounting</i> .....	184
D.	Membangun Budaya Etis dalam Organisasi .....	185
E.	Akuntansi Hijau Berbasis Etika Bisnis.....	187
F.	Simpulan.....	189
	DAFTAR PUSTAKA.....	190
	TENTANG PENULIS .....	193
<b>BAB 9</b>	<b>MANAJEMEN AKUNTANSI HIJAU DALAM EFISIENSI BIAYA LINGKUNGAN.....</b>	<b>195</b>
A.	Pendahuluan .....	195
B.	Konsep Dasar Manajemen Akuntansi Hijau.....	197
C.	Identifikasi dan Pengukuran Biaya Lingkungan .....	199
D.	Implementasi Manajemen Akuntansi Hijau dalam Efisiensi Biaya Lingkungan .....	202
E.	Implementasi Akuntansi Hijau dalam Sektor Energi .....	205
F.	Strategi Manajemen dan Pelaporan Berkelanjutan..	206

G. Kesimpulan .....	211
DAFTAR PUSTAKA.....	212
TENTANG PENULIS .....	213
<b>BAB 10 AKUNTANSI HIJAU DAN KINERJA</b>	
<b>LINGKUNGAN .....</b>	<b>215</b>
A. Pendahuluan .....	215
B. Akuntansi Hijau dan Kinerja Lingkungan .....	215
C. Kesimpulan .....	234
DAFTAR PUSTAKA.....	236
TENTANG PENULIS .....	238
<b>BAB 11 AKUNTANSI HIJAU: STRATEGI PENGGABUNGAN BISNIS DENGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN .....</b>	<b>239</b>
A. Pendahuluan.....	239
B. Pentingnya Akuntansi Hijau dalam Bisnis Modern .....	242
C. Tantangan dalam Implementasi Akuntansi Hijau ..	249
D. Strategi Penggabungan Akuntansi Hijau dengan Keberlanjutan Bisnis .....	253
E. Kebijakan dan Regulasi terkait Akuntansi Hijau.....	255
F. Studi Kasus dan Implementasi Akuntansi Hijau dalam Praktik Bisnis .....	259
G. Kesimpulan .....	263
DAFTAR PUSTAKA.....	266
TENTANG PENULIS .....	268
<b>BAB 12 AKUNTANSI HIJAU DAN PENGHINDARAN PAJAK: KETERKAITAN, TANTANGAN, DAN SOLUSI.....</b>	<b>269</b>
A. Pendahuluan .....	269
B. Konsep Dasar Akuntansi Hijau.....	273
C. Konsep Penghindaran Pajak.....	275
D. Keterkaitan Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak .....	278
E. Studi Kasus: Perusahaan yang Sukses Menerapkan Akuntansi Hijau Tanpa Penghindaran Pajak .....	280

F. Regulasi Internasional dan Upaya Mencegah Penghindaran Pajak Hijau.....	283
G. Tantangan dan Etika dalam Implementasi Akuntansi Hijau.....	284
H. Kesimpulan.....	286
DAFTAR PUSTAKA.....	288
TENTANG PENULIS .....	292
<b>BAB 13 PENERAPAN AKUNTANSI HIJAU DAN ATURANNYA .....</b>	<b>293</b>
A. Pendahuluan .....	293
B. Peran Regulasi dalam Penerapan Akuntansi Hijau.	295
C. Kerangka Regulasi dan Standar Akuntansi Hijau ...	297
D. Simpulan.....	305
DAFTAR PUSTAKA.....	307
TENTANG PENULIS .....	310
<b>BAB 14 PENERAPAN AKUNTANSI HIJAU PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN.....</b>	<b>311</b>
A. Pendahuluan .....	311
B. Konsep dan Prinsip Akuntansi Hijau .....	317
C. Peran Akuntansi Hijau dalam Perusahaan Perkebunan.....	318
D. Standar dan Regulasi terkait Akuntansi Hijau pada Perusahaan Perkebunan .....	318
E. Implementasi Akuntansi Hijau pada Perusahaan Perkebunan.....	319
F. Keuntungan Penerapan Akuntansi Hijau pada Perusahaan Perkebunan .....	319
G. Tantangan yang Dihadapi: Keterbatasan Sumber Daya, Kesulitan dalam Pengukuran Dampak Lingkungan, dan Biaya Implementasi.....	320
H. Kasus: Penerapan Akuntansi Hijau pada PT Perkebunan Lestari.....	320
DAFTAR PUSTAKA.....	325
TENTANG PENULIS .....	328

<b>BAB 15 AKUNTANSI HIJAU PERTAMBANGAN .....</b>	<b>329</b>
A. Pentingnya Akuntansi Hijau di Sektor Pertambangan.....	329
B. Beberapa Kerangka Kerja ( <i>Framework</i> ) dalam Akuntansi Hijau untuk Sektor Pertambangan.....	331
C. Penerapan Akuntansi Hijau di Sektor Pertambangan.....	332
D. Pelacakan Biaya Lingkungan.....	333
DAFTAR PUSTAKA.....	337
TENTANG PENULIS .....	338
<b>BAB 16 PERAN AKUNTANSI HIJAU: AKUNTANSI KARBON DAN ISU PERUBAHAN IKLIM .....</b>	<b>339</b>
A. Pentingnya Akuntansi Hijau di Sektor Pertambangan.....	339
B. Akuntansi Hijau dan Peran Akuntan dalam Keberlanjutan.....	341
C. Akuntansi Karbon: Konsep, Regulasi, dan Implementasi .....	345
D. Isu Perubahan Iklim dan Tantangan bagi Profesi Akuntansi.....	348
E. Implikasi bagi Profesi Akuntansi dan Rekomendasi.....	355
F. Kesimpulan .....	359
DAFTAR PUSTAKA.....	363
TENTANG PENULIS .....	366
<b>BAB 17 ISU PERBANKAN HIJAU DAN KINERJA KEUANGAN BANK .....</b>	<b>367</b>
A. Pendahuluan .....	367
B. Konsep Perbankan Hijau.....	369
C. Regulasi dan Inisiatif Perbankan Hijau.....	370
D. Teori-Teori yang Relevan .....	372
E. Isu-Isu dalam <i>Green Banking</i> .....	374
F. Pengaruh <i>Green Banking</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank.....	375
G. Studi Kasus Bank-Bank yang Mengadopsi <i>Green Banking</i> .....	376

H. Simpulan.....	377
DAFTAR PUSTAKA.....	379
TENTANG PENULIS .....	383

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Studi Kasus Implementasi Akuntansi Hijau di Beberapa Perusahaan .....	39
<b>Tabel 3.1</b>	Formula Pelaporan Biaya Lingkungan .....	57
<b>Tabel 4.1</b>	Indikator Pengukuran Keberlanjutan .....	67
<b>Tabel 9.1</b>	Perbandingan GRI dan ISO 14001 .....	208
<b>Tabel 9.2</b>	Manfaat Integrasи Akuntansi Hijau dalam Strategi Bisnis .....	210

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Skor Ancaman Ekologis Negara ASEAN .....	24
<b>Gambar 3.1</b>	Kerangka Kerja Akuntansi Hijau.....	48
<b>Gambar 3.2</b>	Faktor Relevan Keberhasilan Akuntansi Hijau .....	56
<b>Gambar 17.1</b>	Inisiatif Perbankan Hijau .....	371



## **AKUNTANSI HIJAU**

**Erlyna Tri Rohmiatun, S.E., M.Ak., Ak.**

**Syifa Vidya Sofwan, S.E., M.Ak., CA.**

**Fipiariny, S.E., M.Si., Ak.**

**Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA., CRP**

**Rafrini Amyulianthy, Ph.D., CSRS., AseanCPA.**

**Fadilla Purwitasari, S.E., M.Ak**

**Dr. Nurmala Ahmar, M.Si., Ak., CA**

**Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak**

**Dr. Tri Astuti, S.E., M.M., A.k., C.A., CERA.**

**Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc., CGAA**

**Santi Rahmawaty, S.E., M.Ak**

**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ikbal, M.SA., CSRA., CIAS., CTT**

**Fauzan Fuadi, S.Ak., M.Sc**

**Dr. Monika Handayani, S.E., Ak., C.A., M.M.**

**Dr. Mahsina, S.E., M.Si**

**Ayu Puspitasari, S.Ak., M.Ak**

**Dien Ajeng Fauziah, S.E., M.Ak., CSRS., CSRA**



# BAB

# 1

# AKUNTANSI HIJAU – SEBUAH PENGANTAR

**Erlyna Tri Rohmiyatun, S.E., M.Ak., Ak.**

Universitas NU Sidoarjo

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi, seperti kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat, serta kerusakan terumbu karang di berbagai wilayah perairan Indonesia, menunjukkan pentingnya penerapan akuntansi hijau dalam praktik bisnis nasional. Menurut Debnath *et al.* (2016), akuntansi lingkungan berperan penting dalam membantu perusahaan melacak dampak aktivitasnya terhadap lingkungan dan menghasilkan informasi tentang pemanfaatan sumber daya alam seperti material, energi, air, dan sumber daya lainnya.

Perkembangan akuntansi hijau di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Momentum penting terjadi pada tahun 2007 ketika pemerintah mengeluarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian Endiana *et al.* (2020) bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia yang memiliki peringkat baik dalam program penilaian kinerja

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia memiliki prospek kinerja keuangan yang baik.

Implementasi akuntansi hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Survei yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 35% perusahaan terbuka di Indonesia yang telah menerapkan akuntansi hijau secara komprehensif. Huang & Yu (2023) menekankan pentingnya sistem akuntansi terintegrasi yang menggabungkan aspek ekonomi dan lingkungan dalam pelaporan keuangan, dengan mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas organisasi.

Penerapan akuntansi hijau di Indonesia semakin meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Chen & Li (2022) menunjukkan bahwa pemantauan dan pelaporan emisi total, emisi industri, dan kualitas udara menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi akuntansi hijau. Di Indonesia, beberapa perusahaan besar seperti PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Astra International Tbk telah menjadi pionir dalam penerapan akuntansi hijau.

Manfaat penerapan akuntansi hijau di Indonesia telah mulai terlihat pada beberapa sektor industri. Menurut Endiana *et al.* (2020), alokasi biaya lingkungan dalam akuntansi hijau melalui implementasi Corporate Sustainability Management System (CSMS) merupakan salah satu kebijakan strategis bagi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini diperkuat oleh Debnath *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa pendekatan akuntansi hijau mendukung mekanisme pelaporan sukarela yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang bagaimana perusahaan berkontribusi pada harapan masyarakat.

Definisi dan ruang lingkup akuntansi hijau dalam konteks Indonesia mencakup aspek yang lebih luas dari sekadar pencatatan keuangan konvensional. Huang & Yu (2023) menekankan bahwa ruang lingkup akuntansi hijau meliputi

pencatatan biaya-biaya lingkungan seperti biaya pengelolaan limbah dan polusi, pengukuran manfaat lingkungan seperti penghematan energi, serta pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan terintegrasi. Sistem ini juga mencakup pengembangan indikator kinerja lingkungan dan penilaian risiko lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan strategis organisasi dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## B. Konsep Dasar dan Teori terkait Akuntansi Hijau

### 1. Perbedaan dengan akuntansi konvensional

Akuntansi hijau dan akuntansi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam hal cakupan, fokus pengukuran, dan tujuan pelaporan. Menurut Huang & Yu (2023), akuntansi konvensional hanya berfokus pada aspek finansial tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, sementara akuntansi hijau memperluas cakupan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan dalam sistem pelaporan. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa akuntansi hijau memasukkan biaya dan manfaat lingkungan ke dalam perhitungan seperti biaya pengelolaan limbah dan polusi (Huang & Yu, 2023). Perbedaan ini mencerminkan evolusi sistem akuntansi dalam merespons kebutuhan akan informasi yang lebih komprehensif, dimana akuntansi hijau membantu organisasi mengukur, mengelola dan melaporkan kinerja lingkungannya secara sistematis dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

### 2. Perbandingan Akuntansi Konvensional vs Akuntansi Hijau:

Aspek	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Hijau
Fokus	Transaksi Keuangan	Transaksi Keuangan dan dampak lingkungan

<b>Aspek</b>	<b>Akuntansi Konvensional</b>	<b>Akuntansi Hijau</b>
Pengukuran	Moneter	Moneter dan non-moneter
Cakupan Biaya	Biaya operasional dan produksi	Termasuk biaya lingkungan dan sosial
Pelaporan Integritasi	Laporan keuangan standar	Laporan keuangan dan laporan sustainability
Stakeholder	Investor dan kreditor	Semua pemangku kepentingan
Periode Waktu	Jangka pendek	Jangka pendek dan panjang
Tujuan	Kinerja Keuangan	Kinerja Keuangan dan Sustainability
Standar	GAAP/IFRS	GAAP/IFRS + Standar lingkungan

Prinsip-prinsip dasar akuntansi hijau mencakup beberapa aspek fundamental yang menjadi landasan dalam penerapannya. Pertama, prinsip materialitas yang mengharuskan pengungkapan informasi lingkungan yang signifikan dan relevan bagi pengambilan keputusan. Kedua, prinsip kelengkapan yang mewajibkan pelaporan seluruh dampak lingkungan, baik positif maupun negatif. Ketiga, prinsip konsistensi yang mensyaratkan penggunaan metode pengukuran dan pelaporan yang konsisten antar periode. Keempat, prinsip kehati-hatian dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan untuk menghindari understated liabilities atau overstated assets. Kelima, prinsip transparansi yang menekankan keterbukaan informasi terkait kebijakan, prosedur, dan kinerja lingkungan. Keenam, prinsip akuntabilitas yang mengharuskan pertanggungjawaban atas pengelolaan dampak lingkungan kepada pemangku kepentingan. Ketujuh, prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat dalam implementasi

sistem akuntansi hijau. Kedelapan, prinsip keberlanjutan yang memastikan informasi lingkungan mendukung pengambilan keputusan jangka panjang. Kesembilan, prinsip keterbandingan yang memungkinkan perbandingan kinerja lingkungan antar periode dan antar organisasi. Kesepuluh, prinsip keandalan yang menjamin keakuratan dan objektivitas informasi lingkungan yang dilaporkan.

### 3. Teori dan Pendekatan dalam Akuntansi Hijau

Untuk memahami dinamika akuntansi hijau, diperlukan kerangka teoretis yang menjelaskan mengapa perusahaan melakukan pengungkapan informasi lingkungan. Beberapa teori yang sering digunakan antara lain:

#### a. *Stakeholder Theory*

Teori ini menekankan pentingnya memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, investor, konsumen, dan aktivis lingkungan. Perusahaan yang menyadari pentingnya legitimasi dari para pemangku kepentingan akan cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi lingkungan (Freeman & Reed, 1983; Mahmood *et al.*, 2022).

#### b. *Legitimacy Theory*

Menurut teori legitimasi, perusahaan berusaha mendapatkan dukungan sosial dengan menunjukkan bahwa kegiatannya sejalan dengan norma dan nilai yang dianut masyarakat. Pengungkapan informasi lingkungan dilakukan sebagai strategi untuk mempertahankan atau memulihkan legitimasi sosial perusahaan (Akhter *et al.*, 2023; O'Donovan, 2002).

#### c. *Institutional Theory*

Teori ini beranggapan bahwa organisasi menyesuaikan diri dengan tekanan institusional yang berasal dari lingkungan eksternal, seperti regulasi pemerintah, norma industri, atau praktik terbaik (best practices). Dalam konteks ini, pengungkapan informasi

lingkungan bisa dilihat sebagai bentuk kepatuhan terhadap tekanan institusional (Campbell, 2007).

**d. *Triple Bottom Line (TBL)***

Konsep TBL dikembangkan oleh Elkington (1997) dan menekankan bahwa perusahaan harus mengejar tiga jenis keuntungan secara bersamaan: profit (keuntungan ekonomi), people (kesejahteraan sosial), dan planet (perlindungan lingkungan). Dalam pendekatan ini, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial.

**4. Komponen Akuntansi Hijau**

Komponen penting dalam akuntansi hijau/lingkungan yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, biaya lingkungan, sistem informasi, pengungkapan, dan audit. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan dampak lingkungan, pemahaman yang mendalam tentang komponen-komponen ini menjadi krusial bagi organisasi dalam mengelola tanggung jawab lingkungan perusahaan.

**a. Akuntansi Sumber Daya Alam**

- 1) Pencatatan dan penilaian aset sumber daya alam: Proses ini melibatkan pengidentifikasi dan penilaian nilai aset yang berasal dari sumber daya alam, seperti mineral, hutan, dan air.
- 2) Pengukuran deplesi dan degradasi sumber daya: Mengukur penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam akibat aktivitas manusia dan faktor lingkungan.
- 3) Perhitungan biaya pemulihan lingkungan: Menilai biaya yang diperlukan untuk memulihkan lingkungan setelah kerusakan yang disebabkan oleh eksplorasi sumber daya.

**b. Akuntansi Biaya Lingkungan**

- 1) Identifikasi biaya pencegahan polusi: Mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya polusi sebelum terjadi.
- 2) Pengukuran biaya pengelolaan limbah: Menghitung biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas operasional.
- 3) Perhitungan biaya kepatuhan regulasi: Menilai biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi peraturan lingkungan yang berlaku.
- 4) Penilaian biaya remediasi lingkungan: Menghitung biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

**c. Sistem Informasi Lingkungan**

- 1) Pengumpulan data dampak lingkungan: Mengumpulkan data yang relevan mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan.
- 2) Pemantauan indikator kinerja lingkungan: Memantau dan menganalisis indikator yang menunjukkan kinerja lingkungan perusahaan.
- 3) Pelaporan informasi lingkungan: Menyusun laporan yang menyajikan informasi lingkungan kepada pemangku kepentingan.

**d. Pengungkapan dan Pelaporan**

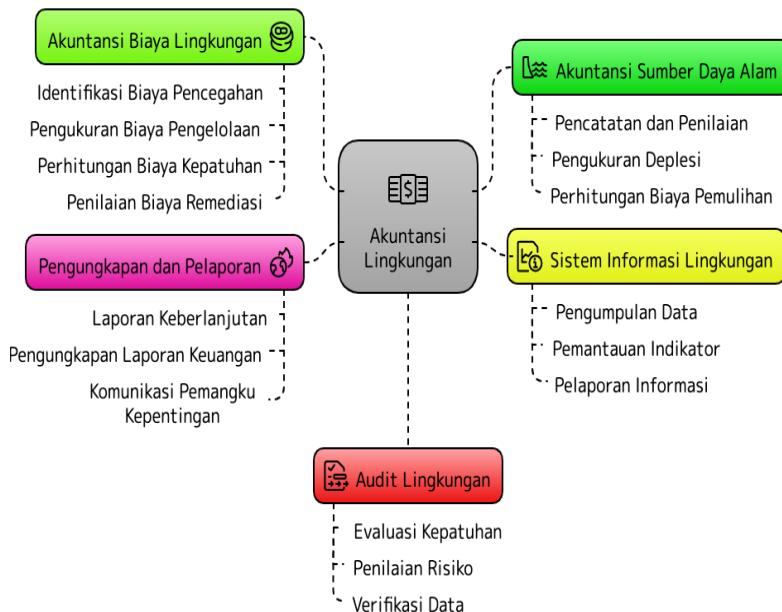
- 1) Laporan keberlanjutan: Menyusun laporan yang mencakup informasi tentang kinerja keberlanjutan perusahaan.
- 2) Pengungkapan dalam laporan keuangan: Menyertakan informasi lingkungan dalam laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada investor.
- 3) Komunikasi dengan pemangku kepentingan: Berkommunikasi secara transparan dengan pemangku kepentingan mengenai isu-isu lingkungan yang relevan.

### e. Audit Lingkungan

- 1) Evaluasi kepatuhan lingkungan: Melakukan audit untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku.
- 2) Penilaian risiko lingkungan: Mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.
- 3) Verifikasi data lingkungan: Memastikan keakuratan dan keandalan data yang dilaporkan mengenai dampak lingkungan.

Dengan memahami dan menerapkan komponen-komponen ini, organisasi dapat lebih efektif dalam mengelola dampak lingkungan perusahaan dan berkontribusi pada keberlanjutan global.

### Komponen Akuntansi Lingkungan



Pengukuran biaya lingkungan mencakup beberapa kategori utama:

**a. Biaya Pencegahan Lingkungan**

- 1) Biaya riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan
- 2) Biaya pelatihan karyawan terkait pengelolaan lingkungan
- 3) Biaya modifikasi proses produksi untuk mengurangi limbah
- 4) Biaya audit lingkungan preventif

**b. Biaya Deteksi Lingkungan**

- 1) Biaya inspeksi produk dan proses
- 2) Biaya pengujian pencemaran
- 3) Biaya pengukuran tingkat kontaminasi
- 4) Biaya pemantauan aktivitas lingkungan

**c. Biaya Kegagalan Internal**

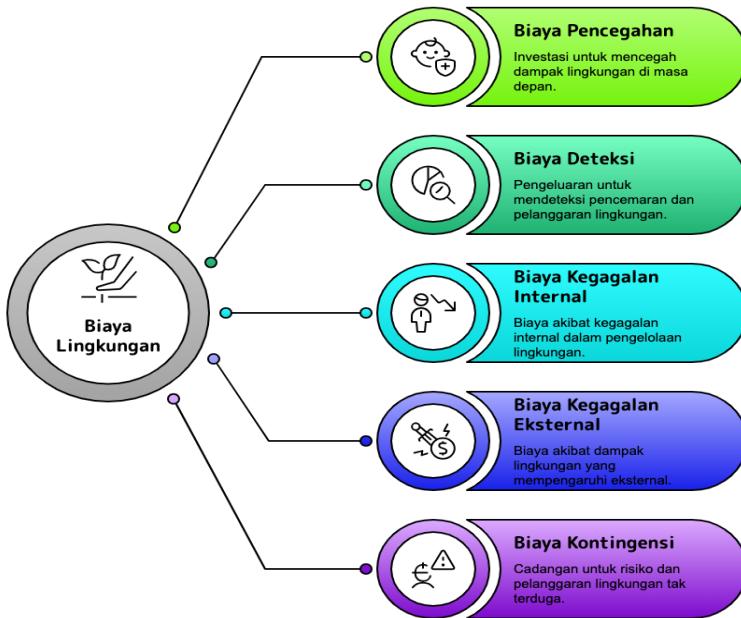
- 1) Biaya pengoperasian peralatan pengendalian polusi
- 2) Biaya pengelolaan dan pembuangan limbah beracun
- 3) Biaya pemeliharaan peralatan pencemaran
- 4) Biaya daur ulang sisa material

**d. Biaya Kegagalan Eksternal**

- 1) Biaya pembersihan danau/sungai yang tercemar
- 2) Biaya pemulihan tanah yang terkontaminasi
- 3) Biaya penyelesaian klaim kerusakan lingkungan
- 4) Biaya kompensasi kerusakan properti akibat polusi

**e. Biaya Kontingensi Lingkungan**

- 1) Biaya potensial remediasi atau kompensasi
- 2) Biaya kepatuhan regulasi di masa depan
- 3) Denda dan penalti yang mungkin terjadi
- 4) Biaya tak terduga terkait risiko lingkungan



**a. Identifikasi kewajiban lingkungan:**

- 1) Kewajiban hukum terkait regulasi lingkungan
- 2) Kewajiban konstruktif dari komitmen sukarela
- 3) Kewajiban kontingensi lingkungan
- 4) Estimasi biaya remediasi dan rehabilitasi
- 5) Provisi untuk pemulihan lingkungan
- 6) Kewajiban terkait pengelolaan limbah
- 7) Kewajiban kompensasi dampak lingkungan
- 8) Kewajiban pajak dan retribusi lingkungan

**b. Pelaporan kinerja lingkungan:**

- 1) Pengukuran dan evaluasi dampak lingkungan
- 2) Indikator kinerja lingkungan utama (KPI)
- 3) Metode pelaporan yang terstandarisasi
- 4) Pengungkapan data kuantitatif dan kualitatif
- 5) Pelaporan emisi gas rumah kaca
- 6) Penggunaan sumber daya dan efisiensi
- 7) Pengelolaan limbah dan daur ulang
- 8) Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan

Pengungkapan informasi lingkungan merupakan aspek krusial dalam akuntansi hijau yang mencakup pelaporan sistematis tentang dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, termasuk data kuantitatif dan kualitatif mengenai penggunaan sumber daya, emisi, pengelolaan limbah, serta upaya mitigasi dampak lingkungan yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan ini dapat bersifat wajib sesuai regulasi atau sukarela melalui sustainability report, yang bertujuan memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan tentang komitmen dan kinerja lingkungan perusahaan, sekaligus menjadi dasar evaluasi efektivitas program pengelolaan lingkungan yang dijalankan. Informasi yang diungkapkan mencakup aspek moneter seperti biaya lingkungan dan investasi teknologi ramah lingkungan, serta aspek non-moneter seperti kebijakan lingkungan, target pengurangan emisi, dan pencapaian sertifikasi lingkungan, yang kesemuanya berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan baik oleh manajemen maupun investor.

Standar dan regulasi akuntansi hijau merupakan kerangka kerja dan pedoman yang mengatur praktik pelaporan lingkungan oleh perusahaan, mencakup standar internasional seperti SEEA (System of Environmental-Economic Accounting) dari PBB, regulasi nasional yang ditetapkan oleh otoritas setempat, serta framework pelaporan berkelanjutan seperti GRI (Global Reporting Initiative) yang memberikan panduan terstruktur bagi organisasi dalam mengungkapkan informasi terkait dampak lingkungan, penggunaan sumber daya, dan upaya pelestarian lingkungan secara transparan dan terstandarisasi.

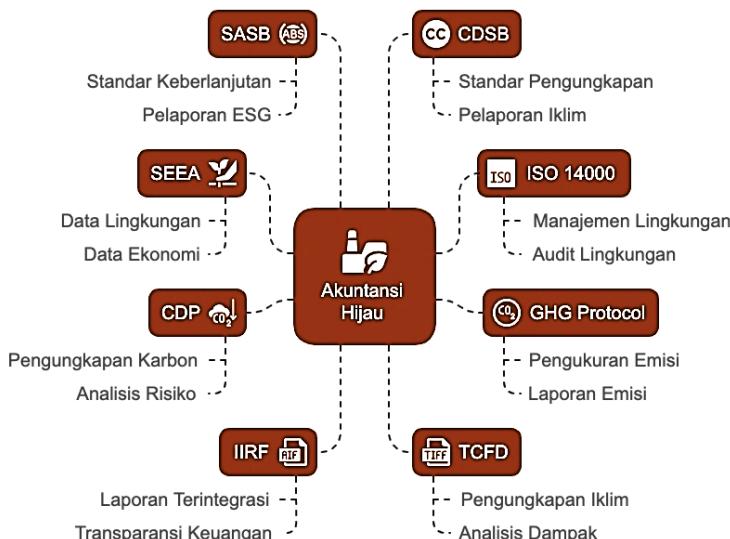
Standar internasional merupakan pedoman dan kerangka kerja yang ditetapkan oleh organisasi internasional untuk mengatur praktik pelaporan dan pengungkapan informasi lingkungan dalam akuntansi hijau secara terstandarisasi di tingkat global. Standar-standar ini bertujuan untuk memastikan konsistensi, komparabilitas,

dan kualitas pelaporan lingkungan antar organisasi di berbagai negara.

Beberapa standar internasional utama dalam akuntansi hijau:

- a. System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) dari PBB
- b. ISO 14000 series untuk manajemen lingkungan
- c. Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)
- d. Carbon Disclosure Project (CDP)
- e. International Integrated Reporting Framework (IIRF)
- f. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
- g. Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
- h. Climate Disclosure Standards Board (CDSB)

Regulasi nasional merupakan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur praktik pelaporan dan pengungkapan informasi lingkungan dalam akuntansi hijau di tingkat nasional. Regulasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari standar pelaporan, kewajiban pengungkapan, hingga sanksi atas pelanggaran ketentuan lingkungan yang bertujuan untuk memastikan penerapan akuntansi hijau secara efektif di Indonesia.



Beberapa regulasi nasional terkait akuntansi hijau di Indonesia:

- a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- c. PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
- d. PSAK 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum
- e. Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
- g. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Framework pelaporan berkelanjutan merupakan pedoman dan standar yang dikembangkan untuk membantu organisasi dalam melaporkan kinerja keberlanjutan perusahaan secara terstruktur dan terstandarisasi. Framework ini menyediakan prinsip-prinsip, indikator, dan metodologi pelaporan yang memungkinkan organisasi untuk mengungkapkan informasi terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara transparan dan dapat dibandingkan.

Framework pelaporan keberlanjutan utama:

- a. Global Reporting Initiative (GRI) Standards
- b. Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
- c. International Integrated Reporting Framework (IIRF)
- d. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
- e. CDP (Carbon Disclosure Project)
- f. UN Global Compact Communication on Progress (COP)

- g. AA1000 Account Ability Principles
- h. ISO 26000 Guidance on Social Responsibility

## 5. Implementasi Akuntansi Hijau di Indonesia

Implementasi akuntansi hijau di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan tekanan regulasi. Menurut Al Amin & Hanifuddin (2021), perkembangan ini didukung oleh berbagai kerangka hukum dan regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta POJK 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan. Kusumaningtias (2013) menambahkan bahwa program penilaian kinerja lingkungan seperti PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup telah berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk lebih serius dalam mengelola dan melaporkan aspek lingkungan perusahaan.

Di sektor industri, implementasi akuntansi hijau telah mulai diterapkan terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Penelitian Shuro & Stainbank (2014) menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan manufaktur menjadi pionir dalam pengungkapan biaya lingkungan dan pelaporan emisi karbon, sementara sektor properti dan industri pengolahan mulai mengembangkan program efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang lebih sistematis. Namun, Hiding *et al.* (2024) mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi hijau, biaya implementasi yang tinggi, serta belum seragamnya standar pelaporan yang digunakan.

Untuk mengoptimalkan implementasi akuntansi hijau di Indonesia, Ulupui *et al.* (2020) menekankan perlunya strategi pengembangan yang komprehensif meliputi penguatan kerangka regulasi dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan temuan Qiu *et al.* (2016) yang menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan

dan sertifikasi, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi akan mendukung terciptanya ekosistem yang kondusif bagi penerapan akuntansi hijau yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Penerapan akuntansi hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan implementasinya. Menurut Hiding *et al.* (2024), tantangan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan kompetensi dalam akuntansi hijau, serta kompleksitas teknis dalam pengukuran dampak lingkungan. Al Amin & Hanifuddin (2021) menambahkan bahwa belum seragamnya standar pelaporan dan inkonsistensi regulasi antar sektor dan wilayah juga menjadi hambatan dalam penerapan akuntansi hijau secara efektif.

Tantangan lainnya berupa resistensi internal organisasi yang masih berorientasi pada profit jangka pendek. Hal ini sejalan dengan temuan Qiu *et al.* (2016) yang menunjukkan kurangnya komitmen manajemen puncak dalam mengalokasikan sumber daya untuk implementasi akuntansi hijau. Menurut Kusumaningtias (2013), kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran pemangku kepentingan akan pentingnya informasi lingkungan dan terbatasnya dukungan dari sektor keuangan dalam mendorong praktik akuntansi hijau.

Risal *et al.* (2020) menekankan bahwa strategi implementasi akuntansi hijau memerlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Shuro & Stainbank (2014) mengusulkan langkah pertama berupa pembangunan komitmen dan dukungan dari manajemen puncak melalui penetapan kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai. Perkembangan roadmap implementasi yang jelas dengan tahapan-tahapan spesifik.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan implementasi akuntansi hijau, yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Selain itu, organisasi juga perlu membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data lingkungan secara efisien. Standardisasi prosedur dan metode pengukuran dampak lingkungan juga sangat penting guna menjamin konsistensi serta kualitas data yang dihasilkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti konsultan, auditor, dan lembaga sertifikasi dapat memperkuat kapabilitas organisasi dalam implementasi akuntansi hijau. Al Amin & Hanifuddin (2021) menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan pencapaian target. Selain hal tersebut, perlu menekankan strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk mengedukasi dan melibatkan seluruh karyawan serta pemangku kepentingan dalam proses implementasi.

### C. Simpulan

Akuntansi hijau merupakan pendekatan akuntansi modern yang berupaya mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan. Di tengah kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan, penerapan akuntansi hijau menjadi solusi strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Akuntansi ini tidak hanya mencatat transaksi finansial, tetapi juga mengukur dan mengungkapkan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan (Huang & Yu, 2023).

Perbedaan mendasar antara akuntansi hijau dan akuntansi konvensional terletak pada fokus, cakupan biaya, dan tujuan pelaporan. Akuntansi hijau mencakup biaya lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pencegahan polusi, dan remediasi, serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku

kepentingan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan keterbandingan menjadi landasan penting dalam implementasinya (Yang *et al.*, 2023).

Teori-teori seperti stakeholder theory, legitimacy theory, dan institutional theory menjelaskan mengapa perusahaan terdorong untuk mengungkapkan informasi lingkungan. Selain itu, konsep Triple Bottom Line memperluas definisi kinerja korporasi dari sekadar profit menjadi mencakup people and planet (Elkington, 1997). Teori-teori ini mendasari pendekatan akuntansi hijau dalam merespons tekanan sosial dan regulasi lingkungan.

Implementasi akuntansi hijau di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, biaya tinggi, dan ketidakterpaduan standar pelaporan. Namun, perkembangan positif mulai terlihat dengan adanya dukungan regulasi seperti POJK No.51/2017 serta inisiatif perusahaan-perusahaan besar dalam menerbitkan laporan keberlanjutan (Al Amin & Hanifuddin, 2021).

Akuntansi hijau di masa yang akan datang berpotensi menjadi kompetensi wajib bagi akuntan di era transisi menuju ekonomi hijau. Untuk itu, penguatan regulasi, pelatihan SDM, dan pengembangan sistem informasi lingkungan harus terus diakselerasi. Dengan pemahaman mendalam dan keterlibatan aktif semua pihak, akuntansi hijau akan menjadi instrumen penting dalam menciptakan nilai jangka panjang dan mendorong transformasi menuju keberlanjutan (Endiana *et al.*, 2020; Risal *et al.*, 2020; Ulupui *et al.*, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhter, F., Hossain, M. R., Elrehail, H., Rehman, S. U., & Almansour, B. (2023). Environmental disclosures and corporate attributes, from the lens of legitimacy theory: a longitudinal analysis on a developing country. *European Journal of Management and Business Economics*, 32(3), 342–369. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-01-2021-0008>
- Al Amin, E. M. N., & Hanifuddin, I. (2021). Implementation of Financial Services Authority Regulation №35/POJK.05/2015 Article 35 by Indonesian Venture Capital Companies in 2015. *Journal of World Economy: Transformations & Transitions*. <https://doi.org/10.52459/jowett1281121>
- Campbell, J. L. (2007). Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility. *The Academy of Management Review*, 32(3), 946–967. <https://www.jstor.org/stable/20159343>
- Chen, B., & Li, F. (2022). Comprehensive Accounting of Resources, Environment, and Economy Integrating Machine Learning and Establishment of Green GDP. *Mathematical Problems in Engineering*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/5191929>
- Debnath, A. K., Haworth, N., Schramm, A., & Williamson, A. (2016). Observational study of compliance with Queensland bicycle helmet laws. *Accident Analysis and Prevention*, 97, 146–152. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2016.09.010>
- Elkington, J. (1997) *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing Ltd.
- Endiana, I. D. M., Dicriyani, N. L. G. M., Adiyadnya, M. S. P., & Putra, I. P. M. J. S. (2020). The Effect of Green Accounting on Corporate Sustainability and Financial Performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 731–738. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.731>

- Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance The Stakeholder Concept. CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW, XXV(3), 88–106.
- Halidin, S., Haerunnisa, R., Arsyad, K., Sakti, M. R. P., & Nanda, S. (2024). Implementation of Green Accounting and Sustainability Performance Critical Reflections, Challenges and Opportunities. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 10(2), 184–198.
- Huang, J., & Yu, S. (2023). A study on global national green GDP accounting based on the System of Integrated Environmental-Economic Accounting. In Business, Economics and Management EERMR (Vol. 2023).
- Kusumaningtias. (2013). PROCEEDING SEMINAR NASIONAL GREEN ACCOUNTING, MENGAPA DAN BAGAIMANA? Proceeding Seminar Nasional Dan Call for Papers Sancall 2013, 137–149.
- Mahmood, M., Khan, S., & Kamal, A. (2022). Multicultural Education Does Corporate Governance Attributes Influence on Corporate Social Responsibility Disclosure and Financial Stability: Stakeholder theory Approach. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6639427>
- O'Donovan, G. (2002). Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(3), 344–371. <https://doi.org/10.1108/09513570210435870>
- Qiu, Y., Shaukat, A., & Tharyan, R. (2016). Environmental and social disclosures: Link with corporate financial performance. British Accounting Review, 48(1), 102–116. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.007>

- Risal, T., Lubis, N., & Argatha, V. (2020). IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN. *Accumulated Journal*, 2(1), 73–85.
- Shuro, N., & Stainbank, L. (2014). Sustainability reporting in South Africa: A comparative study of the mining and manufacturing industries. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(25), 92–101. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n25p92>
- Ulupui, I. G. K. A., Murdayanti, Y., Marini, A. C., Purwohedi, U., & Yanto, H. (2020). Green accounting, material flow cost accounting and environmental performance. *Accounting*, 6(5), 743–752. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.6.009>
- Yang, J., Wu, Y., & Huang, B. (2023). Digital finance and financial literacy: Evidence from Chinese households. *Journal of Banking and Finance*, 156. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2023.107005>

## TENTANG PENULIS



**Erlyna Tri Rohmiyatun, S.E., M.Ak., Ak**

Penulis lahir di Tulungagung pada tanggal 10 Maret 1982. Latar Belakang Pendidikan penulis adalah sedang menempuh program doktor ilmu akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya. Sebelumnya, penulis meraih gelar Magister dalam bidang Akuntansi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga Surabaya. Penulis bekerja sebagai dosen tetap di Universitas NU Sidoarjo.



# BAB 2 | KRISIS EKOLOGI DAN URGENSI AKUNTANSI HIJAU

Syifa Vidya Sofwan, S.E., M.Ak., Ak., CA.

Universitas Bale Bandung

## A. Pendahuluan

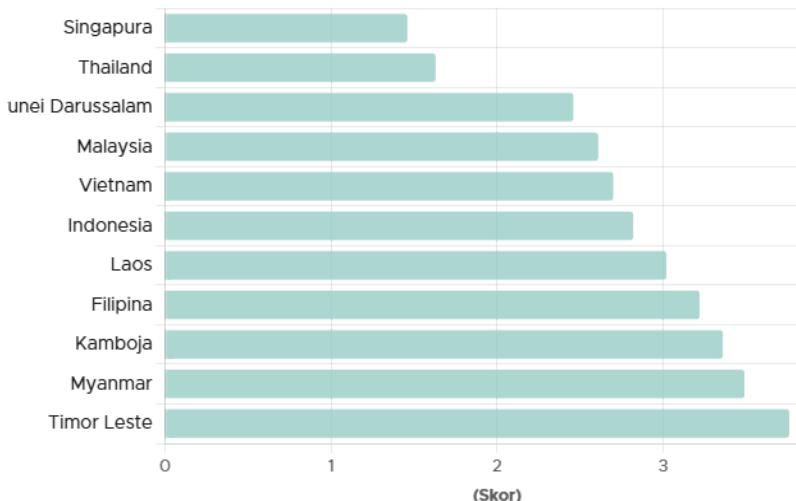
Ekologi adalah studi tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan lainnya. Kata ekologi itu sendiri berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos ("habitat") dan logo ("sains"). Ekologi ditafsirkan sebagai investigasi interaksi antara organisme dan organisme dan lingkungannya. Istilah Ekologi pertama kali disajikan oleh Ernst Heckel (1834-1914). Dalam ekologi, organisme dianggap sebagai unit atau sistem dengan lingkungan (Darmayani *et al.*, 2021).

Seiring berkembangnya zaman terjadilah krisis ekologi yang dilakukan manusia, dan akuntansi disebut-sebut sebagai salah satu penyebab dari terjadinya krisis ekologi. Maka munculah yang dinamakan akuntansi hijau yang bertujuan untuk mengukur dan melaporkan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan. Seperti apa krisis ekologi saat ini dan urgensi dari akuntansi hijau? Mari kita bahas satu persatu.

## B. Krisis Ekologi

Pada saat ini kita sedang mengalami krisis ekologi yang serius dan membahayakan bumi. Krisis ekologi global disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat eksplorasi penggunaan sumber daya alam serta lingkungan yang serakah

semakin parah dan semakin mengkhawatirkan. Krisis tersebut telah menimbulkan berbagai bencana lingkungan diberbagai belahan dunia yang sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup manusia (Lako, 2018).



**Gambar 2.1** Skor Ancaman Ekologis Negara ASEAN

Sumber : (Institute for Economics & Peace, 2024)

Berdasarkan laporan Institute for Economics & Peace (IEP) yang bertajuk Ecological Threat Report 2024, Indonesia mencatatkan penurunan ancaman ekologis dibanding tahun lalu. Skor ancaman ekologis yang diperoleh sebesar 2,82, berkurang 1,69 poin terhadap 2023 yang berada di angka 4,51. Skor ancaman ekologis tersebut diukur dalam skala 1-5. Makin tinggi angkanya, makin besar pula risiko krisis yang menimpakeluarga suatu negara. Besaran skor tahun ini menempatkan Indonesia dalam kategori menengah, setelah di tahun sebelumnya tergolong sangat tinggi.

Sementara itu, kendati membaik, ancaman ekologis Indonesia masih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Di tataran regional, Indonesia menduduki urutan keenam. Negara dengan krisis ekologis di kategori sangat rendah hanya terjadi di Singapura (1,46) dan Thailand (1,63). Brunei Darussalam dengan skor 2,46 masuk kategori rendah, sementara status Malaysia

(2,61) dan Vietnam (2,7) menengah, sama seperti Indonesia. Secara global, di antara 207 wilayah yang diteliti, tercatat ada 50 negara yang menghadapi tingginya krisis ekologis, sebagian besar berada di wilayah Afrika Sub-Sahara. Niger menjadi dengan krisis ekologis ekstrem, skornya menyentuh angka 5. Afghanistan dan Chad mengekor, masing-masing memperoleh skor 4,84 dan 4,81.

Akuntansi dianggap sebagai salah satu pemicu terjadinya krisis ekologi karena proses akuntansi lebih memfokuskan pada objek-objek, peristiwa dan transaksi keuangan, dan menggunakan perspektif akuntansi keuangan dalam proses akuntansi terhadap transaksi-transaksi, peristiwa-peristiwa dan objek-objek sosial serta lingkungan. Akuntansi dituduh berkontribusi pada laporan keuangan yang timbul dari proses akuntansi dan keputusan untuk hanya menyiapkan informasi akuntansi keuangan, dan berkontribusi pada peningkatan krisis sosial dan lingkungan untuk laporan keuangan yang timbul dari proses akuntansi. informasi. Ini berarti bahwa penilaian dan keputusan pengguna informasi akuntansi salah atau salah, terutama dalam kaitannya dengan aspek sosial dan ekologis.(Lako, 2017)

Maka dari itu munculah tuntutan untuk perubahan praktik akuntansi, IAI sendiri dalam 10 tahun terakhir berupaya dalam mereformasi rerangka konseptual, prinsip dan juga standar akuntansi yang lebih ramah lingkungan dan dinamakan Akuntansi Hijau.

Akuntansi Hijau diharapkan dapat membawa perubahan yang berarti bagi keberlanjutan lingkungan dibandingkan sebelumnya.

### C. Urgensi Akuntansi Hijau

Krisis lingkungan global yang ditandai oleh pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan degradasi sumber daya alam menuntut perubahan paradigma dalam pembangunan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan akan mengancam keberlanjutan hidup

manusia dan planet bumi. Dalam konteks ini, akuntansi hijau menjadi salah satu solusi strategis. Akuntansi hijau—green accounting—adalah pendekatan akuntansi yang memperhitungkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi dan menyajikannya secara sistematis dalam laporan keuangan.

Akuntansi hijau memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal berperan sebagai bagian dari sistem informasi lingkungan dalam perusahaan. Melalui fungsi ini, perusahaan dapat mengelola biaya yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan, menganalisis keterkaitan antara biaya lingkungan dengan manfaat yang diperoleh, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan konservasi lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang. Sementara itu, fungsi eksternal dari akuntansi hijau berkaitan dengan penyampaian informasi kuantitatif mengenai aktivitas konservasi lingkungan kepada pihak luar. Fungsi ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan (Sunarmin, 2020). Di Indonesia, urgensi penerapan akuntansi hijau semakin menguat seiring meningkatnya perhatian terhadap ESG (Environmental, Social, and Governance) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Akuntansi hijau adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang menggabungkan informasi ekonomi dan lingkungan dalam satu kesatuan. Ruang lingkupnya meliputi:

1. Identifikasi dan pengukuran dampak lingkungan, seperti polusi udara, air, dan tanah.
2. Penghitungan biaya lingkungan, termasuk biaya pengendalian polusi, konservasi energi, dan rehabilitasi lahan.
3. Valuasi sumber daya alam, seperti air, hutan, dan mineral sebagai aset ekonomi.
4. Penyusunan indikator hijau, seperti jejak karbon (carbon footprint) dan intensitas emisi.

Dalam praktiknya, akuntansi hijau dapat diintegrasikan ke dalam laporan keberlanjutan (sustainability report), laporan keuangan tahunan, atau laporan ESG. Schaltegger dan Burritt menekankan bahwa akuntansi hijau bukan sekadar mencatat biaya lingkungan, melainkan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan keuangan. Mereka menyatakan bahwa akuntansi keberlanjutan bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang berkelanjutan, bukan hanya sebagai alat kepatuhan atau komunikasi eksternal (Stefan Schaltegger, Martin Bennett, 2013).

Transformasi akuntansi konvensional yang berfokus pada akuntansi keuangan menjadi Akuntansi Hijau dengan berfokus pada pelaporan informasi akuntansi lingkungan, sosial dan keuangan secara terpadu dalam satu paket pelaporan dirasakan sangat penting dan mendesak (Greenham, 2010). Terdapat beberapa alasan yang mengharuskan segera terbentuknya standar akuntansi hijau yakni :

### **1. Respon terhadap Krisis Lingkungan Global**

Laporan IPCC menyebutkan bahwa suhu rata-rata global telah meningkat sebesar 1,1°C dibandingkan era pra-industri, yang memicu berbagai bencana ekologis. Industri merupakan penyumbang utama emisi karbon dan limbah. Akuntansi hijau dibutuhkan untuk mengukur, mengendalikan, dan mengurangi dampak tersebut secara sistematis (IPCC, 2023).

Perubahan iklim dan pemanasan global serta kerusakan lingkungan telah menimbulkan berbagai bencana alam, bencana sosial dan bencana ekonomi yang serius. Berbagai bencana tersebut juga telah menyebabkan krisis energi dan kelangkaan sumberdaya, kemiskinan, kemelaratan, kesenjangan sosial dan penderitaan rakyat yang makin serius. Secara umum, berbagai literatur mengemukakan bahwa akar utama dari krisis tersebut terletak pada perilaku serakah dan tamak yang ditunjukkan oleh negara, korporasi, serta masyarakat secara luas dalam

upaya membangun perekonomian dan mendorong pertumbuhan nasional (Thornton, T.F. & Comberti, 2013).

Krisis ini muncul dan semakin memburuk akibat dorongan kuat dari pemerintah serta para pelaku ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan keuntungan maksimal. Ambisi tersebut turut memicu perilaku serakah dan tamak di kalangan pemimpin negara dan pelaku ekonomi, yang kemudian mendorong eksplorasi sumber daya alam dan sosial secara berlebihan serta menyebabkan kerusakan lingkungan.

Secara khusus, akuntansi kerap dianggap turut berkontribusi terhadap munculnya perilaku tidak etis tersebut (Deegan, 2013). Akuntansi dinilai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya krisis ekologi dan sosial, karena memfasilitasi perilaku serakah dan tamak dari negara serta pelaku ekonomi-bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini disebabkan oleh prinsip dan standar dalam akuntansi konvensional yang selama ini digunakan oleh entitas korporasi, yang cenderung mengabaikan aspek pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, pelaporan, serta pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, akuntansi konvensional sering kali mengesampingkan pencatatan dan pelaporan atas objek, peristiwa, fenomena, maupun transaksi yang berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan yang berhubungan dengan entitas bisnis.

## **2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Korporasi**

Saat ini, pemangku kepentingan – termasuk investor, konsumen, regulator, dan masyarakat luas – semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas terkait dampak lingkungan dari aktivitas bisnis. Kesadaran global terhadap isu-isu keberlanjutan mendorong perubahan dalam cara pandang terhadap nilai perusahaan, yang tidak lagi semata-mata diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hasil survei Deloitte mengungkapkan bahwa sebanyak 65%

investor global kini mempertimbangkan faktor keberlanjutan sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan investasi. Ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi investasi dari sekadar profit jangka pendek menuju pertimbangan jangka panjang yang berkelanjutan (Deloitte, 2021).

Dalam konteks ini, akuntansi hijau hadir sebagai solusi yang relevan dan strategis. Dengan menyediakan kerangka kerja yang valid, terstandar, dan kredibel, akuntansi hijau memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan dampak lingkungan dari operasional mereka secara transparan. Informasi yang dihasilkan dari praktik akuntansi hijau tidak hanya memenuhi tuntutan pelaporan dari pemangku kepentingan, tetapi juga membantu entitas bisnis mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, akuntansi hijau tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga sarana transformasi menuju praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika.

### **3. Penyesuaian terhadap Regulasi dan Standar Global**

Beberapa negara telah mengadopsi kerangka pelaporan lingkungan seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Di Indonesia, Pada April 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSPL). Sejak diberlakukannya peraturan ini, TJSPL menjadi kewajiban bagi setiap perseroan untuk dianggarkan sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan. Pelaksanaannya harus dilakukan secara berkala dan hasil kinerjanya wajib dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada publik (Lako, 2018).

Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan (sustainability report) bagi para emiten dan institusi jasa keuangan melalui Peraturan OJK (POJK) No.

51/POJK.03/2017. Peraturan ini merupakan langkah strategis dalam mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG) ke dalam praktik bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan. Dengan adanya kewajiban ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi keuangan, tetapi juga harus melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat komitmen dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan. Akuntansi hijau mendukung kepatuhan terhadap kebijakan ini.

#### **4. Penguatan Manajemen Risiko dan Efisiensi Operasional**

Dengan melakukan pencatatan terhadap biaya-biaya lingkungan, perusahaan memiliki kemampuan untuk mengenali potensi risiko sejak dulu dan mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi terkait pelanggaran lingkungan. Selain itu, informasi yang diperoleh melalui praktik akuntansi hijau memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang berpotensi meningkatkan efisiensi, khususnya dalam hal penggunaan energi dan bahan baku. Menurut Porter dan Kramer, penggabungan nilai-nilai sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnis tidak hanya mencerminkan tanggung jawab perusahaan, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam jangka Panjang (Porter, M. E., & Kramer, 2011).

#### **5. Dukungan terhadap gerakan Go Green**

Sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi 20+ yang berlangsung di Rio de Janeiro pada Juni 2012, di mana Indonesia berperan aktif dalam penyusunan dokumen "The Future We Want" serta mendorong konsep Ekonomi Hijau (Green Economy) guna mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan, pemerintah bersama pelaku ekonomi semakin intens dalam menggalakkan kampanye ekonomi hijau (green economy)

dan bisnis hijau (green business) di sektor ekonomi dan dunia usaha. Dalam implementasinya, banyak perusahaan merespons gerakan “go green” ini dengan mulai mengadopsi serta menerapkan berbagai prinsip seperti green business, green industry, green corporation, green management, green production, hingga green finance. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan korporasi yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan (sustainability), sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis sosial dan lingkungan. Berbagai inisiatif tersebut biasanya tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan. (Lako, 2017)

Akuntansi hijau dibuat salah satunya untuk mendukung Gerakan go green, Dalam konteks gerakan go green, akuntansi hijau berperan penting sebagai alat untuk mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa cara akuntansi hijau mendukung gerakan ini antara lain:

**a. Membantu Mengukur Dampak Lingkungan**

Akuntansi hijau memungkinkan perusahaan mengidentifikasi dan mengukur biaya lingkungan yang timbul dari operasional, seperti emisi karbon, limbah berbahaya, konsumsi energi, dan penggunaan air. Dengan pengukuran ini, perusahaan dapat mengambil langkah konkret untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan.

**b. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas**

Melalui pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting), perusahaan dapat menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana mereka mengelola risiko lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Ini sejalan dengan tuntutan global terhadap keterbukaan informasi lingkungan dan sosial.

### **c. Mengidentifikasi Efisiensi Operasional**

Data yang dihasilkan dari pencatatan biaya lingkungan membantu perusahaan menemukan area yang boros energi atau sumber daya, sehingga dapat dilakukan efisiensi dalam proses produksi. Ini bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga menguntungkan secara ekonomi.

### **d. Meningkatkan Reputasi dan Keunggulan Kompetitif**

Perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi hijau dan menerapkannya secara konsisten cenderung mendapat kepercayaan lebih besar dari investor, konsumen, dan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar yang semakin peduli terhadap isu lingkungan.

### **e. Mendukung Pengambilan Keputusan Berkelanjutan**

Informasi dari akuntansi hijau membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis yang mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, bukan hanya keuntungan jangka pendek.

## **D. Tantangan Implementasi Akuntansi Hijau**

### **1. Minimnya Standar yang Seragam**

Tidak seperti standar akuntansi keuangan yang telah mapan dan diadopsi secara luas, akuntansi hijau hingga saat ini masih belum memiliki kerangka standar yang bersifat universal dan mengikat. Sebagian besar praktik akuntansi hijau bersifat sukarela dan cenderung bervariasi antar perusahaan, industri, maupun negara. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam hal konsistensi dan komparabilitas data, sehingga menyulitkan pemangku kepentingan, termasuk investor dan regulator, untuk melakukan evaluasi dan perbandingan kinerja lingkungan secara objektif. Tanpa adanya standar yang seragam, informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan atau laporan lingkungan menjadi kurang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu,

harmonisasi dan standarisasi global terhadap praktik akuntansi hijau menjadi sangat penting untuk mendukung efektivitas gerakan keberlanjutan (Weirich, T.R. & Akresh, 2024).

## **2. Keterbatasan Kapasitas SDM dan Teknologi**

Penerapan akuntansi hijau memerlukan keahlian multidisipliner yang mencakup bidang akuntansi, lingkungan, dan ekonomi sumber daya alam. Namun, di banyak perusahaan, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM), terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang-bidang tersebut. Keterbatasan ini menjadi hambatan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi hijau ke dalam praktik bisnis sehari-hari. Selain itu, pengumpulan dan verifikasi data lingkungan memerlukan teknologi dan sistem informasi khusus yang sering kali belum dimiliki oleh perusahaan, terutama UKM. Keterbatasan dalam akses terhadap teknologi ini menghambat kemampuan perusahaan untuk melakukan pelaporan lingkungan yang akurat dan transparan. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Palu, perusahaan besar cenderung lebih siap dalam mengintegrasikan data lingkungan ke dalam laporan keuangan mereka karena dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai, sementara UKM masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan biaya dan SDM yang membatasi mereka dalam menerapkan akuntansi hijau secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan. Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, kepada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan pelatihan SDM di bidang keberlanjutan. Lembaga pendidikan juga berperan penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi hijau melalui kurikulum yang relevan dan program pelatihan. Dengan demikian,

keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi dapat diatasi secara bertahap, mendukung penerapan akuntansi hijau yang lebih luas dan efektif.

### **3. Biaya Awal yang Tinggi**

Implementasi akuntansi hijau dan sistem pelaporan lingkungan seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM). Biaya ini mencakup pengadaan teknologi ramah lingkungan, pelatihan sumber daya manusia, serta pengembangan sistem pelaporan yang sesuai. Bagi UKM, keterbatasan modal dan sumber daya menjadi tantangan utama dalam mengadopsi praktik ini. Namun, penting untuk melihat biaya awal ini sebagai investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Dengan menerapkan akuntansi hijau, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi limbah, dan meminimalkan risiko lingkungan yang dapat berujung pada sanksi atau kerugian finansial. Selain itu, perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen dan investor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing di pasar. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait juga memainkan peran penting dalam meringankan beban biaya awal ini. Incentif seperti pengurangan pajak, subsidi untuk teknologi hijau, dan program pelatihan dapat membantu perusahaan, khususnya UKM, dalam mengadopsi praktik akuntansi hijau tanpa harus menghadapi tekanan finansial yang berlebihan.

### **4. Resistensi Budaya Organisasi**

Perubahan menuju sistem pencatatan yang lebih inklusif terhadap aspek lingkungan, seperti akuntansi hijau, sering kali menghadapi tantangan besar dalam bentuk resistensi budaya organisasi. Banyak perusahaan, terutama yang telah lama beroperasi dengan paradigma tradisional, masih berfokus secara eksklusif pada keuntungan finansial (profit-sentrism), dan cenderung menganggap inisiatif

keberlanjutan sebagai beban tambahan, bukan sebagai peluang strategis. Budaya organisasi yang kaku, birokratis, dan tidak terbuka terhadap perubahan menghambat adopsi sistem baru yang membutuhkan cara berpikir holistik dan jangka panjang. Dalam banyak kasus, manajemen puncak kurang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap pentingnya keberlanjutan, sehingga enggan mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan, teknologi, maupun pengembangan sistem pelaporan lingkungan. Selain itu, karyawan di lini operasional pun bisa menunjukkan resistensi, terutama jika implementasi akuntansi hijau dianggap memperumit proses kerja atau memperbesar beban administratif. Padahal, perubahan budaya organisasi sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi akuntansi hijau. Diperlukan pendekatan strategis dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, serta kepemimpinan visioner yang mampu mentransformasikan mindset organisasi dari sekadar mengejar laba menuju penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

#### **E. Strategi Mendorong Implementasi Akuntansi Hijau**

Untuk mendorong penerapan akuntansi hijau secara luas dan efektif, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Implementasi akuntansi hijau tidak hanya bergantung pada kesadaran perusahaan, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan teknologi, serta perubahan paradigma dalam pengelolaan bisnis. Oleh karena itu, berbagai pihak – termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil – perlu berperan aktif dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan keuangan. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan guna mendorong implementasi akuntansi hijau :

## **1. Penguatan Regulasi**

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong implementasi akuntansi hijau melalui regulasi yang mendukung dan berpihak pada prinsip keberlanjutan. Salah satu strategi efektif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem insentif dan disinsentif secara seimbang. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak, keringanan fiskal, atau akses pembiayaan hijau bagi perusahaan yang secara konsisten melaporkan kinerja lingkungannya melalui laporan berkelanjutan yang terstandar. Insentif ini tidak hanya meringankan beban finansial perusahaan, tetapi juga menjadi dorongan moral untuk berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Sebaliknya, perusahaan yang terbukti merusak ekosistem, mengabaikan tanggung jawab sosial, atau tidak transparan dalam pelaporan lingkungan dapat dikenakan penalti atau sanksi administratif. Pendekatan regulatif semacam ini akan menciptakan tekanan positif agar pelaku usaha menginternalisasi biaya lingkungan dalam aktivitas ekonomi mereka. Dengan regulasi yang tepat, pemerintah tidak hanya menciptakan level playing field antar pelaku usaha, tetapi juga mempercepat transisi menuju ekonomi yang hijau dan berkelanjutan.

## **2. Peningkatan Literasi dan Kapasitas SDM**

Integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam kurikulum pendidikan akuntansi menjadi langkah strategis dalam memperluas praktik akuntansi hijau di masa depan. Pendidikan tinggi, khususnya program studi akuntansi dan manajemen, perlu mulai memasukkan materi terkait akuntansi lingkungan, pelaporan keberlanjutan, serta ekonomi sirkular ke dalam silabus mereka. Dengan demikian, calon akuntan dan profesional keuangan akan memiliki kesadaran serta keterampilan yang relevan untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan dalam konteks bisnis.

Selain reformasi kurikulum, pelatihan berkelanjutan bagi praktisi yang sudah bekerja—baik akuntan, auditor, maupun manajer lingkungan—juga menjadi kunci penting. Program pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi lingkungan dapat memperkuat pemahaman teknis dalam menyusun laporan lingkungan, mengukur jejak karbon, serta melakukan audit keberlanjutan. Dukungan dari asosiasi profesi, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan lembaga pendidikan, akan mempercepat penyebaran keahlian ini secara nasional. Dengan kapasitas SDM yang mumpuni, implementasi akuntansi hijau dapat dilakukan lebih luas, konsisten, dan berdampak nyata terhadap keberlanjutan perusahaan maupun lingkungan.

### **3. Pengembangan Indikator dan Kerangka Kerja Lokal**

Penyusunan kerangka akuntansi hijau yang kontekstual dengan karakteristik ekonomi dan ekologi Indonesia merupakan langkah penting dalam mendorong praktik keberlanjutan yang relevan dan aplikatif. Mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, terutama di sektor kehutanan, pertambangan, dan agrikultur, maka kerangka akuntansi hijau perlu dirancang secara spesifik agar dapat menangkap dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut. Pendekatan satu ukuran untuk semua (one-size-fits-all) yang bersifat generik tidak akan cukup efektif dalam menangani isu-isu lokal seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran tambang, atau penggunaan pestisida berlebih di sektor pertanian.

Kerangka ini harus mencakup metode pengakuan dan pengukuran nilai atas aset dan liabilitas lingkungan, serta sistem pelaporan yang memungkinkan perusahaan menghitung biaya eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari operasionalnya. Di sisi lain, aspek sosial seperti dampak terhadap masyarakat adat atau ketimpangan distribusi lahan juga perlu diperhitungkan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi akuntansi, dan pelaku industri menjadi kunci dalam menyusun kerangka kerja yang tidak hanya

akurat secara teknis, tetapi juga kontekstual terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

#### **4. Kolaborasi Multi-Stakeholder**

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti LSM, akademisi, asosiasi profesi, dan sektor swasta sangat penting dalam membangun ekosistem pelaporan lingkungan yang kredibel dan berkelanjutan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) berperan sebagai pengawas independen sekaligus penggerak advokasi transparansi dan akuntabilitas lingkungan. Mereka dapat menyoroti praktik-praktik industri yang merusak dan mendorong adopsi standar pelaporan yang lebih ketat. Di sisi lain, akademisi berkontribusi melalui riset-riset ilmiah yang dapat memperkaya metode pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan serta menyusun kurikulum yang relevan untuk mencetak SDM kompeten di bidang ini. Asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki posisi strategis untuk merumuskan pedoman teknis dan etika dalam praktik akuntansi hijau, serta memastikan pelaku profesi memiliki standar kompetensi yang memadai.

Sektor swasta sendiri, sebagai pelaku utama ekonomi, harus menjadi motor penggerak pelaporan lingkungan dengan menerapkan praktik yang bertanggung jawab dan melaporkan kinerjanya secara transparan. Sinergi antar elemen ini akan menciptakan sistem pelaporan lingkungan yang tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta lingkungan secara luas.

#### **F. Studi Kasus Implementasi Akuntansi Hijau**

Penerapan akuntansi hijau telah menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan keberlanjutan di berbagai sektor. Praktik ini tidak hanya menekankan pada pencatatan dan pelaporan dampak lingkungan, tetapi juga mendorong perusahaan dan institusi pemerintah untuk meninjau kembali

model bisnis dan kebijakan fiskal mereka. Bab ini menyajikan studi kasus implementasi akuntansi hijau dari sektor industri, energi, perbankan, hingga pemerintahan, guna memberikan gambaran menyeluruh atas aplikasinya di lapangan.

**Tabel 2.1** Studi Kasus Implementasi Akuntansi Hijau di Beberapa Perusahaan

Nama Perusahaan	Implementasi Akuntansi Hijau
PT Unilever Indonesia Tbk	Unilever menerapkan Environmental Management Accounting (EMA) untuk memetakan biaya lingkungan seperti air, energi, dan limbah. Mereka juga mengembangkan Environmental Profit & Loss (EP&L) yang mengkonversi dampak lingkungan ke dalam nilai ekonomi. Pengurangan jejak karbon dan efisiensi energi menjadi target tahunan. Informasi ini disampaikan secara terbuka melalui Sustainability Report mereka (Unilever Indonesia, 2022).
PT Pertamina (Persero)	Pertamina mengembangkan roadmap transisi energi, termasuk pencatatan emisi GRK berbasis GHG Protocol. Perusahaan menerapkan pelaporan TCFD dan membangun sistem akuntansi karbon terintegrasi. Pengurangan emisi, konservasi energi, dan pengelolaan air menjadi indikator utama yang tercermin dalam laporan tahunan dan keberlanjutan (Pertamina, 2022).
Bank Rakyat Indonesia (BRI)	BRI mencatat pembiayaan hijau dalam sistem akuntansi terpisah, seperti pembiayaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi hijau. Mereka mengukur dampak portofolio terhadap emisi CO2 dan melaporkan penurunan

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Implementasi Akuntansi Hijau</b>
	emisi operasional dari kegiatan perbankan digital. RAKB dijadikan acuan utama dalam perencanaan strategis tahunan (BRI, 2023).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta mengadopsi pendekatan Green Planning and Budgeting (GPB), yang mengintegrasikan indikator lingkungan ke dalam perencanaan anggaran. Contohnya, anggaran Dinas Lingkungan Hidup mencakup indikator pengurangan titik banjir dan peningkatan ruang terbuka hijau. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta melaporkan capaian lingkungan yang dikaitkan dengan dana publik (Permana, 2023).

## G. Kesimpulan

Krisis ekologi global yang semakin mengkhawatirkan telah memicu kesadaran baru akan pentingnya perubahan paradigma dalam praktik ekonomi dan pelaporan keuangan. Aktivitas ekonomi yang selama ini berorientasi pada profit semata terbukti menjadi kontributor utama terhadap kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, akuntansi hijau muncul sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan keberlanjutan yang kompleks.

Akuntansi hijau tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi, termasuk biaya pencemaran, konsumsi energi, serta pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kerangka kerja yang lebih inklusif, akuntansi hijau membantu perusahaan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, meningkatkan efisiensi operasional, serta membangun reputasi dan daya saing di tengah tuntutan global terhadap keberlanjutan.

Di Indonesia, urgensi akuntansi hijau semakin kuat seiring dengan peningkatan perhatian terhadap ESG dan SDGs, serta diterbitkannya kebijakan seperti PP No. 47/2012 dan POJK No. 51/2017 yang mendorong pelaporan keberlanjutan. Namun, implementasi akuntansi hijau masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain minimnya standar yang seragam, keterbatasan SDM dan teknologi, biaya awal yang tinggi, serta resistensi budaya organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mempercepat penerapannya. Ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan literasi keberlanjutan di dunia pendidikan dan profesi, penyusunan kerangka kerja lokal yang sesuai dengan kondisi Indonesia, serta kolaborasi lintas sektor. Studi kasus dari sektor industri, energi, keuangan, dan pemerintahan menunjukkan bahwa akuntansi hijau dapat diimplementasikan secara nyata dan memberi dampak positif terhadap lingkungan dan tata kelola perusahaan.

Dengan demikian, akuntansi hijau bukan sekedar alat pelaporan, melainkan instrumen penting dalam transformasi ekonomi menuju masa depan yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BRI (2023) *Sustainability Report 2023*.
- Darmayani *et al.* (2021) *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*. Available at: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com).
- Deegan, C. (2013) *Financial Accounting Theory*. 4th edn. Edited by Sydney. McGraw-Hill Education.
- Deloitte (2021) *Global Sustainability Investment Review*.
- Greenham, T. (2010) 'Green accounting: a conceptual framework', *International Journal of Green Economics*, 4(4), pp. 333–345. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1504/IJGE.2010.037655>.
- Institute for Economics & Peace (2024) 'Ekological Threat Report 2024'.
- IPCC (2023) *Sixth Assessment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change*.
- Lako, A. (2017) 'Krisis Ekologi dan Urgensi Tatakelola Bisnis dan Akuntansi Hijau', *Akuntansi Indonesia*, (December), pp. 60–64. Available at: <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/25626>.
- Lako, A. (2018) 'Akuntansi Hijau', *December*, (December), p. 146.
- Permana, Y. (2023) 'Integrasi Akuntansi Hijau dalam APBD: Studi Kasus DKI Jakarta', *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), pp. 134–149.
- Pertamina (2022) *Sustainability Report 2022*.
- Porter, M. E., & Kramer, M.R. (2011) *Creating Shared Value*.
- Stefan Schaltegger, Martin Bennett, R.B. (2013) *Sustainability Accounting and Reporting*, Springer Science Business Media Dordrecht.

- Sunarmin (2020) 'Green Technology Accounting as an Innovation to Reduce Environmental Pollution.', *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 1(2), pp. 135–141. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/neraca.v1i2.862>.
- Thornton, T.F. & Comberti, C. (2013) 'Synergies and trade-offs between adaptation, mitigation and development', *Climatic Change*, 122(3), pp. 341–355. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10584-013-0884-3>.
- Unilever Indonesia (2022) *Laporan Keberlanjutan Unilever Indonesia*.
- Weirich, T.R. & Akresh, A. (2024) 'The ISSB's New Sustainability Disclosure Standards', *The CPA Journal* [Preprint].

## TENTANG PENULIS



**Syifa Vidya Sofwan, S.E., M.Ak., Ak., CA.**

Penulis lahir di Bandung tanggal 10 Agustus 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Universitas Bale Bandung Program Studi Akuntansi. Menyelesaikan pendidikan S1, S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama. Penulis menekuni bidang Akuntansi, Auditing, dan Akuntansi Keuangan. Motivasi penulis ingin selalu memberikan yang terbaik, termasuk ketika terdapat kebaharuan dalam suatu keilmuan. Karya yang sudah diterbitkan ada beberapa Buku yakni, Auditing 1, Auditing 2, dan Teori Ekonomi, Pengauditan 1, Teori Akuntansi, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Jurnal terindeks Sinta, Penelitian dan Pengabdian.

# BAB

# 3

## KONSEP AKUNTANSI HIJAU UNTUK KEBERLANJUTAN BISNIS DAN LINGKUNGAN

Fipiariny, S, S.E., M.Si., Ak.

Universitas Palembang

### A. Pendahuluan

Meningkatnya kesadaran global terhadap isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan, dunia usaha dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Konsep keberlanjutan (*sustainability*) kini menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan, dan salah satu pendekatan yang berkembang untuk mendukung hal tersebut adalah penerapan akuntansi hijau (*green accounting*).

Akuntansi hijau merupakan sistem pelaporan dan pencatatan akuntansi yang memasukkan aspek lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan perusahaan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola biaya serta dampak lingkungan dari operasionalnya. Dengan demikian, akuntansi hijau berperan sebagai alat penting dalam menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap keberlanjutan bisnis itu sendiri dalam jangka panjang.

Dalam konteks global yang semakin mengarah pada praktik bisnis berkelanjutan, adopsi akuntansi hijau menjadi strategi penting yang tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan daya saing

perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep, manfaat, serta tantangan dalam penerapan akuntansi hijau sebagai bagian integral dari strategi bisnis modern yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pada bab ini, Penulis membagikan kepada Anda pengetahuan mengenai (i) sejarah akuntansi hijau (*green accounting*) atau dikenal juga dengan istilah akuntansi lingkungan, (ii) pengertian konsep akuntansi hijau dari beberapa pendapat para penulis, (iii) Sistem kerja akuntansi hijau yang pertama kali dikenalkan oleh Greenham (2010), dan (iv) beberapa pendapat para penulis mengenai konsep akuntansi hijau.

## B. Sejarah Akuntansi Hijau

Kegiatan ekonomi baik secara langsung atau pun tidak langsung telah menjadi faktor penyebab terjadinya pemanasan global dan memunculkan berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan seperti pemanasan global, eko-efisiensi, dan kegiatan industri lainnya yang berdampak secara langsung terhadap lingkungan sekitar. Zhao *et al* (2025) berpendapat bahwa dalam beberapa dekade terakhir, umat manusia telah menghadapi tantangan lingkungan yang darurat seperti penipisan sumber daya, perubahan iklim, dan polusi, menangani masalah iklim global ini dan memperkuat perlindungan lingkungan telah menjadi prioritas utama. Perusahaan kerap tidak memperhatikan permasalahan lingkungan karena para pemimpin perusahaan beranggapan bahwa memperhatikan permasalahan lingkungan yang berarti perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan, sehingga kebijakan lingkungan dalam mencegah dan mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap sumber daya alam tidak lagi diperhatikan.

Profesor Peter Wood, orang yang pertama kali menggunakan istilah akuntansi hijau atau akuntansi lingkungan, ia gunakan istilah tersebut pada tahun 1980-an (Yasrawan *et al.*, 2022). Pada Mei tahun 2000 pertama kali

dikeluarkannya Pedoman-pedoman mengenai akuntansi hijau, oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dulunya bernama NS Badan Lingkungan Jepang (Yasrawan *et al.*, 2022). Pedoman akuntansi hijau berfokus pada pengoptimalan biaya yang berkaitan dengan lingkungan serta peningkatan kinerja lingkungan, yang sebelumnya berpotensi memberikan dampak negatif bagi kesehatan serta kesuksesan bisnis perusahaan, ini juga menjadi alasan utama yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menerapkan akuntansi lingkungan dalam sistem akuntansi Perusahaan (Yasrawan *et al.*, 2022). Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan di kemudian hari.

Dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan, memerlukan suatu sistem akuntansi lingkungan sebagai pengendalian tanggung jawab lingkungan karena pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengukuran, penilaian, pengungkapkan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari kegiatan operasional perusahaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah akuntansi hijau (Minimol and Makesh, 2014).

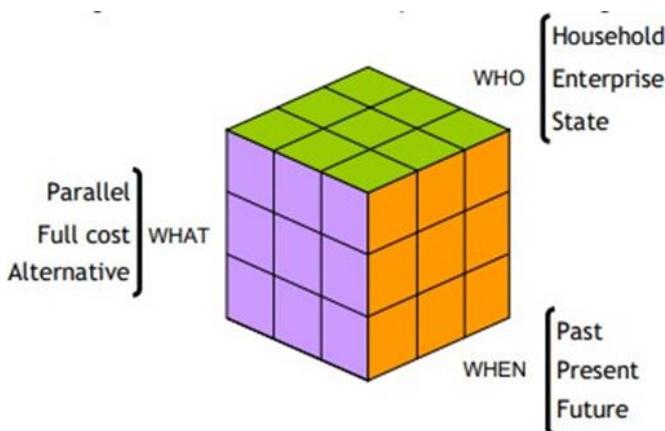
### C. Pengertian Konsep Akuntansi Hijau

Menurut Greenham (2010), konsep akuntansi hijau mengukur dampak aktivitas manusia terhadap sistem ekologi dan sumber daya bumi, bukan hanya mengukur dampak finansial dari aktivitas tersebut. Menurut Aniela (2012), konsep akuntansi hijau merupakan inovasi baru bidang akuntansi bertujuan merubah titik fokus proses akuntansi yang tidak hanyanya di proses pada transaksi saja. Menurut Yasrawan *et al.*, (2022), akuntansi hijau dapat dimaknai sebagai identifikasi,

prioritas, kuantifikasi, kualifikasi dan penggabungan biaya lingkungan ke dalam keputusan bisnis. Sedangkan Faieq & Cek (2024) berpendapat bahwa konsep akuntansi hijau dapat membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang tepat mengenai alokasi sumber daya, penggunaan energi, dan area untuk peningkatan keberlanjutan. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, penulis mencoba menyimpulkan pengertian dari konsep akuntansi hijau adalah segala sesuatu aktivitas yang dilakukan manusia berhubungan dengan kegiatan akuntansi yang berdampak pada penggunaan sumber daya energi berpengaruh pada pengambilan keputusan bisnis.

#### D. Kerangka Kerja Akuntansi Hijau

Greenham (2010) menawarkan kerangka kerja akuntansi hijau yang mengusulkan metodologinya terdiri dari tiga dimensi yaitu (i) *Who – Whose actions are we accounting for*, untuk siapa tindakan yang kita pertanggungjawabkan? (ii) *When – When have the actions and impacts taken place*, kapan tindakan dilakukan dan apa dampak yang terjadi? dan (iii) *What – How are we trying to measure these impacts*, bagaimana mengukur dari dampak yang telah terjadi. Adapun kerangka kerjanya di tampilkan pada Gambar 3.1



**Gambar 3.1** Kerangka Kerja Akuntansi Hijau

Sumber: (Greenham, 2010)

Berikut penjelasan dari kerangka kerja akuntansi hijau yang ditawarkan oleh Greenham (2010):

## **1. Akuntansi untuk Siapa? Rumah tangga, Perusahaan, dan Pemerintah**

Kita dapat memikirkan dampak lingkungan dari tindakan kita sebagai individu, keluarga, atau rumah tangga. Jejak ekologi dan karbon kini dapat dihitung oleh individu dengan alat yang tersedia di web, seperti kalkulator karbon “Act on CO<sub>2</sub>” milik pemerintah Inggris. Namun, akuntansi sebagai profesi mungkin biasanya dikaitkan dengan bisnis, atau perusahaan. Greenham (2010) menyertakan organisasi sektor publik dan sektor ketiga, meskipun konvensi akuntansi berbeda antara ketiganya. Banyak perhatian telah diberikan pada akuntansi dan pelaporan lingkungan atau keberlanjutan untuk perusahaan.

Terakhir, akuntansi nasional masih didominasi oleh Produk Domestik Bruto meskipun banyak literatur yang menyoroti kekeliruan dalam mengukur keberhasilan ekonomi dengan cara yang sempit. Pada tingkat ini, indikator keberlanjutan yang luas seperti ISEW/GPI cenderung membahas masalah lingkungan dan sosial. Akuntansi hijau untuk pemerintah dapat membahas masalah utama ekonomi hijau seperti kesetaraan antargenerasi dan rendahnya penilaian terhadap pekerjaan perempuan. Pemerintah juga perlu dimintai pertanggungjawabannya dalam memastikan bahwa masyarakat yang mereka wakili tidak hidup melampaui batas ekologis mereka.

## **2. Akuntansi untuk Apa? Berbagai pendekatan terhadap akuntansi hijau**

Jumlah metodologi pelaporan keberlanjutan yang diusulkan mungkin berjumlah ratusan, meskipun hanya beberapa model yang telah diadopsi secara luas (Hubbard 2008 dalam Greenham 2010). Metodologi tersebut, menurut Greenham (2010) dapat dianalisis menjadi tiga pendekatan:

### **a. Pelaporan Paralel**

Bentuk pelaporan keberlanjutan yang paling umum adalah mengidentifikasi indikator kinerja utama lingkungan dan mulai memantau serta melaporkan indikator-indikator ini secara bersamaan pelaporan keuangan tradisional.

Indikator sosial biasanya juga disertakan sebagai bagian dari pelaporan tersebut dengan hanya sekitar 1 dari 7 yang berfokus secara eksklusif pada indikator lingkungan.

Namun, yang umum untuk semua pelaporan paralel adalah supremasi berkelanjutan pelaporan keuangan atau ekonomi. Dalam hal ini dampak lingkungan dipandang sebagai kepentingan sekunder untuk memaksimalkan keuntungan finansial.

### **b. Akuntansi Biaya Penuh**

Pendekatan kedua berlandaskan pada konsep eksternalitas dalam ekonomididasarkan pada konsep eksternalitas dalam ekonomi. Ini adalah pengakuan bahwa informasi yang ditangkap oleh pasar bebas dalam harga barang dan jasa hanya bersifat parsial, dan mengecualikan banyak biaya lingkungan dan sosial.

Jika saja, menurut teori tersebut, kita dapat mengoreksi harga untuk mencerminkan biaya dan manfaat ini, pasar bebas akan memberikan keseimbangan yang berkelanjutan. Upaya untuk memberi harga dampak lingkungan negatif melalui izin yang dapat diperdagangkan dan pajak ekologi termasuk dalam kategori ini.

### **c. Tindakan alternatif**

Rangkaian pendekatan yang paling sedikit dieksplorasi adalah mencoba memperkenalkan kriteria yang berbeda untuk menilai tindakan individu, perusahaan, dan pemerintah. Di tingkat pemerintah, ada upaya mapan untuk mengukur kesejahteraan dalam

istilah nonfinansial dari ISEW hingga Indeks Planet Bahagia NEF.

Sejauh mana kebahagiaan dan kesuksesan individu disamakan dengan akumulasi kekayaan merupakan pertanyaan filosofis, psikologis, dan antropologis yang menarik. Dalam hal tindakan perusahaan, hanya sedikit yang menantang keutamaan memaksimalkan keuntungan finansial, atau meminimalkan biaya finansial, tetapi apakah secara konseptual hal itu mungkin dilakukan.

### **3. Akuntansi untuk Kapan? Masa lalu, masa kini, dan masa depan**

Dimensi terakhir adalah periode waktu yang kita gunakan untuk akuntansi. Pelaporan keuangan umumnya berfokus pada masa lalu dan masa kini, dengan kata lain laporan laba rugi dan neraca. Namun, kita juga dapat mempertimbangkan apa arti akuntansi hijau untuk penilaian proyek, analisis biaya-manfaat, dan evaluasi risiko sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Dapat dikatakan bahwa salah satu kelemahan utama adalah minimnya perhatian terhadap dampak jangka panjang dari tindakan masa lalu dan sekarang. Banyak aktifitas manusia menimbulkan konsekuensi yang bertahan lama, contohnya adalah penumpukan gas rumah kaca di atmosfer sejak dimulainya revolusi industri.

Selain memiliki tiga dimensi yaitu (i) Akuntansi untuk Siapa? (ii) Akuntansi untuk Apa? dan (iii) Akuntansi untuk Kapan?, Greenham (2010) juga menjelaskan Akuntansi Hijau dalam Praktik penggunaan dari kerangka kerja yang telah dibuatnya, dibedakan menjadi empat yaitu untuk (i) Rumah Tangga, (ii) Perusahaan (iii) Pemerintah, dan (iv) Menilai Praktik Saat Ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **a. Rumah Tangga**

Di tingkat rumah tangga, indikator dampak lingkungan yang paling dikenal mungkin adalah jejak karbon. Ada banyak alat yang tersedia untuk membantu

orang menghitung emisi karbon pribadi mereka, salah satu contohnya adalah kalkulator "tindakan terhadap CO<sub>2</sub>" milik pemerintah Inggris. Setiap individu didorong untuk mengurangi emisi mereka, dan membandingkan jejak mereka dengan individu lain, namun tidak ada saran tentang berapa jumlah emisi yang 'tepat'.

Contoh sistem akuntansi alternatif di tingkat rumah tangga sulit diidentifikasi karena sulit untuk keluar dari sistem moneter, khususnya di negara-negara maju. Contoh yang paling mendekati mungkin adalah masyarakat yang dibentuk dengan tujuan yang jelas untuk mencapai swasembada dan meminimalkan kerusakan ekologi.

#### **b. Perusahaan**

Organisasi besar telah secara sukarela mengadopsi pelaporan keberlanjutan dalam berbagai bentuk, tetapi penerapannya di antara perusahaan kecil dan menengah masih rendah. Standar akuntansi terkemuka adalah pedoman Global Reporting Initiatives, edisi ketiga yang dirilis pada tahun 2006. Lebih dari 1.500 perusahaan sekarang melaporkan berdasarkan pedoman GRI dari titik awal 20 pada tahun 1999. Jumlah perusahaan yang sama melaporkan emisi GRK mereka sebagai bagian dari Carbon Disclosure Project yang menyediakan informasi untuk lebih dari 475 investor institusional.

Pada dasarnya entri pembukuan akan dilambangkan dalam satuan energi standar, seperti therm atau kilowatt, bukan satuan keuangan Dolar atau Euro. Suatu organisasi kemudian akan bertujuan untuk memberikan produk dan layanannya dengan input satuan energi terendah. Karena banyak dampak lingkungan negatif yang terkait dengan ekstraksi, distribusi, dan penggunaan energi, hal itu dapat berfungsi dengan baik sebagai proksi untuk dampak lingkungan umum.

### c. Pemerintah

Lebih dari 178 pemerintah menandatangani prinsip-prinsip keberlanjutan di KTT Bumi PBB, termasuk komitmen untuk memantau kemajuan mereka dalam memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Oleh karena itu, kita mungkin berharap sistem pelaporan paralel dari indikator-indikator lingkungan utama dapat dikembangkan dengan baik. Sistem Akuntansi Lingkungan & Ekonomi Terpadu Program Lingkungan PBB (UNEP) menetapkan kerangka kerja umum bagi negara-negara anggota PBB “untuk mengukur kontribusi lingkungan terhadap ekonomi dan dampak ekonomi terhadap lingkungan”. Namun, UNEP menggambarkannya sebagai ‘sistem satelit’ dari akun nasional.

Alat akuntansi hijau yang digunakan di tingkat pemerintah untuk menilai dampak lingkungan di masa mendatang adalah Penilaian Lingkungan Strategis, versi metodologi Penilaian Dampak Lingkungan yang diterapkan pada kebijakan dan strategi, bukan pada proyek dan pengembangan individual. Dalam hal langkah-langkah alternatif lainnya, eksplorasi akuntansi energi pada tahun 1970-an sebenarnya sudah ada sebelum pengakuan pentingnya aliran energi pada awal abad ke-20. Ada usulan untuk mengganti sistem moneter dengan sistem yang berdasarkan alokasi unit energi. Misalnya, kekayaan “nyata” tidak berasal dari aliran moneter tetapi dari penggunaan energi untuk mengubah material menjadi barang dan jasa fisik.

### d. Menilai Praktik Saat Ini

Seberapa luas penerapan akuntansi hijau, dan seberapa efektifkah penerapannya? Dimulai dari perusahaan, organisasi besar telah secara sukarela mengadopsi pelaporan keberlanjutan dalam berbagai bentuk, tetapi penerapannya di antara perusahaan kecil dan menengah masih rendah. Perundang-undangan

secara bertahap mendorong penerapan indikator lingkungan, misalnya, Arahan Modernisasi Akuntansi Uni Eropa.

Namun, tidak ada konsensus tentang standar akuntansi hijau global untuk perusahaan meskipun GRI dapat berkembang menjadi standar global yang didukung oleh kekuatan hukum pada waktunya. Standar pengawasan eksternal juga jauh tertinggal dari infrastruktur, baik dalam pedoman perundang-undangan maupun praktik terbaik yang mendasari audit keuangan. Ada standar praktik terbaik, seperti *Account Ability*, tetapi pengawasan eksternal atas akun hijau masih bersifat sukarela.

## E. Konsep dalam Akuntansi Hijau

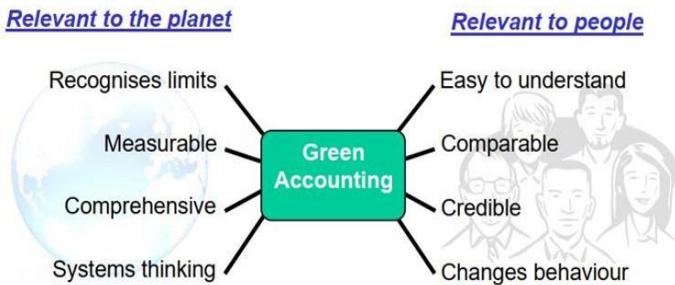
Beberapa pendapat mengenai konsep akuntansi hijau:

1. Abdullah & Yuliana (2018) berpendapat bahwa perusahaan mengkategorikan biaya lingkungan berdasarkan kegiatannya dan tidak menetapkan biaya lingkungan, sehingga informasi tersebut disembunyikan dan manajer mengalami kesulitan mengendalikan biaya lingkungan.
2. Asjuwita & Agustin (2020) berpendapat bahwa dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan sering kali mengabaikan masalah lingkungan, hal ini membuat perusahaan merasakan dampak yang besar yang nantinya bisa mengancam keberlangsungan (*sustainability*) usahanya, padahal perlu meningkatkan pandangan tentang bagaimana suatu benda melekat pada lingkungan alam dan sosial?, dari mana bahan baku diperoleh?, bagaimana suatu benda diproduksi secara massal?, bagaimana penggunaannya mempengaruhi lingkungan alam dan masyarakat yang menggunakannya?
3. Said (2020) menambahkan bahwa akan menjadi masalah bagi keberlangsungan hidup perusahaan jika mengabaikan masalah lingkungan dan aspek sosial. Hal ini disebabkan, kelangsungan hidup berkaitan erat dengan legitimasi

keberadaan sosial suatu perusahaan dalam masyarakat tertentu.

4. Taufiqurrahman & Sitepu (2020) mereka menekankan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memiliki manfaat sebagai bentuk komitmen bidang bisnis untuk melaksanakan kegiatan bisnis berdasarkan pada nilai-nilai etika dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi yang seimbang baik pada pihak internal perusahaan, kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menghasilkan proses pembangunan yang berkelanjutan dan berkelanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, pengaturan hukum untuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan peraturan perundang-undangan terkait.
5. Yasrawan *et al.*, (2022) Berpendapat mengenai konsep akuntansi hijau dalam sudut pandang peran perusahaan terhadap lingkungan yaitu berlandaskan pada teori legitimasi, perusahaan hendaknya mengungkapkan praktik tanggung perusahaan dengan tepat dan benar sehingga Masyarakat dapat menerima aktivitas dan kinerja perusahaan, namun, masih terdapat permasalahan terkait keterbatasan pengungkapan biaya lingkungan dalam operasional Perusahaan

Dari kerangka konseptual akuntansi hijau Greenham (2010) yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya. Ia juga mengidentifikasi beberapa faktor untuk keberhasilan pentingnya menerapkan akuntansi hijau. Pada tingkat paling umum, konsep yang berhasil harus relevan bagi planet dan manusia seperti di tampilkan pada Gambar 3.2



**Gambar 3.2 Faktor Relevan Keberhasilan Akuntansi Hijau**

Sumber: (Greenham, 2010).

Keterkaitan bagi planet (*relevant to the planet*) dapat didefinisikan sebagai penggabungan elemen-elemen seperti berikut ini:

1. *Recognises limits*, konsep ini mengakui batasan lingkungan dan didasarkan pada ilmu fisika dan analisis faktual tentang tingkat dampak yang dapat ditoleransi dari aktivitas manusia terhadap planet ini.
2. *Measurable*, variabel dapat diukur dengan istilah yang andal dan objektif untuk mengungkapkan batasan ini.
3. *Comprehensive*, Indikatornya cukup komprehensif untuk memastikan bahwa faktor ekologi utama tidak diabaikan.
4. *System thinking*, harus diakui bahwa banyak variabel saling berhubungan

Sedangkan keterkaitan bagi masyarakat dapat ditentukan oleh faktor-faktor berikut ini:

1. *Easy to Understand*, keluaran akuntansi hijau mudah dipahami
2. *Comparable*, memungkinkan perbandingan antara kinerja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah
3. *Credible*, informasinya kredibel
4. *Changes Behaviour*, sifat informasinya sedemikian rupa sehingga mendorong perubahan perilaku yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan.

Selain konsep akuntansi hijau Greenham (2010), Abdullah & Yuliana (2018) membuat sebuah formula bagi memudahkan pelaporan biaya lingkungan yang didampak akibat perusahaan kurang memperhatikan akuntansi hijau kedalam lima kategori, penulis tampilkan pada tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1** Formula Pelaporan Biaya Lingkungan

No.	Biaya Lingkungan	Unit Moneter
1	Biaya Pencegahan Lingkungan, terdiri dari: 1. Biaya bantuan pelatihan setiap unit kerja 2. Biaya sistem manajemen lingkungan 3. Biaya audit risiko lingkungan 4. Biaya entri kertas kerja  Total Biaya:	XX XX XX <u>XX</u> XX
2	Biaya Deteksi lingkungan, terdiri dari: 1. Biaya pengukuran tingkat pencemaran lingkungan 2. Biaya audit untuk aktivitas lingkungan 3. Biaya pemeriksaan untuk pembungan emisi 4. Biaya inspeksi limbah cair 5. Biaya inspeksi cerobong asap  Total Biaya:	XX XX XX XX <u>XX</u> XX
3	Biaya Kegagalan Internal Lingkungan, terdiri dari: 1. Biaya pengelolaan terak tembaga 2. Biaya pengelolaan lumpur WWTP 3. Biaya pengelolaan lumpur iol 4. Biaya pengelolaan pelumas bekas 5. Biaya pengelolaan abu terbang 6. Biaya pengelolaan abu dasar 7. Biaya pengelolaan limbah kebun 8. Biaya Principitator (limbah rumah tangga) 9. Biaya pengoperasian <i>Electronic Principitator</i> 10. Biaya pengoperasian <i>Dust Collector</i>	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

No.	Biaya Lingkungan	Unit Moneter
	11. Biaya pengoperasian fasilitas pemuatan batubara dan fomogenisasi 12. Biaya pengoperasian <i>Sequential Timer</i> (ST) 13. Biaya pengoperasian pompa reservoir 14. Biaya pengoperasian tangki air baku 15. Biaya pemasangan stiker hemat listrik 16. Biaya pengoperasian jalur pengangkutan batubara halus 17. Biaya perawatan electronic principal 18. Biaya perawatan <i>Dust Collector</i> (DC) 19. Biaya perawatan fasilitas pembongkaran batubara dan fomogenisasi 20. Biaya perawatan sequence timer 21. Biaya perawatan pompa reservoir 22. Biaya perawatan tangki air baku 23. Biaya perawatan jalur pengangkutan batu bara halus 24. Biaya daur ulang bahan sisa Total Biaya:	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX <u>XX</u> XX
4	Biaya Kegagalan Lingkungan Eksternal, terdiri dari: 1. Biaya Penanaman 2. Biaya Pengadaan Tanaman Vitex Cofassus 3. Biaya Pembuatan Taman Hutan Raya 4. Biaya Pembuatan Kolam Buatan 5. Biaya Pembuatan Taman Sipong 6. Biaya Pembuatan Kebun Buah 7. Biaya Asuransi Lingkungan Total Biaya:	XX XX XX XX XX XX <u>XX</u> XX
5	Biaya Pengembangan Lingkungan dan Penelitian, terdiri dari: 1. Kewajiban untuk menaati peraturan dari pemerintah agar di kemudian hari tidak timbul	XX

No.	Biaya Lingkungan	Unit Moneter
	2. Biaya unit purnajual 3. Biaya pembuatan dokumen laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan	XX XX
	Total Biaya:	XX

Sumber: (Abdullah & Yuliana, 2018).

## F. Kesimpulan

Dengan mengintegrasikan akuntansi hijau, perusahaan dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka. Selain itu, pendekatan akuntansi hijau juga dapat memberikan keuntungan jangka panjang, baik secara finansial maupun reputasi, karena konsumen dan investor semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam keputusan mereka.

Selain itu, penulis menyimpulkan, pertama, bahwa setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dan berbeda. Oleh karena itu, konsep akuntansi hijau pada suatu perusahaan tidak dapat digeneralisasikan karena tantangan pengelolaan limbah yang berbeda. Kedua, batasan dari pemeriksaan pada perusahaan kulit dan produk terkait, pakaian, pabrik produk tekstil, peralatan elektronik, manufaktur kimia, minuman dan produk tembakau, serta perusahaan manufaktur makanan tidak dapat digeneralisasikan ke perusahaan lain atau diperluas ke skenario yang lebih umum dengan praktik pengelolaan limbah yang berbeda.

Mengingat kedua hal tersebut, penulis lebih lanjut menyarankan diperlukan penulisan untuk melibatkan pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, asosiasi perusahaan, organisasi lingkungan, dan masyarakat lokal dalam inisiatif untuk mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan penciptaan bersama solusi berkelanjutan dari akuntansi hijau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.W. and Yuliana, A. (2018) 'Corporate Environmental Responsibility: An Effort To Develop A Green Accounting Model', *Jurnal Akuntansi*, 22(3), p. 305. Available at: <https://doi.org/10.24912/ja.v22i3.390>.
- Aniela, Y. (2012) 'Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – Vol 1, No. 1, Januari 2012', *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), pp. 1–5.
- Asjuwita, M. and Agustin, H. (2020) 'Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), pp. 3327–3345. Available at: <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.285>.
- Faieq, H.T. and Cek, K. (2024) 'Enhancing Kurdistan's manufacturing companies' sustainable waste management: A norm activation approach to green accounting, CSR, and environmental auditing oversight', *Heliyon*, 10(12). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32725>
- Greenham, T. (2010) 'Green Accounting: A Conceptual Framework', *International Journal of Green Economics*, 4(4), pp. 333–345. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1504/IJGE.2010.037655>.
- Minimol and Makesh (2014) 'Green Accounting and Reporting Practices Among Indian Corporates', *Asia Pacific Journal on Research*, 1, pp. 21–35.
- Said, D. (2020) *Kearifan Lingkungan dalam Praktik Akuntansi*. Edisi ke-1. Makassar: Tohar Media.

- Taufiqurrahman, M. and Sitepu, H. (2020) 'Kewajiban Perusahaan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)', *Jurnal Retentum*, 2(1), pp. 65–75. Available at: <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i1.438>.
- Yasrawan, K.T. and Werastuti, D.N.S. (2022) 'Bagaimana Peran Dan Penerapan Akuntansi Hijau Di Indonesia?', *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(3), pp. 151–161. Available at: <https://doi.org/10.33508/jako.v14i3.3514>.
- Zhao, R., Mou, Y. and Yu, X. (2025) 'Analysis of the moderating effects of environmental regulations on green accounting information disclosure and financial performance of heavily polluting enterprises', *Finance Research Letters*, 72. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106493>.

## TENTANG PENULIS



**Fipiariny. S, S.E., M.Si., Ak.**

Penulis lahir di Palembang, 25 Mei 1989. Saat ini penulis adalah dosen tetap Program Studi Manajemen Universitas Palembang dari Oktober 2024 hingga sekarang. Sebelumnya penulis merupakan dosen tetap Program Studi Akuntansi Politeknik Sekayu dari 2022 hingga 2024, dosen tetap Program Studi Akuntansi Politeknik Anika Palembang dari 2018 hingga 2022. Penulis juga telah menjadi Tutor Tuton Universitas Terbuka tahun 2023 – sekarang. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik Sekayu Agustus 2022 – Februari 2024. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Akuntansi Universitas Bina Darma tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntan tahun 2013 dan menyelesaikan S2 di Universitas Sriwijaya tahun 2017. Penulis telah memenangkan hibah penelitian Kemendikbudristek empat kali dan telah memiliki publikasi baik berindeks Sinta maupun Scopus.

# BAB

# 4

## STRATEGI KEBERLANJUTAN BISNIS: AKUNTANSI HIJAU DAN IDENTITAS ORGANISASI

Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA., CRP.

Politeknik Negeri Sriwijaya

### A. Pendahuluan

Konsep keberlanjutan menjadi perhatian utama di berbagai bidang, termasuk dalam industri bisnis pada beberapa dekade terakhir. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap tindakan yang telah dilakukan, baik karena adanya perubahan pada pola konsumsi, tekanan dari regulator, ataupun munculnya kesadaran global terhadap masalah lingkungan. Hal ini diperkuat dengan adanya krisis lingkungan yang semakin meningkat di seluruh dunia, seperti pencemaran, perubahan iklim, dan kelangkaan sumber daya alam. Sehingga perusahaan diwajibkan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam situasi seperti ini, strategi keberlanjutan menjadi bagian penting dari visi, misi, dan strategi jangka panjang perusahaan untuk memastikan bahwa bisnis dapat *sustainable* dengan tetap memberikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Keberadaan konsep *Triple Bottom Line*, yang menekankan pencapaian kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan, semakin mendorong penerapan keberlanjutan dalam dunia bisnis. Saat ini perusahaan tidak hanya dilihat dari kinerja keuangan saja, namun termasuk pengaruh sosial dan lingkungannya. Perusahaan yang mengabaikan aspek

keberlanjutan, berisiko kehilangan kepercayaan pasar karena konsumen, investor, dan mitra bisnis mulai mempertimbangkan hal ini saat membuat keputusan. Selain itu, kebijakan dan regulasi nasional dan internasional yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan sepanjang operasinya. Ketahanan bisnis sangat penting untuk tetap bersaing dan bertahan di masa depan. Jadi, dengan bertindak sebagai agen perubahan, perusahaan memperkuat legitimasi dan reputasinya di mata pemangku kepentingan dan mendukung upaya global untuk menjaga keberlanjutan *planet*.

## B. Strategi Keberlanjutan Bisnis Melalui Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau merupakan suatu alat penting dalam strategi keberlanjutan, karena memungkinkan bisnis mengukur, mencatat, dan melaporkan kinerja lingkungan secara transparan dan akuntabel. Akuntansi hijau tidak hanya mencatat biaya, tetapi juga menghitung efisiensi sumber daya, menghitung emisi karbon, dan mengungkap bagaimana perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan. Proses akuntansi hijau menghasilkan data dan informasi yang membantu manajemen dalam menyusun strategi bisnis yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, keberadaannya menjadi alat komunikasi antara perusahaan dengan investor, konsumen, regulator, dan masyarakat luas. Identitas organisasi hijau entitas merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan dengan menerapkan akuntansi hijau secara konsisten.

Identitas hijau membangun reputasi perusahaan sebagai pelaku bisnis yang peduli terhadap lingkungan, menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan membuka peluang untuk akses pasar dan pendanaan berbasis keberlanjutan. Strategi yang memungkinkan bisnis untuk mencapai kinerja yang inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing di era ekonomi hijau.

## **1. Pengukuran dan Pelaporan Keberlanjutan**

Pengukuran dan pelaporan keberlanjutan melibatkan penilaian dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan organisasi. Kerangka kerja utama termasuk GRI, IIRC, SASB, TCFD, ISO 26000, dan ISO 14016, yang memandu pelaporan yang efektif dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja berkelanjutan (Rusu *et al.*, 2024). Sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tahun 2017 menjelaskan Laporan Keberlanjutan sebagai laporan yang diumumkan kepada Masyarakat, yang didalamnya tergambar kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu perusahaan publik dalam menjalankan bisnisnya serta memiliki orientasi yang keberlanjutan. Pengukuran dan pelaporan keberlanjutan membantu membuat keputusan strategis yang lebih baik selain memenuhi peraturan atau meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko lingkungan dan sosial, dan menciptakan nilai tambahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang dengan memahami kinerja keberlanjutan mereka. Mereka juga dapat menetapkan target jangka panjang yang realistik, dan mengkomunikasikan komitmen mereka terhadap keberlanjutan kepada pemangku kepentingan.

Dalam penerapannya, perusahaan dapat mengadopsi standar internasional seperti *Global Reporting Initiative* yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Standar ini merupakan standar yang paling umum digunakan. Standar GRI yang terbaru ini berlaku untuk laporan keberlanjutan yang dipublikasikan perusahaan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023. Standar GRI 2021 disusun sebagai sistem standar yang saling berkaitan yang disusun menjadi tiga seri:

**a. Standar Universal:**

- 1) GRI 1: Landasan 2021, dengan memperkenalkan tujuan dan sistem Standar GRI dan menjelaskan konsep dasar untuk pelaporan keberlanjutan. GRI 1 juga menguraikan berbagai persyaratan dan prinsip pelaporan yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI.
- 2) GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan berbagai detail organisasi lainnya, seperti kegiatan, tata kelola, dan kebijakan. Informasi ini memberikan wawasan mengenai profil dan skala organisasi serta memberikan konteks untuk memahami dampak organisasi.
- 3) GRI 3: Topik Material 2021 menyediakan panduan secara bertahap tentang cara menentukan topik material. GRI 3 juga berisi pengungkapan yang digunakan organisasi untuk melaporkan informasi tentang proses penentuan topik material, daftar topik material, dan cara mengelola setiap topik.

**b. Standar Sektor**

Menyediakan informasi bagi organisasi mengenai mana yang berpotensi menjadi topik material mereka. Organisasi menggunakan Standar Sektor yang berlaku untuk sektornya saat menentukan topik materialnya, dan saat menentukan informasi apa yang akan dilaporkan untuk topik material.

**c. Standar Topik**

Berisi pengungkapan bagi organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampaknya sehubungan dengan topik tertentu. Standar Topik mencakup berbagai macam topik. Organisasi menggunakan Standar Topik sesuai dengan daftar topik material yang telah mereka tentukan menggunakan GRI 3.

Di Indonesia sendiri kewajiban untuk menyampaikan laporan keberlanjutan telah dikeluarkan dengan terbitnya POJK No. 51/POJK.03/2017, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Standar-standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana indikator keberlanjutan harus diukur, dilaporkan, dan diverifikasi secara independen. Indikator keberlanjutan yang harus diukur dan dilaporkan meliputi tiga aspek utama, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan capaian kegiatan perusahaan terhadap aspek-aspek tersebut.

Secara umum hal-hal yang dilaporkan dalam dalam laporan keberlanjutan untuk masing-masing aspek ekonomi, lingkungan dan social dapat diuraikan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1** Indikator Pengukuran Keberlanjutan

Aspek Ekonomi	Aspek Lingkungan	Aspek Sosial
Aspek ekonomi mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional, lokal, dan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang dilaporkan dalam aspek ini misalnya: • Kinerja keuangan perusahaan secara umum (pendapatan,	Aspek ini fokus pada dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan hidup dan bagaimana perusahaan mengelola risiko serta kontribusinya terhadap pelestarian alam. Hal-hal yang dilaporkan dalam aspek ini misalnya: • Konsumsi energi (energi terbarukan dan tidak terbarukan) dan efisiensi energi.	Aspek sosial menggambarkan hubungan perusahaan dengan karyawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam menciptakan nilai sosial yang positif. Hal-hal yang dilaporkan dalam aspek ini misalnya: • Profil ketenagakerjaan (jumlah karyawan, tingkat turnover, rasio gender, dll).

Aspek Ekonomi	Aspek Lingkungan	Aspek Sosial
<p>biaya operasional, laba/rugi).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi ekonomi terhadap masyarakat lokal, termasuk pembayaran pajak dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.</li> <li>• Praktik pengadaan barang dan jasa yang mendukung pemasok lokal.</li> <li>• Investasi pada infrastruktur yang berkelanjutan.</li> <li>• Distribusi nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan (karyawan, pemerintah, masyarakat, pemegang saham).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emisi gas rumah kaca dan upaya reduksi emisi.</li> <li>• Pengelolaan limbah berbahaya dan tidak berbahaya.</li> <li>• Penggunaan dan pengelolaan air.</li> <li>• Keanekaragaman hayati di wilayah operasi perusahaan.</li> <li>• Upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan.</li> <li>• Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan dan keselamatan kerja.</li> <li>• Pelatihan dan pengembangan kapasitas karyawan.</li> <li>• Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>• Hak asasi manusia dan kebijakan anti-diskriminasi.</li> <li>• Hubungan industri dan hak berorganisasi.</li> <li>• Perlindungan konsumen dan praktik pemasaran yang adil.</li> </ul>

Sumber: diolah (2025)

## **2. Penerapan Akuntansi Hijau dalam Pengambilan Keputusan Strategis**

Dalam Menyusun rencana investasi dan anggaran, perusahaan dapat menggunakan akuntansi hijau, terutama di era bisnis kontemporer yang semakin menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Dengan menggunakan akuntansi hijau, bisnis tidak hanya mempertimbangkan biaya konvensional tetapi juga biaya lingkungan seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, akuntansi hijau membantu bisnis memahami dampak finansial dari aktivitas lingkungan secara lebih transparan dan terukur. Pada akhirnya, ini berdampak pada pilihan investasi dan alokasi sumber daya. Karena proyek yang berpotensi merusak lingkungan dapat menimbulkan beban lingkungan atau tanggung jawab lingkungan yang berisiko menurunkan profitabilitas jangka panjang, perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau cenderung menghindari berinvestasi dalam proyek tersebut. Selain itu, akuntansi hijau mendorong bisnis untuk menggabungkan tujuan keberlanjutan dalam anggaran mereka. Ini terjadi dengan memberikan dana khusus untuk program efisiensi energi, audit lingkungan, atau pengurangan emisi karbon.

Sekarang, anggaran bisnis tidak hanya berfokus pada mencapai keuntungan finansial, tetapi juga menghitung biaya dan keuntungan lingkungan sesuai dengan visi keberlanjutan. Sehingga keberadaan akuntansi hijau mendorong adanya pengelolaan anggaran yang lebih luas, di mana kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan keuangan bisnis. Metode ini meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Investor yang berfokus pada kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG) juga menganggap perusahaan lebih baik.

Akuntansi hijau tidak hanya memengaruhi perencanaan investasi dan anggaran, tetapi juga sangat penting untuk menilai kelayakan proyek berkelanjutan. Dalam situasi seperti ini, akuntansi hijau menawarkan kerangka kerja yang memasukkan aspek lingkungan ke dalam analisis kelayakan proyek, yang sebelumnya didominasi oleh metode finansial konvensional. Perusahaan dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengkuantifikasi dampak positif maupun negatif proyek terhadap lingkungan, kemudian mengkonversinya ke dalam nilai moneter dengan menggunakan metode *Environmental Cost-Benefit Analysis* (ECBA). Dengan demikian, perusahaan dapat membandingkan biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek dengan manfaat ekonomi dan ekologis yang dihasilkannya. Metode ini membantu manajemen membuat keputusan yang lebih rasional dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keuntungan finansial jangka pendek.

Akuntansi hijau juga mendukung penerapan konsep *Life Cycle Costing* (LCC), di mana perusahaan menghitung total biaya dan dampak lingkungan sepanjang siklus hidup proyek, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, penggunaan, hingga pengelolaan limbah atau penghentian proyek. Dengan mempertimbangkan seluruh siklus ini, perusahaan dapat mengidentifikasi titik-titik kritis di mana potensi penghematan biaya lingkungan atau pengurangan emisi dapat dioptimalkan. Sangat relevan untuk proyek berkelanjutan, seperti pembangunan pabrik ramah lingkungan, penerapan energi terbarukan, atau pengembangan produk yang ramah lingkungan, pendekatan life cycle ini.

Akuntansi hijau membantu menghitung *Return on Investment on Environmental (EROI)*, yaitu rasio antara biaya lingkungan yang dikeluarkan dan manfaat lingkungan yang dihasilkan. Dengan indikator ini, perusahaan dapat

menemukan proyek yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi emisi, efisiensi sumber daya, dan meningkatkan reputasi lingkungan. Oleh karena itu, akuntansi hijau berfungsi sebagai alat analisis strategis yang membantu pengambilan keputusan tentang proyek berkelanjutan yang berbasis data. Ini memastikan bahwa setiap investasi tidak hanya menguntungkan secara komersial, tetapi juga selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Perusahaan memperoleh legitimasi dan reputasi sebagai organisasi yang peduli terhadap keberlanjutan dengan menggunakan pendekatan ini. Ini juga meningkatkan daya saingnya di era ekonomi hijau.

### **3. Inovasi Keuangan Berkelanjutan dan Investasi Hijau**

Pada masa sekarang, ketika keberlanjutan dan perubahan iklim menjadi masalah utama bagi bisnis dan pemangku kepentingan global, keberadaan akuntansi hijau diharapkan mampu menjadi pendorong dan akan memperkuat ekosistem investasi yang ramah lingkungan. Karena adanya akuntansi hijau memungkinkan perusahaan melakukan identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan tindakan dan dampak lingkungan dari operasi dan proyek investasi mereka. Informasi lingkungan yang transparan memungkinkan investor, kreditur, dan mitra bisnis melihat secara jelas komitmen perusahaan atas praktik bisnis berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Soraya & Nurrochmah (2024) menyatakan bahwa akuntansi hijau berperan penting dalam mendorong investasi yang ramah lingkungan dengan cara memasukkan aspek lingkungan dan sosial ke dalam laporan keuangan perusahaan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat menghitung dan menyampaikan dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan secara terbuka. Keterbukaan informasi ini

membantu meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, memperkuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan, dan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Dengan demikian, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan yang menjalankan praktik berkelanjutan karena dinilai lebih bertanggung jawab dan memiliki prospek jangka panjang yang lebih baik

Selain itu, akuntansi hijau membantu bisnis membuat laporan keberlanjutan yang kredibel dan berbasis data, yang memungkinkan investor untuk menilai risiko dan peluang lingkungan yang mungkin dihadapi perusahaan. Investor memiliki landasan kuat dalam pengambilan keputusan atas investasi dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis perusahaan dan keuntungan finansial. Dengan menggunakan pendekatan untuk mengukur biaya, efisiensi sumber daya, dan pengelolaan jejak karbon, akuntansi hijau menjadikan informasi lingkungan penting untuk menilai kinerja bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, penggunaan akuntansi hijau menghasilkan ekosistem investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di mana investasi dituju ke bisnis yang menganut prinsip-prinsip ekonomi hijau dan tanggung jawab sosial. Yüzbaşıoğlu, (2024) menyatakan bahwa keberadaan akuntansi hijau meningkatkan kredibilitas produk keuangan hijau. Dimana akuntansi hijau membantu mendorong investasi yang peduli lingkungan dengan menyediakan laporan yang transparan dan dapat dipercaya. Melalui penggunaan standar pelaporan yang jelas dan menyeluruh, perusahaan dapat menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Hal ini membuat produk keuangan hijau seperti obligasi hijau dan pinjaman ramah lingkungan, yang berfokus pada keberlanjutan menjadi lebih dipercaya oleh investor. Akibatnya, semakin banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi dalam program atau proyek yang mendukung pelestarian lingkungan. Selain itu, praktik ini juga membantu

membangun ekonomi yang lebih kuat dan tahan terhadap perubahan di masa depan.

Obligasi hijau adalah surat utang yang diterbitkan untuk meningkatkan modal untuk proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan positif, seperti energi terbarukan dan inisiatif efisiensi energi (Khan *et al.*, 2024). Obligasi hijau berfungsi merupakan instrumen keuangan yang dirancang khusus untuk mendanai proyek-proyek dengan dampak lingkungan yang positif, yang diharapkan akan memberikan manfaat lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan air dan limbah, dan konservasi sumber daya sehari-hari, sehingga menyelaraskan pengembalian keuangan dengan manfaat ekologis. Mereka juga menjadi instrumen penting dalam kerangka inovasi keuangan berkelanjutan yang mendorong perusahaan dan pemerintah untuk mengadopsi aktivitas ramah lingkungan. Karena penggunaan dananya dilaporkan secara terbuka, obligasi hijau memberikan transparansi yang tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini membuat obligasi hijau semakin menarik bagi berbagai kalangan investor yang peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan, serta memperkuat kredibilitas proyek yang didanai. Akibatnya, akuntansi hijau sangat penting untuk memastikan bahwa semua biaya dan keuntungan lingkungan dari proyek yang mendapatkan dana hijau dicatat, diukur, dan dilaporkan dengan benar sesuai dengan standar pelaporan keberlanjutan yang berlaku, seperti Prinsip Bond Hijau (GBP) atau standar lokal lainnya.

Konsep *green bonds* semakin berkembang dalam sistem keuangan kontemporer, dimana aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) dikenal sebagai keuangan berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pembiayaan dan investasi. Lembaga keuangan dan investor mengevaluasi kinerja ESG perusahaan-perusahaan yang mengajukan pembiayaan, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan

sebagai bagian dari analisis risiko kredit dan keputusan investasi mereka. Akibatnya, akuntansi hijau berfungsi sebagai dasar untuk memberikan data dan informasi yang dapat dipercaya tentang masalah lingkungan seperti pengukuran emisi karbon, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan rantai pasokan.

### C. Identitas Organisasi dan Implementasi Akuntansi Hijau

#### 1. Pengaruh Akuntansi Hijau terhadap Citra dan Identitas Perusahaan

Di mata pemangku kepentingan, penerapan akuntansi hijau mengubah persepsi perusahaan dan identitasnya. Bisnis saat ini semakin dipengaruhi oleh masalah keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Akibatnya, perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari sisi finansial saja namun juga pada bagaimana mereka menangani dampak lingkungan dari operasi mereka, yang disajikan dalam bentuk laporan keberlanjutan. (*sustainability report*). *Sustainability reporting* tersebut dapat disusun baik berdasarkan standar internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), ataupun standar lokal yang berlaku. Dengan keterbukaan informasi ini, pemangku kepentingan—seperti investor, konsumen, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat—dapat menilai komitmen dan kinerja lingkungan perusahaan secara objektif.

Dengan menggunakan akuntansi hijau, perusahaan memperkuat citranya sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis (*environmentally responsible entity*). Hal ini menjadi nilai tambah unik di tengah meningkatnya minat pelanggan dan investor terhadap barang dan jasa yang memiliki rekam jejak lingkungan yang baik. Konsumen lebih suka merek yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Sebaliknya, investor, khususnya mereka yang mengutamakan prinsip *Environmental, Social, Governance* (ESG), lebih tertarik menanamkan modal pada perusahaan yang menunjukkan

komitmen nyata terhadap pengelolaan dampak lingkungan. Akibatnya, akuntansi hijau bukan hanya alat untuk mengukur dan melaporkan informasi, tetapi juga strategi pembangunan reputasi yang meningkatkan posisi perusahaan di pasar.

Penggunaan akuntansi hijau membantu bisnis dalam berkomunikasi dengan regulator dan komunitas lokal. Perusahaan yang telah menunjukkan bahwa mereka telah memasukkan biaya lingkungan ke dalam pengelolaan keuangan dan telah berinvestasi dalam teknologi hijau cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan kebijakan, insentif, atau bahkan kolaborasi strategis dari pemerintah dan lembaga internasional. Dengan kata lain, akuntansi hijau mendorong bisnis untuk melampaui peraturan lingkungan dan melampaui harapan dengan melakukan hal-hal yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, semua upaya ini menciptakan gambaran yang baik di mata masyarakat, membuat perusahaan dipandang sebagai pemimpin dalam praktik bisnis hijau, dan memperkuat citra perusahaan sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga berpikir tentang masa depan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

## **2. Tantangan dan Peluang dalam Membangun Identitas Organisasi Hijau**

Dalam upaya membangun identitas organisasi hijau, terdapat tantangan internal ataupun eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Tantangan internal bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri, sebaliknya tantangan internal berasal dari luar perusahaan. Tantangan internal berupa:

- a. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki perusahaan (Ambarsari *et al.*, 2024; Hung, 2024), yang berupa investasi, penggunaan teknologi, maupun sumber daya manusia berkemampuan khusus dalam mengelola aspek keberlanjutan dan akuntansi hijau. Proses transformasi menuju organisasi hijau sering kali membutuhkan

investasi besar untuk penerapan teknologi ramah lingkungan, sistem pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi, serta pelatihan sumber daya manusia agar memahami konsep dan implementasi akuntansi hijau. Bagi perusahaan kecil dan menengah (UMKM), tantangan keterbatasan sumber daya ini menjadi semakin berat karena belum memadainya infrastruktur pendukung dan akses terhadap sumber pembiayaan hijau.

- b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran internal mengenai aspek penting identitas organisasi hijau (Hung, 2024; Marota, 2024). Adanya anggapan pihak manajemen dan karyawan bahwa *sustainability* hanyalah merupakan kewajiban kepatuhan atas regulasi lingkungan, dan bukan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Akibatnya, konsep akuntansi hijau dan pelaporan keberlanjutan kurang diperhatikan secara khusus, bahkan dianggap sebagai beban administratif semata. Ketidakpahaman ini juga berakar pada minimnya sosialisasi dan edukasi terkait manfaat jangka panjang dari identitas organisasi hijau, baik dari aspek peningkatan reputasi, daya saing, hingga efisiensi biaya operasional melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik.
- c. Keengganahan untuk menerima perubahan dalam berbagai tingkatan organisasi yang disebabkan karena tidak sadar terhadap lingkungan (Amaechi & Nwankwoeke, 2017; Feng, 2024). Setiap upaya perubahan, terutama yang berkaitan dengan transformasi menuju organisasi hijau, kerap menghadapi penolakan dari sebagian karyawan maupun manajemen yang merasa nyaman dengan sistem yang telah berjalan. Resistensi ini sering kali dipicu oleh kekhawatiran akan meningkatnya beban kerja, ketidakjelasan manfaat langsung yang dirasakan, serta ketakutan akan adanya evaluasi kinerja baru yang mengakomodasi indikator keberlanjutan. Tanpa adanya komitmen kuat dari manajemen puncak dan keterlibatan

seluruh lini organisasi, membangun identitas hijau akan sulit diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain tantangan internal, perusahaan juga dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal yang berasal dari dinamika regulasi dan tekanan pasar.

- a. Kurangnya standar dan kerangka peraturan yang seragam dalam akuntansi hijau dapat menciptakan kebingungan dan inkonsistensi dalam penerapannya, yang pada akhirnya menghambat efektivitas strategi keberlanjutan Perusahaan (Ambarsari *et al.*, 2024; Syarifuddin & Khomsiyah, 2024). Tantangan ini semakin diperburuk di banyak negara berkembang, di mana dukungan peraturan masih terbatas, sehingga perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka (Zuhri, 2022). Ketidakjelasan regulasi juga dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaporan keberlanjutan, mengurangi transparansi, dan menyulitkan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja lingkungan perusahaan secara akurat. Oleh karena itu, harmonisasi standar dan peningkatan kebijakan yang mendukung akuntansi hijau menjadi langkah krusial dalam memastikan praktik keberlanjutan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan di berbagai sektor industri.
- b. Perusahaan juga menghadapi tekanan pasar yang terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran konsumen dan investor terhadap isu keberlanjutan. Konsumen semakin selektif dalam memilih produk dan jasa yang memiliki jejak lingkungan rendah dan diproduksi oleh perusahaan yang memiliki rekam jejak keberlanjutan yang baik. Begitu pula dengan investor, terutama investor yang menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* sebagai bagian dari kriteria investasi mereka. Tekanan pasar ini menuntut perusahaan tidak hanya fokus pada kinerja keuangan, tetapi juga secara proaktif membangun

identitas hijau yang dapat dibuktikan melalui laporan keberlanjutan yang kredibel dan praktik bisnis ramah lingkungan yang terintegrasi. Ketidakmampuan perusahaan merespons tekanan pasar ini berisiko menurunkan daya saing, mengurangi loyalitas pelanggan, serta membatasi akses perusahaan terhadap sumber pembiayaan yang berbasis keberlanjutan.

Perusahaan memiliki peluang untuk menjadikan identitas organisasi hijau sebagai keunggulan kompetitif yang bernilai jangka panjang dengan memahami dan mengelola tantangan internal dan eksternal ini secara strategis, yang meliputi:

- a. Adopsi akuntansi hijau diharapkan mampu mendorong inovasi dan ekspansi pasar. Pergeseran menuju akuntansi hijau tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan praktik dan produk yang lebih berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat menciptakan keunggulan kompetitif (Demdoum *et al.*, 2021). Dengan menerapkan prinsip akuntansi hijau, perusahaan dapat menciptakan produk ramah lingkungan yang lebih menarik bagi segmen konsumen yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan (Juita *et al.*, 2024). Hal ini memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar baru, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta memperkuat reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
- b. Membangun reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan cenderung mendapatkan kepercayaan masyarakat seiring meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan Marota, 2024; Ambarsari *et al.*, 2024).. Persepsi publik yang positif tentang keberlanjutan bisnis meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar, terutama di kalangan pelanggan yang sadar lingkungan dan

cenderung memilih merek dengan nilai keberlanjutan yang kuat (Marota, 2024).

- c. Penerapan akuntansi hijau memberikan berbagai manfaat bagi bisnis, termasuk peningkatan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan, keunggulan kompetitif yang lebih tinggi, serta kinerja lingkungan yang lebih optimal. Selain itu, pendekatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas dengan memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya lingkungan secara lebih efektif. Dengan strategi yang berorientasi pada keberlanjutan, bisnis dapat memastikan pertumbuhan jangka panjang dan daya saing yang lebih kuat, terutama di industri yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu lingkungan, seperti sektor agroindustri (Ardiana *et al.*, 2023).
- d. Penerapan akuntansi hijau memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan pemahaman terhadap dampak lingkungan, memperkuat nilai sosial, serta memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, menarik minat investor, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Secara khusus, negara-negara dengan dukungan kebijakan yang kuat, seperti India, dapat memperoleh manfaat lebih besar dari penerapan akuntansi hijau karena adanya insentif pemerintah yang mendukung keberlanjutan bisnis dan investasi ramah lingkungan (Husda *et al.*, 2024).

## D. Kesimpulan

Akuntansi hijau memainkan peran penting dalam mendukung strategi keberlanjutan bisnis dengan menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang mencerminkan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Dengan penerapan akuntansi hijau, organisasi dapat mengukur, mengungkapkan, dan mengelola jejak lingkungan mereka, yang

pada gilirannya membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Selain itu, praktik akuntansi hijau juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang semakin menjadi tuntutan pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat.

Identitas organisasi yang kuat dalam konteks keberlanjutan tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan tetapi juga dalam budaya perusahaan, kebijakan operasional, dan strategi bisnis secara keseluruhan. Organisasi yang secara konsisten mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya akan lebih mampu membangun reputasi yang positif, meningkatkan daya saing, dan memperoleh kepercayaan pasar. Dengan demikian, sinergi antara akuntansi hijau dan identitas organisasi menjadi kunci utama dalam menciptakan nilai jangka panjang, baik bagi perusahaan maupun bagi lingkungan dan masyarakat secara luas.

Sebagai wujud dukungan terhadap keberlanjutan, maka perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan kinerja keberlanjutan dalam bentuk laporan keberlanjutan mereka secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial. Laporan tersebut dapat disusun mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 serta panduan *Global Reporting Initiative* (GRI). Pelaporan atas ketiga aspek ini harus dilakukan secara transparan, terukur, dan konsisten dari tahun ke tahun agar pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana komitmen dan capaian perusahaan dalam menjalankan strategi keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaechi, E. P., & Nwankwoeke, E. M. (2017). Must Firms Adopt Environmental Accounting? Adoption Challenges in Nigeria. *Trends Economics and Management*, 11(30), 9. <https://doi.org/10.13164/trends.2017.30.9>
- Ambarsari, S. D., Ambarwati, S. D., & Hwihanus, H. (2024). The Role Of Green Accounting In Promoting Corporate Sustainability. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 1(3), 165–177. <https://doi.org/10.62951/ijecm.v1i3.106>
- Ardiana, M., Agustina, R., & Pertiwi, D. A. (2023). Increasing Business Eco-Efficiency and Competitive Advantage through the Application of Green Accounting. *Buletin Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo*, 25(1), 1–8. <https://doi.org/10.37149/bpsosek.v25i1.363>
- Demdoum, Z., Meraghni, O., & Bekkouche, L. (2021). The Application of Green Accounting According to Activity-Based Costing for an Orientation Towards a Green Economy. *International Journal of Digital Strategy, Governance, and Business Transformation*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.4018/ijdsbt.20210101.0a3>
- Feng, X. (2024). Green Accounting in China: Challenges, Opportunities, and the Path Forward. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 86(1), 1–7. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/86/20240929>
- Hung, P. H. (2024). Exploring the Adoption of Green Accounting Practices in Vietnamese Small and Medium Enterprises Article Info ABSTRACT. In *West Science Accounting and Finance* (Vol. 2, Issue 03).
- Husda, A. P., Haldy, M., & Saputra, A. (2024). Green Accounting: Implementation In Indonesia, India & Yordania. *Jurnal Program Studi Manajemen*, 13(1).

- Juita, S. H., Lukita, C., & Lasmini, L. (2024). Pemahaman dan Kepedulian dalam Implementasi Green Accounting oleh UMKM Pencucian Mobil. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(12). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i12.4392>
- Khan, D., Paul, S., Borana, M. V., & Kavyansh Gupta, M. (2024). The Role of Green Bonds in Sustainable Finance (A Descriptive Study) Introduction and Background. In *Digital Living: Redefining Culture with Technology for Industries, Education, Society & Entrepreneurship* (Vol. 1, pp. 109–120). <https://www.doi.org/10.58532/V3BFLT6P2CH414>
- Marota, R. (2024). Uncovering The Potential Of Sustainability: Opportunities And Challenges In Applying Green Accounting For Natural Environmental Sustainability In Companies. *Journal of Sustainability Science and Management*, 19(8), 89–102. <https://doi.org/10.46754/jssm.2024.08.007>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (2017).
- Rusu, T. M., Odagiu, A., Pop, H., & Paulette, L. (2024). Sustainability Performance Reporting. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 16, Issue 19). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/su16198538>
- Soraya, B., & Nurrochmah, A. (2024). Business Transformation Towards Sustainability: The Role of Green Accounting in Sustainability Management. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 1(3). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jees>
- Syarifuddin, M., & Khomsiyah, K. (2024). Potensi Penerapan Green Accounting Masa Depan melalui Perspektif Paradigma Positivisme. *Journal Homepage*, 2, 175–181. <https://doi.org/10.36733/jia.v2i2.8565>

- Yüzbaşıoğlu, M. A. (2024). Green Finance and Accounting: Accounting and Reporting of Environmentally Friendly Financial Products. *International Journal on Science and Technology (IJSAT)* IJSAT24041392, 15(4).
- Zuhri, S. (2022). Green accounting in Indonesia pathways to sustainable economic development. *Journal of Economics and Business Letters*, 2(1), 10–12.  
<https://doi.org/10.55942/jebl.v2i1.282>

## TENTANG PENULIS



**Dr. Siska Aprianti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA., CRP.**

Penulis Lahir di Palembang pada 10 April, telah menyelesaikan studi Doktoral di Universitas Sriwijaya Palembang pada Jurusan Ekonomi Kekhususan Akuntansi Keuangan tahun 2023. Saat ini penulis merupakan salah satu dosen tetap di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, yang telah mengabdi sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Mata kuliah yang pernah diampu meliputi Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Perbankan, Akuntansi Koperasi dan Manajemen Risiko. Penulis pernah mengikuti beberapa pelatihan sertifikasi seperti *Certified Sustainability Reporting Specialist* tahun 2020, *Certified Sustainability Reporting Asrurer* tahun 2021, *Certified Risk Professional* tahun 2022. Penulis juga pernah menjadi narasumber beberapa kegiatan seperti Akuntansi BUMDes bagi pengurus BUMDes Kabupaten Muara Enim Tahun 2022, Perhitungan Harga Pokok Produksi Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Bagi UMKM Di Kota Prabumulih tahun 2024.

# BAB

# 5

## KEBERLANJUTAN DAN AKUNTANSI HIJAU DALAM TRANSFORMASI BISNIS INTERNASIONAL

Rafrini Amyulianthy, Ph.D., CSRS., AseanCPA.

Universitas Pancasila

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang Transformasi Bisnis Global

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, dunia usaha menghadapi perubahan mendasar yang dipicu oleh kemajuan teknologi, keterbukaan pasar, dan meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan kini tidak hanya berlomba mencetak keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat luas (Dyllick & Muff, 2016).

Tekanan dari berbagai pemangku kepentingan—seperti investor, konsumen, dan pemerintah—menuntut perusahaan untuk bersikap lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas bisnis. Akibatnya, paradigma manajemen perusahaan bergeser dari orientasi keuntungan jangka pendek ke arah strategi bisnis yang lebih holistik dan berkelanjutan (Eccles & Krzus, 2018).

Perubahan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kepedulian masyarakat internasional terhadap isu-isu lingkungan global, seperti pemanasan global, polusi, dan krisis ekologi lainnya. Dunia usaha diharapkan menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penyumbang masalah. Oleh sebab itu, perusahaan mulai mengintegrasikan prinsip-

prinsip keberlanjutan dalam setiap keputusan strategisnya (Porter & Kramer, 2011).

Transformasi tersebut tidak hanya terjadi di tingkat lokal atau nasional, namun telah menjadi tren di ranah bisnis internasional. Bahkan perusahaan yang beroperasi di negara berkembang turut ter dorong untuk menyesuaikan diri dengan praktik global agar tetap kompetitif dan mendapat kepercayaan dari mitra internasional (Lozano, 2015).

## ***2. Peran Keberlanjutan dan Akuntansi Hijau dalam Konteks Internasional***

Keberlanjutan telah menjadi prinsip penting dalam penyusunan strategi bisnis lintas negara. Dalam konteks ini, akuntansi hijau berperan sebagai instrumen penting untuk mengukur dan mengkomunikasikan sejauh mana perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas operasional mereka (Bebbington & Larrinaga, 2014).

Melalui pendekatan akuntansi hijau, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya dan risiko lingkungan yang mungkin timbul serta menyajikan informasi tersebut dalam laporan keuangan atau laporan keberlanjutan mereka. Hal ini menjadi acuan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan berorientasi jangka panjang (Schaltegger & Burritt, 2010).

Di tingkat global, standar pelaporan seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan panduan dari International Sustainability Standards Board (ISSB) telah menjadi referensi utama dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan. Akuntansi hijau menyediakan landasan teknis yang memudahkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan ini (KPMG, 2020).

Dengan demikian, praktik akuntansi hijau bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi reputasi dan daya saing perusahaan di pasar global. Komitmen terhadap pelaporan lingkungan yang akurat dan transparan mencerminkan keseriusan perusahaan dalam

menjalankan bisnis yang bertanggung jawab di tengah perubahan iklim ekonomi dan lingkungan yang cepat (IFAC, 2022).

## B. Globalisasi dan Tantangan Lingkungan

### 1. Dampak Globalisasi terhadap Lingkungan

Globalisasi telah mempercepat pertumbuhan ekonomi lintas batas, meningkatkan arus perdagangan dan investasi internasional. Namun, pertumbuhan ini sering kali disertai dengan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan, degradasi lingkungan, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca (Zarsky, 2013). Sebagai contoh, penelitian oleh Le dan Le (2022) menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi, sosial, dan politik memiliki hubungan positif dengan peningkatan emisi gas rumah kaca, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Selain itu, studi oleh Sun *et al.* (2022) menyoroti bahwa perkembangan keuangan dan perdagangan internasional berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon dioksida, terutama di negara-negara berkembang. Temuan ini menggariskan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dalam proses globalisasi dan mendorong implementasi kebijakan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

Pergeseran industri ke negara berkembang dalam upaya mencari biaya produksi yang lebih rendah juga memicu peningkatan pencemaran dan deforestasi. Aktivitas produksi yang kurang diawasi secara ketat menyebabkan dampak lingkungan yang serius di berbagai wilayah (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016). Salah satu konsekuensi nyata dari globalisasi adalah terbentuknya rantai pasok global yang panjang dan kompleks, di mana perusahaan sering kali tidak memiliki kendali penuh atas praktik lingkungan mitra bisnis mereka (UNEP, 2020). Perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara juga menghadapi tantangan untuk menyesuaikan praktik bisnis mereka dengan berbagai peraturan lingkungan yang berbeda-beda, yang kadang

menimbulkan ketidakkonsistenan dalam perlindungan lingkungan (Lundan & Cantwell, 2020). Perusahaan multinasional (MNC) yang beroperasi di berbagai negara menghadapi tantangan signifikan dalam menyesuaikan praktik bisnis mereka dengan beragam peraturan lingkungan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Perbedaan dalam standar dan penegakan regulasi lingkungan antara negara-negara dapat menyebabkan inkonsistensi dalam perlindungan lingkungan dan menimbulkan berbagai konsekuensi bagi MNC.

Negara-negara memiliki tingkat ketatnya regulasi lingkungan yang berbeda, dengan beberapa menerapkan standar yang lebih tinggi dan penegakan yang lebih ketat dibandingkan yang lain. Variasi ini menciptakan tantangan bagi MNC dalam mengembangkan kebijakan lingkungan yang konsisten di seluruh operasi global mereka. Penelitian oleh Lundan dan Cantwell (2020) menyoroti bahwa MNC harus menavigasi kompleksitas ini untuk memastikan kepatuhan dan menghindari risiko hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa MNC cenderung memindahkan operasi mereka ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar, fenomena yang dikenal sebagai "pollution haven." Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya kepatuhan, namun dapat memperburuk degradasi lingkungan di negara tuan rumah. Studi milik Dam dan Scholtens, (2012) menemukan bahwa MNC lebih mungkin berinvestasi di negara dengan regulasi lingkungan yang kurang ketat, yang dapat meningkatkan polusi di wilayah tersebut.

Penelitian lain menunjukkan bahwa MNC sering kali mengurangi emisi di negara asal mereka yang memiliki regulasi ketat, namun meningkatkan emisi di negara dengan regulasi lebih lemah. Hal ini menunjukkan adanya pemindahan beban lingkungan ke yurisdiksi dengan standar yang lebih rendah. Laporan oleh *Principles for Responsible Investment* (PRI) mengungkap bahwa MNC cenderung lebih

banyak mencemari di negara dengan regulasi lingkungan yang lemah, sementara mengurangi emisi di negara asal yang memiliki regulasi lebih ketat.

Ketidakpastian dalam regulasi lingkungan juga mempengaruhi keputusan investasi MNC. Studi An *et al* (2022) menunjukkan bahwa MNC lebih cenderung memasuki pasar di negara yang memiliki regulasi lingkungan yang jelas dan stabil, dibandingkan dengan negara yang regulasinya tidak pasti atau berubah-ubah. Hal ini menantang pandangan umum bahwa regulasi lingkungan yang ketat selalu menghalangi investasi asing. MNC juga menghadapi tantangan dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan mereka, terutama di negara berkembang. Keterbatasan kerangka hukum internasional dan kurangnya harmonisasi legislasi lingkungan dapat menghambat upaya penegakan tanggung jawab tersebut. Sehingga kurangnya harmonisasi dalam legislasi lingkungan dan prioritas ekonomi negara berkembang yang sering mengesampingkan langkah-langkah lingkungan yang ketat menjadi hambatan utama bagi MNC dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan mereka.

Selain itu, meningkatnya konsumsi global dan permintaan terhadap produk murah turut mendorong perusahaan untuk menekan biaya, yang terkadang mengorbankan praktik produksi yang ramah lingkungan (Horner, 2017). Meski demikian, globalisasi juga membuka peluang transfer teknologi bersih dan inovasi lingkungan dari negara maju ke negara berkembang, yang dapat menjadi solusi bagi tantangan lingkungan global jika dimanfaatkan dengan bijak (OECD, 2021).

## **2. Tuntutan Regulasi Internasional dan Keberlanjutan**

Seiring meningkatnya perhatian global terhadap degradasi lingkungan, berbagai kebijakan internasional mulai bermunculan untuk mendorong dunia usaha mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam praktik operasionalnya. Kebijakan-kebijakan ini berperan sebagai

fondasi penting dalam mengarahkan perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan beretika (UNEP, 2020). Sehingga salah satu inisiatif penting adalah *Paris Agreement*, yang menyerukan kepada negara dan pelaku bisnis untuk berkontribusi secara nyata dalam menurunkan emisi karbon. Perjanjian ini memiliki dampak signifikan terhadap strategi perusahaan global, khususnya bagi sektor industri yang menghasilkan emisi tinggi (UNFCCC, 2015).

Upaya peningkatan transparansi dalam pelaporan lingkungan juga terus digalakkan, misalnya melalui program European Green Deal dan regulasi CSRD dari Uni Eropa. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan berbagai risiko dan dampak aktivitasnya terhadap iklim dalam laporan tahunan mereka (European Commission, 2021). Negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin turut bergerak ke arah yang sama dengan mengadopsi kerangka kebijakan yang mengacu pada standar internasional. Langkah ini diambil agar entitas bisnis mereka mampu bersaing di tingkat global dan tetap memenuhi ekspektasi pasar terhadap keberlanjutan (ADB, 2020).

Lebih dari sekadar kewajiban hukum, regulasi terkait keberlanjutan kini menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Kepatuhan terhadap regulasi ini juga dapat membuka peluang mendapatkan pendanaan dari instrumen keuangan hijau dan memperkuat citra positif perusahaan (Astuti, Amyulianthy and Kaniati, 2022). Dengan demikian, mengikuti regulasi internasional tentang keberlanjutan tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global (PwC, 2021).

### **3. Peran Lembaga-Lembaga Internasional**

Sejumlah organisasi internasional memiliki peranan strategis dalam mendorong adopsi prinsip keberlanjutan oleh sektor bisnis global. Salah satu inisiatif paling

berpengaruh adalah United Nations Global Compact (UNGC), yang memperkenalkan sepuluh prinsip utama terkait hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan antikorupsi sebagai pedoman etika bagi perusahaan (UNGC, 2015). Melalui UNGC, entitas bisnis dari berbagai negara diajak untuk menjalankan operasional secara bertanggung jawab dan menyampaikan progresnya secara berkala dalam bentuk Communication on Progress (CoP), sehingga aspek akuntabilitas dan keterbukaan publik dapat terus terjaga (UNGC, 2021).

Selain itu, Global Reporting Initiative (GRI) telah diakui secara luas sebagai referensi utama dalam pelaporan keberlanjutan. GRI menyusun struktur pelaporan yang membantu perusahaan mengkomunikasikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka secara sistematis dan terukur (GRI, 2021). Pedoman dari GRI juga mempermudah perusahaan dalam menjawab tuntutan pemangku kepentingan yang semakin menekankan transparansi dan tanggung jawab lingkungan, dengan pendekatan yang dapat diterapkan secara global (KPMG, 2020).

Sementara itu, perkembangan terbaru di bidang pelaporan keberlanjutan ditandai oleh inisiatif dari International Financial Reporting Standards (IFRS) yang membentuk International Sustainability Standards Board (ISSB). Lembaga ini merancang Sustainability Disclosure Standards yang bertujuan menyelaraskan praktik pelaporan di berbagai negara (IFRS Foundation, 2022). Standar yang dikembangkan ISSB diharapkan mampu memberikan informasi keberlanjutan yang lebih konsisten dan berkualitas tinggi, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi investor dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang berbasis data lingkungan (IFRS Foundation, 2023).

## C. Transformasi Bisnis Menuju Keberlanjutan

### 1. *Model-Model Transformasi Bisnis Hijau*

Transformasi bisnis hijau merupakan upaya strategis perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam model bisnis mereka. Dalam dekade terakhir, berbagai pendekatan telah berkembang untuk mendorong organisasi menuju praktik yang lebih ramah lingkungan, mulai dari efisiensi sumber daya hingga inovasi produk berbasis keberlanjutan (Bocken *et al.*, 2014). Model-model ini tidak hanya bertujuan mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan sosial jangka panjang. Salah satu model yang menonjol adalah pendekatan 'Eco-Efficiency' yang dikembangkan oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Konsep ini menekankan pada peningkatan produktivitas dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit limbah serta emisi. Banyak perusahaan industri telah mengadopsi model ini untuk menekan biaya sekaligus memenuhi regulasi lingkungan yang ketat (DeSimone & Popoff, 2017).

Model lainnya adalah 'Circular Economy', yang bertujuan untuk mendesain ulang sistem produksi dan konsumsi agar meminimalkan limbah dan memperpanjang umur produk. Prinsip sirkularitas ini melibatkan daur ulang, penggunaan kembali, dan pemeliharaan nilai material selama mungkin dalam siklus ekonomi. Model ini mendapatkan perhatian besar di sektor manufaktur dan fashion sebagai solusi terhadap pola konsumsi linear yang eksplotatif (Geissdoerfer *et al.*, 2017). 'Sustainable Value Creation' adalah model transformasi yang mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam inti strategi bisnis. Tidak hanya fokus pada efisiensi, model ini menekankan inovasi dan penciptaan produk atau layanan yang membawa manfaat sosial dan ekologis. Perusahaan yang menerapkan model ini berusaha menciptakan dampak positif melalui rantai nilai yang berkelanjutan (Hart & Milstein, 2011).

Transformasi juga dapat dilakukan melalui pendekatan '*Shared Value*', sebuah konsep yang dikembangkan oleh Porter dan Kramer (2011). Model ini mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi persimpangan antara kepentingan bisnis dan kebutuhan sosial. Melalui inovasi model bisnis yang menyasar pada solusi sosial, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif sambil memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, model '*Green Innovation*' menjadi bagian penting dari transformasi bisnis hijau, di mana perusahaan berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Hal ini mencakup inovasi dalam proses produksi, pengelolaan limbah, serta pengembangan produk dengan jejak karbon rendah. Adopsi model ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya tentang kepatuhan, tetapi juga merupakan sumber keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang (Chen *et al.*, 2012).

## **2. Studi Kasus: Perusahaan Multinasional Yang Mengadopsi Strategi Hijau**

Penerapan strategi hijau oleh perusahaan multinasional kini menjadi elemen penting dalam membangun keunggulan kompetitif sekaligus memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan global. Salah satu contoh menonjol adalah Unilever, yang telah menjadi pionir dalam menerapkan strategi keberlanjutan secara menyeluruh. Melalui Sustainable Living Plan, perusahaan ini berhasil menggabungkan tujuan bisnis dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial (Unilever, 2020). Unilever menetapkan target ambisius untuk mengurangi separuh dampak lingkungan dari produk-produknya dan meningkatkan dampak sosial positif hingga tahun 2030. Strategi ini tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, tetapi juga mencakup transformasi rantai pasok agar lebih ramah lingkungan. Misalnya, Unilever beralih ke penggunaan

sumber daya terbarukan dan mengurangi limbah kemasan plastik secara signifikan (Unilever, 2020).

Contoh lainnya adalah Tesla Inc., yang mengintegrasikan inovasi hijau sebagai inti dari model bisnisnya. Tesla tidak hanya memproduksi kendaraan listrik, tetapi juga mengembangkan teknologi energi bersih seperti solar panels dan penyimpanan energi melalui Powerwall dan Powerpack. Fokus utama perusahaan adalah mempercepat transisi global menuju energi berkelanjutan (Tesla, 2022). Selain itu, IKEA juga telah memantapkan posisi sebagai perusahaan multinasional yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. IKEA telah berinvestasi dalam energi terbarukan dan berkomitmen untuk hanya menggunakan bahan-bahan yang bersumber secara bertanggung jawab. Bahkan, mereka menargetkan menjadi bisnis yang sepenuhnya sirkular dan iklim positif pada tahun 2030 (IKEA, 2021).

Strategi hijau yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan tersebut bukan semata-mata didorong oleh regulasi atau tekanan eksternal, tetapi juga karena pertimbangan bisnis jangka panjang. Berbagai studi menunjukkan bahwa perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil, reputasi yang lebih kuat, dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi (Eccles *et al.*, 2014). Melalui studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa integrasi strategi hijau ke dalam model bisnis utama memungkinkan perusahaan multinasional untuk tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai berkelanjutan yang relevan di pasar global. Komitmen terhadap lingkungan menjadi strategi utama dalam mempertahankan relevansi bisnis di era ekonomi hijau.

### **3. Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Adopsi Keberlanjutan di Level Internasional**

Adopsi keberlanjutan di tingkat internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari sisi pendorong maupun penghambat. Salah satu faktor pendorong utama adalah meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan ekosistem. Kesadaran ini diperkuat oleh laporan ilmiah dari lembaga-lembaga seperti IPCC yang menekankan perlunya aksi kolektif global untuk mengurangi emisi dan menjaga keseimbangan lingkungan (IPCC, 2021). Selain itu, tuntutan dari pemangku kepentingan seperti konsumen, investor, dan lembaga pembiayaan mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Investor institusional kini semakin mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi. Studi oleh Friede *et al.* (2015) menemukan bahwa integrasi ESG secara konsisten memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan jangka panjang. Kemajuan teknologi juga menjadi faktor signifikan yang mendukung adopsi keberlanjutan. Inovasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi ramah lingkungan memungkinkan perusahaan mengurangi jejak karbon mereka dengan lebih efektif dan hemat biaya. Teknologi digital juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan berbasis data (GeSI, 2016).

Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah hambatan yang memperlambat penerapan keberlanjutan di tingkat global. Salah satunya adalah perbedaan regulasi dan kebijakan antar negara. Negara berkembang, misalnya, sering kali menghadapi kendala dalam membiayai program keberlanjutan akibat keterbatasan sumber daya fiskal dan teknologi (UNCTAD, 2020). Kurangnya kesadaran atau komitmen dari manajemen perusahaan juga menjadi

tantangan. Banyak organisasi, terutama di negara-negara dengan regulasi lingkungan yang lemah, belum menjadikan keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Hal ini diperparah oleh kurangnya insentif atau tekanan eksternal yang mendorong transformasi menuju model bisnis hijau (OECD, 2017).

Di samping itu, ketiadaan standar pelaporan keberlanjutan yang seragam secara global menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam perbandingan antar perusahaan atau negara. Meskipun lembaga seperti ISSB dan GRI telah membuat kemajuan, proses harmonisasi ini masih berlangsung dan memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan global (IFRS Foundation, 2022).

#### **D. Peran Akuntansi Hijau dalam Bisnis Internasional**

Integrasi aspek lingkungan dalam laporan keuangan kini menjadi salah satu pendekatan penting dalam praktik pelaporan korporat, terutama di tengah meningkatnya kepedulian terhadap isu-isu ekologi. Banyak perusahaan skala internasional mulai mencantumkan informasi terkait aktivitas lingkungan dalam bentuk kuantitatif, seperti biaya penanganan limbah, efisiensi energi, serta upaya penurunan emisi. Informasi ini yang dulunya sering dianggap pelengkap kini menjadi bagian utama dari sistem pelaporan, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan menunjukkan tanggung jawab lingkungan perusahaan (Schaltegger & Burritt, 2010).

Dorongan ini juga sejalan dengan meningkatnya perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Investor, lembaga keuangan, hingga konsumen kini mempertimbangkan data keberlanjutan sebagai indikator penting dalam menilai risiko dan potensi jangka panjang suatu entitas bisnis. Ketika perusahaan mampu menyajikan informasi lingkungan secara terstruktur dan menyatu dengan laporan keuangan utama, hal tersebut dapat memperkuat posisi perusahaan sebagai organisasi yang tidak hanya patuh secara regulasi, tetapi juga

berkomitmen terhadap keberlanjutan (Clark, Feiner & Viehs, 2015). Meski demikian, implementasi pelaporan lingkungan secara global masih menghadapi tantangan besar, terutama karena belum adanya satu standar baku yang berlaku secara internasional. Saat ini, perusahaan dapat memilih dari berbagai standar seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), maupun Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Perbedaan pendekatan dan indikator antar sistem ini menyebabkan inkonsistensi dan menyulitkan proses benchmarking antar perusahaan lintas negara (IFRS Foundation, 2022).

Dalam konteks ini, harmonisasi pelaporan keberlanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Adanya standar pelaporan global yang seragam akan mempermudah perusahaan multinasional untuk memenuhi kewajiban pelaporan tanpa mengalami tumpang tindih regulasi di berbagai yurisdiksi. Selain itu, harmonisasi ini juga meningkatkan keandalan data bagi investor dan pengambil kebijakan, serta mempercepat integrasi aspek ESG dalam pengambilan keputusan strategis (KPMG, 2020).

Salah satu area utama dalam pelaporan keberlanjutan yang mendapat perhatian luas adalah pengungkapan karbon dan jejak lingkungan. Perusahaan-perusahaan besar kini dituntut untuk melaporkan jejak karbon mereka, termasuk emisi gas rumah kaca, intensitas energi, serta dampak ekologis dari operasi bisnis mereka. Transparansi terhadap data tersebut menjadi tolok ukur komitmen mereka terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap risiko iklim global (CDP, 2021).

Tak hanya itu, data emisi karbon kini memainkan peran penting dalam keputusan investasi. Banyak investor global mengintegrasikan informasi karbon ke dalam portofolio berbasis keberlanjutan untuk mengidentifikasi risiko lingkungan jangka panjang. Perusahaan yang konsisten dalam pelaporan karbon cenderung lebih dihargai di pasar karena dianggap memiliki

ketahanan yang lebih baik terhadap dinamika regulasi dan tekanan lingkungan di masa mendatang (TCFD, 2017).

## E. Inovasi dan Teknologi dalam Akuntansi Hijau Global

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan melakukan pelaporan keberlanjutan. Melalui digitalisasi, proses pengumpulan, analisis, dan penyampaian data keberlanjutan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan software khusus dan dashboard visual, perusahaan dapat mengelola data lingkungan seperti emisi karbon, konsumsi air, dan limbah secara real-time, sekaligus memperbaiki kualitas pelaporan mereka kepada investor, regulator, dan masyarakat luas.

Sistem pelaporan digital juga mendukung standarisasi pelaporan berbasis kerangka global seperti GRI, TCFD, dan SASB. Dengan sistem ini, perusahaan dapat menjaga konsistensi antar periode pelaporan dan meningkatkan akurasi informasi. Selain itu, digitalisasi mempermudah proses audit keberlanjutan dan memungkinkan penyusunan laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan (KPMG, 2020). Inovasi lain dalam ekosistem keberlanjutan adalah munculnya green fintech – teknologi finansial yang mendukung agenda hijau. Green fintech mempermudah pelacakan dan pengukuran indikator ESG secara otomatis, baik untuk perusahaan maupun individu. Beberapa platform bahkan memberikan analisis terhadap dampak lingkungan dari pola konsumsi atau keputusan investasi pengguna, sehingga membantu perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (Ghosh & Vinod, 2021).

Metrik ESG yang didukung oleh teknologi fintech kini menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan investasi yang berkelanjutan. Fintech berbasis keberlanjutan memungkinkan penyusunan skor ESG berdasarkan data yang mencakup aspek sosial, tata kelola, dan lingkungan. Informasi ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan, tetapi juga menjadi pertimbangan utama dalam alokasi modal oleh investor

institusional (World Bank, 2020). Pemanfaatan big data semakin memperkuat upaya pelaporan dan pengawasan lingkungan. Dengan menganalisis volume besar data dari berbagai sumber, perusahaan mampu mengidentifikasi risiko lingkungan secara lebih cepat dan akurat. Big data juga membuka peluang bagi analisis prediktif terkait dampak iklim, konsumsi energi, dan emisi dalam operasi bisnis, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih responsif dan strategis (Wamba *et al.*, 2015).

Selain big data, teknologi blockchain turut mendorong akuntabilitas keberlanjutan melalui pencatatan data yang transparan dan tidak dapat diubah. Blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi keberlanjutan, melacak jejak karbon, hingga memverifikasi sertifikat lingkungan dalam rantai pasok. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan menjaga integritas data secara desentralisasi, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap pelaporan lingkungan (Tapscott & Tapscott, 2016).

## F. Tantangan dan Peluang

Dalam konteks global, pelaporan hijau menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama karena perbedaan kebijakan lingkungan dan standar akuntansi antar negara. Setiap yurisdiksi memiliki kerangka regulasi yang unik, sehingga menyebabkan perbedaan dalam pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan. Perbedaan ini menyulitkan harmonisasi dan menciptakan kebingungan dalam proses perbandingan kinerja lingkungan antar perusahaan lintas negara (Lozano, 2015). Ketiadaan standar pelaporan keberlanjutan yang seragam secara internasional menjadi hambatan utama dalam adopsi akuntansi hijau. Meski terdapat berbagai inisiatif seperti GRI, SASB, dan TCFD, perbedaan pendekatan, terminologi, dan metrik pengukuran membuat pelaporan menjadi tidak konsisten. Hal ini menghambat pemangku kepentingan global dalam menilai dampak dan risiko lingkungan perusahaan secara objektif (IFRS Foundation, 2022).

Tantangan lainnya muncul dari kapasitas institusional yang berbeda di tiap negara. Negara-negara berkembang, misalnya, kerap kekurangan sumber daya untuk mengembangkan sistem pelaporan lingkungan yang komprehensif. Keterbatasan ini mencakup infrastruktur teknologi, sumber daya manusia terlatih, dan dukungan regulasi yang memadai (UNCTAD, 2020). Di samping itu, resistensi dari perusahaan juga menjadi faktor penghambat. Beberapa entitas bisnis menilai pelaporan hijau sebagai beban administratif tambahan dan khawatir akan pengungkapan informasi yang sensitif. Tanpa insentif atau tekanan regulasi yang cukup kuat, perusahaan cenderung enggan mengadopsi praktik pelaporan lingkungan secara sukarela (OECD, 2017).

Namun demikian, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar untuk membangun kolaborasi internasional dalam memperkuat praktik akuntansi hijau. Inisiatif multilateral seperti Paris Agreement telah mendorong negara-negara untuk menyatukan komitmen mereka dalam mengurangi dampak lingkungan. Hal ini membuka ruang kerja sama lintas negara dalam menyusun kerangka pelaporan yang harmonis dan relevan secara global (UNFCCC, 2015). Organisasi internasional dan lembaga multilateral seperti World Bank, UNDP, dan UNEP turut memainkan peran penting dalam mendukung negara-negara berkembang dalam memperkuat kapasitas pelaporan lingkungan mereka. Bantuan teknis dan pendanaan internasional dapat membantu pembangunan sistem pelaporan berbasis data serta pelatihan sumber daya manusia dalam bidang akuntansi hijau (World Bank, 2020).

Selain itu, aliansi bisnis global juga dapat mendorong praktik akuntansi hijau yang berkelanjutan. Melalui platform seperti United Nations Global Compact dan Sustainable Stock Exchanges Initiative, perusahaan multinasional dapat saling berbagi pengetahuan, standar, dan praktik terbaik dalam pelaporan keberlanjutan (UNGC, 2021). Dengan membangun jejaring kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional, praktik akuntansi hijau dapat

dikembangkan secara lebih sistematis dan inklusif. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menciptakan sistem pelaporan lingkungan yang dapat diandalkan, transparan, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global (KPMG, 2020).

## G. Studi Kasus Internasional Perusahaan Global

Penerapan strategi hijau oleh perusahaan multinasional kini menjadi elemen penting dalam membangun keunggulan kompetitif sekaligus memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan global. Salah satu contoh menonjol adalah Unilever, yang telah menjadi pionir dalam menerapkan strategi keberlanjutan secara menyeluruh. Melalui Sustainable Living Plan, perusahaan ini berhasil menggabungkan tujuan bisnis dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial (Unilever, 2020). Unilever menetapkan target ambisius untuk mengurangi separuh dampak lingkungan dari produk-produknya dan meningkatkan dampak sosial positif hingga tahun 2030. Strategi ini tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, tetapi juga mencakup transformasi rantai pasok agar lebih ramah lingkungan. Misalnya, Unilever beralih ke penggunaan sumber daya terbarukan dan mengurangi limbah kemasan plastik secara signifikan (Unilever, 2020).

Contoh lainnya adalah Tesla Inc., yang mengintegrasikan inovasi hijau sebagai inti dari model bisnisnya. Tesla tidak hanya memproduksi kendaraan listrik, tetapi juga mengembangkan teknologi energi bersih seperti solar panels dan penyimpanan energi melalui Powerwall dan Powerpack. Fokus utama perusahaan adalah mempercepat transisi global menuju energi berkelanjutan (Tesla, 2022). Selain itu, IKEA juga telah memantapkan posisi sebagai perusahaan multinasional yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. IKEA telah berinvestasi dalam energi terbarukan dan berkomitmen untuk hanya menggunakan bahan-bahan yang bersumber secara bertanggung jawab. Bahkan, mereka menargetkan menjadi

bisnis yang sepenuhnya sirkular dan iklim positif pada tahun 2030 (IKEA, 2021).

Strategi hijau yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan tersebut bukan semata-mata didorong oleh regulasi atau tekanan eksternal, tetapi juga karena pertimbangan bisnis jangka panjang. Berbagai studi menunjukkan bahwa perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil, reputasi yang lebih kuat, dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi (Eccles *et al.*, 2014). Melalui studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa integrasi strategi hijau ke dalam model bisnis utama memungkinkan perusahaan multinasional untuk tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai berkelanjutan yang relevan di pasar global. Komitmen terhadap lingkungan menjadi strategi utama dalam mempertahankan relevansi bisnis di era ekonomi hijau.

## H. Penutup

### 1. *Ringkasan*

Bab ini membahas bagaimana keberlanjutan dan akuntansi hijau menjadi pilar penting dalam transformasi bisnis internasional di tengah tantangan globalisasi dan krisis lingkungan. Diuraikan bahwa akuntansi hijau berfungsi sebagai alat strategis untuk mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas bisnis global. Pembahasan mencakup peran regulasi internasional seperti Paris Agreement, GRI, dan ISSB yang mendorong praktik pelaporan lingkungan yang transparan dan terstandar. Disoroti pula berbagai model transformasi bisnis hijau seperti eco-efficiency, circular economy, shared value, hingga green innovation yang telah diadopsi oleh perusahaan multinasional seperti Unilever, Tesla, dan IKEA. Dokumen ini juga menguraikan tantangan lintas negara dalam harmonisasi standar pelaporan keberlanjutan, serta peluang kolaborasi global untuk memperkuat praktik akuntansi hijau

melalui inovasi digital seperti big data, fintech, dan blockchain.

## **2. Implikasi Bagi Akuntan Dan Pemangku Kepentingan Global**

Bagi profesi akuntan, pergeseran menuju pelaporan hijau menciptakan kebutuhan kompetensi baru, termasuk pemahaman atas standar ESG, pengukuran jejak karbon, serta kemampuan mengelola sistem pelaporan digital. Akuntan tidak lagi berperan sekadar sebagai penyusun laporan keuangan, melainkan juga sebagai penjaga akuntabilitas keberlanjutan dan penasihat strategis perusahaan. Bagi pemangku kepentingan global seperti investor, regulator, dan organisasi masyarakat sipil, keterbukaan informasi lingkungan yang andal sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Harmonisasi standar internasional menjadi vital agar laporan keberlanjutan bersifat komparatif lintas negara dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kolaborasi antar sektor sangat dibutuhkan untuk mendorong integrasi keberlanjutan ke dalam sistem ekonomi global.

## **3. Arah Masa Depan Akuntansi Hijau dalam Bisnis Internasional**

Akuntansi hijau di masa depan akan semakin terintegrasi dengan teknologi dan sistem informasi. Digitalisasi pelaporan keberlanjutan, penggunaan real-time ESG dashboards, dan sertifikasi berbasis blockchain akan menjadi hal lumrah dalam rantai pasok global. Standardisasi pelaporan keberlanjutan lintas negara melalui ISSB dan peningkatan peran lembaga internasional akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas lingkungan di pasar modal. Selain itu, akuntansi hijau juga akan berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan menjadi jembatan antara keputusan bisnis dan tujuan ekologis global. Perusahaan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi hijau secara holistik diprediksi akan memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang

dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADB, 2020. Asian Development Outlook: What Drives Innovation in Asia?. Asian Development Bank.
- Astuti, T., Amyulianthy, R. and Kaniati, R. (2022) 'Green Accounting, Financial Performance toward Firm Value', *Asian Journal of Accounting and Finance*, 4(1), pp. 1-12.
- Bebbington, J. & Larrinaga, C., 2014. Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), pp.395-413.
- Bocken, N.M.P., Short, S.W., Rana, P. & Evans, S., 2014. A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. *Journal of Cleaner Production*, 65, pp.42–56.
- CDP, 2021. CDP Global Environmental Disclosure Report 2021. [online] Available at: <https://www.cdp.net/en/reports> [Accessed 10 Apr. 2025].
- Chen, Y.S., Lai, S.B. & Wen, C.T., 2012. The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. *Journal of Business Ethics*, 104(3), pp.361–370.
- Clark, G.L., Feiner, A. & Viehs, M., 2015. From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance. University of Oxford and Arabesque Partners.
- DeSimone, L.D. & Popoff, F., 2017. Eco-efficiency: The business link to sustainable development. MIT Press.
- Dyllick, T. & Muff, K., 2016. Clarifying the Meaning of Sustainable Business: Introducing a Typology From Business-as-Usual to True Business Sustainability. *Organization & Environment*, 29(2), pp.156–174.
- Eccles, R.G. & Krzus, M.P., 2018. The Nordic Model: An Analysis of Leading Practices in ESG Disclosure. *Nordic Journal of Business*, 67(2), pp.4-25.

- Eccles, R.G., Ioannou, I. & Serafeim, G., 2014. The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance. *Management Science*, 60(11), pp.2835–2857.
- European Commission, 2021. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Brussels: EU Commission.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N.M.P. & Hultink, E.J., 2017. The Circular Economy – A new sustainability paradigm?. *Journal of Cleaner Production*, 143, pp.757–768.
- Gereffi, G. & Fernandez-Stark, K., 2016. Global Value Chain Analysis: A Primer. Duke University Center on Globalization, Governance & Competitiveness.
- Ghosh, S. & Vinod, D., 2021. Green fintech: The sustainable face of financial technology. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(11), pp.1–17.
- GRI, 2021. Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting Standards 2021. Global Reporting Initiative.
- Hart, S.L. & Milstein, M.B., 2011. Creating sustainable value. *Academy of Management Executive*, 17(2), pp.56–67.
- Horner, R., 2017. Beyond facilitator? Global South firm expansion and the strategic coupling of local ties and international networks. *Economic Geography*, 93(4), pp.422–445.
- IFAC, 2022. Sustainability Information for Small Businesses: The Opportunity for Practitioners. [online] International Federation of Accountants. Available at: <https://www.ifac.org/>
- IFRS Foundation, 2022. ISSB delivers proposals that create comprehensive global baseline of sustainability disclosures. [online] Available at: <https://www.ifrs.org> [Accessed 10 Apr. 2025].
- IFRS Foundation, 2023. International Sustainability Standards Board - Sustainability Disclosure Standards. [online] Available at: <https://www.ifrs.org>

- IKEA, 2021. Sustainability Report FY20. [online] Available at: <https://www.ikea.com/gb/en/this-is-ikea/sustainable-everyday/> [Accessed 10 Apr. 2025].
- Kotsantonis, S. & Serafeim, G., 2019. Four Things No One Will Tell You About ESG Data. *Journal of Applied Corporate Finance*, 31(2), pp.50–58.
- KPMG, 2020. The Time Has Come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020. [online] Available at: <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/11/the-time-has-come-survey-of-sustainability-reporting.html>
- Lozano, R., 2015. A Holistic Perspective on Corporate Sustainability Drivers. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 22(1), pp.32-44.
- Lundan, S. & Cantwell, J., 2020. The local co-evolution of firms and governments in the Information Age. *Journal of International Business Studies*, 51(3), pp.404–410.
- OECD, 2017. Investing in Climate, Investing in Growth. Paris: OECD Publishing.
- OECD, 2021. Green Innovation in Technology and Finance. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Porter, M.E. & Kramer, M.R., 2011. Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), pp.62-77.
- PwC, 2021. The ESG Opportunity: How Companies Can Drive Value by Bridging the Trust Gap. PricewaterhouseCoopers.
- Schaltegger, S. & Burritt, R., 2010. Sustainability accounting for companies: Catchphrase or decision support for business leaders?. *Journal of World Business*, 45(4), pp.375-384.
- Schaltegger, S. & Burritt, R., 2010. Sustainability accounting for companies: Catchphrase or decision support for business leaders? *Journal of World Business*, 45(4), pp.375–384.

- Tapscott, D. & Tapscott, A., 2016. Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world. Penguin.
- TCFD, 2017. Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. [online] Available at: <https://www.fsb-tcfd.org/publications/> [Accessed 10 Apr. 2025].
- Tesla, 2022. Impact Report 2021. [online] Available at: [https://www.tesla.com/ns\\_videos/2021-tesla-impact-report.pdf](https://www.tesla.com/ns_videos/2021-tesla-impact-report.pdf) [Accessed 10 Apr. 2025].
- UNCTAD, 2020. World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic. United Nations Conference on Trade and Development.
- UNEP, 2020. Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain. United Nations Environment Programme.
- UNFCCC, 2015. The Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change.
- UNGC, 2015. United Nations Global Compact: The Ten Principles.
- UNGC, 2021. Communication on Progress Policy.
- Unilever, 2020. Unilever Sustainable Living Plan. [online] Available at: <https://www.unilever.com/sustainable-living/> [Accessed 10 Apr. 2025].
- Wamba, S.F., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G. & Gnanzou, D., 2015. How 'big data' can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study. International Journal of Production Economics, 165, pp.234-246.
- World Bank, 2020. Green Bond Impact Report. [online] Available at: <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/19/world-bank-green-bond-impact-report-2020>

World Bank, 2020. World Bank Annual Report 2020. [online]  
Available at:  
<https://www.worldbank.org/en/about/annual-report>  
[Accessed 10 Apr. 2025].

## TENTANG PENULIS



**Rafrini Amyulianthy, PhD., CSRS., AseanCPA.**

Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Akuntansi Universitas Pancasila. Lahir di Jakarta, 1 Juli 1983. Anak ke-dua dari tiga bersaudara. Pendidikan Sarjana (S1) Universitas Padjadjaran Prodi Akuntansi, Pendidikan Profesi (Ak) Universitas Trisakti Profesi Akuntan, Pendidikan Magister (S2) Universitas Indonesia Prodi Pascasarjana Ilmu Akuntansi dan Pendidikan Doktoral (S3) Universiti Teknologi Mara Prodi Financial Criminology. Selain menjadi dosen tetap, aktif di kegiatan organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik dan Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi Publik. Aktivitas lain juga menjadi asesor penjaminan mutu PT dari LAM-EMBA.

# BAB

# 6

## AKUNTANSI HIJAU: INTEGRASI KEBERLANJUTAN KE DALAM PELAPORAN KEUANGAN

Fadilla Purwitasari, S.E., M.Ak.  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

### A. Pendahuluan

Tema keberlanjutan menjadi salah satu trending topic saat ini. Tema ini mulai dikenal dunia ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai mengadopsi Tujuan Pembangunan Keberlanjutan atau Sustainable Developmet Goals (SDGs) di tahun 2015. SDGs sendiri merupakan ajakan kepada semua negara di dunia untuk melakukan aksi mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan semua orang di dunia dapat hidup damai dan makmur di tahun 2030 (United Nation Development Programme, 2025). Untuk mencapai tiga tujuan tersebut, United Nation Development Programme (UNDP) membuat rencana strategik untuk jangka waktu. Dalam rencana strategik tahun 2022-2025, UNDP memilih pembiayaan yang berkelanjutan sebagai salah satu fasilitator untuk mencapai SDGs (United Nations Development Programme, 2021). Pembiayaan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembiayaan yang tidak hanya memperhatikan faktor keuntungan dan resiko saja, namun juga faktor lain, misalnya dampak sosial (Alhasan dan Zeka, 2024). Karena lebih banyak faktor yang menjadi pertimbangan, maka lebih banyak pihak yang dapat menjadi investor, seperti: pemerintah, partner multilateral (agensi donor, pendanaan terkait iklim, dan lain-lain), institusi pendanaan berkelanjutan (World Bank Group, African Development Bank,

Afrexim Bank, Industrial Development Corporation, dan lain-lain), dan Non Governmental Organization (NGO) (Alhasan dan Zeka, 2024).

Bertambahnya pihak yang dapat menjadi investor dalam pendanaan perusahaan yang menggunakan keberlanjutan sebagai dasar pelaksanaan operasi mereka menimbulkan kebutuhan standar pelaporan keuangan yang sudah terintegrasi dengan konsep keberlanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah dan beberapa organisasi nirlaba memutuskan membuat standar pelaporan keuangan untuk perusahaan yang menyerap prinsip berkelanjutan ke dalam operasi mereka. Berikut akan disajikan beberapa strategi beserta contoh standar pelaporan keuangan yang telah memasukkan unsur keberlanjutan ke dalamnya.

## **B. Standar Pelaporan Keuangan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI)**

GRI adalah salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Standar ini telah dipakai lebih dari 73% dari 250 perusahaan terbesar di dunia dan 63% dari 100 perusahaan terbesar di 52 negara (KPMG, 2020). Terdapat tiga tema yang dibahas dalam standar GRI, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. tema yang sering menjadi dasar dalam integrasi keberlanjutan ke dalam pelaporan keuangan adalah tema ekonomi.

Dalam standar GRI (*Global Reporting Initiatives*, 2024) , tema ekonomi membahas tujuh topik, yaitu:

1. Kinerja Ekonomi (Standar GRI 201)
2. Keberadaan Pasar (Standar GRI 202)
3. Dampak Ekonomi Tidak Langsung (Standar GRI 203)
4. Praktik Pengadaan (Standar GRI 204)
5. Antikorupsi (Standar GRI 205)
6. Perilaku Antipersaingan (Standar GRI 206)
7. Pajak (Standar GRI 207)

Berikut akan disampaikan penjelasan ringkas mengenai setiap topik di tema ekonomi dalam standar GRI.

## **1. Standar GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016**

Pada standar GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 terdapat empat sub topik yang dapat digunakan sebagai standar penyajian laporan keuangan keberlanjutan. Berikut akan disampaikan penjelasan ringkas mengenai tiap sub topik

### **a. Pengungkapan 201-1: Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan**

Informasi mengenai proses pembuatan dan distribusi nilai ekonomi perusahaan memberikan indikasi dasar mengenai bagaimana perusahaan menghasilkan kemakmuran bagi para pemangku kepentingan mereka. Beberapa komponen penyusun nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan juga dapat menunjukkan profil ekonomi perusahaan, yang dapat digunakan untuk menormalisasi angka-angka kinerja lainnya. Jika disajikan berdasarkan negara penghasilnya, informasi nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dapat gambaran berguna mengenai bagaimana nilai ekonomi langsung berpengaruh pada ekonomi lokal sebuah negara.

Beberapa komponen keuangan yang dapat menjadi komponen penyusun nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan antara lain:

- 1) Figur pendapatan perusahaan, contoh penjualan bersih, penjualan aset tetap, pendapatan dari investasi keuangan, dan lain-lain.
- 2) Figur beban operasional, contoh: sewa properti, biaya lisensi, biaya fasilitas, biaya royalti, upah pegawai kontrak, biaya pelatihan karyawan, biaya baju pelindung bagi karyawan, dan lain-lain.
- 3) Figur gaji dan upah karyawan, contoh: gaji, tunjangan pajak, tunjangan pensiun, tunjangan tempat tinggal, dan lain-lain.
- 4) Figur bagi hasil kepada investor.

- 5) Figur pajak dan pembayaran lain kepada pemerintah.
- 6) Figur investasi yang benar-benar dikeluarkan kepada komunitas.

**b. Pengungkapan 201-2: Implikasi Finansial serta Risiko dan Peluang Lain Akibat dari Perubahan Iklim**

Perubahan iklim dapat memberikan resiko dan peluang bagi organisasi, investor mereka dan para pemangku kepentingan lainnya. Ketika pemerintah mulai mengatur aktivitas yang berkontribusi pada perubahan iklim, perusahaan yang bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung pada emisi akan menghadapi resiko dan peluang. Resiko dan peluang yang dihadapi dapat menaikkan biaya atau faktor lainnya yang berdampak pada daya saing perusahaan. Tetapi, pembatasan pada emisi gas rumah kaca juga dapat menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk membuat teknologi dan pasar baru. Kasus ini khusus ditujukan untuk perusahaan yang dapat menggunakan atau menghasilkan energi dan produk efisien energi secara lebih efektif.

Resiko dan peluang akibat perubahan iklim dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: fisik, regulasi, dan faktor lainnya. Beberapa contoh resiko dan peluang fisik akibat perubahan iklim adalah

- 1) Dampak dari badai yang lebih sering dan lebih besar.
- 2) Dampak dari perubahan level laut, temperatur yang mudah berubah, dan ketersediaan air.
- 3) Dampak pada para pekerja, misalnya penyakit dan sakit akibat suhu panas dan kebutuhan untuk relokasi tempat operasi.

Metode yang dapat digunakan untuk mengelola resiko dan peluang dapat berupa:

- 1) Penangkapan dan penyimpanan karbon
- 2) Pergantian bahan bakar yang dipakai
- 3) Penggunaan energi terbarukan dan memiliki jejak karbon yang lebih rendah

- 4) Peningkatan efisiensi energi
- 5) Pengurangan pada penyalaman, pelepasan, dan emisi fugitif
- 6) Mensertifikasi energi terbarukan
- 7) Penggunaan *carbon offset*

c. **Pengungkapan 201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya**

Ketika sebuah perusahaan memberikan jaminan pensiun kepada karyawannya, hal ini menunjukkan komitmen perusahaan bahwa karyawan yang mendapatkan jaminan pensiun telah mendapatkan jaminan kesejahteraan ekonomi secara jangka panjang. Komitmen perusahaan ini dapat menarik dan mempertahankan karyawan serta dapat mendukung perencanaan keuangan dan strategik jangka panjang dari pemberi kerja.

d. **Pengungkapan 201-4: Bantuan Keuangan dari Pemerintah**

Penyajian informasi bantuan keuangan dari pemerintah dapat menunjukkan besaran kontribusi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Bantuan keuangan yang signifikan, bila dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan dapat menunjukkan gambaran yang seimbang mengenai transaksi antara perusahaan dan pemerintah.

**2. Standar GRI 202: Keberadaan Pasar 2016**

Pada standar GRI 202: Keberadaan Pasar 2016 terdapat dua sub topik yang dapat digunakan sebagai standar penyajian laporan keuangan keberlanjutan. Berikut akan disampaikan penjelasan ringkas mengenai tiap sub topik

a. **Pengungkapan 202-1: Rasio Standar Upah Karyawan Pemula Berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap Upah Minimum Regional**

Informasi tentang rasio standar upah karyawan pemula terhadap upah minimum regional bermanfaat

untuk menunjukkan apakah sebagian karyawannya, dan pekerja yang melaksanakan aktivitas di perusahaan, telah dikompensasi sesuai dengan cara atau skala yang mendekati upah minimum yang ditentukan regulasi. Selain itu, informasi ini juga dapat menunjukkan daya saing perusahaan dan memberikan informasi yang relevan mengenai efek upah pada pasar tenaga kerja lokal. Informasi yang ditambahkan dengan perbandingan gender juga dapat menjadi alat ukur bagaimana organisasi menerapkan pemberian kesempatan yang sama di tempat kerja.

**b. Pengungkapan 202-2: Proporsi Manajemen Senior yang Berasal dari Masyarakat Setempat**

Pilihan perusahaan untuk menyertakan komunitas lokal dalam manajemen seniornya dapat menunjukkan keberadaaan pasar perusahaan yang positif di masyarakat, meningkatkan modal sumber daya manusia, meningkatkan keuntungan ekonomi bagi komunitas lokal, dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memahami kebutuhan masyarakat lokal.

**3. Standar GRI 2023: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016**

Pada standar GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 terdapat dua sub topik yang dapat digunakan sebagai standar penyajian laporan keuangan keberlanjutan. Berikut akan disampaikan penjelasan ringkas mengenai tiap sub topik.

**a. Pengungkapan 203-1: Investasi Infrastruktur dan Dukungan Layanan**

Penyajian pada sub topik ini ditujukan pada dampak investasi infrastruktur dan dukungan layanan yang dibangun oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingannya dan ekonomi. Dampak investasi infrastruktur dapat melebihi ruang lingkup operasi perusahaan itu sendiri dan untuk jangka waktu yang lebih lama. Investasi ini dapat berupa jalur transportasi, utilitas, fasilitas sosial komunitas, pusat kesejahteraan dan

kesehatan, dan pusat olahraga. Selain menjadi investasi bagi operasional perusahaan sendiri, investasi ini juga dapat menjadi ukuran kontribusi perusahaan pada ekonomi.

#### **b. Pengungkapan 203-2: Dampak Ekonomi Tidak Langsung Signifikan**

Penyajian pada sub topik ini meliputi berbagai hal yang termasuk dampak ekonomi tidak langsung perusahaan pada pemangku kepentingannya dan ekonomi. Beberapa contoh dampak yang dapat disajikan adalah:

- 1) Perkembangan ekonomi di area dengan tingkat kemiskinan tinggi, misalnya: perubahan pada jumlah orang ditanggung yang didukung oleh penghasilan dari satu pekerjaan.
- 2) Dampak ekonomi dari peningkatan atau penurunan kondisi lingkungan atau sosial, misalnya: perubahan pada pasar tenaga kerja pada area pertanian-pertanian kecil yang diubah menjadi perkebunan besar atau dampak ekonomi dari polusi.
- 3) Jumlah posisi tenaga kerja yang tersedia dalam rantai pasokan atau distribusi, misalnya: ketersediaan posisi tenaga kerja pada pemasok akibat pertumbuhan atau pencuitan ukuran perusahaan.
- 4) Dampak ekonomi akibat perubahan lokasi operasi atau aktivitas, misalnya: dampak ketersediaan posisi tenaga kerja kontrak pada lokasi aktivitas perusahaan di luar negeri.
- 5) Dampak ekonomi dari penggunaan produk atau jasa, misalnya: pertumbuhan ekonomi yang berasal dari penggunaan produk atau jasa tertentu.

#### **4. Standar 204: Praktik Pengadaan 2016**

Pada standar GRI 204: Praktik Pengadaan 2016 terdapat satu sub topik yang dapat digunakan sebagai standar penyajian laporan keuangan keberlanjutan. Berikut akan disampaikan penjelasan ringkas mengenai sub topik ini.

- Pengungkapan 204-1: Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal

Penyajian informasi mengenai dukungan kepada pemasok lokal dapat membuat organisasi menarik dukungan investasi tambahan kepada ekonomi lokal. Pasokan dari pihak lokal dapat menjadi strategi untuk memastikan pasokan, mendukung ekonomi lokal yang stabil, dan menjaga hubungan dengan komunitas.

## 5. Standar GRI 205: Antikorupsi 2016

Pada standar GRI 205: Antikorupsi 2016 terdapat tiga sub topik yang dapat digunakan sebagai standar penyajian laporan keuangan keberlanjutan. Berikut akan disampaikan penjelasan ringkas mengenai tiap sub topik.

- a. Pengungkapan 205-1: Operasi-Operasi yang Dinilai Memiliki Risiko Terkait Korupsi

Penyajian ini menunjukkan seberapa jauh penerapan penilaian resiko di dalam perusahaan. Penilaian resiko dapat membantu menilai potensi kejadian korupsi di dalam perusahaan maupun yang berkaitan dengan perusahaan dan membantu perusahaan mendesain aturan dan prosedur untuk melawan korupsi.

- b. Pengungkapan 205-2: Komunikasi dan Pelatihan terkait Aturan dan Prosedur Antikorupsi

Komunikasi dan pelatihan tentang antikorupsi dapat membangun kesadaran internal dan eksternal serta kapasitas yang dibutuhkan untuk melawan korupsi

- c. Pengungkapan 205-3: Insiden Korupsi yang Terbukti dan Tindakan yang Diambil

Penyajian mengenai informasi ini dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan perusahaan karena para pemangku kepentingan memiliki kepentingan atas terjadinya korupsi dan bagaimana perusahaan menyelesaikan kasus tersebut.

## **6. Standar GRI 206: Perilaku Antipersaingan 2016**

Pada standar GRI 206: Perilaku Antipersaingan 2016 terdapat satu sub topik yang dapat digunakan sebagai standar penyajian laporan keuangan keberlanjutan. Berikut akan disampaikan penjelasan ringkas mengenai sub topik ini.

- Pengungkapan 206-1: Langkah-Langkah Hukum untuk Perilaku Antipersaingan, Praktik Antipakat, dan Monopoli

Perilaku antipersaingan, praktik antipakat, dan monopoli yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempengaruhi pilihan konsumen, penentuan harga, dan faktor lainnya yang berkaitan dengan pasar yang efisien. Pembuatan aturan yang diberlakukan di berbagai negara bertujuan untuk mengendalikan atau mencegah monopoli, dengan asumsi bahwa kompetisi antara perusahaan juga mempromosikan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Aksi legal yang dihadapi perusahaan menunjukkan bahwa telah terjadi situasi dimana aksi pasar atau status perusahaan telah mencapai titik yang menyebabkan kekhawatiran oleh pihak ketiga. Keputusan hukum yang berasal dari situasi tersebut dapat menciptakan resiko dimana mungkin terjadi gangguan pada aktivitas pasar yang berkaitan dengan perusahaan beserta langkah-langkah penghukuman yang diterima perusahaan.

## **7. Standar GRI 207: Pajak 2019**

Pada standar GRI 207: Pajak 2019 terdapat empat sub topik yang dapat digunakan sebagai standar penyajian laporan keuangan keberlanjutan. Berikut akan disampaikan penjelasan ringkas mengenai tiap sub topik.

### **a. Pengungkapan 207-1: Pendekatan Terhadap Pajak**

Penyajian mengenai pendekatan pajak yang dilakukan perusahaan menunjukkan bagaimana perusahaan menyeimbangkan antara kepatuhan pajak dengan ekspektasi yang berkaitan dengan aktivitas dan etika bisnis, masyarakat, dan pembangunan

keberlanjutan. Informasi mengenai pendekatan terhadap pajak dapat berisi tentang prinsip pajak perusahaan, sikap perusahaan terhadap perencanaan pajak, besaran resiko yang berani ditanggung perusahaan, dan pendekatan perusahaan kepada otoritas perpajakan.

**b. Pengungkapan 207-2: Tata Kelola, Pengontrolan, dan Manajemen Resiko Pajak**

Penyajian yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tata kelola, pengontrolan, dan manajemen resiko berkaitan dengan pajak dapat menjadi indikasi bahwa pendekatan terhadap pajak dan strategi pajak yang dilaporkan telah tertanam dengan baik dalam perusahaan dan telah dilakukan pemantauan secara efektif terhadap kewajiban untuk mematuhi. Penyajian mengenai hal ini dapat meyakinkan para pemangku kepentingan perusahaan kembali bahwa praktik yang dilakukan perusahaan telah merefleksikan pernyataan yang dibuat mengenai pendekatan terhadap pajak dalam dokumen strategi pajak perusahaan atau dokumen lainnya.

**c. Pengungkapan 207-3: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengelolaan Kepedulian yang Berkaitan dengan Pajak**

Praktik pajak yang dilakukan perusahaan merupakan topik yang menarik banyak pemangku kepentingan. Pendekatan yang dilakukan perusahaan untuk melibatkan pemangku kepentingan memiliki potensi untuk mempengaruhi reputasi dan tingkat kepercayaan kepada perusahaan. Pendekatan ini termasuk pada bagaimana perusahaan melibatkan otoritas pajak pada pengembangan sistem, perundangan-undangan, dan administrasi pajak.

Pelibatan pemangku kepentingan dapat membuat perusahaan memahami perkembangan ekspektasi mengenai pajak. Hal ini dapat memberikan pandangan bagi organisasi mengenai potensi perubahan peraturan di masa datang dan membuat perusahaan dapat mengelola

resiko dan dampaknya perubahan tersebut dengan lebih baik.

**d. Pengungkapan 207-4: Laporan per Negara**

Penyajian ini dapat berupa laporan keuangan, ekonomi, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pajak di tiap yurisdiksi dimana perusahaan beroperasi.

**C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan**

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK - RI) menerbitkan peraturan yang berfungsi untuk mengatur penerapan praktik pelaporan keuangan berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Aturan ini mengatur mengenai bagaimana format Laporan Keberlanjutan yang wajib diterbitkan oleh perusahaan yang ditunjuk. OJK - RI mewajibkan perusahaan untuk membuat Laporan Keberlanjutan yang terpisah dari laporan tahunan dan memuat informasi paling sedikit:

1. Penjelasan strategi keberlanjutan perusahaan.
2. Ikhtisar aspek keberlanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
3. Profil singkat perusahaan.
4. Penjelasan direksi mengenai aktivitas keberlanjutan perusahaan.
5. Tata kelola keberlanjutan yang diterapkan perusahaan.
6. Kinerja keberlanjutan dari perusahaan.
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen mengenai benarnya akktivitas keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan, jika ada.
8. Lembar umpan balik bagi pembaca, jika ada.
9. Tanggapan perusahaan mengenai umpan balik laporan keberlanjutan tahun sebelumnya.

## **D. Simpulan**

Topik keberlanjutan merupakan topik yang trendi sekarang ini. Dimulai dari adopsi SDGs oleh PBB di tahun 2015, topik keberlanjutan ini kemudian menyebar ke berbagai hal, termasuk perubahan pada standar pelaporan keuangan perusahaan. Berbagai pihak kemudian mulai mendukung perubahan ini yang kemudian melahirkan berbagai standar pelaporan keuangan berkelanjutan, seperti standar GRI tentang pelaporan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial serta standar OJK tentang pelaporan keberlanjutan oleh perusahaan. Standar GRI tentang pelaporan keberlanjutan aspek ekonomi diatur dalam standar GRI 201 hingga 207, sedangkan standar pelaporan keuangan OJK diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhasan, A.L. dan Zeka, B. (2024) *Development Finance: How It Works, Where It Goes, Why It's Needed.* Dapat diakses di: <https://theconversation.com/development-finance-how-it-works-where-it-goes-why-its-needed-227085> (Diakses tanggal 10 April 2025)
- Global Reporting Initiatives. (2024) Consolidated Set of the GRI Standards.
- KPMG. (2020). *The Time Has Come: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020.* Dapat diakses di: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/lk/pdf/2020/12/the-time-has-come-survey-of-sustainability-reporting.pdf> (Diakses tanggal; 15 April 2025)
- United Nation Development Programme. (2021) *United Nation Development Programme Strategic Plan 2022-2025.*
- United Nation Development Programme. (2025) *What are the Sustainable Development Goals?*

## TENTANG PENULIS



**Fadilla Purwitasari, S.E., M.Ak.**

Penulis lahir di Yogyakarta tanggal 24 Desember 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Akuntansi di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2011 dan S2 Program Magister Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 2017. Penulis menekuni akuntansi keperilakuan. Motivasi menulis bab ini adalah untuk menambah karya tulis dalam bidang akuntansi keperilakuan, khususnya akuntansi keberlanjutan.

# BAB

# 7

## METODE AKUNTANSI HIJAU DALAM PRAKTIK BISNIS

Dr. Nurmala Ahmar, M.Si., Ak., CA.  
Universitas Pancasila

### A. Pendahuluan

Keberlanjutan bisnis kini menjadi tuntutan global akibat tekanan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang mendorong perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab. Jika praktik bisnis tidak memperhatikan keberlanjutan, dampaknya bisa berupa kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, serta ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Elkington (1998) memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* (TBL), yang mencakup aspek manusia (People), lingkungan (Planet), dan keuntungan (Profit), menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, bukan hanya aspek finansial. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen serta regulasi pemerintah terkait keberlanjutan, perusahaan yang tidak beradaptasi berisiko mengalami penurunan reputasi, terkena sanksi hukum, atau bahkan kehilangan nilai pasar (Porter & Kramer, 2011).

Di era global saat ini, keberlanjutan sangat penting bagi perusahaan yang bersaing. Dalam jangka panjang, bisnis yang mengutamakan keberlanjutan akan memperoleh keuntungan seperti operasi yang lebih efisien, peningkatan kepuasan pelanggan, dan kemudahan mendapatkan pendanaan hijau. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eccles *et al.* (2014), perusahaan yang menerapkan strategi keberlanjutan

menunjukkan peningkatan kinerja keuangan dalam jangka panjang dibandingkan perusahaan yang mengabaikan faktor lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, menerapkan strategi keberlanjutan bukan sekadar kewajiban moral tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjamin pertumbuhan dan keberlanjutan usaha dalam sistem ekonomi yang semakin kompleks.

Akuntansi memegang peranan penting dalam mendukung kebijakan lingkungan dengan menyediakan sistem pelaporan yang transparan dan akurat terkait dampak bisnis terhadap lingkungan. *Environmental Accounting* memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan biaya serta manfaat dari kebijakan lingkungan yang diterapkan. Menurut Rahman, Rana, dan Zhu (2025), penerapan akuntansi keberlanjutan dalam laporan keuangan meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan emisi karbon. Dengan adanya pelaporan ini, perusahaan dapat lebih mudah menyesuaikan strategi mereka dengan regulasi lingkungan serta memenuhi ekspektasi pasar.

Selain itu, akuntansi berperan dalam pengambilan keputusan investasi berkelanjutan melalui metode *Life Cycle Costing* (LCC) dan *Environmental Management Accounting* (EMA). Studi oleh Busato, Severino, dan Varlese (2025) mengungkapkan bahwa pengintegrasian akuntansi lingkungan dalam kebijakan perusahaan dapat mendorong inovasi dalam energi terbarukan serta pengelolaan limbah, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dalam jangka panjang.

Lebih jauh, akuntansi juga membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan melalui penerapan standar seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), yang berfungsi untuk mengukur dan mengaudit kebijakan lingkungan perusahaan. Penelitian oleh Prabowo dan Munthazah (2025) menunjukkan bahwa perusahaan yang secara aktif melaporkan keberlanjutan memiliki akses lebih mudah ke pendanaan hijau serta mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dengan demikian,

akuntansi tidak hanya menjadi alat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga strategi utama dalam meningkatkan daya saing di era ekonomi hijau.

## B. Konsep Dasar Akuntansi Hijau

### 1. Definisi Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau adalah pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam pencatatan, pelaporan, serta proses pengambilan keputusan finansial suatu perusahaan. Harjivanbhai dan Dave (2024) menjelaskan bahwa akuntansi hijau berfokus pada evaluasi serta pelaporan dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan, termasuk penggunaan sumber daya alam, emisi karbon, serta biaya yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Sistem ini membantu perusahaan dalam menilai efektivitas program keberlanjutan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelaporan lingkungan.

Implementasi akuntansi hijau mencakup berbagai metode, seperti *Environmental Management Accounting* (EMA) dan *Life Cycle Costing* (LCC), yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya lingkungan secara lebih akurat. Menurut Zhang (2024), penerapan akuntansi hijau dalam laporan keuangan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat. Pendekatan ini juga mendorong perusahaan untuk menyusun strategi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan, sehingga memperkuat daya saing mereka dalam ekonomi hijau.

Selain itu, akuntansi hijau memainkan peran penting dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Stoyanova *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan hijau serta mengurangi risiko hukum akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan. Oleh karena

itu, akuntansi hijau tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## 2. Perbedaan antara Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Hijau

Akuntansi konvensional dan akuntansi hijau memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan, tujuan, dan sistem pelaporan. Akuntansi konvensional berfokus pada pencatatan serta pelaporan transaksi keuangan guna menggambarkan kinerja ekonomi perusahaan berdasarkan standar IFRS dan GAAP, dengan tujuan utama menyediakan informasi finansial yang akurat bagi investor. Sebaliknya, akuntansi hijau memiliki cakupan yang lebih luas karena mengintegrasikan faktor lingkungan dalam laporan keuangan untuk meningkatkan transparansi terhadap dampak ekologis serta mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Dalam hal pengukuran dan pelaporan, akuntansi konvensional hanya mencatat aspek keuangan seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara itu, akuntansi hijau menerapkan pendekatan tambahan, seperti *Environmental Cost Accounting* dan *Carbon Accounting*, guna mengukur dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Pelaporan ini mengikuti standar internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) agar lebih sistematis dan komprehensif.

Dari sisi regulasi, akuntansi konvensional berada di bawah pengawasan otoritas keuangan nasional, dengan fokus utama pada kepatuhan pajak serta audit. Sebaliknya, akuntansi hijau mendapatkan dukungan dari regulasi global seperti *EU Green Taxonomy*, yang wajibkan perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan dalam laporan keuangan mereka.

Meskipun akuntansi konvensional lebih praktis karena berorientasi pada profit dan kepatuhan pajak, akuntansi hijau menawarkan manfaat strategis jangka panjang, seperti peningkatan reputasi perusahaan serta kemudahan akses ke pendanaan hijau. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti biaya penerapan yang tinggi dan belum adanya regulasi yang seragam.

Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, akuntansi hijau semakin menjadi elemen krusial dalam dunia bisnis modern. Perusahaan yang menerapkannya tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan daya saing di era keberlanjutan, menjadikannya strategi yang tepat untuk bertahan di pasar global.

### **3. Pilar Utama dalam Akuntansi Hijau (Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan)**

Akuntansi hijau didasarkan pada konsep Triple Bottom Line (TBL), yang mencakup tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari sisi keuangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. John Elkington (1997) memperkenalkan model berkelanjutan ini sebagai pendekatan bisnis yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam sistem pelaporan akuntansi.

#### **a. Aspek Ekonomi (Profit)**

Dari sisi ekonomi, akuntansi hijau berfokus pada pencapaian keuntungan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau tidak hanya mencatat laba dan rugi, tetapi juga memperhitungkan biaya lingkungan dalam laporan keuangan mereka. Contohnya termasuk pengeluaran untuk program daur ulang, pengurangan emisi karbon, serta investasi dalam teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi bisnis. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi dapat selaras

dengan upaya pelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi keberlanjutan (Ruiz-Arranz *et al.*, 2025).

**b. Aspek Sosial (People)**

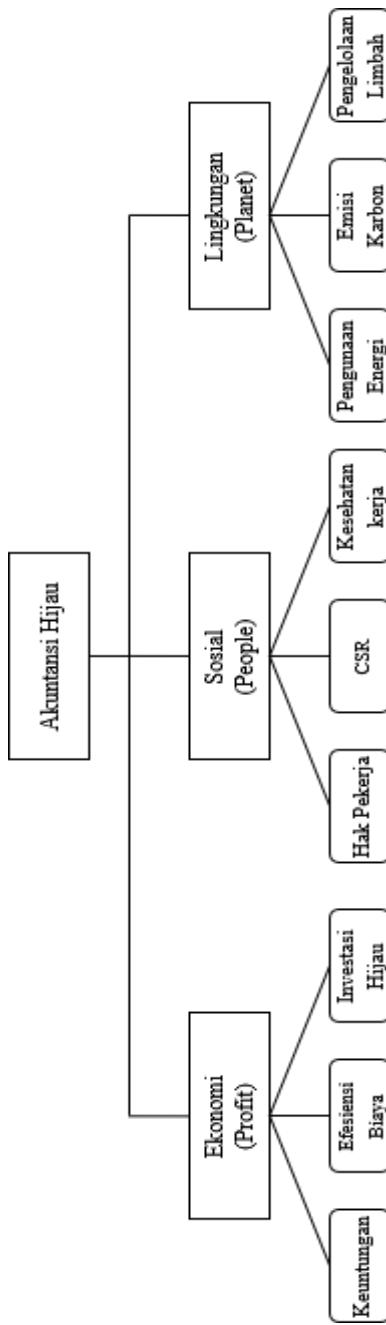
Aspek sosial dalam akuntansi hijau berfokus pada dampak bisnis terhadap karyawan dan masyarakat luas. Hal ini mencakup evaluasi kesejahteraan tenaga kerja, hak asasi manusia (HAM), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta hubungan dengan komunitas setempat. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial akan mencatat dan melaporkan upaya mereka dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta mendukung program sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat (Schleicher & Soesbergen, 2025). Selain itu, transparansi dalam praktik ketenagakerjaan menjadi bagian dari pelaporan keberlanjutan berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI).

**c. Aspek Lingkungan (Planet)**

Lingkungan menjadi elemen utama dalam akuntansi hijau, di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengurangi dampak ekologis dari aktivitas mereka. Ini mencakup pelaporan terkait penggunaan sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah industri, serta jejak karbon. Akuntansi hijau memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan mengungkapkan data lingkungan secara sistematis, menggunakan metode seperti Environmental Cost Accounting (ECA) dan Carbon Accounting (Kim, 2025). Dengan menerapkan strategi berkelanjutan seperti efisiensi energi, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, dan manajemen limbah yang bertanggung jawab, perusahaan dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memenuhi regulasi internasional seperti EU Green Taxonomy.

## **Bagan Pilar Utama Akuntansi Hijau**

Berikut adalah bagan yang menggambarkan tiga pilar utama dalam akuntansi hijau:  
Triple Bottom Line dalam Akuntansi Hijau



Dalam akuntansi ramah lingkungan, ada tiga komponen penting yang saling terkait: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi berusaha untuk mempertahankan keuntungan usaha untuk jangka panjang, dan aspek sosial memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan karyawan. Organisasi bisnis dapat menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab dan berkontribusi pada kemajuan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Triple Bottom Line.

### C. Kerangka Metodologi Akuntansi Hijau: Prinsip-Prinsip Dasar dalam Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau adalah metode akuntansi yang memasukkan elemen lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan, pencatatan, dan pelaporan perusahaan. Metodologi akuntansi hijau menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan pengukuran, analisis, dan pemanfaatan data lingkungan dalam perencanaan strategi bisnis. Kerangka kerja tersebut terdiri dari beberapa prinsip dasar yang memastikan bahwa pelaporan berkelanjutan dilakukan dengan transparan, tepat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 1. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability Principle*)

Konsep ini menekankan bahwa keberlanjutan adalah elemen utama dalam strategi dan sistem akuntansi perusahaan. Akuntansi hijau bertujuan untuk menilai dampak lingkungan dari aktivitas bisnis serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan bertanggung jawab. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *Triple Bottom Line* (profit, people, planet), yang menilai keberhasilan perusahaan tidak hanya dari segi keuntungan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan (Schleicher & Soesbergen, 2025).

#### a. Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountability Principle*)

Perusahaan diwajibkan menyajikan informasi terkait lingkungan secara transparan dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Keterbukaan ini

memungkinkan pemangku kepentingan memahami dampak keputusan bisnis terhadap lingkungan. Organisasi seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) telah mengembangkan pedoman untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang dapat diaudit secara independen (Ruiz-Arranz *et al.*, 2025).

**b. Prinsip Akuntansi Biaya Lingkungan (Environmental Cost Accounting Principle)**

Seluruh biaya yang terkait dengan dampak lingkungan harus dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya ini mencakup:

- 1) Pengeluaran untuk pencegahan dan pengendalian polusi, seperti investasi dalam teknologi ramah lingkungan.
- 2) Biaya pemulihan dan restorasi lingkungan, seperti reklamasi lahan bekas tambang.
- 3) Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, termasuk pajak karbon dan biaya kompensasi emisi.

Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan dapat menghindari denda akibat pelanggaran lingkungan serta meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi dampak ekologis mereka (Kim, 2025).

**c. Prinsip Pengukuran Dampak dan Kinerja Lingkungan (Performance and Impact Measurement Principle)**

Perusahaan perlu menerapkan sistem berbasis data yang objektif untuk menilai kinerja lingkungan mereka. Beberapa metode yang umum digunakan dalam akuntansi hijau meliputi:

- 1) *Life Cycle Costing* (LCC): Menghitung total biaya lingkungan sepanjang siklus hidup produk atau jasa.
- 2) *Carbon Accounting*: Mengukur jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan bisnis.

- 3) *Material Flow Cost Accounting* (MFCA): Mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan baku guna mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas.

Penerapan metode ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi sumber daya serta mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang (Babaeian *et al.*, 2025).

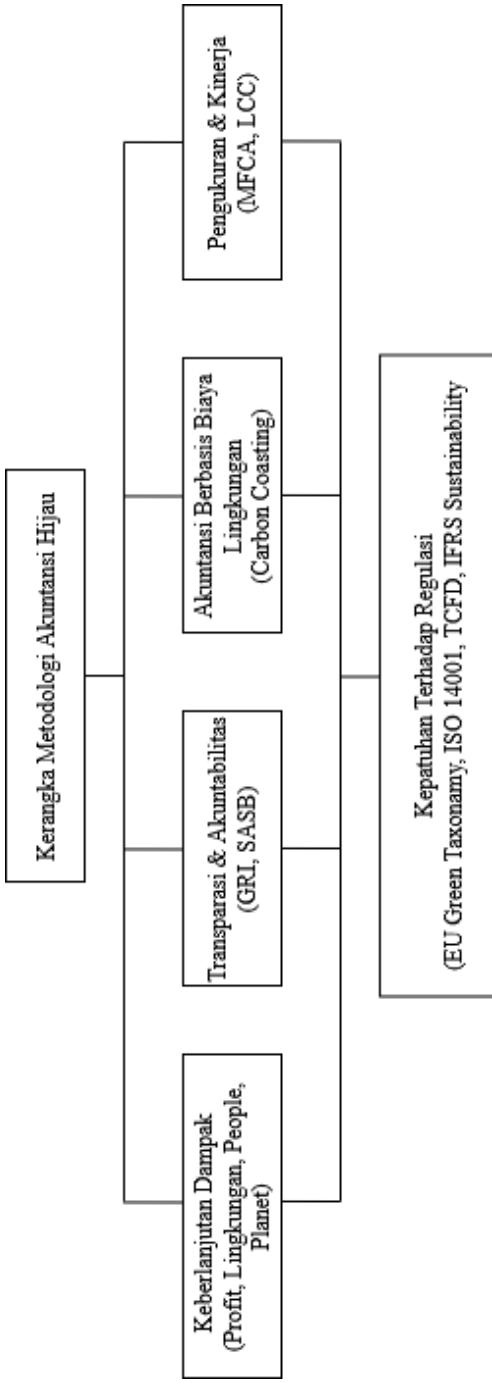
**d. Prinsip Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Berkelanjutan (Regulatory Compliance Principle)**

Prinsip ini menegaskan pentingnya mematuhi berbagai regulasi dan standar keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga internasional. Beberapa regulasi yang umum diterapkan dalam akuntansi hijau meliputi:

- 1) *EU Green Taxonomy*: Peraturan Uni Eropa yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan dalam laporan keuangan mereka.
- 2) *ISO 14001*: Standar internasional dalam sistem manajemen lingkungan.
- 3) *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures* (TCFD): Pedoman bagi perusahaan dalam mengungkapkan risiko terkait perubahan iklim.

Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan dapat menghindari risiko hukum dan denda, sekaligus membangun kepercayaan dengan investor serta pemangku kepentingan lainnya (Cetrulo *et al.*, 2025).

Bagan Kerangka Metodologi Akuntansi Hijau



Metodologi akuntansi hijau bertujuan untuk memastikan bahwa informasi finansial dapat dengan akurat dan terbuka menggambarkan dampak perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi kompetitif, dan bertahan dalam jangka panjang dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, keterbukaan, perhitungan biaya lingkungan, dan pemenuhan aturan. Perusahaan yang menerapkan asas-asas ini tidak hanya membantu mereka mematuhi peraturan keberlanjutan, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi baru dengan menghemat sumber daya dan mengurangi risiko lingkungan.

## **2. Standar dan Regulasi Terkait dalam Akuntansi Hijau (GRI, IFRS, ISO 14000, dll.)**

Berbagai standar dan regulasi internasional mendukung penerapan akuntansi hijau guna memastikan transparansi, ketepatan, dan keselarasan pelaporan informasi lingkungan dengan prinsip keberlanjutan. Panduan ini membantu perusahaan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam laporan keuangan mereka serta mempermudah pemangku kepentingan dalam menilai dampak lingkungan dari aktivitas bisnis. Beberapa standar dan regulasi utama dalam akuntansi hijau mencakup *Global Reporting Initiative* (GRI), *IFRS Sustainability*, *ISO 14000*, dan *EU Green Taxonomy*.

### **a. Global Reporting Initiative (GRI)**

GRI merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang telah diadopsi secara luas di tingkat global. Standar ini memberikan pedoman bagi perusahaan dalam melaporkan dampak operasional mereka terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. GRI mencakup beberapa komponen utama, seperti:

- 1) GRI 101: Foundation – Prinsip dasar dan pedoman umum dalam pelaporan keberlanjutan.
- 2) GRI 102: General Disclosures – Informasi mendasar perusahaan serta metode pelaporan yang digunakan.

- 3) GRI 103: Management Approach - Strategi perusahaan dalam mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- 4) GRI 300 (Lingkungan) - Aspek keberlanjutan yang mencakup konsumsi energi, emisi karbon, serta manajemen limbah.

Melalui penerapan GRI, perusahaan dapat menyusun laporan keberlanjutan yang lebih sistematis dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain, sehingga meningkatkan transparansi serta akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan (GRI, 2025).

**b. International Financial Reporting Standards (IFRS) Sustainability**

IFRS, yang dikembangkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB), kini memiliki standar keberlanjutan melalui *IFRS Sustainability Disclosure Standards* yang dirancang oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB). Standar ini bertujuan untuk menghubungkan pelaporan keuangan tradisional dengan informasi terkait keberlanjutan.

Fokus utama *IFRS Sustainability* meliputi:

- 1) Dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan, termasuk emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya alam.
- 2) Risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi kinerja keuangan.
- 3) Kesesuaian kebijakan perusahaan dengan target keberlanjutan global, seperti yang ditetapkan dalam Kesepakatan Paris.

Dengan mengadopsi standar ini, perusahaan dapat menyediakan informasi keberlanjutan yang bernilai bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya (IFRS Foundation, 2025).

### c. ISO 14000 – Sistem Manajemen Lingkungan

ISO 14000 adalah serangkaian standar internasional yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO) untuk membantu organisasi dalam mengelola dampak lingkungan mereka. Standar utamanya, ISO 14001, menetapkan persyaratan bagi *Environmental Management System* (EMS).

Komponen utama ISO 14001 meliputi:

- 1) Identifikasi serta evaluasi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis.
- 2) Perencanaan dan implementasi kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
- 3) Pemantauan serta pengukuran kinerja lingkungan berdasarkan target yang telah ditetapkan.
- 4) Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan di tingkat nasional maupun internasional.

Sertifikasi ISO 14001 menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki sistem manajemen lingkungan yang terdokumentasi dan efektif. Selain itu, standar ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta mengurangi risiko hukum akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan (ISO, 2025).

### d. EU Green Taxonomy

Uni Eropa mengembangkan *EU Green Taxonomy* sebagai sistem klasifikasi yang membantu investor dalam mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang memenuhi standar keberlanjutan lingkungan. Regulasi ini bertujuan untuk:

- 1) Menentukan kriteria ilmiah guna mengevaluasi apakah suatu kegiatan ekonomi berkontribusi terhadap tujuan lingkungan.
- 2) Meningkatkan transparansi dalam investasi hijau serta mencegah praktik *greenwashing* (klaim keberlanjutan yang menyesatkan).
- 3) Mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

EU Green Taxonomy berfokus pada enam tujuan utama:

- 1) Pengurangan emisi gas rumah kaca (*mitigasi perubahan iklim*).
- 2) Adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi dampak lingkungan.
- 3) Perlindungan sumber daya air dan laut.
- 4) Transisi ke ekonomi sirkular, termasuk pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang.
- 5) Pencegahan polusi.
- 6) Perlindungan biodiversitas dan ekosistem.

Regulasi ini mewajibkan perusahaan serta investor untuk melaporkan sejauh mana aktivitas ekonomi mereka sejalan dengan klasifikasi keberlanjutan, sehingga mendukung pengambilan keputusan dalam investasi hijau (European Commission, 2025).

**e. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)**

TCFD adalah kerangka pelaporan yang dikembangkan oleh *Financial Stability Board* (FSB) untuk membantu perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang yang berkaitan dengan perubahan iklim. Fokus utama TCFD mencakup:

- 1) Pengungkapan risiko fisik dan transisi yang disebabkan oleh perubahan iklim.
- 2) Strategi bisnis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
- 3) Dampak perubahan iklim terhadap laporan keuangan perusahaan.

TCFD menjadi salah satu standar penting dalam akuntansi hijau karena semakin banyak regulator dan investor yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan risiko iklim secara transparan dalam laporan tahunan mereka (TCFD, 2025).

## **Kesimpulan**

Standar dan regulasi seperti *GRI*, *IFRS Sustainability*, *ISO 14000*, *EU Green Taxonomy*, dan *TCFD* berperan dalam membentuk sistem akuntansi hijau yang lebih terstruktur dan transparan. Setiap standar memiliki fungsinya masing-masing, mulai dari pelaporan keberlanjutan (*GRI*), integrasi informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan (*IFRS Sustainability*), pengelolaan lingkungan melalui sistem manajemen (*ISO 14000*), hingga klasifikasi investasi berkelanjutan (*EU Green Taxonomy*).

Dengan menerapkan standar-standar ini, perusahaan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memperkuat daya saing mereka dalam era ekonomi hijau dan berkelanjutan.

### **3. Pengukuran dan Pelaporan Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan Perusahaan**

Pengukuran dan pelaporan keberlanjutan dalam laporan keuangan perusahaan semakin krusial seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Tujuan utama pelaporan keberlanjutan adalah untuk memastikan transparansi terkait bagaimana perusahaan mengelola aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*ESG - Environmental, Social, and Governance*). Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau menggunakan berbagai standar internasional untuk menilai dan melaporkan dampak keberlanjutan mereka, seperti *Global Reporting Initiative* (*GRI*), *IFRS Sustainability Disclosure Standards*, dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (*TCFD*) (Khumalo & Lekhanya, 2025).

Dalam laporan keuangan, pengukuran keberlanjutan dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya *Carbon Accounting*, yang berfungsi untuk mengukur jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode lain yang sering diterapkan adalah *Life Cycle Costing* (*LCC*), yang

menghitung dampak lingkungan sepanjang siklus hidup suatu produk, serta *Material Flow Cost Accounting* (MFCA), yang mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan baku dan pengelolaan limbah (Zhang, 2025). Dengan menerapkan metode ini, perusahaan dapat lebih memahami dampak lingkungan dari operasional mereka dan merancang strategi yang lebih efektif untuk mengurangi emisi serta limbah.

Dalam aspek pelaporan, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan dalam laporan tahunan mereka. Standar GRI menyediakan panduan bagi perusahaan untuk melaporkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh. Selain itu, *IFRS Sustainability Disclosure Standards* yang dikembangkan oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB) memungkinkan informasi keberlanjutan terintegrasi dengan laporan keuangan tradisional agar lebih relevan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, standar TCFD membantu perusahaan mengidentifikasi serta mengungkapkan risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim (Kaleem *et al.*, 2025).

Saat ini, banyak perusahaan besar mulai mengadopsi laporan keberlanjutan yang mencakup informasi keuangan dan non-keuangan. Pendekatan ini tidak hanya menarik investor yang peduli terhadap keberlanjutan, tetapi juga membantu perusahaan mengurangi risiko hukum akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Beberapa regulator, seperti Uni Eropa melalui *EU Green Taxonomy*, bahkan mewajibkan perusahaan untuk melaporkan sejauh mana aktivitas ekonomi mereka berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan, seperti mitigasi perubahan iklim dan efisiensi energi (Siswanti & Wijayanti, 2025).

Dengan meningkatnya permintaan terhadap transparansi keberlanjutan, laporan keuangan perusahaan kini tidak lagi hanya berfokus pada aspek keuangan tradisional. Keberlanjutan telah menjadi elemen penting

dalam menilai kinerja perusahaan, dan penerapan standar pelaporan yang tepat dapat membantu perusahaan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan reputasi, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi aspek keberlanjutan dalam laporan keuangan bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas untuk keberlanjutan jangka panjang.

#### **D. Penerapan Akuntansi Hijau dalam Praktik Bisnis: Contoh Studi Kasus**

Banyak perusahaan di berbagai belahan dunia mulai menerapkan akuntansi hijau sebagai bagian dari strategi keberlanjutan mereka. Salah satu contoh yang menarik adalah implementasi akuntansi hijau di sektor manufaktur di China, di mana perusahaan telah mengintegrasikan prinsip *Environmental Management Accounting* (EMA) dan *Life Cycle Costing* (LCC) dalam operasional mereka (Rahman *et al.*, 2025).

##### **1. Studi Kasus: Implementasi Akuntansi Hijau di Perusahaan Manufaktur di China**

Sebuah penelitian oleh Rahman *et al.* (2025) mengevaluasi dampak implementasi akuntansi hijau terhadap kinerja finansial dan keberlanjutan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa saham China. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini mengadopsi berbagai strategi guna mengurangi emisi karbon serta meningkatkan efisiensi energi, antara lain:

- a. Menggunakan *Material Flow Cost Accounting* (MFCA) untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku sekaligus mengurangi limbah produksi.
- b. Menerapkan *Carbon Accounting* guna memantau serta melaporkan jejak emisi gas rumah kaca dari aktivitas operasional.
- c. Berinvestasi dalam energi terbarukan, seperti pemasangan panel surya dan pengembangan sistem daur ulang air guna mengurangi konsumsi sumber daya alam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau mengalami peningkatan efisiensi biaya operasional sebesar 12% dan penurunan emisi karbon hingga 18% dalam tiga tahun sejak penerapannya. Selain itu, perusahaan ini memperoleh peringkat ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang lebih tinggi, sehingga menarik lebih banyak investor yang fokus pada keberlanjutan.

## 2. Studi Kasus: Implementasi Akuntansi Hijau di Perusahaan Teknologi

Penelitian lainnya oleh Rahman *et al.* (2025) meninjau perusahaan teknologi berbasis di Amerika Serikat yang telah menerapkan strategi akuntansi hijau dengan mengadopsi standar *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam pelaporan keberlanjutan mereka. Perusahaan ini menerapkan beberapa langkah berikut:

- a. Mengungkapkan konsumsi energi serta pengelolaan limbah elektronik secara transparan dalam laporan tahunan mereka.
- b. Menggunakan *Life Cycle Costing* (LCC) untuk mengevaluasi dampak lingkungan produk mereka dari tahap desain hingga proses daur ulang.
- c. Menerapkan kebijakan pajak karbon internal untuk mengintegrasikan biaya lingkungan akibat emisi gas rumah kaca ke dalam perhitungan keuangan mereka.

Hasil implementasi ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memperkuat reputasinya di pasar global, memperoleh sertifikasi ISO 14001, serta menarik lebih banyak pelanggan yang memiliki kedulian terhadap lingkungan.

Penerapan akuntansi hijau dalam dunia bisnis terbukti memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memanfaatkan metode seperti *Environmental Management Accounting* (EMA), *Carbon Accounting*, serta *Life Cycle Costing* (LCC), perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi dampak

ekologis, serta memperkuat daya tarik mereka di mata investor dan konsumen. Studi kasus ini mengonfirmasi bahwa akuntansi hijau bukan sekadar tren, melainkan strategi bisnis berkelanjutan yang memberikan keuntungan jangka panjang.

### **3. Strategi Bisnis Berkelanjutan yang Didukung oleh Akuntansi Hijau**

Akuntansi hijau berperan penting dalam mendukung strategi bisnis berkelanjutan dengan membantu perusahaan mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan serta pelaporan keuangan mereka. Penerapan akuntansi hijau tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya lingkungan, serta memperkuat citra perusahaan di mata investor dan konsumen (Rana, Rahman, & Öhman, 2025). Berikut adalah beberapa strategi bisnis berkelanjutan yang dapat diperkuat dengan akuntansi hijau.

#### **a. Mengurangi Jejak Karbon dengan Carbon Accounting**

Salah satu strategi utama dalam akuntansi hijau adalah pengukuran serta pengelolaan emisi karbon melalui *Carbon Accounting*. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi sumber emisi terbesar mereka dan menerapkan langkah-langkah pengurangan dampak lingkungan. Sebagai contoh, perusahaan di sektor energi dan manufaktur menerapkan sistem pajak karbon internal untuk meningkatkan efisiensi energi dan beralih ke energi terbarukan. Implementasi *Carbon Accounting* telah membantu banyak perusahaan menyesuaikan diri dengan regulasi lingkungan global seperti *EU Green Taxonomy* dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards* (Rahman, Rana, & Zhu, 2025).

## **b. Penerapan Ekonomi Sirkular dan Optimalisasi Penggunaan Material**

Akuntansi hijau juga mendukung strategi ekonomi sirkular, yang mendorong perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya melalui daur ulang limbah, peningkatan efisiensi bahan baku, serta memperpanjang umur produk. Dalam hal ini, *Material Flow Cost Accounting* (MFCA) berfungsi untuk mengidentifikasi area inefisiensi dalam penggunaan bahan dan energi. Studi oleh Mawardi, Noor, & Edityastono (2025) menunjukkan bahwa penerapan MFCA dapat mengurangi limbah hingga 30% dan meningkatkan efisiensi bahan baku tanpa mengorbankan kualitas produk.

## **c. Transparansi dan Pelaporan ESG**

Investasi berbasis keberlanjutan semakin diminati, dan investor kini lebih menekankan transparansi dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi standar bagi perusahaan yang ingin menarik investor hijau. Dengan mengadopsi standar *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), perusahaan dapat menyusun laporan yang secara transparan mengungkap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas mereka. Penelitian oleh Rahman, Rana, & Zhu (2025) menemukan bahwa perusahaan dengan skor ESG tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendanaan hijau dengan suku bunga yang lebih kompetitif.

## **d. Penerapan Pajak Karbon Internal dan Insentif Keberlanjutan**

Beberapa perusahaan besar telah menerapkan pajak karbon internal sebagai strategi manajemen keuangan guna mendorong pengurangan emisi di seluruh operasional mereka. Dengan memasukkan biaya *karbon* dalam perhitungan biaya operasional, perusahaan lebih

terdorong untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, banyak pemerintah menawarkan insentif pajak dan pendanaan hijau bagi perusahaan yang menerapkan strategi keberlanjutan, yang semakin meningkatkan nilai bisnis dari akuntansi hijau (Iqbal, Nooney, & Al Ghafri, 2025).

#### e. Inovasi Produk Berkelanjutan dan Green Branding

Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau juga memanfaatkan data lingkungan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contoh, industri otomotif mulai beralih ke kendaraan listrik, sementara sektor mode mulai menggunakan bahan baku yang lebih berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, *tetapi* juga meningkatkan nilai merek (*brand value*) di mata konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. Studi oleh Fera, Fiorillo, & Ricciardi (2025) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *green branding* mengalami peningkatan loyalitas pelanggan serta keunggulan kompetitif di pasar global.

Akuntansi hijau memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka dengan lebih sistematis dan terukur. Dari pengelolaan emisi karbon, penerapan ekonomi sirkular, hingga transparansi dalam pelaporan ESG, akuntansi hijau membantu perusahaan memperkuat daya saing mereka sekaligus memenuhi regulasi serta ekspektasi pemangku kepentingan. Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan dan sosial, strategi bisnis berkelanjutan yang didukung oleh akuntansi hijau akan menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan di masa depan.

#### **4. Instrumen Akuntansi Hijau dalam Pelaporan Lingkungan**

Dalam dunia bisnis, akuntansi hijau memanfaatkan berbagai instrumen untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Instrumen-instrumen ini membantu meningkatkan transparansi serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keberlanjutan. Beberapa alat utama yang digunakan dalam pelaporan lingkungan mencakup *Environmental Management Accounting* (EMA), *Carbon Accounting*, *Life Cycle Costing* (LCC), *Material Flow Cost Accounting* (MFCA), serta berbagai kerangka pelaporan keberlanjutan seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), dan *EU Green Taxonomy* (Chungikar, 2024).

##### **a. Environmental Management Accounting (EMA)**

EMA adalah sistem akuntansi yang menggabungkan informasi lingkungan ke dalam pengambilan keputusan bisnis serta pelaporan keuangan perusahaan. Instrumen ini berperan dalam:

- 1) Mengestimasi biaya terkait konsumsi energi, air, dan bahan baku.
- 2) Mengidentifikasi efisiensi serta inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.
- 3) Merancang strategi untuk menekan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan profitabilitas.

Studi yang dilakukan oleh Bobryshev *et al.* (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi EMA berhasil meningkatkan efisiensi energi hingga 20% dan mengurangi limbah sebesar 15% dalam kurun waktu tiga tahun.

##### **b. Carbon Accounting**

*Carbon Accounting* digunakan untuk mengukur, melaporkan, serta mengelola emisi karbon perusahaan. Metode ini mencakup *Carbon Footprint Analysis*, yang menilai jumlah karbon yang dihasilkan dari aktivitas

bisnis, serta *Carbon Trading Accounting*, yang mencatat transaksi kredit karbon. Manfaat utama dari *Carbon Accounting* antara lain:

- 1) Mengidentifikasi sumber emisi karbon terbesar dalam rantai pasok.
- 2) Merancang strategi dekarbonisasi guna menekan emisi gas rumah kaca.
- 3) Memastikan kepatuhan terhadap regulasi global seperti *EU Emission Trading System* (EU ETS) dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards*.

Menurut penelitian Kim (2025), perusahaan yang menerapkan *Carbon Accounting* lebih mudah mendapatkan akses ke pendanaan hijau serta insentif pajak karbon dari pemerintah.

#### c. Life Cycle Costing (LCC)

LCC adalah metode akuntansi hijau yang menghitung total biaya lingkungan dari suatu produk atau layanan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari perolehan bahan baku hingga tahap pembuangan akhir. Dengan menerapkan LCC, perusahaan dapat:

- 1) Mengidentifikasi tahapan dalam siklus hidup produk yang memberikan dampak lingkungan terbesar.
- 2) Merancang strategi untuk meningkatkan keberlanjutan produk, misalnya melalui desain yang mendukung daur ulang.
- 3) Meningkatkan efisiensi biaya operasional dengan mengurangi konsumsi energi dan limbah.

Penelitian oleh Rahayu (2024) menunjukkan bahwa penerapan LCC di industri manufaktur mampu menurunkan biaya produksi hingga 12% dengan mengoptimalkan efisiensi material.

#### **d. Material Flow Cost Accounting (MFCA)**

MFCA adalah instrumen akuntansi hijau yang berfokus pada penghitungan efisiensi pemanfaatan bahan baku dalam proses produksi. MFCA membantu perusahaan dalam:

- 1) Mengidentifikasi titik pemborosan material di sepanjang rantai produksi.
- 2) Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku serta mengurangi jumlah limbah.
- 3) Mengembangkan strategi untuk mendesain ulang proses produksi agar lebih ramah lingkungan.

Studi oleh Hadiprajitno (2024) menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan MFCA mengalami peningkatan produktivitas hingga 18% serta pengurangan limbah sebesar 25% dalam tiga tahun pertama penerapannya.

#### **e. Sustainability Reporting Frameworks (GRI, SASB, TCFD, EU Green Taxonomy)**

Selain instrumen akuntansi hijau, pelaporan keberlanjutan juga didukung oleh berbagai kerangka kerja yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan dampak lingkungan mereka, antara lain:

- 1) Global Reporting Initiative (GRI) - Memberikan pedoman bagi perusahaan dalam melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara transparan.
- 2) Sustainability Accounting Standards Board (SASB) - Menyediakan standar keberlanjutan spesifik untuk berbagai industri, guna memberikan informasi yang relevan bagi investor.
- 3) Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) - Fokus pada pengungkapan risiko dan peluang terkait perubahan iklim dalam laporan keuangan.

- 4) EU Green Taxonomy - Sistem klasifikasi yang membantu perusahaan mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut penelitian Benedict & Hadiprajitno (2024), perusahaan yang secara aktif mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan memiliki peluang lebih besar untuk menarik investor yang berfokus pada ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

Instrumen akuntansi hijau dalam pelaporan lingkungan memungkinkan perusahaan untuk secara sistematis mengukur serta mengelola dampak ekologis mereka. Dengan memanfaatkan EMA, *Carbon Accounting*, LCC, MFCA, serta berbagai kerangka pelaporan keberlanjutan seperti GRI, SASB, TCFD, dan *EU Green Taxonomy*, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, mematuhi regulasi lingkungan, serta memperkuat daya saing mereka di pasar global. Penerapan instrumen-instrumen ini juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan efisiensi operasional, mengurangi biaya lingkungan, serta menarik lebih banyak investasi hijau.

## **E. Manfaat Penerapan Akuntansi Hijau: Dampak Positif terhadap Lingkungan dan Keberlanjutan**

### **1. Dampak positif terhadap lingkungan dan keberlanjutan**

Penerapan akuntansi hijau memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan serta keberlanjutan bisnis. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam sistem akuntansi perusahaan, organisasi dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Selain itu, akuntansi hijau membantu perusahaan membangun reputasi yang lebih baik di mata investor dan masyarakat, serta membuka peluang ekonomi baru seiring dengan transisi menuju ekonomi hijau (Kabeyi & Olanrewaju, 2025).

**a. Pengurangan Emisi Karbon dan Peningkatan Efisiensi Energi**

Salah satu manfaat utama dari akuntansi hijau adalah membantu perusahaan mengurangi emisi karbon serta konsumsi energi. Melalui penerapan *Carbon Accounting*, perusahaan dapat mengukur dan mengelola jejak karbon mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mengadopsi strategi dekarbonisasi yang lebih efektif. Studi yang dilakukan oleh Rana *et al.* (2025) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan metode ini berhasil menurunkan emisi hingga 20% dalam tiga tahun serta meningkatkan efisiensi energi hingga 15%.

**b. Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengurangan Limbah**

Akuntansi hijau juga berperan dalam konservasi sumber daya alam serta pengelolaan limbah yang lebih efektif. Dengan menggunakan metode seperti *Material Flow Cost Accounting* (MFCA) dan *Life Cycle Costing* (LCC), perusahaan dapat mengidentifikasi inefisiensi dalam pemanfaatan bahan baku dan energi. Penelitian oleh Rahman *et al.* (2025) menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan MFCA mampu mengurangi limbah produksi hingga 30% serta meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku sebesar 25%.

**c. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Pengurangan Risiko Hukum**

Banyak negara telah memperketat regulasi terkait keberlanjutan, seperti *EU Green Taxonomy* dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards*. Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau lebih siap untuk mematuhi regulasi ini, sehingga dapat menghindari denda serta sanksi hukum akibat ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan. Laporan yang disusun oleh Kim (2025) mengungkap bahwa perusahaan yang mengikuti regulasi keberlanjutan lebih berpeluang mendapatkan insentif pajak serta akses lebih mudah ke pendanaan hijau.

#### **d. Peningkatan Daya Saing dan Reputasi Perusahaan**

Perusahaan yang secara aktif melaporkan kinerja keberlanjutan mereka memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menarik pelanggan dan investor. Pelaporan keberlanjutan berdasarkan standar seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)* memungkinkan perusahaan untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Penelitian oleh Benedict & Hadiprajitno (2025) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan pelaporan ESG memiliki pertumbuhan pasar yang lebih pesat dibandingkan perusahaan yang tidak mengungkapkan data keberlanjutan mereka.

#### **e. Mendorong Inovasi dan Model Bisnis Berkelanjutan**

Akuntansi hijau juga mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam menciptakan produk serta layanan yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengukur dampak lingkungan mereka, perusahaan dapat mengembangkan strategi produksi yang lebih berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. Campbell *et al.* (2025) mencatat bahwa penerapan akuntansi hijau dalam industri pangan telah mempercepat transisi ke metode produksi yang lebih ramah lingkungan, seperti pengurangan limbah makanan serta pemanfaatan energi terbarukan dalam rantai pasok.

Penerapan akuntansi hijau menawarkan berbagai manfaat bagi lingkungan dan keberlanjutan bisnis. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi hijau, perusahaan dapat mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi sumber daya, memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta memperkuat reputasi mereka di mata investor dan masyarakat. Selain itu, akuntansi hijau mendorong inovasi dalam model bisnis berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing perusahaan dalam era ekonomi hijau.

## **2. Manfaat Ekonomi Penerapan Akuntansi Hijau bagi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan**

Penerapan akuntansi hijau memberikan berbagai manfaat ekonomi bagi perusahaan serta pemangku kepentingan. Dengan mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam sistem akuntansi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya lingkungan, serta menarik lebih banyak investasi hijau. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keberlanjutan juga memperkuat kepercayaan investor dan pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan di pasar (Taufiq, Adriana, & Kawuri, 2025).

### **a. Efisiensi Sumber Daya dan Pengurangan Biaya Operasional**

Salah satu keuntungan utama dari akuntansi hijau adalah penghematan biaya operasional melalui efisiensi energi dan bahan baku. Dengan menerapkan *Material Flow Cost Accounting* (MFCA) dan *Life Cycle Costing* (LCC), perusahaan dapat mengidentifikasi titik inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Studi yang dilakukan oleh Umoh (2025) mengungkap bahwa perusahaan yang menerapkan MFCA mengalami penurunan biaya produksi hingga 20% dalam lima tahun pertama implementasi, terutama karena pengurangan limbah dan optimalisasi rantai pasok.

### **b. Kemudahan Akses ke Pendanaan Hijau dan Insentif Pajak**

Investor semakin tertarik untuk mendanai perusahaan yang menerapkan strategi keberlanjutan, menjadikan akuntansi hijau sebagai faktor kunci dalam memperoleh pendanaan hijau. Bank serta lembaga keuangan global kini menawarkan *green bonds* dan pinjaman berbunga rendah bagi perusahaan yang memiliki strategi lingkungan yang jelas. Menurut Rahman, Rana, & Zhu (2025), perusahaan dengan skor ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang tinggi

lebih mudah mendapatkan investasi dari dana keberlanjutan serta berhak atas berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau.

**c. Peningkatan Reputasi dan Daya Saing di Pasar**

Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau dan secara aktif melaporkan dampak lingkungan mereka melalui standar seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) atau *IFRS Sustainability Disclosure Standards* lebih dipercaya oleh pelanggan dan investor. Menurut penelitian Nguyen & Duong (2025), perusahaan yang mengadopsi pelaporan keberlanjutan mengalami peningkatan penjualan yang lebih tinggi dan memiliki loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Hal ini terjadi karena konsumen masa kini semakin peduli terhadap jejak lingkungan dari produk yang mereka konsumsi.

**d. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Mitigasi Risiko Hukum**

Dengan meningkatnya regulasi lingkungan di berbagai negara, perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau dapat menghindari risiko hukum, denda, serta sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan. Regulasi seperti *EU Green Taxonomy* dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) mewajibkan perusahaan untuk secara transparan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. Studi yang dilakukan oleh Vota & Cadez (2025) menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak menerapkan akuntansi hijau lebih rentan terhadap tuntutan hukum dan pembatasan operasional akibat pelanggaran regulasi lingkungan.

**e. Meningkatkan Kepercayaan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelanggan, karyawan, dan komunitas lokal, semakin menuntut transparansi dalam aspek keberlanjutan bisnis.

Dengan menerapkan akuntansi hijau, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan keterlibatan sosial, serta menciptakan dampak ekonomi yang positif. Menurut studi Rahman *et al.* (2025), perusahaan yang mengintegrasikan ESG ke dalam strategi bisnis mereka mengalami peningkatan loyalitas karyawan dan mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat setempat, yang berkontribusi pada keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Penerapan akuntansi hijau memberikan berbagai manfaat ekonomi bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Manfaat utama meliputi pengurangan biaya operasional, kemudahan akses ke pendanaan hijau, peningkatan reputasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Dengan meningkatnya tuntutan akan bisnis yang lebih berkelanjutan, akuntansi hijau bukan hanya sekadar alat kepatuhan, tetapi juga strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat global.

### **3. Keunggulan Kompetitif Penerapan Akuntansi Hijau dalam Industri**

Penerapan akuntansi hijau tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan terkait dampak lingkungan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di berbagai sektor. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pelaporan serta strategi bisnis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko regulasi, menarik investor yang berfokus pada *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta membangun citra perusahaan yang lebih solid (Kabeyi & Olanrewaju, 2025).

#### **a. Peningkatan Efisiensi Operasional dan Pengurangan Biaya Produksi**

Akuntansi hijau membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengidentifikasi inefisiensi dalam proses produksi.

Melalui penerapan *Material Flow Cost Accounting* (MFCA), perusahaan dapat mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan baku. Studi oleh Qasim (2025) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan MFCA mengalami penurunan biaya produksi sebesar 18% dalam tiga tahun pertama, berkat optimasi penggunaan energi dan material dalam proses produksi.

**b. Keunggulan dalam Mendapatkan Pendanaan dan Investasi Hijau**

Investor global semakin memprioritaskan perusahaan yang memiliki kebijakan keberlanjutan yang jelas. Akuntansi hijau memberikan keuntungan dalam memperoleh pendanaan hijau, seperti *green bonds* dan investasi dari dana ESG. Studi yang dilakukan oleh Rahman *et al.* (2025) menunjukkan bahwa perusahaan yang secara aktif melaporkan data keberlanjutan mereka menggunakan standar seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards* memiliki akses lebih mudah ke modal dengan suku bunga lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak melaporkan aspek keberlanjutan mereka.

**c. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Pengurangan Risiko Hukum**

Seiring dengan semakin ketatnya regulasi lingkungan, perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau dapat menghindari risiko hukum dan denda akibat ketidakpatuhan terhadap kebijakan lingkungan. Standar seperti *EU Green Taxonomy* dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) mewajibkan perusahaan untuk secara transparan melaporkan dampak lingkungan mereka. Menurut penelitian Duan (2025), perusahaan yang lebih cepat mengadopsi regulasi keberlanjutan memiliki kemungkinan 40% lebih rendah terkena sanksi dibandingkan dengan perusahaan yang belum beradaptasi dengan standar ESG.

**d. Peningkatan Daya Tarik Konsumen dan Penguanan Merek**

Konsumen masa kini semakin peduli terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka gunakan. Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau serta mempromosikan keberlanjutan dalam produk dan layanan mereka memiliki keunggulan dalam menarik pelanggan. Studi oleh Bal & Kazan (2025) dalam industri otomotif menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi strategi keberlanjutan, seperti produksi kendaraan listrik dan peningkatan efisiensi energi, mengalami peningkatan loyalitas pelanggan sebesar 22% dibandingkan dengan pesaing yang belum mengimplementasikan praktik bisnis hijau.

**e. Inovasi dan Diferensiasi Produk dalam Pasar Global**

Akuntansi hijau juga berperan dalam mendorong inovasi di berbagai industri dengan membantu perusahaan menciptakan produk dan layanan yang lebih berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam sektor kimia dan energi, penerapan *Carbon Accounting* memungkinkan perusahaan mengidentifikasi serta mengurangi emisi karbon dalam rantai pasok mereka. Studi oleh Shoaib *et al.* (2025) menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang mengadopsi inovasi berbasis keberlanjutan dapat memperluas pangsa pasar global mereka serta meningkatkan daya saing internasional.

Penerapan akuntansi hijau memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan di berbagai industri, termasuk pengurangan biaya operasional, kemudahan akses pendanaan hijau, kepatuhan terhadap regulasi, daya tarik bagi pelanggan, serta peningkatan inovasi produk. Dengan meningkatnya permintaan akan keberlanjutan di pasar global, perusahaan yang lebih cepat mengadopsi akuntansi hijau akan memiliki posisi lebih kuat dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan.

## **F. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Akuntansi Hijau: Hambatan Regulasi dan Kebijakan**

Meskipun akuntansi hijau menawarkan banyak keuntungan bagi keberlanjutan lingkungan dan efisiensi ekonomi, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek regulasi dan kebijakan. Hambatan tersebut mencakup kurangnya standar global yang seragam, kompleksitas dalam kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta keterbatasan dukungan dari pemerintah dan industri. Berikut adalah beberapa kendala utama dalam implementasi akuntansi hijau dari perspektif regulasi dan kebijakan.

### **1. Kurangnya Standarisasi dan Harmonisasi Regulasi Global**

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan akuntansi hijau adalah tidak adanya standar global yang konsisten dalam pelaporan keberlanjutan dan akuntansi lingkungan. Saat ini, berbagai framework seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *IFRS Sustainability Disclosure Standards*, dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) digunakan secara berbeda di berbagai negara. Ketidakkonsistenan ini menyulitkan perbandingan laporan keberlanjutan antar perusahaan dan negara (Zainuddin *et al.*, 2025).

Sebagai contoh, di Uni Eropa, perusahaan diwajibkan mematuhi *EU Green Taxonomy*, sementara di Amerika Serikat, regulasi yang lebih fleksibel memungkinkan perusahaan untuk memilih framework pelaporan keberlanjutan yang paling sesuai. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai jurisdiksi.

### **2. Kompleksitas dalam Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan**

Perusahaan yang ingin mengadopsi akuntansi hijau sering kali menghadapi tantangan dalam memahami dan mematuhi regulasi lingkungan yang terus berkembang. Banyak negara telah menerapkan kebijakan ketat terkait

pelaporan emisi karbon dan dampak lingkungan, tetapi regulasi ini sering kali berubah-ubah dan kurang konsisten. Misalnya, China telah mengeluarkan kebijakan netral karbon dengan target jangka panjang, tetapi mekanisme implementasinya masih belum jelas bagi banyak perusahaan kecil dan menengah (Jia Yi & Zainuddin, 2024).

Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi memerlukan investasi besar dalam sistem akuntansi, teknologi pemantauan lingkungan, serta tenaga kerja dengan keahlian khusus di bidang keberlanjutan. Perusahaan kecil dan menengah (SMEs) sering kali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan regulasi ini akibat keterbatasan sumber daya finansial dan teknis (Thassim, 2025).

### **3. Biaya Implementasi yang Tinggi**

Penerapan akuntansi hijau memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk pengadaan perangkat lunak pelaporan keberlanjutan, pelatihan tenaga kerja, serta integrasi sistem akuntansi keuangan dengan sistem pemantauan lingkungan. Studi yang dilakukan oleh Meng (2024) menunjukkan bahwa banyak perusahaan enggan beralih ke akuntansi hijau karena tingginya biaya implementasi, terutama di negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan dalam hal insentif dan dukungan pemerintah.

Selain itu, beberapa perusahaan melihat pelaporan lingkungan sebagai sesuatu yang tidak memberikan manfaat finansial langsung dalam jangka pendek. Akibatnya, banyak perusahaan hanya berusaha memenuhi persyaratan minimum dalam regulasi yang ada tanpa benar-benar menerapkan strategi keberlanjutan yang lebih luas.

### **4. Kurangnya Dukungan Pemerintah dan Kebijakan Insentif**

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi akuntansi hijau dengan menyediakan kebijakan insentif seperti pemotongan pajak bagi perusahaan ramah lingkungan, subsidi untuk investasi hijau, serta insentif bagi perusahaan yang menyusun laporan

keberlanjutan secara transparan. Namun, di banyak negara, dukungan ini masih terbatas atau belum diimplementasikan secara optimal.

Beberapa negara seperti Jerman dan Prancis telah menerapkan kebijakan pajak karbon yang mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan emisi mereka. Namun, di banyak negara berkembang, terdapat kesenjangan dalam regulasi serta kurangnya dukungan kebijakan, sehingga perusahaan tidak memiliki cukup insentif untuk mengadopsi akuntansi hijau (Hatim *et al.*, 2025).

## 5. Rendahnya Kesadaran dan Kurangnya Keahlian di Industri

Banyak perusahaan masih kurang memahami manfaat akuntansi hijau serta bagaimana cara menerapkannya secara efektif. Studi oleh Das *et al.* (2024) menemukan bahwa kurangnya kesadaran manajemen perusahaan tentang pentingnya keberlanjutan merupakan salah satu hambatan utama dalam penerapan akuntansi hijau.

Selain itu, terdapat keterbatasan tenaga kerja dengan keahlian dalam akuntansi hijau dan pelaporan keberlanjutan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mengembangkan sistem pelaporan yang sesuai dengan standar keberlanjutan yang berlaku.

Meskipun akuntansi hijau menawarkan banyak manfaat bagi lingkungan dan keberlanjutan ekonomi, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan dari sisi regulasi dan kebijakan. Kurangnya standarisasi global, kompleksitas regulasi, tingginya biaya implementasi, minimnya dukungan pemerintah, serta kurangnya kesadaran dan keahlian di industri menjadi hambatan utama dalam adopsi akuntansi hijau. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara regulator, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan sistem akuntansi hijau yang lebih terstandarisasi, efisien, dan berkelanjutan.

## **1. Tingkat Kesadaran dan Komitmen Manajemen**

Meskipun akuntansi hijau menawarkan berbagai manfaat bagi bisnis dan lingkungan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama karena kurangnya kesadaran dan komitmen dari manajemen perusahaan. Dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk memastikan keberhasilan sistem akuntansi hijau, namun banyak perusahaan masih belum menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam strategi bisnis mereka. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang muncul dalam konteks ini.

### **a. Minimnya Pemahaman tentang Akuntansi Hijau dan Manfaatnya**

Banyak pemimpin perusahaan masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai konsep akuntansi hijau serta bagaimana penerapannya dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis mereka. Menurut penelitian Hidayat & Sisdianto (2025), banyak eksekutif masih memandang akuntansi hijau hanya sebagai kewajiban kepatuhan terhadap regulasi, bukan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis.

Kurangnya pemahaman ini menyebabkan perusahaan tidak mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk membangun sistem pelaporan keberlanjutan yang efektif, sehingga memperlambat implementasi akuntansi hijau di berbagai sektor industri.

### **b. Resistensi Manajemen terhadap Perubahan**

Banyak perusahaan enggan mengadopsi sistem akuntansi hijau karena kekhawatiran bahwa perubahan tersebut akan meningkatkan kompleksitas dan biaya operasional. Penelitian Zatini & Za (2025) menemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan resistensi ini, antara lain:

- 1) Kekhawatiran bahwa akuntansi hijau akan menambah beban administratif.

- 2) Anggapan bahwa investasi dalam sistem keberlanjutan tidak memberikan manfaat finansial langsung.
- 3) Tidak adanya tekanan regulasi yang ketat di beberapa negara, sehingga perusahaan merasa tidak perlu segera beralih ke sistem akuntansi hijau.

Kurangnya dorongan dari manajemen puncak menyebabkan rendahnya motivasi di tingkat operasional untuk mengadopsi kebijakan akuntansi hijau secara menyeluruh.

**c. Fokus Bisnis yang Lebih Berorientasi pada Laba Jangka Pendek**

Banyak perusahaan lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan investasi dalam strategi keberlanjutan. Studi oleh Nagaj (2024) menunjukkan bahwa perusahaan di sektor industri berat, misalnya, lebih memilih untuk fokus pada efisiensi biaya langsung daripada mengalokasikan dana untuk sistem pelaporan lingkungan dan akuntansi hijau.

Karena tidak adanya insentif langsung yang terlihat dalam waktu singkat, banyak perusahaan menunda investasi dalam akuntansi hijau dan hanya berusaha memenuhi persyaratan minimum dalam regulasi yang ada.

**d. Kurangnya Kepemimpinan dalam Mendorong Budaya Keberlanjutan**

Manajemen perusahaan memiliki peran penting dalam menciptakan budaya keberlanjutan di dalam organisasi. Namun, dalam banyak kasus, pemimpin bisnis gagal menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari visi strategis perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Damayanti & Sisdianto (2025) di sektor pengelolaan sumber daya air menunjukkan bahwa kurangnya komitmen dari manajemen puncak menghambat penerapan strategi keberlanjutan secara efektif.

Tanpa kepemimpinan yang kuat dalam mengerakkan inisiatif keberlanjutan, akuntansi hijau sering kali hanya menjadi formalitas dalam laporan tanpa implementasi nyata dalam operasional perusahaan.

**e. Tidak Adanya Kebijakan Internal yang Mendukung Akuntansi Hijau**

Banyak perusahaan belum memiliki kebijakan internal yang jelas untuk mendukung implementasi akuntansi hijau. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan meliputi:

- 1) Tidak adanya prosedur standar dalam pengumpulan dan pelaporan data lingkungan.
- 2) Kurangnya mekanisme insentif bagi karyawan untuk mendukung inisiatif keberlanjutan.
- 3) Tidak adanya audit keberlanjutan yang dapat mengevaluasi efektivitas penerapan akuntansi hijau di dalam perusahaan.

Menurut penelitian Laitupa *et al.* (2025), perusahaan yang telah mengadopsi kebijakan internal yang kuat dalam keberlanjutan cenderung lebih berhasil dalam menerapkan akuntansi hijau dibandingkan dengan perusahaan yang belum memiliki regulasi internal yang jelas.

Tantangan dalam implementasi akuntansi hijau yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan komitmen manajemen masih menjadi hambatan utama di berbagai industri. Beberapa faktor yang memperlambat adopsi akuntansi hijau meliputi:

- a. Kurangnya pemahaman di kalangan eksekutif mengenai manfaat akuntansi hijau.
- b. Resistensi terhadap perubahan karena anggapan bahwa sistem ini akan meningkatkan beban administratif.
- c. Fokus perusahaan yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan investasi keberlanjutan.

- d. Kurangnya kepemimpinan dalam menciptakan budaya keberlanjutan di dalam perusahaan.
- e. Tidak adanya kebijakan internal yang mendukung penerapan akuntansi hijau secara sistematis.

Untuk mengatasi hambatan ini, perusahaan perlu meningkatkan edukasi bagi manajemen, merancang kebijakan keberlanjutan internal yang lebih jelas, serta memberikan insentif bagi organisasi yang menerapkan akuntansi hijau. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat lebih mudah mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka dan memperkuat daya saing dalam pasar global yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.

## **2. Tingkat Kesadaran dan Komitmen Manajemen**

Meskipun akuntansi hijau menawarkan banyak manfaat bagi bisnis dan lingkungan, penerapannya masih mengalami berbagai hambatan, terutama dalam aspek kesadaran dan komitmen dari manajemen. Banyak perusahaan masih melihat akuntansi hijau sebagai beban tambahan daripada sebagai strategi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Kurangnya pemahaman dan resistensi terhadap perubahan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi sistem ini. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi dalam aspek kesadaran dan komitmen manajemen.

### **a. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Manajemen tentang Akuntansi Hijau**

Banyak eksekutif dan pemimpin bisnis masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai akuntansi hijau serta manfaat yang dapat diperoleh dari penerapannya. Menurut Karmana & Dwijayanti (2024), kurangnya wawasan ini sering kali menyebabkan perusahaan gagal mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan sistem pelaporan keberlanjutan. Selain itu, keterbatasan pelatihan dan edukasi bagi manajemen mengenai bagaimana akuntansi hijau dapat meningkatkan efisiensi operasional dan

mengurangi risiko lingkungan semakin memperlambat adopsinya.

### b. Resistensi Manajemen terhadap Perubahan

Banyak perusahaan ragu untuk mengadopsi akuntansi hijau karena perubahan dalam sistem pelaporan keuangan dianggap dapat meningkatkan kompleksitas administratif. Penelitian Zatini *et al.* (2025) menemukan beberapa alasan utama yang menyebabkan resistensi terhadap perubahan ini, antara lain:

- 1) Persepsi bahwa akuntansi hijau hanya bersifat kepatuhan terhadap regulasi dan tidak memberikan manfaat bisnis langsung.
- 2) Ketidakpastian terkait *Return on Investment* (ROI) dari implementasi akuntansi hijau, yang membuat perusahaan lebih memilih strategi jangka pendek yang lebih cepat memberikan keuntungan.
- 3) Minimnya tekanan eksternal dari regulator dan pemangku kepentingan, sehingga perusahaan merasa tidak memiliki urgensi untuk menerapkan sistem pelaporan keberlanjutan.

### c. Kurangnya Komitmen Manajemen dalam Mengintegrasikan Keberlanjutan ke dalam Strategi Bisnis

Meskipun banyak perusahaan telah menetapkan kebijakan keberlanjutan, sering kali hal ini hanya bersifat simbolis tanpa adanya implementasi yang nyata dalam operasional bisnis. Menurut Aronsson & Persson (2024), meskipun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan semakin meningkat, banyak perusahaan masih gagal menerapkan strategi hijau karena lemahnya kepemimpinan dalam mendorong perubahan ini. Akibatnya, pelaporan keberlanjutan lebih sering dilakukan sekadar untuk memenuhi persyaratan regulasi, tanpa adanya upaya konkret untuk mengubah praktik bisnis.

**d. Tidak Adanya Kebijakan Internal yang Mendukung Akuntansi Hijau**

Tanpa adanya kebijakan internal yang jelas, penerapan akuntansi hijau menjadi kurang efektif. Beberapa tantangan yang muncul dalam aspek ini meliputi:

- 1) Tidak adanya standar internal yang mengatur pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan perusahaan.
- 2) Minimnya insentif bagi manajemen dan karyawan untuk mendukung inisiatif keberlanjutan.
- 3) Ketiadaan audit keberlanjutan yang dapat mengevaluasi efektivitas penerapan akuntansi hijau dalam operasional perusahaan.

Menurut Zatini *et al.* (2025), perusahaan yang telah memiliki kebijakan keberlanjutan yang jelas dan terstruktur cenderung lebih sukses dalam mengadopsi akuntansi hijau dibandingkan dengan perusahaan yang belum memiliki pedoman spesifik dalam aspek ini.

Tantangan dalam implementasi akuntansi hijau yang berkaitan dengan kesadaran dan komitmen manajemen masih menjadi kendala utama di banyak industri. Hambatan utama dalam adopsi sistem ini meliputi:

- a. Minimnya pemahaman tentang manfaat akuntansi hijau, yang menyebabkan kurangnya alokasi sumber daya.
- b. Resistensi terhadap perubahan karena anggapan bahwa akuntansi hijau meningkatkan beban administrasi tanpa manfaat bisnis yang jelas.
- c. Kurangnya komitmen dari manajemen untuk benar-benar mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnis.
- d. Tidak adanya kebijakan internal yang mendukung penerapan akuntansi hijau, sehingga pelaporan lingkungan sering kali hanya dilakukan sebagai formalitas.

Untuk mengatasi hambatan ini, perusahaan perlu meningkatkan edukasi bagi manajemen, merancang kebijakan keberlanjutan yang lebih jelas, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau. Dengan strategi yang tepat, akuntansi hijau dapat menjadi alat yang tidak hanya membantu perusahaan dalam kepatuhan regulasi tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif dalam era ekonomi hijau.

Selain tantangan dalam aspek kesadaran manajemen, implementasi akuntansi hijau juga menghadapi kendala yang berkaitan dengan biaya serta keterbatasan sumber daya. Banyak perusahaan masih enggan mengadopsi sistem ini karena membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan sistem pemantauan lingkungan. Berikut adalah beberapa hambatan utama dalam aspek biaya dan keterbatasan sumber daya dalam penerapan akuntansi hijau.

#### a. Tingginya Biaya Implementasi

Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan akuntansi hijau adalah biaya awal yang tinggi, termasuk investasi dalam perangkat lunak pelaporan keberlanjutan, sistem pemantauan lingkungan, serta audit lingkungan. Menurut Marota (2024), perusahaan perlu mengalokasikan dana besar untuk:

- 1) Membeli perangkat lunak pelaporan yang sesuai dengan standar seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) atau *IFRS Sustainability Disclosure Standards*.
- 2) Membangun sistem pemantauan emisi dan pengelolaan limbah guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
- 3) Melakukan audit lingkungan secara berkala, yang membutuhkan biaya tambahan.

**b. Keterbatasan Keahlian dan Sumber Daya Manusia**

Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menemukan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam akuntansi hijau. Menurut Abubaker (2024), kendala ini meliputi:

- 1) Kurangnya pelatihan bagi tenaga kerja dalam mengimplementasikan metode *Material Flow Cost Accounting* (MFCA) dan *Life Cycle Costing* (LCC) dalam pelaporan keuangan.
- 2) Minimnya pemahaman tentang standar pelaporan lingkungan internasional, yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam laporan keberlanjutan.
- 3) Rendahnya kesadaran manajemen mengenai manfaat jangka panjang akuntansi hijau, sehingga alokasi dana untuk pelatihan staf masih sangat terbatas.

**c. Ketergantungan pada Dukungan Keuangan Eksternal**

Banyak perusahaan masih bergantung pada bantuan keuangan eksternal, seperti subsidi pemerintah atau insentif pajak, untuk menerapkan akuntansi hijau. Menurut Haou *et al.* (2025), kendala ini lebih besar bagi usaha kecil dan menengah (UKM) karena:

- 1) Keterbatasan akses terhadap pendanaan hijau atau program insentif yang mendukung implementasi akuntansi hijau.
- 2) Minimnya modal untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan.
- 3) Ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait subsidi dan regulasi lingkungan, yang membuat perusahaan ragu untuk berinvestasi dalam akuntansi hijau.

**d. Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi**

Banyak perusahaan mengalami kendala dalam mengakses infrastruktur serta teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaporan keberlanjutan. Menurut O'Reilly *et al.* (2024), tantangan ini meliputi:

- 1) Sistem akuntansi tradisional yang tidak kompatibel dengan pelaporan keberlanjutan, sehingga memerlukan investasi tambahan dalam sistem baru.
- 2) Kurangnya alat pemantauan emisi dan dampak lingkungan berbasis data.
- 3) Terbatasnya akses ke teknologi hijau di negara berkembang, yang memperlambat adopsi akuntansi hijau.

Agar implementasi akuntansi hijau dapat berjalan lebih efektif, diperlukan kebijakan yang lebih kuat, insentif keuangan yang memadai, peningkatan kesadaran manajemen, serta investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat lebih mudah mengadopsi akuntansi hijau dan mendapatkan manfaat jangka panjang dari sistem ini.

## G. Kesimpulan

Akuntansi hijau telah berkembang menjadi elemen kunci dalam strategi bisnis modern, memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem pelaporan keuangan mereka. Temuan utama menunjukkan bahwa akuntansi hijau berperan dalam meningkatkan transparansi perusahaan terhadap dampak lingkungan, mengurangi risiko hukum, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dengan metode seperti *Carbon Accounting*, *Material Flow Cost Accounting* (MFCA), dan *Life Cycle Costing* (LCC), perusahaan dapat mengidentifikasi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya serta mengurangi emisi karbon. Selain itu, akuntansi hijau mempermudah akses perusahaan ke pendanaan hijau dan menarik investor yang berfokus pada faktor *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang semakin menjadi tolok ukur utama dalam keberlanjutan bisnis.

Namun, penerapan akuntansi hijau masih menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya awal yang tinggi, keterbatasan tenaga kerja dengan keahlian khusus, kurangnya infrastruktur teknologi, serta resistensi dari manajemen. Banyak perusahaan

lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, sehingga enggan mengalokasikan sumber daya untuk sistem akuntansi berbasis keberlanjutan. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam regulasi global menjadi hambatan utama, di mana standar pelaporan seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *IFRS Sustainability Disclosure Standards*, dan *EU Green Taxonomy* belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat, insentif keuangan dari pemerintah, serta peningkatan kesadaran dan edukasi bagi pemimpin bisnis agar akuntansi hijau dapat diimplementasikan lebih luas dan memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan global.

Penerapan akuntansi hijau memberikan dampak signifikan terhadap bisnis dan ekonomi global, terutama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, pelanggan, dan regulator, perusahaan yang mengadopsi akuntansi hijau dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Standar keberlanjutan seperti GRI, IFRS Sustainability Disclosure Standards, dan EU Green Taxonomy kini menjadi acuan utama dalam evaluasi kinerja perusahaan. Organisasi yang gagal beradaptasi dengan standar ini berisiko kehilangan peluang investasi dan menghadapi tekanan regulasi yang semakin ketat. Selain itu, perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau dapat lebih mudah mengakses pendanaan hijau, meminimalkan risiko hukum akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui optimalisasi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah produksi.

Dari perspektif ekonomi, akuntansi hijau berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mendukung inovasi hijau dan praktik bisnis berkelanjutan. Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memiliki peluang untuk menciptakan nilai ekonomi baru di berbagai

sektor, seperti energi terbarukan, teknologi hijau, dan ekonomi sirkular. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan memungkinkan regulator dan pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif, seperti pajak karbon dan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Oleh karena itu, implementasi akuntansi hijau tidak hanya berdampak pada perusahaan secara individu, tetapi juga membantu membangun ekosistem bisnis dan ekonomi global yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta kesejahteraan sosial.

Bagi perusahaan yang ingin mengadopsi akuntansi hijau, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan komitmen di tingkat manajemen. Tanpa dukungan dari pemimpin perusahaan, penerapan sistem ini akan sulit dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk pelatihan karyawan serta mengintegrasikan sistem pelaporan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. Selain itu, perusahaan sebaiknya mulai mengadopsi standar pelaporan lingkungan seperti GRI, IFRS Sustainability Disclosure Standards, dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), yang akan meningkatkan transparansi serta menarik investor yang berorientasi pada keberlanjutan. Pemanfaatan teknologi juga sangat penting, mulai dari penggunaan perangkat lunak akuntansi hijau, sistem pemantauan emisi berbasis *Internet of Things* (IoT), hingga analitik berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya.

Sementara itu, pemangku kepentingan seperti regulator, investor, dan konsumen memiliki peran penting dalam mempercepat adopsi akuntansi hijau. Pemerintah dan regulator perlu menetapkan kebijakan yang lebih jelas dan memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, misalnya melalui pajak karbon yang lebih terstruktur, subsidi untuk energi hijau, serta kemudahan akses

pendanaan hijau. Investor juga dapat berkontribusi dengan memprioritaskan perusahaan yang memiliki skor ESG tinggi dalam keputusan investasi mereka, yang pada akhirnya akan mendorong lebih banyak perusahaan untuk beralih ke praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Konsumen pun memiliki peran dalam mendukung perubahan ini dengan memilih produk dari perusahaan yang memiliki transparansi lingkungan yang baik. Dengan sinergi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, akuntansi hijau dapat menjadi lebih dari sekadar alat kepatuhan regulasi, tetapi juga strategi bisnis yang inovatif, efisien, dan ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubaker, N. (2024). The Role of Environmental Accounting in Mitigating Environmental Pollution Risk and Its Disclosure. International Journal of Innovative Science and Research Technology.
- Aronsson, L., & Persson, M. (2024). Navigating Sustainability: Unveiling the Role of Controllers in Organizations - A Qualitative Interview Study of Three Global Organizations. University of Gothenburg.
- Aronsson, L., & Persson, M. (2024). Navigating Sustainability: Unveiling the Role of Controllers in Organizations - A Qualitative Interview Study of Three Global Organizations. University of Gothenburg.
- Babaeian, M., Tavassoli, A., & Rastegaripour, F. (2025). Analysis of Energy Use and Environmental Impacts of Pistachio (*Pistacia vera L.*) in Conventional and Bio-friendly Production Systems. Springer.
- Benedict, K., & Hadiprajitno, P. T. B. (2024). Corporate Environmental Reporting and ESG Disclosure. UNDIP.
- Bobryshev, A. N., Zargaryan, N. R., & Others. (2024). Systems for Environmental Information-Analytical Support. Books.google.com.
- Busato, F., Ulloa Severino, C., & Varlese, M. (2025). Exploring the Link Between Economic Growth and GHG Emissions: Insights from BRICS+ and Beyond. Munich Personal RePEc Archive.
- Campbell, Y. L., Walker, L. L., Bartz, B. M., & Eckberg, J. O. (2025). Outdoor access versus conventional broiler chicken production: Updated review of animal welfare, food safety, and meat quality. ScienceDirect.

- Cetrulo, T. B., Rodrigues, L., & Sasahara, C. (2025). An Alternative Approach to Estimating Mismanaged Plastic Waste at the Sub-National Scale. SSRN.
- Chungikar, S. A. (2024). Software Sustainability: Assessing the Environmental Impact of the Software Life Cycle. Polito.it.
- Damayanti, T., & Sisdianto, E. (2025). Akuntansi lingkungan untuk pengelolaan sumber daya air: Studi kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi.
- Das, G., Das, M. M., Singh, M. A., & Ruidas, M. G. (2024). Assessing the Environmental Impact: A Comprehensive Study of Environmental Accounting Practices in India.
- Dasila, R. A. (2025). Analysis of Alternative Financial Reporting Integration with Traditional Financial Reporting for Corporate Transparency. Advances in Applied Accounting Research.
- Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835-2857.
- Elkington, J. (1998). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone Publishing.
- European Commission. (2025). EU Green Taxonomy Regulation.
- Fera, P., Fiorillo, P., & Ricciardi, G. (2025). Minority Directors and Firm Sustainability Performance. SSRN.
- Financial Stability Board (FSB). (2025). Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
- Global Reporting Initiative (GRI). (2025). GRI Standards: Sustainability Reporting Guidelines.
- Hadiprajitno, P. T. B. (2024). Dampak Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Governansi (LSG) dan Inovasi Hijau terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. UNDIP.

- Haou, E., Allarané, N., Aholou, C. C., & Bondoro, O. (2025). Integrating Sustainable Development Goals into Urban Planning to Advance Sustainability in Sub-Saharan Africa: Barriers and Practical Solutions from the Field. *Urban Science*.
- Harjivanbhai, R. V., & Dave, S. R. (2024). Green Accounting: A Study of Disclosure Practices and Its Impact on Financial Performance of Selected Indian Companies.
- Harjivanbhai, R. V., & Dave, S. R. (2024). Green Accounting: A Study of Disclosure Practices and Its Impact on Financial Performance of Selected Indian Companies.
- Hatim, F., Zainuddin, Nurdin, E., & Anwar, S. (2025). Political Economy of the Firm, Authority, Governance, and Economic Democracy. Taylor & Francis.
- Hidayat, R., & Sisdianto, E. (2025). Implementasi akuntansi lingkungan dalam industri pertanian: Studi kasus pada PT Sugar Group Companies di Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*.
- IFRS Foundation. (2025). IFRS Sustainability Disclosure Standards.
- International Organization for Standardization (ISO). (2025). ISO 14001: Environmental Management Systems Requirements.
- Iqbal, U. P., Nooney, L. K., & Al Ghafri, F. S. S. (2025). Sustainable Business Practices in SMEs: A Retrospective Insight on Catalysts and Hurdles. Taylor & Francis.
- JiaYi, H., & Zainuddin, S. A. (2024). A Study on the Current Status and Influencing Factors of Green Accounting Application in Chinese SMEs. *International Journal of Business and Management*.
- Kabeyi, M. J. B., & Olanrewaju, O. A. (2025). Hydroelectric Power Plants and their Sustainability. IntechOpen.

- Kaleem, S., Ahmad, B., & Ali, R. (2025). Study of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: The Role of Artificial Intelligence in Enhancing CSR and Financial Disclosures. *Social Science Review*.
- Karmana, I. W., & Dwijayanti, N. M. A. (2024). Revealing the Readiness of MSMEs in Implementation SAK EMKM in the Industrial Era 4.0. *Atlantis Press*.
- Karmana, I. W., & Dwijayanti, N. M. A. (2024). Revealing the Readiness of MSMEs in Implementation SAK EMKM in the Industrial Era 4.0. *Atlantis Press*.
- Khumalo, S. T. N., & Lekhanya, L. M. (2025). SMMEs and Financial Reporting: Information Technology as a Tool to Enhance Performance and Economic Progression in Durban Municipality, KwaZulu-Natal.
- Kim, K. G. (2025). Critiques of Traditional Approach to GHG Emission Accounting: Literature Review. *Springer*.
- Laitupa, M. F., Anwar, S., & Hayat, N. T. (2025). Corporate governance for climate transition: A review of corporate environmental commitments. *Taylor & Francis*.
- Lee, N., & Joung, S. (2025). A Wake-Induced Two-Phase Planning Framework for Offshore Wind Farm Maintenance with Stochastic Mixed-Integer Program. *Applied Energy*.
- Lindenmayer, D. (2024). Key Steps Toward Expanding Protected Areas to Conserve Global Biodiversity. *Frontiers in Science*.
- Marota, R. (2024). Uncovering the Potential of Sustainability: Opportunities and Challenges in Applying Green Accounting for Natural Environmental Sustainability in Companies. *Journal of Sustainability Science and Management*.
- Mawardi, M. K., Noor, A. Y. M., & Edityastono, L. (2025). Green Entrepreneurship in the Era of Sustainability: The Relationship Between Intent, Institutional Support, and Student Behavior. *Taylor & Francis*.

- Meng, H. (2024). Challenges and Controversies to the European CBAM from a Legal Perspective. *Advances in Economics, Management, and Political Science*.
- Nadeem, S. (2025). Selecting Green Wall Adoption Best Solutions Using Optimization: Addressing Barriers and Maximizing Benefits. *Fount*.
- Nagaj, R. (2024). Green Deal as one of the determinants of energy poverty. *Management Papers*.
- Nguyen, H. C., & Duong, H. K. (2025). The Impact of Sustainability Reporting on the Cost of Capital: Evidence from Vietnam's Listed Companies. *Emerald*.
- O'Reilly, S., Mac An Bhaird, C., & Gorman, L. (2024). Accounting Practitioners' Perspectives on Small-and Medium-Sized Enterprises' Environmental Sustainability Reporting. *Journal of Applied Accounting Research*.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77.
- Prabowo, M. A., & Munthazah, S. (2025). Strategic Management for The Success of Legislative Candidates in the 2024 Election Campaign Period. *Journal of Business and Management Studies*.
- Rahayu, T. (2024). The Influence of Green Investments, Company Size, Media Exposure, and Profitability on Carbon Emission Disclosures in Coal Companies. UMK.
- Rahman, M. J., Rana, T., & Zhu, H. (2025). Analysis of Green Accounting Impacts on Chinese Corporate Sustainability and Financial Performance. Books.google.com.
- Rahman, M. J., Rana, T., & Zhu, H. (2025). The Relationship between ESG Disclosure, Financial Reporting Quality, and Investment. *Environmental, Social and Governance Accounting*.

- Rana, T., Rahman, M. J., & Öhman, P. (2025). Carbon Accounting for Sustainability and Environmental Management.
- Rana, T., Rahman, M. J., & Öhman, P. (2025). Management Control, Performance Measurement, and Climate Risk Management Perspectives for Carbon Accounting.
- Ruiz-Arranz, M., Martin, L., Lotti, G., & Peña, W. (2025). Huella: Measuring the impact of development projects. Inter-American Development Bank.
- Sarifudeen, A. L. (2024). Carbon accounting in Sri Lankan SMEs: challenges and opportunities.
- Schleicher, J., & van Soesbergen, A. (2025). Where Nature and Poverty Meet: Developing a Multidimensional Environment-Poverty Measure. *The Journal of Development Studies*.
- Siswanti, T., & Wijayanti, D. (2025). The Role of Energy Companies in Achieving Net Zero Emissions in Indonesia Based on Sustainability Disclosures Period 2020–2022. *Jurnal Universitas Suryadarma*.
- Stoyanova, K., Grigorova, V., & Benotsmane, R. (2024). ISRG PUBLISHERS. ISRG.
- Taufiq, A., Adriana, N., & Kawuri, S. (2025). Unveiling the Hidden Dimensions of Sustainability Accounting Behind Green Economic Transformation. *The Journal of Academic Science*.
- Thassim, S. (2025). A Quantitative Analysis of the Level of Sustainability Disclosure in Corporate Annual Reports of Indian Companies. *International Journal of Business and Management*.
- Umoh, E. (2025). Impact of Environmental Accounting Practices on Shareholder Value in Pharmaceutical Industries: Insights from an Emerging Economy. SSRN.
- Vota, V., & Cadez, S. (2025). Examining the Impact of Environmental Information on Food Decision-Making of Consumers. BSLab Symposium.

- Zatini, G., & Za, S. (2025). Deciphering barriers and strategies in environmental management accounting (EMA) adoption: A comprehensive two-decade analysis. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*.
- Zatini, G., Della Porta, A., & Za, S. (2025). Deciphering Barriers and Strategies in Environmental Management Accounting (EMA) Adoption: A Comprehensive Two-Decade Analysis. Wiley Online Library.
- Zhang, J. (2024). Assessing Climate Change Impacts and Associated Risks: Applications in Finance and Insurance. University of Waterloo.
- Zhang, J. (2024). Assessing Climate Change Impacts and Associated Risks: Applications in Finance and Insurance. University of Waterloo.

## TENTANG PENULIS



**Dr. Nurmala Ahmar, M.Si., Ak., CA.**

Penulis adalah seorang dosen Universitas Pancasila yang telah mengabdikan diri di dunia pendidikan selama lebih dari 30 tahun. Dengan latar belakang dan pengalaman panjang dalam bidang akuntansi, ia menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap isu-isu lingkungan melalui pendekatan green accounting. Buku ini ditulis sebagai bentuk kontribusinya untuk memperkenalkan dan mendorong praktik akuntansi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ia berharap buku ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi mahasiswa, akademisi, serta para praktisi di bidang akuntansi dan lingkungan.

# BAB

# 8

# AKUNTANSI

# HIJAU BERBASIS

# ETIKA BISNIS

**Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak.**

Universitas Muhammadiyah Makassar

## A. Pendahuluan

*Green Accounting* bukan sekedar praktik pengukuran biaya lingkungan secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Praktik ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada laba, melainkan mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial dari kegiatan operasionalnya (Cahyaningrum and Indra, 2024)

Menurut Ballnat and Festing (2022), pendekatan keberlanjutan dalam manajemen tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab etis. Dalam konteks ini, akuntansi hijau bertindak sebagai perpanjangan tangan dari nilai-nilai organisasi yang peduli terhadap keseimbangan antara bisnis dan ekosistem. *Green Accounting* juga berperan dalam membentuk narasi moral perusahaan di mata publik. Sebagaimana dijelaskan oleh de la Cruz Jara and Spanjol (2024) konsep “social value” dalam bisnis tidak dapat direduksikan hanya menjadi langka, tetapi juga melibatkan persepsi moral dari para pemangku kepentingan terhadap komitmen perusahaan.

Etika bisnis merupakan cabang dari etika terapan yang fokus pada nilai-nilai moral dan norma perilaku yang seharusnya dipatuhi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika ini menjadi fondasi dalam mengatur hubungan antar pelaku bisnis,

pemangku kepentingan, hingga interaksi perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat. Menurut Christensen, Just and Schwarzkopf (2024), etika dalam bisnis melibatkan pengakuan terhadap “impuritas konstitutif” atau ketegangan antara nilai dan kepentingan. Artinya, dalam dunia nyata bisnis tidak selalu “bersih” secara etis, namun justru dari ketegangan inilah lahir potensi etika relasional yang menjadi fondasi moral dari praktik bisnis yang adil dan inklusif. Etika bisnis juga dapat dimaknai sebagai sistem nilai yang memberikan batasan sekaligus arah pada keputusan ekonomi, terutama dalam hal akuntabilitas dan tanggung jawab sosial (Lusmeida, Khomsiyah and J. Arsjah, 2024)

Berbicara mengenai etika bisnis tentu berbicara mengenai kondisi Kesehatan psikologi dari perusahaan yang mencakup bagaimana bisnis dijalankan secara adil (fairness) dan sesuai dengan hukum yang berlaku (legal). Pembahasan mengenai etika bisnis, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai etika. Etika bisnis merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai, dan pandangan yang berlaku dalam masyarakat yang memandang para pelanggarnya sebagai individu yang tidak beradab, bermartabat rendah dan lain-lain, maka berbisnis dengan prinsip etika bisnis merupakan penerapan norma-norma umum terkait etika dalam tindakan bisnis. Dalam kondisi yang seperti ini etika bisnis berkaitan dengan moral, interaksi sosial, hak-hak dan tanggung jawab, dasar-dasar dan norma-norma. Dalam kerangka keberlanjutan, nilai-nilai moral ini menjadi penting untuk memastikan bahwa keuntungan jangka pendek tidak diperoleh dengan mengorbankan generasi mendatang (Cahyaningrum and Indra, 2024).

Penelitian Ballnat and Festing (2022) menunjukkan bahwa keberlanjutan hanya bisa dicapai bila organisasi memadukan strategis bisnis dengan kebijakan etis misalnya, melalui pengelolaan SDM yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti inklusi, keadilan dan keseimbangan menjadi pilar utama dalam membentuk organisasi tahan krisis dan adaptif secara sosial. Lebih lanjut, de la Cruz Jara and Spanjol

(2024) menekankan pentingnya memahami keberagaman perspektif terhadap nilai sosial dalam bisnis. Etika dalam bisnis bukan hanya soal kepatuhan hukum, melainkan bagaimana perusahaan menciptakan dan mendistribusikan nilai yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan

Bisnis yang sukses tidak hanya fokus pada keuntungan, melainkan juga memiliki tujuan yang luhur yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengubah kehidupan manusia yang lebih baik (menciptakan nilai sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan). Bisnis yang baik tidak hanya menguntungkan secara *financial*, akan tetapi baik secara moral dan etika. Penerapan dan pelaksanaan etika bisnis yang kaffah (menyeluruh) dan terus menerus secara konsisten oleh pengusaha dapat menurunkan pelanggaran etika sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## **B. Tantangan Moral dalam Praktik Akuntansi Lingkungan**

Salah satu dilema etis terbesar dalam green accounting adalah ketegangan antara mengejar keuntungan bisnis dan menjaga kelestaria lingkungan. Dalam banyak kasus, perusahaan menghadapi tekanan untuk menunjukkan kinerja keuangan jangka pendek kepada pemegang saham, meskipun hal tersebut bisa bertentangan dengan investasi berkelanjutan (Heubeck and Ahrens, 2024).

Marina, Wahjono and Desipradani (2017) dalam penelitiannya menyebut bahwa integritas etika bisnis dalam akuntansi hijau menjadi krusial agar pelaporan lingkungan tidak berubah menjadi sekedar simbolisme (greenwashing). Ketika perusahaan hanya “menunjukkan” keberlanjutan tanpa komitmen moral yang nyata, akuntansi lingkungan kehilangan esensinya. Dalam kasus yang lebih politis, seperti respons perusahaan terhadap perang Rusia-Ukraina, Bamiatzzi *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bisa digunakan secara partisan untuk membentuk opini publik. Ini menggambarkan bagaimana praktik keberlanjutan dapat diseret ke dalam arena politik tanpa kejelasan etika.

Krisis lingkungan saat ini bukan hanya isu teknis, tapi krisis moral global. Green accounting hadir sebagai jawaban yang menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab dan keadilan intergenerasional dalam kebijakan dan pelaporan perusahaan (Soraya, Nurrochmah and Hwihanus, 2024). Penelitian Erianto, Hasibuan and Nurlaila (2023) juga menekankan bahwa dalam perspektif maqashid syariah, pelestarian lingkungan menjadi bagian dari tujuan moral dan spiritual manusia, sehingga akuntansi lingkungan seharusnya tidak hanya tunduk pada aturan pasar, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan universal. Sementara itu, Christensen, Just and Schwarzkopf (2024) bicara tentang ketegangan produktif dalam kemitraan etis, yang menyoroti pentingnya "relational ethics" atau etika relasional dalam pengambilan leputusan bisnis suatu pendekatan yang sangat relevan dalam green accounting untuk menghadapi kompleksitas krisis lingkungan.

Oleh karena itu, green accounting tidak bisa dilepaskan dari kerangka etika, karena menyangkut keputusan-keputusan penting yang berdampak pada ekosistem, masyarakat dan masa depan generasi berikutnya. Pendekatan berbasis nilai ini akan semakin relevan ketika perusahaan dituntut tidak hanya untuk transparan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab sosial dan ekologis.

### C. Dilema Etis dalam Praktik *Green Accounting*

#### 1. Menyembunyikan limbah atau polusi dalam laporan

Praktik menyembunyikan limbah atau dampak polusi dari laporan lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sering dilakukan untuk menghindari pinjaman regulasi atau menjaga reputasi perusahaan di mata publik.

Menurut (Sukoharsono, 2007), hal ini menunjukkan kegagalan moral dalam sistem akuntansi konvensional yang belum sepenuhnya mengakomodasi akuntabilitas ekologis. Akuntan dan manajemen harus mengambil posisi etis untuk

melaporkan dampak secara jujur dan bertanggung jawab, bukan memanipulasi data.

**2. Menggunakan “angka hijau” untuk citra, bukan aksi nyata (greenwashing)**

Greenwashing adalah salah satu bentuk dilema etis terbesar dalam green accounting. Perusahaan menyampaikan narasi keberlanjutan melalui angka atau label ramah lingkunga, padahal secara internal tidak ada tindakan nyata yang mendukung klaim tersebut.

Christensen, Just and Schwarzkopf (2024) menyoroti bahwa praktik-praktik seperti ini menciptakan “ketegangan produktif” antara strategi komunikasi dan realitas etis perusahaan. Akuntansi hijau yang tidak dibarengi dengan nilai-nilai integritas berpotensi menjadi alat marketing, bukan transformasi nyata menuju keberlanjutan.

**3. Menimbang biaya lingkungan vs. Keuntungan jangka pendek**

Manajer perusahaan sering menghadapi dilema antara mengurangi biaya dengan mengabaikan tanggung jawab lingkungan, atau menanggung biaya keberlanjutan yang tinggi dengan risiko menurunnya profit dalam jangka pendek. (Mubarokah and Setyaningsih (2024) menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, nilai jangka panjang dan kepedulian terhadap lingkungan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sesaat. Namun demikian, keputusan seperti ini tidak selalu mudah karena adanya tekanan pemilik saham, pasar, dan target kinerja.

**D. Membangun Budaya Etis dalam Organisasi**

Etika dalam organisasi tidak seharusnya hadir dalam bentuk kebijakan formal seperti kode etik atau standar perilaku, malainkan harus menjadi bagian internal dari budaya organisasi yaitu nilai nilai, norma, dan praktik sehari hari yang membentuk karakter kolektif perusahaan. Menurut Ballnat and Festing (2022) pandekatan terhadap keberlanjutan organisasi tidak akan efektif jika hanya di Kelola sebagai kebijakan administrasi.

Harus ada transformasi budaya yang menempatkan etika sebagai fondasi dalam setiap proses manajerial, termasuk pengelolaan SDM dan pelaporan lingkungan. (Christensen, Just and Schwarzkopf (2024), Juga menegangkan pentingnya "Relation Ethecs" dalam organisasi yakni cara etika dijalankan melalui relasi manusiawi sehari-hari, bukan hanya lewat Aturan tertulis. budaya etis bentuk dari keseharian bukan hanya saat audit atau krisis reputasi terjadi.

Selain itu, budaya etis harus lahir dari seorang pemimpin sebagai driver organisasi. Untuk itu peran pemimpin sebagai role model etika lingkungan sangat penting, Dimana pemimpin yang menjunjung tinggi etika lingkungan akan menjadi teladan moral (role model) bagi seluruh anggota organisasi. Sikap dan keputusan mereka menjadi cerminan nilai organisasni yang akan ditiru oleh bawahannya. Heubeck and Ahrens (2024) menekankan pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan strategi terkait investasi lingkungan (ESG). ketika pemimpin aktif dalam CSR dalam pelaporan keberlanjutan secara autentik mereka menginspirasi tindakan etis dalam seluruh Lini organisasi. Begitu pula dengan Lusmeida, Khomsiyah and J. Arsjah (2024) yang menyatakan bahwa pemimpin dengan komitmen etis mampu memoderasi risiko dan menjembatani kepentingan pemegang saham dengan nilai-nilai keberlanjutan.

Membangun budaya etis organisasi juga bisa dilakukan melalui upaya sistematis seperti pelatihan dan Pendidikan etika, khususnya bagi para professional yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan lingkungan. Tampak pemahaman etis yang kuat, akuntan dapat tergoda untuk memanipulasi angka demi kepentingan jangka pendek perusahaan. Menurut Cahyaningrum and Indra (2024), edukasi tentang green accounting harus disertai dengan pendidikan etika, agar pelaporan keberlanjutan tidak berubah menjadi simbolik atau manipulatif. Pelatihan ini sebaiknya menekankan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia, Sukoharsono (2007) sudah menekankan pentingnya

akuntabilitas lingkungan sebagai bagian dari pendidikan profesional akuntansi. Akuntan bukan hanya pencatat angka, tetapi juga penjaga moral informasi.

Lebih lanjut sistem reward dan *punishment* juga dinilai menjadi salah satu strategi untuk menumbuhkan budaya etis secara efektif yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam sistem penghargaan dan sanksi. Karyawan yang menunjukkan perilaku etis dan kontribusi terhadap keberlanjutan seharusnya mendapatkan pengakuan yang setara, sementara pelanggaran etis harus ditindak tegas. Penelitian Bamiatzi *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa organisasi yang tidak konsisten dalam penghargaan terhadap perilaku etis cenderung menciptakan iklim “etika partisan” di mana CSR atau green accounting hanya dijalankan demi kepentingan politis atau reputasi semata. Sementara itu, Ballnat and Festing (2022) mendorong integrasi prinsip etis dalam sistem HRM (manajemen sumber daya manusia), termasuk dalam rekrutmen, penilaian kinerja, dan promosi. Ini memastikan bahwa etika bukan hanya menjadi komitmen simbolik, tetapi bagian dari sistem insentif organisasi.

## E. Akuntansi Hijau Berbasis Etika Bisnis

### 1. Etika Bisnis sebagai inti dari *green accounting*

Etika bisnis bukanlah elemen pelengkap dari *green accounting*, tetapi etika bisnis merupakan sebuah pondasi yang mendukung seluruh proses dan tujuan *green report*. Nilai integritas menjadi kunci dan merupakan wujud komitmen, responsibility dan *social care* dimana pelaporan lingkungan kehilangan urgensinya dan menerjemahkannya kedalam kewajiban manajemen atau alat pencitraan saja. Marina *et al.*, (2017) tolak ukur dari keberhasilan *green accounting* sangat bergantung pada bagaimana komitmen etis perusahaan, yang ditunjukan melalui praktik pelaporan lingkungan berbasis etika bisnis dapat memenuhi kebutuhan pasar yang semakin menyadari masalah ekologis dan sosial. Soraya *et al.*, (2022) mengemukakan bahwa perubahan pada

keberlanjutan dapat di implementasikan secara efektif hanya ketika data formal dan angka simbolik didukung oleh integritas dalam pelaporan.

**2. Sukses *green accounting* ditentukan oleh keberaniam Moral dalam bersikap**

Kejujuran membutuhkan keberaniam moral sebagaimana dalam konsep *green accounting*. Keberaniam yang dimaksud yaitu keberaniam berkata benar dalam pelaporan keuangan meskipun tidak populer, menolak Eco-washing dan memprioritaskan transparansi etimbang keuntungan sesaat. Christensen *et al* (2024) menyebut adanya "productive tension" dalam etika bisnis dimana adanya ketegangan antara value dan kepentingan yang justru menjadi panggung pembuktian komitmen moral organisasi. Adanya desakan pasar dan tuntutan pemangku kepentingan komitmen terhadap etika menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah perusahaan benar-benar serius menjalankan tanggungjawabnya atau hanya Pseudo-green branding (Pencitraan palsu seolah-olah peduli lingkungan). Penelitian Lusmeida *et al.*, (2024) juga menekankan urgen dari etika sebagai power yang menjaga arah keputusan strategis agar tetap dalam koridor tanggungjawab sosial dan sustainability untuk jangka panjang.

**3. Keputusan etis hari ini merupakan pondasi membangun Masa depan**

Gerakan hijau dapat dilaksanakan ketika ada masalah serius terkait dengan lingkungan yang memerlukan perhatian dari semua pihak, termasuk sektor industri. Implementasinya sering terhambat karena perusahaan tidak dapat langsung merasakan keuntungan dari gerakan hijau ini, sehingga banyak dari perusahaan merasa tidak perlu untuk menerapkan prakarsa hijau dalam organisasi. Tindakan-tindakan kecil dan keputusan harus diambil dengan didasari etika akan berdampak begitu besar bagi masa yang akan datang. Masa depan yang hijau dan sustain-

tidak dibentuk oleh narasi besar, tetapi konsistensi dalam keputusan etis yang diambil saat ini.

Penelitian Ballnat dan Festing (2022) menunjukkan bahwa organisasi yang menanamkan nilai etika ke dalam kebijakan SDM, pengambilan keputusan, dan pelaporan kinerja, cenderung lebih adaptif, lebih dipercaya, dan lebih tahan krisis. Etika di sini menjadi asset tak berwujud yang mendukung kesinambungan bisnis dan reputasi. Sementara itu, de la Cruz Jara and Spanjol, (2024) menekankan bahwa pemahaman atas nilai sosial bisnis harus bersifat integratif dan tidak statis. Keputusan etis saat ini adalah investasi reputasi dan sosial untuk masa depan yang lebih adil dan lestari.

## F. Simpulan

*Green Accounting* pada prinsipnya bukan focus pada angka atau laporan keuangan sebagaimana tersaji sesuai standar yang berlaku, tetapi lebih dari itu bagaimana nawaitu (niat), Nilai (value) dan keberanian moral baik individu maupun entitas. Etika merupakan jantung dari *green accounting report* yang efektif, oleh karenanya tanpa itu semua data dan system tidak lebih dari dempulan kosmetik belaka. Untuk itu membangun masa depan yang hijau tidak dimulai dari teknologi atau regulasi saja, tetapi harus dari integritas dalam mengambil keputusan. Etika juga bukan beban tambahan, melainkan energi moral yang sejatinya menggerakan keberlanjutan secara menyeluruh baik Perusahaan, masyarakat maupun Bumi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ballnat, A. and Festing, M. (2022) 'The Role of Sustainable HRM in Promoting Corporate Sustainability', *Academy of Management Proceedings*, 2022(1), pp. 165–177. Available at: <https://doi.org/10.5465/ambpp.2022.17628abstract>.
- Bamiatzi, V. et al. (2024) 'The Rise of Partisan CSR: Corporate Responses to the Russia-Ukraine War', *Academy of Management Proceedings*, 2024(1), pp. 263–291. Available at: <https://doi.org/10.5465/amproc.2024.19922abstract>.
- Cahyaningrum, A. and Indra, M. (2024) 'Development of Green Accounting for Sustainable Monitoring and Reporting in Modern Business', *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1).
- Christensen, J.F., Just, S.N. and Schwarzkopf, S. (2024) 'Productive Tensions of Corporate Pride Partnerships: Towards a Relational Ethics of Constitutive Impurity', *Journal of Business Ethics*, 198(2), pp. 343–363. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05813-w>.
- de la Cruz Jara, M.F. and Spanjol, J. (2024) 'Understanding Multiple Perspectives on Social Value in Business: An Integrative Review and Typology', *Journal of Business Ethics*, 198(2), pp. 407–435. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05692-1>.
- Erianto, R., Hasibuan, I.M. and Nurlaila, N. (2023) 'Akuntansi Hijau: Konsep dan Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), p. 135. Available at: <https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.11783>.
- Erstiawan, M.S. et al. (2024) 'Pemetaan Tren Penelitian Akuntansi Hijau di Indonesia Dalam Perpektif: Systematic Literatur Review 2017 – 2024 Mapping Green Accounting Research Trends in Indonesia: A Systematic Literatur Review Perspective from 2017 to 2024', *Greenomika*, 06(2), pp. 143–161.

- Heubeck, T. and Ahrens, A. (2024) 'Governing the Responsible Investment of Slack Resources in Environmental, Social, and Governance (ESG) Performance: How Beneficial are CSR Committees?', *Journal of Business Ethics*, 198(2), pp. 365–385. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10551-024-05798-6>.
- Lusmeida, H., Khomsiyah and J. Arsjah, R. (2024) 'Etika Bisnis Memoderasi Pengaruh Manajemen Risiko, Modal Intelektual Hijau Dan Hak Pemegang Saham Terhadap Keuangan Berkelanjutan', *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 24(1), pp. 107–130. Available at: <https://doi.org/10.25105/v24i1.19580>.
- Marina, A., Wahjono, S.I. and Desipradani, G. (2017) 'Akuntansi Hijau Berbasis Etika Bisnis: Implementasi Green Accounting untuk Merespon Kebutuhan Pasar', *Jurnal Balance*, 14(1), pp. 19–28.
- Mubarokah, A.K. and Setyaningsih, N.D. (2024) 'Peran Green Accounting dalam Mewujudkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Pendahuluan', *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), pp. 189–198. Available at: <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3449>.
- Nofita, R. et al. (2024) 'Green Accounting and Organization Performance: Science Mapping of Present and Future Trends', *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 7(1), pp. 62–81.
- Rachmiarti Kusumah, J. (2020) 'Green Product Sebagai Penerapan Etika Bisnis Pada Perusahaan Produsen Cat', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(5), pp. 451–463. Available at: <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i5.205>.
- Riski, M. et al. (2025) 'The Effect of Green Accounting , Green Intellectual Capital & Corporate Social Responsibility on Financial Performance: Empirical Study of Energy Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for the 2021-2023 Period', *Golden Ratio of Finance Management*, 5(1), pp. 123–136.

- Setiawati, L. *et al.* (2024) 'GREEN ACCOUNTING SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN', *Jurnal media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Soraya, B., Nуррохмад, А. and Hwihanus, H. (2024) 'Business Transformation Towards Sustainability: The Role of Green Accounting in Sustainability Management', *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 1(3), pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/10.47134/jees.v1i3.342>.
- Sukoharsono, E.G. (2007) 'Green Accounting in Indonesia: Accountability and Environmental Issues', *The International Journal of Accounting and Business Society*, 15(1), pp. 21–60.
- Wahyuni, W., Meutia, I. and Syamsurijal, S. (2019) 'The Effect of Green Accounting Implementation on Improving the Environmental Performance of Mining and Energy Companies in Indonesia', *Binus Business Review*, 10(2), pp. 131–137. Available at: <https://doi.org/10.21512/bbr.v10i2.5767>.

## TENTANG PENULIS



**Dr. Mira, S.E., M.Ak., Ak.**

Penulis lahir di Dompu pada tanggal 03 Maret 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Prodi Akuntansi Univeristas Muhammadiyah Makassar, S2 Universitas Muslim Indonesia dan S3 Ilmu Akuntansi pada universitas Airlangga Surabaya. Selain menjadi dosen, penulis juga terdaftar sebagai Auditor Junior pada KAP SJR Makassar. Penulis termotivasi untuk menulis karena dorongan untuk berbagi ilmu, meningkatkan kualitas riset, dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi. Sejumlah karya tulis yang telah diterbitkan antara lain: *Analisis Kepatuhan Pajak UMKM di Sulawesi Selatan*, *Pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan*, dan *Good Governance dan Transparansi Keuangan Publik* serta masih banyak lagi. Korespondensi dapat dilakukan melalui email: [mira.akuntansi@unismuh.ac.id](mailto:mira.akuntansi@unismuh.ac.id). Penulis terbuka untuk kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi.



# BAB

# 9

## MANAJEMEN AKUNTANSI HIJAU DALAM EFISIENSI BIAYA LINGKUNGAN

Dr. Tri Astuti, S.E., M.M., A.k., C.A., CERA.

Universitas Pancasila

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Perubahan iklim dan isu lingkungan global yang semakin mengkhawatirkan telah menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis, dimana peningkatan emisi karbon, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta pencemaran lingkungan telah mendorong berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, investor, dan konsumen, untuk mencari solusi yang keberlanjutan guna mengurangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi yang terus berkembang (Burritt *et al.*, 2002). Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mematuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat, tetapi juga harus merespons tekanan pasar dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menerapkan strategi bisnis yang lebih ramah lingkungan, salah satunya melalui manajemen akuntansi hijau yang berfokus pada efisiensi biaya lingkungan, yang tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem, tetapi juga meningkatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.

Transformasi bisnis menuju keberlanjutan memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengelola dampak lingkungan, dimana akuntansi hijau berperan penting dalam menyediakan informasi yang transparan mengenai sejauh mana aktivitas bisnis memengaruhi lingkungan dan bagaimana perusahaan dapat mengadopsi langkah-langkah strategis untuk mengurangi jejak karbon, meminimalkan limbah, serta meningkatkan efisiensi biaya operasional melalui optimalisasi penggunaan sumber daya yang lebih cerdas dan berkelanjutan (Schaltegger *et al.*, 2006). Dalam hal ini, konsep akuntansi hijau tidak hanya muncul sebagai instrumen pelaporan semata, tetapi juga sebagai solusi yang mengintegrasikan faktor lingkungan ke dalam sistem pengelolaan keuangan perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang penghematan biaya melalui efisiensi energi, pengurangan limbah produksi, serta inovasi dalam proses bisnis yang lebih ramah lingkungan, yang pada akhirnya tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dengan meningkatkan profitabilitas dan data saing perusahaan di era pasar global yang semakin menuntut praktek bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

## **2. Tujuan dan Manfaat Akuntansi Hijau**

Manajemen akuntansi hijau bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola lingkungan yang timbul dari operasi bisnis guna meningkatkan efisiensi serta keberlanjutan perusahaan, dimana penerapan strategi ini, tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya produksi melalui pengurangan limbah, peningkatan efisiensi energi, dan optimalisasi penggunaan sumber daya (Burritt *et al.*, 2002), tetapi juga mendorong inovasi dalam pengelolaan lingkungan yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan, memperkuat daya saing di pasar global yang semakin menekankan aspek

keberlanjutan, serta menciptakan peluang investasi yang lebih besar seiring dengan meningkatnya perhatian pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab lingkungan perusahaan.

Selain itu implementasi akuntansi hijau juga berperan dalam membangun citra positif perusahaan di mata investor, konsumen dan regulator karena semakin banyak pihak yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan yang mampu menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya, menjadikan akuntansi hijau tidak hanya sebagai alat kepatuhan terhadap regulasi yang semakin ketat, tetapi juga sebagai strategi bisnis yang mampu meningkatkan profitabilitas sekaligus memastikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang di tengah tuntutan pasar yang terus berkembang.

## B. Konsep Dasar Manajemen Akuntansi Hijau

### 1. Definisi dan Ruang Lingkup

Akuntansi hijau merupakan suatu pendekatan dalam bidang akuntansi yang secara eksplisit memasukkan aspek lingkungan ke dalam proses pengukuran dan pelaporan keuangan, dimana metode ini tidak hanya digunakan untuk menilai dampak finansial dari kebijakan serta strategi keberlanjutan perusahaan, tetapi juga untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pemangku kepentingan mengenai bagaimana perusahaan mengelola sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Atkinson *et al.*, 2012).

Manajemen akuntansi hijau adalah pengidentifikasi, mengukur, dan mengelola biaya lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal guna meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Dimana aspek biaya lingkungan yang diperhitungkan tidak hanya

mencakup biaya eksternal seperti polusi dan limbah, tetapi juga biaya internal yang berkaitan dengan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, inovasi proses produksi, serta strategi mitigasi resiko lingkungan yang dapat berdampak pada profitabilitas dan regulasi perusahaan di pasar global yang semakin memuntut transparansi dalam pelaporan keberlanjutan dengan ruang lingkup yang mencakup pelaporan lingkungan, perhitungan biaya lingkungan serta analisis mendalam mengenai dampak keberlanjutan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Gray *et al.*, 2014).

Penerapan sistem akuntansi hijau tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi sumber-sumber inefisiensi yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, tetapi juga membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan sumber daya, mengurangi jejak karbon, serta meningkatkan daya saing perusahaan melalui pendekatan bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

**2. Peran Akuntansi Hijau dalam Efisiensi Biaya Lingkungan**  
**a. Mengurangi Pemborosan Sumber Daya melalui Pengelolaan Biaya Lingkungan yang Lebih Baik**

Menyoroti bagaimana penerapan akuntansi manajemen lingkungan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan sumber daya melalui pengelolaan biaya lingkungan yang lebih efektif. Dengan menggunakan sistem akuntansi hijau, perusahaan dapat memetakan sumber inefisiensi dalam penggunaan bahan baku, energi, dan air, serta mengukur dampak lingkungan dari aktivitas operasional mereka. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menerapkan strategi pengurangan limbah, efisiensi energi, serta optimalisasi proses produksi yang lebih ramah lingkungan, sehingga tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga menurunkan jejak lingkungan yang dihasilkan.

**b. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan untuk Menghindari Denda dan Penalti**

Perusahaan dihadapkan pada regulasi lingkungan yang semakin ketat untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Penerapan akuntansi hijau memungkinkan perusahaan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan biaya lingkungan secara lebih akurat, sehingga dapat memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pengawas. Dengan kepatuhan yang lebih baik, perusahaan dapat menghindari risiko hukum, denda, serta penalti akibat pelanggaran regulasi, yang pada akhirnya juga melindungi reputasi bisnis di mata pemangku kepentingan.

**c. Meningkatkan Daya Saing melalui Inovasi Berbasis Keberlanjutan**

Menekankan bahwa integrasi akuntansi hijau dalam strategi perusahaan dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, perusahaan dapat mengembangkan inovasi seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, penerapan ekonomi sirkular, serta efisiensi energi yang tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin sadar lingkungan, menarik investor yang fokus pada investasi berkelanjutan, serta membangun citra positif yang memperkuat posisi kompetitif dalam jangka panjang.

**C. Identifikasi dan Pengukuran Biaya Lingkungan**

**1. Biaya Pencegahan, Deteksi dan Kegagalan Lingkungan**

**a. Biaya Pencegahan :**

Biaya pencegahan mencakup semua pengeluaran yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan, seperti

mesin hemat energi, sistem pengolahan limbah, atau bahan baku yang lebih berkelanjutan, merupakan bentuk utama dari biaya ini. Selain itu, biaya pelatihan karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam praktik keberlanjutan juga termasuk dalam kategori ini. Kebijakan keberlanjutan perusahaan, seperti penerapan standar ISO 14001 atau sistem manajemen lingkungan lainnya, juga memerlukan investasi awal yang dapat mengurangi risiko lingkungan jangka panjang serta meningkatkan efisiensi operasional.

**b. Biaya Deteksi:**

Biaya deteksi berkaitan dengan aktivitas pemantauan dan pengukuran yang dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Ini mencakup audit lingkungan berkala untuk mengevaluasi kinerja keberlanjutan, pengukuran emisi gas rumah kaca untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan sistem pemantauan lingkungan berbasis teknologi, seperti sensor kualitas udara dan air. Dengan adanya biaya deteksi, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah lingkungan lebih awal, sehingga dapat mengambil tindakan korektif sebelum terjadi dampak yang lebih besar dan merugikan.

**c. Biaya Kegagalan:**

Biaya kegagalan muncul sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap regulasi atau dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Biaya ini mencakup denda dan sanksi hukum akibat pelanggaran aturan lingkungan, seperti pembuangan limbah berbahaya atau emisi melebihi batas yang ditentukan. Selain itu, biaya remediasi lingkungan, seperti pembersihan limbah atau rehabilitasi ekosistem yang terdampak, juga termasuk dalam kategori ini. Kerusakan reputasi akibat kegagalan dalam manajemen lingkungan dapat berdampak lebih luas, seperti

berkurangnya kepercayaan konsumen, hilangnya peluang investasi, dan penurunan nilai saham perusahaan.

## 2. Metode Pengukuran Biaya Lingkungan

### a. *Activity Based Costing (ABC)*

*Activity-Based Costing (ABC)* digunakan untuk mengalokasikan biaya lingkungan secara lebih akurat dengan mengidentifikasi aktivitas yang menyebabkan biaya dan membebakkannya ke produk atau layanan yang terkait. Dengan metode ini, perusahaan dapat memahami sumber pemborosan sumber daya dan mengambil langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi dampak lingkungan dalam jangka panjang.

### b. *Life Cycle Assessment (LCA)*

*Life Cycle Assessment (LCA)* mengevaluasi dampak lingkungan dari seluruh siklus hidup suatu produk, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan, hingga tahap akhir seperti daur ulang atau pembuangan. LCA membantu perusahaan dalam mengidentifikasi titik kritis dalam rantai produksi yang memiliki dampak lingkungan terbesar, sehingga dapat dikembangkan strategi untuk menguranginya.

### c. *Full Cost Accounting (FCA)*

*Full Cost Accounting (FCA)* mengintegrasikan semua biaya lingkungan, baik yang bersifat langsung (misalnya biaya pengolahan limbah) maupun tidak langsung (seperti biaya dampak lingkungan terhadap masyarakat) ke dalam laporan keuangan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memiliki gambaran lebih akurat tentang dampak finansial dari kebijakan lingkungan mereka dan membuat keputusan bisnis yang lebih berkelanjutan.

**d. *Life Cycle Costing (LCC)***

*Life Cycle Costing (LCC)* menganalisis biaya lingkungan sepanjang siklus hidup produk, termasuk biaya produksi, operasional, pemeliharaan, serta pembuangan atau daur ulang. Jasch (2009) menemukan bahwa LCC membantu perusahaan energi dalam memahami biaya tersembunyi dari siklus hidup produk mereka, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

**e. *Material Flow Cost Accounting (MFCA)***

*Material Flow Cost Accounting (MFCA)* berfokus pada identifikasi pemborosan material dan energi dalam proses produksi dengan menelusuri pergerakan bahan baku serta output yang dihasilkan. Gale (2006) menunjukkan bahwa penerapan MFCA di industri manufaktur dapat mengurangi biaya produksi dan limbah dengan mengidentifikasi inefisiensi yang sebelumnya tidak terlihat, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi konsumsi bahan baku dan meningkatkan produktivitas secara lebih berkelanjutan.

**D. Implementasi Manajemen Akuntansi Hijau dalam Efisiensi Biaya Lingkungan**

**1. Pengelolaan Limbah dan Efisiensi Sumber Daya**

Strategi utama dalam efisiensi biaya lingkungan adalah dengan mengurangi limbah produksi. Perusahaan yang menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam operasionalnya dapat menghemat biaya bahan baku dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengurangi beban keuangan tetapi juga mematuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat.

**a. *Teknik Lean Manufacturing***

*Lean Manufacturing* adalah metode produksi yang berfokus pada pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dalam konteks akuntansi hijau,

pendekatan ini membantu perusahaan mengurangi penggunaan bahan baku berlebih, meningkatkan efisiensi energi, dan mengoptimalkan proses produksi. Dengan penerapan teknik seperti *Just-In-Time* (JIT) dan Kaizen, perusahaan dapat menekan biaya operasional, mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas produk.

**b. Pendekatan *Circular Economy***

*Circular Economy* (Ekonomi Sirkular) menekankan pemanfaatan kembali limbah sebagai bahan baku baru untuk menciptakan siklus produksi yang lebih berkelanjutan. Melalui konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam baru dan meminimalkan limbah yang berakhir di lingkungan. Contohnya, dalam industri manufaktur, limbah logam atau plastik dapat didaur ulang menjadi bahan baku baru, sementara dalam sektor energi, limbah biomassa dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya bahan baku tetapi juga meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan daya saing perusahaan dalam pasar yang semakin sadar akan keberlanjutan.

**2. Studi Kasus Perusahaan manufaktur yang Menerapkan Akuntansi Hijau**

**• Optimalisasi Konsumsi Energi dalam Efisiensi Biaya Lingkungan**

Penggunaan energi yang lebih efisien menjadi faktor utama dalam mengurangi biaya lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Dengan menerapkan teknologi hemat energi, seperti sistem pencahayaan LED, peralatan produksi berdaya rendah, dan otomatisasi proses, perusahaan dapat secara signifikan menekan konsumsi listrik serta biaya operasional (Gale, 2020). Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya atau biomassa,

membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi karbon. Investasi dalam efisiensi energi juga memberikan manfaat tambahan, seperti insentif pajak dan pengurangan beban regulasi lingkungan.

*Toyota dan Green Supply Chain Management (GSCM)*  
Toyota (2015) berhasil mengurangi jejak karbonnya dengan menerapkan *Green Supply Chain Management* (GSCM), sebuah konsep yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam seluruh rantai pasok. Dengan memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan, mengoptimalkan transportasi logistik, dan menerapkan efisiensi energi dalam proses produksi, Toyota mampu menekan emisi karbon sekaligus menghemat biaya operasional. Sarkis (2012) menunjukkan bahwa implementasi GSCM tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

*Unilever dan Material Flow Cost Accounting (MFCA)*  
Unilever (2018) menerapkan *Material Flow Cost Accounting* (MFCA) untuk mengidentifikasi pemborosan dalam rantai produksinya, khususnya dalam pengelolaan limbah plastik. Dengan menganalisis aliran material secara rinci, perusahaan mampu mengurangi penggunaan plastik berlebih, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengurangi limbah yang dihasilkan. Metode ini membantu Unilever mencapai efisiensi biaya sekaligus memperkuat komitmen keberlanjutan dalam operasional bisnisnya.

Melalui strategi optimalisasi energi dan penerapan akuntansi hijau, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, mengurangi biaya lingkungan, serta menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang.

## E. Implementasi Akuntansi Hijau dalam Sektor Energi

### 1. Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi

Efisiensi energi dan pengurangan emisi merupakan strategi utama dalam mengurangi dampak lingkungan sekaligus menekan biaya operasional. Perusahaan semakin beralih ke teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menekan emisi karbon. Selain itu, sistem pemantauan karbon memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan konsumsi energi secara real-time, sehingga mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi produksi.

### 2. Peran Energi Terbarukan dalam Pengelolaan Biaya Lingkungan.

Penggunaan energi terbarukan menawarkan keuntungan jangka panjang karena biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Selain itu, regulasi seperti **pajak karbon** memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam energi bersih guna menghindari denda dan meningkatkan keberlanjutan bisnis.

- a. Pertamina (2020) mulai mengadopsi strategi keberlanjutan dengan berinvestasi dalam energi terbarukan, seperti pengembangan biofuel dan tenaga surya, untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi energi.
- b. Tesla (2022) menerapkan strategi akuntansi hijau dalam produksi baterai listrik, yang mencakup pengurangan jejak karbon dalam rantai pasok dan optimalisasi material berkelanjutan.

Studi menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan lingkungan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi energi. Ilmuwan menemukan bahwa perusahaan energi yang secara transparan melaporkan dampak lingkungannya cenderung lebih efisien dalam mengelola konsumsi energi. Selain itu, peneliti menyoroti bagaimana kebijakan pajak karbon mendorong perusahaan

energi untuk menyesuaikan strategi akuntansi mereka agar lebih berorientasi pada keberlanjutan.

Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga meningkatkan daya saing dalam pasar global yang semakin fokus pada energi bersih dan keberlanjutan.

## F. Strategi Manajemen dan Pelaporan Berkelanjutan

### 1. Standar Pelaporan Lingkungan (GRI, ISO 14001 dll)

Dalam dunia akuntansi dan manajemen lingkungan, terdapat beberapa standar yang digunakan untuk melaporkan dan mengelola dampak lingkungan perusahaan. Dua standar utama yang sering digunakan adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) dan ISO 14001.

#### a. *Global Reporting Initiative* (GRI)

GRI adalah standar pelaporan keberlanjutan yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Standar ini membantu organisasi mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka dengan transparan

##### 1) Tujuan GRI

- a) Memberikan kerangka kerja bagi perusahaan dalam mengungkapkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
- b) Mempermudah pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan.
- c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

##### 2) Struktur Standar GRI

GRI memiliki tiga kategori standar utama:

- a) **GRI Universal Standards** → Prinsip dasar dan panduan umum pelaporan keberlanjutan.
- b) **GRI Topic-specific Standards** → Standar yang lebih spesifik, termasuk aspek lingkungan seperti:
  - (1) **GRI 302** (Energi)
  - (2) **GRI 303** (Air dan Efluen)

- (3) GRI 305 (Emisi)
  - (4) GRI 306 (Limbah)
  - c) **GRI Sector Standards** → Panduan khusus untuk industri tertentu, seperti energi, manufaktur, atau pertambangan.
- 3) **Keunggulan GRI**
- a) Dapat digunakan oleh perusahaan dari berbagai sektor dan ukuran.
  - b) Membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan.
  - c) Menghubungkan laporan keberlanjutan dengan standar lain seperti SDGs (Sustainable Development Goals).

**b. ISO 14001**

ISO 14001 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen lingkungan (Environmental Management System/EMS). Standar ini membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka secara berkelanjutan.

1) **Tujuan ISO 14001**

- a) Mengelola dampak lingkungan organisasi secara sistematis.
- b) Memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.
- c) Meningkatkan efisiensi operasional dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan limbah.

2) **Prinsip Dasar ISO 14001**

ISO 14001 berbasis pada siklus **Plan-Do-Check-Act (PDCA)**:

- a) **Plan** → Identifikasi risiko lingkungan, perencanaan kebijakan, dan penetapan target.
- b) **Do** → Implementasi kebijakan dan prosedur lingkungan.

- c) **Check** → Monitoring dan evaluasi kinerja lingkungan.
- d) **Act** → Perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.

### 3) Manfaat ISO 14001

- a) Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan dalam kepatuhan lingkungan.
- b) Mengurangi risiko hukum terkait regulasi lingkungan.
- c) Mendorong efisiensi biaya melalui pengurangan limbah dan penggunaan energi yang lebih baik.
- d) Dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lain seperti ISO 9001 (**Quality Management System**).

**Tabel 9.1** Perbandingan GRI dan ISO 14001

Aspek	GRI	ISO 14001
<b>Fokus Utama</b>	Pelaporan keberlanjutan dan transparansi	Sistem manajemen lingkungan
<b>Sifat Standar</b>	Prinsip pelaporan	Standar manajemen
<b>Tujuan</b>	Menyediakan panduan pelaporan dampak ESG	Mengelola dampak lingkungan melalui sistematisasi proses
<b>Cakupan</b>	Seluruh aspek ESG (termasuk lingkungan)	Fokus pada aspek lingkungan
<b>Kepatuhan</b>	Sukarela, tetapi sering diminta pemangku kepentingan	Bisa bersifat wajib jika diadopsi oleh regulasi nasional atau industry
<b>Sertifikasi</b>	Tidak ada sertifikasi khusus	Dapat disertifikasi oleh Lembaga independen

Sumber : Diolah sendiri

## **2. Integrasi Akuntansi Hijau dalam Startegi Bisnis**

Akuntansi hijau merupakan pendekatan akuntansi yang memasukkan aspek lingkungan dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Integrasi akuntansi hijau ke dalam strategi bisnis tidak hanya membantu perusahaan dalam memenuhi regulasi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, reputasi, dan daya saing.

### **a. Konsep Akuntansi Hijau dalam Bisnis**

Akuntansi hijau mencakup pengukuran, pencatatan, dan pelaporan biaya serta manfaat yang terkait dengan dampak lingkungan perusahaan. Beberapa aspek utama dalam akuntansi hijau meliputi:

- 1) Biaya lingkungan** (e.g., pengolahan limbah, emisi karbon, daur ulang).
- 2) Aset lingkungan** (e.g., investasi dalam teknologi ramah lingkungan).
- 3) Pendapatan dari inisiatif hijau** (e.g., penjualan kredit karbon, produk ramah lingkungan).
- 4) Liabilitas lingkungan** (e.g., penalti atas pencemaran, biaya remediasi).

### **b. Strategi Integrasi Akuntansi Hijau dalam Bisnis**

Untuk menerapkan akuntansi hijau secara efektif, perusahaan perlu mengintegrasikannya dalam berbagai aspek strategi bisnis:

- 1) Perencanaan dan Pengambilan Keputusan**
  - a) Menyertakan faktor lingkungan dalam analisis biaya-manfaat untuk investasi dan proyek bisnis.
  - b) Menggunakan *Green Performance Indicators (GPI)* sebagai bagian dari *Key Performance Indicators (KPI)*.
  - c) Menganalisis dampak lingkungan dalam perencanaan anggaran dan pengendalian biaya.
- 2) Pengembangan Produk dan Inovasi**
  - a) Menerapkan *eco-design* dan konsep *circular economy* dalam pengembangan produk.

- b) Menghitung jejak karbon produk untuk menilai dampak lingkungan dalam siklus hidupnya.
- c) Meningkatkan efisiensi bahan baku dengan menggunakan sumber daya terbarukan.

**3) Operasional dan Efisiensi Sumber Daya**

- a) Menerapkan sistem *Environmental Management Accounting (EMA)* untuk mengelola biaya lingkungan.
- b) Mengoptimalkan konsumsi energi, air, dan bahan baku untuk meningkatkan efisiensi biaya.
- c) Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan emisi.

**4) Pelaporan dan Transparansi**

- a) Menyusun laporan keberlanjutan berbasis standar seperti **GRI, SASB, atau IFRS S2**.
- b) Mengadopsi ISO 14001 dalam sistem manajemen lingkungan untuk memastikan kepatuhan regulasi.
- c) Melakukan audit lingkungan secara berkala untuk meningkatkan akuntabilitas.

**5) Keunggulan Kompetitif dan Reputasi Perusahaan**

- a) Menggunakan akuntansi hijau sebagai strategi diferensiasi dalam branding dan pemasaran.
- b) Menjalin kemitraan dengan pemasok dan pelanggan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.
- c) Memanfaatkan insentif pajak dan pendanaan hijau untuk meningkatkan profitabilitas.

**Tabel 9.2 Manfaat Integrasi Akuntansi Hijau dalam Strategi Bisnis**

Aspek	Manfaat
Keuangan	Mengurangi biaya operasional, meningkatkan profitabilitas, dan mendapatkan akses ke pendanaan hijau
Kepatuhan Regulasi	Meminimalkan resiko hukum dan sanksi terkait peraturan lingkungan

Aspek	Manfaat
Efisiensi Operasional	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah
Reputasi dan daya Saing	Meningkatkan citra perusahaan dan menarik investor serta konsumen yang peduli lingkungan
Inovasi Bisnis	Mendorong pengembangan produk dan layanan ramah lingkungan

Sumber : Diolah sendiri

## G. Kesimpulan

Manajemen akuntansi hijau memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mengelola biaya lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber inefisiensi yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti polusi dan limbah, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui teknologi ramah lingkungan dan inovasi dalam proses produksi. Penerapan akuntansi hijau tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

Selain itu, manajemen akuntansi hijau juga memungkinkan perusahaan untuk memenuhi tuntutan pasar global yang semakin menekankan pentingnya keberlanjutan dan transparansi dalam pelaporan lingkungan. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka melalui manajemen akuntansi hijau akan mendapatkan keunggulan kompetitif yang lebih baik di pasar, memperkuat citra perusahaan di mata investor dan konsumen, serta menciptakan peluang untuk inovasi yang lebih berkelanjutan. Hal ini menjadikan akuntansi hijau sebagai alat yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, A.A., Epstein, M.J. and Young, S.M. (2012) *Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution.*. 6th ed. Pearson Education.
- Gray, R., Bebbington, J. and Collison, D. (2014) *Sustainability, Environmental Performance and Disclosures*. Routledge.
- Burritt, R. L., Hahn, T., & Schaltegger, S. (2002). Towards a comprehensive framework for environmental management accounting. *Australian Accounting Review*, 12(27), 39–50.
- Gale, R. (2006). Environmental costs at a Canadian paper mill: A case study of Environmental Management Accounting (EMA). *Journal of Cleaner Production*, 14(14), 1237–1251. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.08.001>
- Jasch, C. (2009). Environmental and Material Flow Cost Accounting: Principles and Procedures. Springer Science & Business Media.
- Sarkis, J. (2012). A boundaries and flows perspective of green supply chain management. *Supply Chain Management: An International Journal*, 17(2), 202–216. <https://doi.org/10.1108/13598541211212924>
- Schaltegger, S., Bennett, M., and Burritt, R. (2006) *Environmental Management Accounting: An Introduction and Case Studies*. Springer.
- Unilever. (2018). Annual Report and Accounts 2018. Unilever PLC. [Sustainability and Waste Reduction Initiatives]

## TENTANG PENULIS



**Dr. Tri Astuti, S.E., M.M., A.K., CERA.**

Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 11 Februari 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi D3 Universitas Pancasila. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Extention Universitas Indonesia, S2 Universitas Pancasila dan S3 Universitas Pancasila. Selain menjadi dosen, penulis menekuni bidang B. Korespondensi melalui email : triastuti@univpancasila.ac.id.

Penulis memiliki jabatan fungsional dosen sebagai Asisten Ahli (1 Desember 1999), Lektor (1 Juli 2019) dan Lektor Kepada (1 Mei 2023). Hasil karya yang telah dibuat menghasilkan buku *book chapter* dengan judul :Jangan Biarkan Buah-Buah itu Berserakan, mengambil tema Peluang Bisnis Inovasi Pada Alat Kesehatan dan Makanan Beku, Pengelolaan Kartu Hutang, Teori Akuntansi (Teori, Implementasi dan Perkembangannya), Buku Ajar Akuntansi Biaya, Buku ajar Pengantar Akuntansi serta Cara Mudah Memahami Akuisisi dan Disposisi Properti, Pabrik dan Peralatan Part 1 [https://www.youtube.com/watch?v=r8FchzVRw\\_0&t=24s](https://www.youtube.com/watch?v=r8FchzVRw_0&t=24s)



# BAB

# 10

## AKUNTANSI HIJAU DAN KINERJA LINGKUNGAN

**Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc., CGAA.**

Politeknik Negeri Sriwijaya

### A. Pendahuluan

Di era globalisasi dan kesadaran lingkungan yang semakin meningkat saat ini, bisnis diharuskan untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan selain mengejar keuntungan ekonomi. Kebutuhan ini dipenuhi oleh akuntansi hijau, suatu metode akuntansi yang memasukkan elemen lingkungan dalam pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan. Akuntansi hijau membantu bisnis menemukan dan mengelola biaya serta dampak lingkungannya. Ini juga menjadi dasar untuk evaluasi dan peningkatan kinerja lingkungan. Bisnis dapat memperoleh banyak manfaat dari lingkungan yang baik, termasuk peningkatan efisiensi, pengurangan risiko, dan peningkatan citra. Oleh karena itu, untuk bisnis modern yang ingin tetap berdaya saing dan berkelanjutan, memahami akuntansi hijau dan kinerja lingkungan sangat penting.

### B. Akuntansi Hijau dan Kinerja Lingkungan

#### 1. Konsep Dasar Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau adalah cabang akuntansi yang berfokus pada dampak aktivitas ekonomi perusahaan terhadap lingkungan dengan tujuan meningkatkan transparansi dan mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan (Schaltegger & Burritt, 2010). Dalam akuntansi

hijau, Anda dapat mempertimbangkan biaya yang berkaitan dengan lingkungan, aset yang berkelanjutan, dan kewajiban lingkungan yang dapat memengaruhi keputusan strategis yang dibuat oleh perusahaan (Tilt, 2018). Dengan menggunakan akuntansi hijau, perusahaan dapat mengelola risiko lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memenuhi peraturan dan keinginan pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan (Bebbington *et al.*, 2001).

Sejarah akuntansi hijau dimulai dengan peningkatan kesadaran global tentang dampak bisnis pada lingkungan pada akhir abad ke-20, yang didorong oleh gerakan keberlanjutan dan tuntutan transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan (Gray, 1992). Pada tahun 1970-an dan 1980-an, akuntansi lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan pengukuran biaya lingkungan (Bebbington *et al.*, 2001). Berbagai regulasi dan standar internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Environmental Management Accounting* (EMA) mendorong perusahaan untuk memasukkan elemen lingkungan dalam laporan keuangan mereka, yang mendorong perkembangan akuntansi hijau pada tahun 1990-an (Schaltegger & Burritt, 2010). Akuntansi hijau saat ini berkembang dengan menggabungkan kebijakan keberlanjutan global dan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja lingkungan bisnis dan mendukung ekonomi sirkular (Tilt, 2018).

Prinsip-prinsip utama dalam akuntansi hijau mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk mengintegrasikan faktor lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. *Pertama*, prinsip keterbukaan dan transparansi, yang mengharuskan bisnis melaporkan dampak lingkungan dari operasi mereka, seperti pengungkapan biaya dan emisi karbon (Schaltegger & Burritt, 2010). *Kedua*, prinsip akuntabilitas, yang menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab kepada

pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Gray *et al.*, 1995). Ketiga, prinsip kehati-hatian, yang berarti bahwa perusahaan harus mempertimbangkan risiko lingkungan ketika mereka membuat keputusan investasi dan keuangan (Bebbington *et al.*, 2001). Keempat, prinsip kesinambungan yang menekankan betapa pentingnya memasukkan elemen lingkungan ke dalam rencana bisnis jangka panjang untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi (Tilt, 2018). Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan memenuhi persyaratan regulasi dan harapan masyarakat terhadap bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Akuntansi hijau memainkan peran penting dalam bisnis kontemporer karena membantu perusahaan mengintegrasikan elemen lingkungan ke dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Dalam era di mana kesadaran keberlanjutan semakin meningkat di seluruh dunia, akuntansi hijau memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola bagaimana tindakan mereka berdampak pada lingkungan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan (Schaltegger & Burritt, 2010). Selain itu, menggunakan akuntansi hijau membantu bisnis mematuhi peraturan yang semakin ketat tentang lingkungan serta mengurangi risiko finansial mereka karena denda atau litigasi lingkungan (Bebbington & Larrinaga, 2014). Dengan mempertimbangkan biaya dan keuntungan lingkungan, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi sumber daya, meningkatkan reputasi, dan menarik investor yang sadar lingkungan (Tilt, 2018). Oleh karena itu, akuntansi hijau adalah strategi bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang selain membantu mematuhi peraturan.

Akuntansi hijau terkait erat dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan keberlanjutan karena keduanya menekankan betapa pentingnya mengelola dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas bisnis. Akuntansi hijau menawarkan perusahaan kerangka kerja untuk mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak lingkungan mereka secara transparan, sehingga mendukung tujuan keberlanjutan yang mencakup keseimbangan antara aspek ekternal dan eksternal (Schaltegger & Burritt, 2010). Selain itu, dalam hal CSR, akuntansi hijau membantu perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan manfaat lingkungan dan biaya saat membuat keputusan (Bebbington, J., Unnerman, J., & O'Dwyer, 2008). Perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya dan memenuhi persyaratan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan dengan menerapkan akuntansi hijau (Tilt, 2018). Akuntansi hijau sangat penting untuk mencapai keberlanjutan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

## 2. Komponen Akuntansi Hijau

Biaya lingkungan dibagi menjadi empat kategori utama (Hansen, D. R., & Mowen, 2005);

### a. Biaya Pencegahan (*Prevention Costs*)

Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Contohnya: Biaya perencanaan dan desain produk yang ramah lingkungan Biaya pelatihan karyawan tentang lingkungan Biaya pemeliharaan peralatan pencegahan pencemaran.

### b. Biaya Deteksi (*Detection Costs*)

Biaya yang dikeluarkan untuk memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan. Contohnya: Biaya pengujian kualitas air dan udara Biaya audit lingkungan Biaya pemantauan emisi.

**c. Biaya Kegagalan Internal (*Internal Failure Costs*)**

Biaya yang timbul akibat kegagalan dalam mencegah atau mendeteksi kerusakan lingkungan. Contohnya: Biaya pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar Biaya perbaikan kerusakan lingkungan internal Biaya denda internal.

**d. Biaya Kegagalan Eksternal (*External Failure Costs*)**

Biaya yang timbul akibat dampak lingkungan yang telah terjadi dan mempengaruhi pihak eksternal. Contohnya: Biaya pemulihan lingkungan eksternal Biaya kompensasi kepada masyarakat terdampak Biaya denda eksternal.

Biaya lingkungan dibagi menjadi dua kategori utama (Ikhsan, 2018);

**a. Biaya Internal**

Biaya yang terkait dengan pengurangan dampak lingkungan dari dalam perusahaan, seperti biaya untuk mengurangi proses produksi agar mengurangi dampak lingkungan.

**b. Biaya Eksternal**

Biaya yang terkait dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha, seperti biaya untuk membersihkan dan memulihkan lingkungan yang tercemar.

Biaya lingkungan diklasifikasikan berdasarkan hubungan dengan produk (Dixon, R., & Russell, 2011);

**a. Biaya Langsung**

Biaya yang secara langsung terkait dengan produksi suatu produk, seperti biaya bahan baku ramah lingkungan atau biaya pengemasan yang dapat didaur ulang.

**b. Biaya Tidak Langsung**

Biaya yang tidak secara langsung terkait dengan produksi suatu produk, tetapi tetap berkontribusi terhadap dampak lingkungan, seperti biaya energi untuk penerangan pabrik atau biaya pengelolaan limbah umum.

Aset lingkungan dalam akuntansi hijau adalah sumber daya alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Ini dapat mencakup *aset alam*, seperti hutan, air, dan tanah; *aset biologis*, seperti ekosistem dan keanekaragaman hayati; dan *aset infrastruktur hijau*, seperti bangunan hijau dan transportasi berkelanjutan (Schaltegger & Burritt, 2010). Dalam akuntansi hijau, aset lingkungan ini sangat penting karena membantu perusahaan membuat keputusan tentang bagaimana mengelola sumber daya alam, bagaimana mengelola risiko lingkungan, dan bagaimana menjadi lebih kompetitif dengan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan (Tilt, 2018).

Aset lingkungan dalam akuntansi hijau dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya dalam mendukung keberlanjutan bisnis. *Pertama*, aset fisik lingkungan, yang mencakup peralatan dan teknologi ramah lingkungan seperti sistem pengolahan limbah, panel surya, dan fasilitas daur ulang, yang membantu bisnis mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Schaltegger & Burritt, 2010). *Kedua*, aset tak berwujud lingkungan, seperti paten teknologi hijau, hak emisi karbon, dan sertifikasi lingkungan seperti ISO 14001, yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan (Bebbington & Larrinaga, 2014). *Ketiga*, aset keuangan berbasis lingkungan, misalnya investasi dalam proyek hijau atau pendanaan berbasis keberlanjutan, seperti obligasi hijau, yang digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan (Tilt, 2018). Dengan mengelola berbagai jenis aset lingkungan ini secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko regulasi, serta memperkuat reputasi dan daya saing di pasar yang semakin menuntut praktik bisnis yang berkelanjutan.

Akuntansi hijau menggunakan istilah "kewajiban lingkungan" untuk menggambarkan bagaimana bisnis bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang

disebabkan oleh operasinya. Ini dapat berupa tanggung jawab hukum, seperti memulihkan lahan yang tercemar atau membayar denda atas pelanggaran lingkungan, atau tanggung jawab sukarela, seperti berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan atau mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan memahami risiko dan peluang yang terkait dengan kinerja lingkungan perusahaan, tanggung jawab lingkungan perusahaan harus diidentifikasi, diukur, dan diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Dalam akuntansi hijau, pelaporan lingkungan adalah menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kinerja lingkungan perusahaan. Laporan ini mencakup data dan informasi tentang dampak kegiatan operasional perusahaan terhadap lingkungan, upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, dan tujuan dan pencapaian lingkungan. Pelaporan lingkungan bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk terus menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik mengenai kinerja lingkungan mereka.

### **3. Kinerja Lingkungan Dalam Perusahaan**

Kinerja lingkungan merujuk pada hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam mengelola dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya, termasuk upaya untuk meminimalkan polusi, mengurangi konsumsi sumber daya, serta meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan (Schaltegger, S., & Wagner, 2006). Tingkat emisi gas rumah kaca, efisiensi penggunaan air dan energi, pengelolaan limbah, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku adalah beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan (Schaltegger & Burritt, 2010). Perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab sosial dan hukum dengan meningkatkan kinerja lingkungannya. Mereka juga dapat menghemat uang dengan mengurangi

biaya dan meningkatkan reputasi mereka di mata pemangku kepentingan.

Ruang lingkup kinerja lingkungan mencakup beberapa aspek utama dalam operasional bisnis, yaitu:

**a. Manajemen Emisi dan Polusi**

Mengontrol dan mengurangi emisi gas rumah kaca, limbah industri, serta polutan udara dan air guna mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem (ISO, 2013)

**b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Optimalisasi konsumsi bahan baku, energi, dan air untuk mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas perusahaan (Bebington & Larrinaga, 2014).

**c. Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang**

Implementasi praktik daur ulang, pengurangan limbah, serta pemanfaatan kembali material untuk mendukung ekonomi sirkular.

**d. Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan**

Memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan standar lingkungan lokal maupun internasional, seperti ISO 14001 dan peraturan pemerintah terkait perlindungan lingkungan

**e. Keberlanjutan Rantai Pasok**

Mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam rantai pasok, termasuk penggunaan bahan ramah lingkungan dan kolaborasi dengan pemasok yang memiliki standar keberlanjutan.

Mengukur kinerja lingkungan perusahaan sangat penting untuk menilai seberapa baik strategi keberlanjutan perusahaan dan seberapa baik aktivitasnya berdampak pada lingkungan. Kinerja lingkungan ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa komponen utama dan menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan mengelola sumber daya alam dan mengurangi dampak negatifnya.

#### **4. Pengukuran Kinerja Lingkungan**

Sejauh mana suatu organisasi atau perusahaan mengelola dampak lingkungannya secara efektif dan berkelanjutan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja lingkungan. Indikator kinerja lingkungan, menurut Standar *Global Reporting Initiative* (GRI), mencakup konsumsi sumber daya, emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan (Global Reporting Initiative, 2021). Dengan menggunakan indikator ini, organisasi dapat menilai seberapa efektif strategi keberlanjutan mereka dan apakah mereka memenuhi persyaratan transparansi pemangku kepentingan.

Indikator kondisi lingkungan, indikator kinerja operasional, dan indikator kinerja manajemen adalah tiga kategori umum indikator kinerja lingkungan (Schaltegger & Burritt, 2010). Selain itu, standar ISO 14031 menekankan bahwa evaluasi kinerja lingkungan harus dilakukan dengan menggunakan indikator berbasis data yang dapat memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana tindakan bisnis memengaruhi lingkungan (ISO, 2013);

**a. Indikator Kinerja Operasional (*Operational Performance Indicators - OPI*)**

- 1) Konsumsi energi dan efisiensi energi
- 2) Konsumsi air dan efisiensi penggunaan air
- 3) Pengelolaan limbah dan daur ulang
- 4) Emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O)
- 5) Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan

**b. Indikator Kinerja Manajemen (*Management Performance Indicators - MPI*)**

- 1) Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan
- 2) Sertifikasi lingkungan
- 3) Kebijakan lingkungan dan penerapannya
- 4) Investasi dalam program keberlanjutan
- 5) Pelaporan dan transparansi kinerja lingkungan

c. **Indikator Kinerja Kondisi Lingkungan (*Environmental Condition Indicators* - ECI)**

- 1) Kualitas udara dan air di sekitar operasional perusahaan
- 2) Tingkat pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri
- 3) Keanekaragaman hayati dan konservasi ekosistem
- 4) Dampak perubahan iklim akibat aktivitas perusahaan

Indikator manajemen mengevaluasi kebijakan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi, dan indikator operasional menunjukkan seberapa efektif penggunaan sumber daya dan pengelolaan limbah. Sementara itu, indikator kondisi lingkungan mengukur dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan eksternal, seperti tingkat pencemaran udara atau kualitas air.

Namun demikian, metrik kinerja manajemen terkait dengan kepatuhan organisasi terhadap peraturan lingkungan, penerapan sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001, dan kebijakan dan investasi dalam program keberlanjutan (Epstein, M. J., & Buhovac, 2014). Indikator kondisi lingkungan digunakan untuk mengukur pengaruh kegiatan bisnis terhadap lingkungan, seperti tingkat pencemaran, kualitas air dan udara, dan perubahan keanekaragaman hayati (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2020).

Sangat penting bagi bisnis untuk menggunakan indikator kinerja lingkungan untuk meningkatkan akuntabilitas mereka dan menghadapi tantangan keberlanjutan. Program seperti PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menilai kinerja lingkungan perusahaan dengan menggunakan beberapa indikator utama, mendorong peningkatan pengelolaan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2020). Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan isu lingkungan, bisnis semakin didorong untuk memasukkan elemen lingkungan

ke dalam strategi bisnis mereka untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan mereka (Epstein, M. J., & Buhovac, 2014).

Selain menggunakan standar ISO 14031, pengukuran kinerja lingkungan juga dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis standar pelaporan, seperti *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* dan *Environmental, Social, and Governance (ESG) Metrics*. GRI menyediakan kerangka kerja untuk indikator lingkungan seperti konsumsi energi, emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, dan dampak keanekaragaman hayati (ISO, 2013). Selain itu, investor menggunakan metrik ESG untuk menilai keberlanjutan bisnis; indikator ini mencakup kebijakan keberlanjutan, efisiensi energi, dan strategi mitigasi perubahan iklim (Schaltegger & Burritt, 2010).

Dalam pengukuran kinerja lingkungan, metode kuantitatif juga digunakan, seperti *Life Cycle Assessment (LCA)* dan *Eco-Efficiency Analysis*. LCA menilai dampak lingkungan suatu produk atau proses dari bahan baku hingga pembuangan akhir (ISO, 2013). Selain itu, analisis efisiensi lingkungan menilai efektivitas penggunaan sumber daya dibandingkan dengan hasil ekonomi yang diperoleh, yang dapat membantu bisnis dalam membuat keputusan tentang keberlanjutan (Epstein, M. J., & Buhovac, 2014). Penggunaan teknik-teknik ini menjadi semakin penting bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lingkungan mereka karena perhatian yang meningkat terhadap masalah keberlanjutan global.

Meskipun ada beberapa masalah saat menggunakan pengukuran kinerja lingkungan sebagai bagian penting dari rencana keberlanjutan perusahaan, itu masih sangat penting. Kurangnya standar universal yang dapat diterapkan di semua sektor dan wilayah merupakan masalah utama. Meskipun standar seperti ISO 14031 dan GRI (*Global Reporting Initiative*) 300 Series telah dibuat, perusahaan sering mengalami kesulitan untuk menemukan indikator yang

paling relevan dengan operasi mereka. Mereka juga harus menyesuaikan metode pengukuran mereka karena perubahan peraturan di berbagai negara, yang membuat perbandingan menjadi sulit lintas industri dan wilayah (ISO, 2013).

Mengumpulkan dan mengelola data lingkungan yang akurat dan dapat diandalkan merupakan tantangan tambahan. Banyak bisnis masih mencatat data konsumsi energi, emisi karbon, dan pengelolaan limbah secara manual, yang rentan terhadap kesalahan dan penyesuaian (Schaltegger & Burritt, 2010). Selain itu, pengukuran menjadi kurang efektif karena keterbatasan teknologi yang diperlukan untuk memantau dampak lingkungan secara real-time. Ini semakin sulit karena pelaporan lingkungan yang tidak transparan. Beberapa perusahaan hanya mengungkapkan informasi yang menguntungkan citra mereka tanpa memberikan gambaran yang akurat tentang dampak negatif yang disebabkan oleh operasi mereka.

Untuk menerapkan sistem pengukuran kinerja lingkungan membutuhkan banyak sumber daya dan biaya yang tinggi. Perusahaan harus menginvestasikan dana yang besar untuk membangun sistem pemantauan berbasis teknologi, melakukan audit lingkungan, dan melatih karyawan untuk mengelola data dengan baik (Epstein, M. J., & Buhovac, 2014). Selain itu, ada situasi di mana perusahaan enggan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pengukuran kinerja lingkungan karena keuntungan ekonomi dari pengukuran ini tidak langsung terlihat dalam jangka pendek. Oleh karena itu, untuk membuat perusahaan dapat melakukan pengukuran kinerja lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan strategis.

Pengukuran kinerja lingkungan membutuhkan peningkatan standar pengukuran, peningkatan kualitas, dan peningkatan kualitas data. Tantangan ini termasuk masalah metodologis karena kurangnya standar pengukuran seragam, keterbatasan kapasitas, dan biaya pengukuran, dan

masalah eksternal seperti perubahan regulasi dan tekanan pemangku kepentingan. Mengatasi masalah ini akan memungkinkan organisasi dan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pengukuran kinerja lingkungan dan mendukung kemajuan berkelanjutan.

## 5. Pelaporan Kinerja Lingkungan

Laporan kinerja lingkungan adalah dokumen yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi untuk mengkomunikasikan dampak aktivitas bisnis mereka terhadap lingkungan dan strategi yang mereka gunakan untuk mengelola aspek lingkungan. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat transparansi bagi pemangku kepentingan dan seringkali termasuk dalam strategi keberlanjutan perusahaan. Berikut adalah beberapa jenis laporan kinerja lingkungan yang umum digunakan:

### a. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Laporan keberlanjutan adalah laporan yang mencatat kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan. *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) adalah standar yang sering digunakan saat menyusun laporan ini. Laporan ini membahas elemen lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya alam (Global Reporting Initiative, 2021).

### b. Laporan Pengelolaan Lingkungan (*Environmental Management Report*)

Fokus penelitian ini adalah kebijakan dan pendekatan perusahaan untuk mengelola faktor lingkungan. Biasanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan sertifikasi lingkungan, penerapan standar seperti ISO 14001, dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan. Laporan ini sering menjadi bagian dari sistem manajemen lingkungan perusahaan dan dibuat sebagai bagian dari kepatuhan

terhadap peraturan pemerintah (International Organization for Standardization (ISO), 2015).

**c. Laporan Emisi dan Karbon (*Carbon & Emission Report*)**

Laporan ini secara khusus membahas emisi gas rumah kaca (GRK) perusahaan. Untuk mengukur dan melaporkan emisi karbon mereka, beberapa perusahaan menggunakan *Framework Carbon Disclosure Project* (CDP) atau *Protocol Greenhouse Gas* (GHG). Laporan tersebut juga membahas metode untuk mengurangi emisi, seperti penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam operasi bisnis (Carbon Disclosure Project (CDP), 2022).

**d. Laporan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (*PROPER Report*)**

Perusahaan di Indonesia harus mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER), yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). PROPER menilai dan memberikan peringkat kepada perusahaan berdasarkan kinerja lingkungan mereka, dengan kategori emas menunjukkan perusahaan terbaik dan kategori hitam menunjukkan perusahaan yang paling buruk. Perusahaan dapat menggunakan laporan ini sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan mereka sesuai dengan standar nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2020).

**e. Laporan Dampak Lingkungan (*Environmental Impact Assessment Report - EIA/AMDAL*)**

Perusahaan yang akan melaksanakan proyek dengan dampak lingkungan yang signifikan harus memiliki laporan ini sebagai bagian dari persyaratan perizinan mereka. Laporan ini disebut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia, dan mencakup identifikasi, evaluasi, dan saran tentang cara mitigasi dampak lingkungan proyek dapat dilakukan. Industri berat, pertambangan, dan infrastruktur biasanya

membutuhkan laporan ini (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), 2021).

**f. Laporan Keberlanjutan Terintegrasi (*Integrated Report*)**

Beberapa bisnis menggabungkan laporan keberlanjutan dan keuangan mereka dalam satu dokumen. Dokumen ini dibuat sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh *International Integrated Reporting Council* (IIRC) dan mencakup aspek keuangan dan bagaimana bisnis menciptakan nilai dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan social (International Integrated Reporting Council (IIRC), 2021).

Laporan kinerja lingkungan biasanya terdiri dari beberapa bagian utama, termasuk pendahuluan, kebijakan dan strategi lingkungan, indikator kinerja lingkungan, program keberlanjutan, evaluasi pencapaian, dan rencana dan target ke depan. Indikator kinerja lingkungan biasanya mencakup konsumsi energi, emisi gas rumah kaca, efisiensi penggunaan air, pengelolaan limbah, dan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, laporan ini sering mengikuti standar internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), ISO 14031, atau *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB).

Laporan kinerja lingkungan biasanya disusun dengan cara yang profesional. Untuk membuat data lebih mudah dipahami, laporan ini biasanya menggunakan kombinasi teks, tabel, grafik, dan infografis. Standar teknis mungkin termasuk ukuran dokumen A4, bahasa yang ringkas dan mudah dipahami, dan ilustrasi yang mendukung transparansi informasi. Untuk membuat laporan ini dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, beberapa perusahaan menerbitkannya baik dalam bentuk cetak maupun digital, seperti format PDF atau interaktif di situs web perusahaan. Perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan meningkatkan

kepercayaan investor, pemerintah, dan masyarakat luas dengan laporan ini.

Standar pelaporan kinerja lingkungan adalah pedoman yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi untuk mengukur, mengelola, dan mengungkapkan dampak yang ditimbulkan oleh operasi mereka terhadap lingkungan secara terbuka dan akuntabel. Standar ini dibuat untuk memastikan bahwa laporan lingkungan dapat dibandingkan, diverifikasi, dan relevan bagi pemangku kepentingan. *Global Reporting Initiative* (GRI), yang menawarkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan dengan indikator lingkungan khusus, dan ISO 14031, yang berfokus pada cara menilai dan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, adalah standar yang paling populer di seluruh dunia. Selain itu, investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan pedoman yang diberikan oleh *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) untuk mengarahkan sektor industri tertentu dalam pelaporan kinerja lingkungan yang relevan secara finansial.

Selain standar utama, ada juga kerangka pelaporan yang lebih khusus. Misalnya, Proyek Pengungkapan Karbon (CDP), yang membantu perusahaan melaporkan data terkait emisi karbon dan dampaknya terhadap perubahan iklim, dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), yang membantu organisasi mengungkapkan risiko dan peluang keuangan yang terkait dengan perubahan iklim. Dalam pelaporan keberlanjutan, standar seperti *Integrated Reporting* (IR) menggabungkan elemen lingkungan dengan elemen ekonomi dan sosial. Dengan menggunakan standar ini, perusahaan dapat memenuhi regulasi yang berlaku, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan meningkatkan kepercayaan investor, pelanggan, dan masyarakat luas terhadap komitmen keberlanjutan mereka.

Tren pelaporan kinerja lingkungan terbaru menunjukkan bahwa perusahaan lebih transparan dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan mereka. Perusahaan semakin banyak menggunakan pelaporan berbasis standar global seperti Inisiatif Laporan Global (GRI), Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB), dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) untuk memastikan keterbandingan dan kredibilitas data lingkungan mereka. Selain itu, semakin banyak perusahaan yang menggabungkan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam laporan mereka. Penggunaan teknologi digital dalam pelaporan, seperti blockchain untuk verifikasi data emisi, dan big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk pengolahan dan analisis data lingkungan yang lebih akurat dan real-time, adalah tren lain yang berkembang.

Selain teknologi dan transparansi, ada pergeseran menuju pelaporan berbasis dampak dan terintegrasi, di mana perusahaan menghubungkan data lingkungan dengan kinerja finansial dan strategi jangka panjang. Menurut pendekatan *Integrated Reporting* (IR) Framework, tren ini mendorong perusahaan untuk memasukkan keberlanjutan ke dalam nilai bisnis mereka. Selain itu, peraturan lingkungan yang semakin ketat di banyak negara telah mendorong bisnis untuk lebih proaktif dalam melaporkan dampak lingkungan mereka. Ini termasuk kewajiban pengungkapan emisi karbon dan strategi dekarbonisasi yang semakin diperketat oleh banyak pemerintah dan lembaga keuangan di seluruh dunia. Tren saat ini mengubah pelaporan kinerja lingkungan menjadi alat strategis untuk meningkatkan daya saing bisnis di era ekonomi hijau.

## 6. Hubungan Akuntansi Hijau dan Kinerja Lingkungan

Akuntansi hijau adalah metode akuntansi yang memasukkan elemen lingkungan ke dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan dampak operasi mereka terhadap

lingkungan. Dengan menggunakan akuntansi hijau, bisnis dapat menemukan biaya lingkungan seperti konsumsi energi, emisi karbon, pengelolaan limbah, dan pemulihan ekosistem. Biaya-biaya ini sering kali tidak terlihat dalam laporan keuangan konvensional (Schaltegger & Burritt, 2010). Dengan melihat bagaimana kinerja keuangan dan dampak lingkungan berhubungan, akuntansi hijau membantu dalam perencanaan strategi keberlanjutan karena memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya dan mengurangi risiko lingkungan (Burritt, R. L., & Christ, 2021).

Akuntansi hijau sering dikaitkan dengan berbagai standar pelaporan lingkungan, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), dan ISO 14031, yang menetapkan standar untuk mengukur dan mengungkapkan aspek lingkungan dalam laporan keberlanjutan. Bisnis juga dapat menggunakan akuntansi hijau untuk memenuhi peraturan lingkungan yang semakin ketat dan memberikan lebih banyak transparansi kepada pemangku kepentingan. Metode ini membantu bisnis mengembangkan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka juga dapat lebih mudah menemukan bagian pengelolaan lingkungan yang perlu diperbaiki (Qian, W., Burritt, R. L., & Monroe, 2018).

Akuntansi hijau memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi bisnis, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya dan biaya lingkungan. Dengan menggunakan akuntansi hijau, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengukur biaya yang terkait dengan dampak lingkungan seperti penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan emisi karbon. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasi mereka (Schaltegger & Burritt, 2010). Selain itu, perusahaan yang menggunakan akuntansi hijau dapat mengurangi risiko lingkungan dan mematuhi peraturan, yang dapat

menghindarkan mereka dari denda atau sanksi jika mereka tidak mematuhi kebijakan lingkungan (Qian, W., Burritt, R. L., & Monroe, 2018).

Selain mengurangi biaya dan biaya operasional, akuntansi hijau juga meningkatkan efisiensi strategis bisnis. Perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih berkelanjutan dan inovatif dengan memasukkan aspek lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan mereka. Misalnya, mereka dapat berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan atau menerapkan proses produksi yang lebih hemat energi untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin peduli terhadap keberlanjutan (Burritt, R. L., & Christ, 2021). Akibatnya, akuntansi hijau bukan hanya sekadar alat pengukuran tetapi juga strategi bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan secara keseluruhan karena transparansi pelaporan lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor dan pelanggan, yang semakin mempertimbangkan aspek keberlanjutan saat membuat keputusan investasi dan konsumsi.

Untuk meningkatkan akuntansi hijau, perusahaan harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan, menggunakan teknologi, dan membuat kebijakan internal. Dengan menetapkan kebijakan yang jelas dan indikator kinerja lingkungan yang dapat diukur, akuntansi hijau dapat dimasukkan ke dalam sistem manajemen perusahaan sebagai salah satu strategi utama. Dengan mengikuti standar internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), dan ISO 14031, pelaporan lingkungan dapat dilakukan secara sistematis dan akurat.(Schaltegger & Burritt, 2010). Selain itu, bisnis harus memberi tahu karyawannya tentang pentingnya akuntansi hijau melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi sehingga mereka dapat memahami dan

menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasi sehari-hari mereka.

Memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi ramah lingkungan juga merupakan strategi. Big data, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain dapat membuat pengelolaan dan verifikasi data lingkungan lebih transparan dan efisien (Burritt, R. L., & Christ, 2021). Selain itu, penggunaan program akuntansi hijau yang dapat mengotomatisasi pelaporan konsumsi energi, pelaporan emisi, dan pengelolaan limbah akan membantu perusahaan meningkatkan akurasi data serta mengurangi biaya administrasi. Terakhir, melalui transparansi pelaporan lingkungan, perusahaan akan mendorong regulator, investor, dan masyarakat untuk terus meningkatkan kinerja lingkungannya. Dengan demikian, pendekatan ini akan memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan ini.

### C. Kesimpulan

Akuntansi hijau dan kinerja lingkungan merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam mendukung keberlanjutan bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan menggunakan akuntansi hijau, bisnis dapat mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi bagaimana tindakan mereka berdampak pada lingkungan. Ini membantu membuat keputusan yang lebih memperhatikan keberlanjutan. Perusahaan dapat menggunakan akuntansi hijau untuk memenuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat serta meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko lingkungan. Selain itu, akuntansi hijau membantu pengelolaan sumber daya yang lebih baik, mengembangkan metode produksi yang lebih ramah lingkungan, dan membuat bisnis lebih kompetitif di pasar global yang semakin peduli dengan keberlanjutan.

Sebaliknya, kinerja lingkungan merupakan alat penting untuk mengukur seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. Perusahaan dapat secara transparan mengungkapkan dampak lingkungan yang mereka hasilkan dan melakukan apa yang mereka lakukan untuk mengurangi dampak tersebut dengan bantuan standar pelaporan lingkungan seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan ISO 14031. Peningkatan kinerja lingkungan memperkuat hubungan perusahaan dengan pemerintah, investor, dan masyarakat selain membantu ekosistem. Oleh karena itu, kinerja lingkungan dan akuntansi hijau harus menjadi bagian penting dari strategi bisnis perusahaan jika mereka ingin mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395–413. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.003>
- Bebbington, J., Gray, R., Hibbitt, C., & Kirk, E. (2001). Full Cost Accounting: An Agenda for Action. *The Association of Chartered Certified Accountants, June 2014*, 174.
- Bebbington, J., Unerman, J., & O'Dwyer, B. (2008). *Sustainability accounting and accountability*. Routledge.
- Burritt, R. L., & Christ, K. L. (2021). Accounting for sustainability: Implementing green accounting in business operations. *Journal of Cleaner Production*.
- Carbon Disclosure Project (CDP). (2022). *CDP Climate Change Report*.
- Dixon, R., & Russell, M. (2011). *Environmental accounting for sustainable development*. Routledge.
- Epstein, M. J., & Buhovac, A. R. (2014). Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental and Economic Impacts. *Berrett-Koehler Publishers*.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI 300: Environmental Standards*.
- Gray, R. (1992). Accounting and environmentalism: An exploration of the challenge of gently accounting for accountability, transparency and sustainability. *Accounting, Organizations and Society*, 17(5), 399–425. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(92\)90038-T](https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90038-T)
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). <869645.Pdf>. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 78–101.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2005). *Cost management: Accounting and control*. Thomson Learning.

- Ikhsan, A. (2018). *Akuntansi lingkungan*. Mitra Wacana Media.
- International Integrated Reporting Council (IIRC). (2021). *The International <IR> Framework*.
- International Organization for Standardization (ISO). (2015). *ISO 14001: Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use*.
- ISO, 14031. (2013). *Environmental management – Environmental performance evaluation – Guidelines*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK). (2021). *Panduan Penyusunan AMDAL*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2020). *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)*.
- Qian, W., Burritt, R. L., & Monroe, G. S. (2018). Environmental management accounting in developing economies: The case of China. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(3), 456–478.
- Schaltegger, S., & Burritt, R. L. (2010). Sustainability accounting for companies: Catchphrase or decision support for business leaders? *Journal of World Business*, 45(4), 375–384. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.08.002>
- Schaltegger, S., & Wagner, M. (2006). *Managing the business case for sustainability: The integration of social, environmental and economic performance*. Greenleaf Publishing.
- Tilt, C. A. (2018). Making accounting for sustainability count: The challenge of integrating sustainability into accounting language. *Critical Perspectives on Accounting*, 54, 17–34.

## TENTANG PENULIS



**Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc., CGAA.**  
Politeknik Negeri Sriwijaya

Penulis lahir di Sugih Waras, Kab Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 23 Mei 1982. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Kota Yogyakarta lulus tahun 2004. Pendidikan S2 *Master Of Sains In Accounting*, lulus tahun 2010 di Universitas Gadjah Mada, Kota Yogyakarta. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Ekonomi, Bidang Kekhususan Akuntansi Keuangan di Universitas Sriwijaya, Kota Palembang. Penulis menjadi Dosen Jurusan Akuntansi sejak tahun 2004 di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Lampung. Dari tahun 2014 sampai dengan saat ini, menjadi Dosen Program Studi Akuntansi Sektor Publik di Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.

# BAB

# 11

## AKUNTANSI HIJAU: STRATEGI PENGGABUNGAN BISNIS DENGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Santi Rahmawaty, S.E., M.Ak.  
Universitas Abdul Azis Lamadjido

### A. Pendahuluan

Dalam era modern yang semakin peduli terhadap dampak lingkungan dari aktivitas bisnis, konsep Akuntansi Hijau (*Green Accounting*) telah menjadi strategi kunci dalam mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam praktik bisnis. Akuntansi hijau merupakan pendekatan akuntansi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga memasukkan faktor lingkungan dan sosial dalam proses pelaporan perusahaan. Dengan meningkatnya tekanan dari pemangku kepentingan, regulasi pemerintah, dan tuntutan konsumen akan transparansi lingkungan, akuntansi hijau menjadi alat yang efektif dalam membantu perusahaan menilai, mengukur, dan mengungkapkan dampak ekologis dari kegiatan mereka (Soraya, Nurrochmah and Hwihanus, 2024).

Seiring dengan berkembangnya praktik pelaporan keberlanjutan, akuntansi hijau memainkan peran penting dalam menyusun indikator kinerja lingkungan dan sosial yang dapat digunakan untuk mengukur dampak aktivitas bisnis terhadap ekosistem. Banyak perusahaan telah mengadopsi praktik ini dengan menerapkan standar pelaporan seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) guna meningkatkan akuntabilitas mereka dalam isu-isu keberlanjutan (Zik-Rullahi and Jide, 2023). Selain itu, penerapan akuntansi hijau juga memberikan manfaat

strategis bagi perusahaan, seperti meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya lingkungan, serta meningkatkan daya saing dan reputasi perusahaan di pasar global (Marota, 2024).

Implementasi akuntansi hijau dalam praktik bisnis terbukti memberikan banyak keuntungan, terutama dalam peningkatan efisiensi manajemen lingkungan dan kinerja finansial perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam artikel yang menyatakan bahwa penggunaan metode akuntansi hijau dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan (Pratama *et al.*, 2024). Selain itu, integrasi akuntansi hijau juga dapat mendukung strategi pemasaran yang berkelanjutan dengan memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara ekologis (Hamizar *et al.*, 2024).

Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi akuntansi hijau masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan secara kuantitatif, kurangnya regulasi yang seragam di berbagai negara, serta kesulitan dalam mengadopsi standar pelaporan yang dapat diterapkan secara universal (Sundarasen, Rajagopalan and Alsmady, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara dunia usaha, akademisi, serta pembuat kebijakan untuk mengembangkan pendekatan akuntansi hijau yang lebih efektif dan dapat diterapkan di berbagai sektor industri.

Bab ini akan membahas secara mendalam konsep Akuntansi Hijau sebagai strategi integrasi antara bisnis dan kelestarian lingkungan. Pembahasan akan diawali dengan konsep dan prinsip dasar akuntansi hijau, termasuk sejarah perkembangannya, definisi, serta peran pentingnya dalam mendukung keberlanjutan bisnis. Dalam bagian ini, akan dijelaskan bagaimana akuntansi hijau berfungsi sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka.

Pembahasan kemudian akan berfokus pada dampak akuntansi hijau terhadap perusahaan dan lingkungan. Manfaat dari penerapan sistem ini, seperti peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya lingkungan, serta peningkatan reputasi perusahaan, akan dianalisis berdasarkan hasil penelitian terkini. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana akuntansi hijau berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (Oborska, 2024).

Bab ini juga akan menyoroti kebijakan dan regulasi terkait akuntansi hijau, yang mencakup berbagai regulasi pemerintah dan kebijakan internasional yang mendukung praktik akuntansi hijau. Peran pemerintah dalam mendorong implementasi akuntansi hijau melalui regulasi yang lebih ketat serta insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan juga akan dibahas secara komprehensif.

Selain itu, akan dikupas mengenai strategi penggabungan akuntansi hijau dengan keberlanjutan bisnis. Dalam bagian ini, akan dijelaskan bagaimana akuntansi hijau dapat diintegrasikan ke dalam strategi bisnis jangka panjang untuk memastikan keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan. Peran pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan komunitas, dalam mendukung keberhasilan implementasi akuntansi hijau juga akan diuraikan. Tak ketinggalan, inovasi teknologi dalam mendukung praktik akuntansi hijau, seperti penggunaan big data, *artificial intelligence* (AI), dan *blockchain*, akan menjadi bagian penting dari pembahasan.

Sebagai penutup, akan diulas penerapan akuntansi hijau dalam dunia bisnis, termasuk studi kasus dari berbagai perusahaan yang telah berhasil mengadopsi sistem ini. Standar pelaporan keberlanjutan seperti GRI dan TCFD akan dibahas sebagai pedoman utama dalam implementasi akuntansi hijau. Tidak hanya itu, berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi hijau, seperti kompleksitas pengukuran

dampak lingkungan dan kurangnya standar global yang seragam, akan dikaji lebih lanjut.

Dengan cakupan yang luas ini, bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya akuntansi hijau dalam mewujudkan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

## B. Pentingnya Akuntansi Hijau dalam Bisnis Modern

Dalam dunia bisnis modern yang semakin dinamis, kesadaran akan keberlanjutan lingkungan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Tekanan dari pemangku kepentingan, regulasi pemerintah, dan tuntutan konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan memaksa perusahaan untuk berpikir lebih jauh dari sekadar keuntungan finansial. Di tengah perubahan paradigma ini, konsep Akuntansi Hijau (*Green Accounting*) muncul sebagai strategi kunci dalam mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam praktik bisnis.

### Akuntansi Hijau sebagai Strategi Kunci Integrasi Keberlanjutan Lingkungan

Akuntansi hijau merupakan pendekatan akuntansi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga memasukkan faktor lingkungan dan sosial ke dalam proses pelaporan perusahaan. Dalam praktiknya, akuntansi hijau mengharuskan perusahaan untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan biaya lingkungan yang timbul akibat aktivitas bisnis. Dengan demikian, pendekatan ini membantu perusahaan memahami sejauh mana operasi mereka berdampak pada lingkungan dan bagaimana biaya tersebut dapat dikendalikan dan dikurangi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agarwal dan Kalpaja (2018), akuntansi hijau sangat penting dalam membantu perusahaan mengidentifikasi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan serta merancang strategi mitigasi yang efektif. Melalui penerapan akuntansi hijau, perusahaan dapat

meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi polusi, dan meminimalisir jejak karbon secara lebih terstruktur.

## **1. Pendekatan Akuntansi Hijau: Keuangan, Lingkungan, dan Sosial**

Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kesadaran global akan keberlanjutan, dunia bisnis semakin menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh keuntungan finansial semata. Konsep Akuntansi Hijau hadir sebagai solusi yang mampu menggabungkan tiga aspek penting dalam pengelolaan bisnis: keuangan, lingkungan, dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perhitungan angka-angka keuangan, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial dari setiap aktivitas bisnis yang dilakukan.

### **a. Keuangan dalam Perspektif Akuntansi Hijau**

Secara tradisional, akuntansi berfungsi untuk melaporkan kondisi keuangan dan laba rugi perusahaan. Namun, dalam konteks akuntansi hijau, aspek keuangan tidak dapat dipisahkan dari biaya lingkungan dan sosial. Akuntansi hijau mengharuskan perusahaan untuk memasukkan biaya lingkungan seperti pemulihan ekosistem, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari laporan keuangan mereka.

Menurut Singh (2020), pendekatan ini dapat meningkatkan transparansi keuangan perusahaan dalam hal pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Dengan adanya laporan akuntansi hijau, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi biaya lingkungan yang tersembunyi dan mengurangi risiko yang mungkin timbul dari tuntutan hukum atau peraturan terkait lingkungan.

Selain itu, pendekatan akuntansi hijau mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui identifikasi pemborosan energi dan sumber daya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dapat menghemat biaya operasional tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar

global melalui praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara ekologis.

**b. Lingkungan dalam Perspektif Akuntansi Hijau**

Aspek lingkungan merupakan inti dari akuntansi hijau, di mana perusahaan dituntut untuk menyusun indikator kinerja lingkungan yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Indikator ini mencakup berbagai parameter seperti emisi karbon, limbah cair, pemanfaatan energi terbarukan, dan upaya konservasi biodiversitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soraya *et al.* (2024), akuntansi hijau membantu perusahaan dalam menyusun indikator kinerja keberlanjutan yang lebih terukur dan akurat. Hal ini sangat penting dalam konteks peningkatan akuntabilitas dan transparansi perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Dengan adanya indikator tersebut, perusahaan dapat secara proaktif merancang kebijakan untuk menurunkan emisi karbon dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Implementasi standar pelaporan seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) juga memperkuat upaya transparansi dalam hal risiko lingkungan. Dengan mengikuti pedoman ini, perusahaan dapat mengungkapkan secara terbuka bagaimana aktivitas mereka berdampak pada ekosistem dan langkah-langkah mitigasi yang diambil untuk mengurangi jejak ekologis.

**c. Sosial dalam Perspektif Akuntansi Hijau**

Selain keuangan dan lingkungan, aspek sosial juga merupakan pilar penting dalam akuntansi hijau. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik tetapi juga terhadap masyarakat yang terdampak oleh operasional mereka. Oleh karena itu, akuntansi hijau mencakup evaluasi tentang bagaimana kegiatan perusahaan memengaruhi kesejahteraan

masyarakat sekitar, termasuk dalam hal kesehatan, kualitas hidup, dan hak asasi manusia.

Menurut Oborska (2024), akuntansi hijau memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan sosial dengan memastikan bahwa perusahaan memberikan kontribusi positif bagi komunitas lokal dan meminimalkan dampak negatifnya. Akuntansi hijau membantu menyelaraskan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan pelaporan keuangan sehingga tercipta transparansi mengenai peran perusahaan dalam pembangunan sosial.

#### **d. Holisme dalam Akuntansi Hijau: Menghubungkan Keuangan, Lingkungan, dan Sosial**

Keunikan dari akuntansi hijau terletak pada pendekatan holistiknya. Ketiga pilar utama – keuangan, lingkungan, dan sosial – dihubungkan dalam satu kesatuan yang terintegrasi sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberlanjutan perusahaan. Melalui integrasi ini, perusahaan tidak hanya dapat memahami keuntungan finansial tetapi juga mengetahui bagaimana keuntungan tersebut dicapai dengan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.

Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur dapat menggunakan akuntansi hijau untuk menghitung emisi karbon per unit produksi dan mengevaluasi apakah inisiatif pengurangan limbah telah berdampak pada biaya operasional. Selain itu, perusahaan dapat mengukur dampak sosial dengan memantau kesejahteraan tenaga kerja dan komunitas lokal di sekitar fasilitas produksi.

#### **Manfaat Pendekatan Holistik dalam Akuntansi Hijau**

##### **a. Pengambilan Keputusan yang Lebih Bijaksana:**

Dengan mempertimbangkan ketiga aspek secara bersamaan, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

**b. Peningkatan Daya Saing:**

Perusahaan yang secara proaktif menerapkan akuntansi hijau cenderung lebih dihargai oleh konsumen dan investor, sehingga meningkatkan daya saing.

**c. Transparansi dan Akuntabilitas:**

Pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi meningkatkan transparansi perusahaan dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial.

**d. Manajemen Risiko yang Lebih Efektif:**

Dengan memahami risiko lingkungan dan sosial, perusahaan dapat mengantisipasi potensi konflik dengan pemangku kepentingan serta meminimalkan kerugian reputasi.

**2. Peran Akuntansi Hijau dalam Menilai, Mengukur, dan Mengungkapkan Dampak Ekologis**

Di tengah meningkatnya kekhawatiran global mengenai perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, perusahaan di seluruh dunia semakin dituntut untuk bertanggung jawab atas dampak ekologis dari kegiatan bisnis mereka. Dalam konteks ini, Akuntansi Hijau (*Green Accounting*) muncul sebagai alat yang penting dan relevan untuk menilai, mengukur, dan mengungkapkan dampak ekologis secara transparan dan akuntabel.

**a. Menilai Dampak Ekologis dengan Akuntansi Hijau**

Proses penilaian dampak ekologis dalam akuntansi hijau dimulai dengan mengidentifikasi dan menghitung berbagai aktivitas bisnis yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini mencakup pengukuran emisi karbon, limbah padat dan cair, serta dampak lainnya terhadap kualitas air, udara, dan tanah. Akuntansi hijau menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan untuk menganalisis biaya lingkungan secara lebih terstruktur. Menurut Oborska (2024), perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi sumber pencemaran dan

merancang strategi mitigasi yang efektif. Misalnya, perusahaan di sektor manufaktur dapat melakukan audit lingkungan untuk mengevaluasi jejak karbon per unit produksi, sehingga dapat mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan efisien. Selain itu, akuntansi hijau juga membantu dalam menghitung environmental liabilities (liabilitas lingkungan) yang timbul akibat kerusakan atau pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Dengan adanya perhitungan yang komprehensif, perusahaan dapat mengetahui besaran biaya yang perlu disisihkan untuk memulihkan lingkungan yang terdampak, sehingga perencanaan keuangan dapat lebih realistik dan antisipatif terhadap potensi kerugian.

**b. Mengukur Dampak Ekologis secara Akurat dan Terukur**

Setelah melakukan penilaian, tahap berikutnya adalah mengukur dampak ekologis secara kuantitatif. Akuntansi hijau menggunakan serangkaian indikator keberlanjutan yang dapat diterapkan di berbagai sektor industri, seperti emisi karbon per ton produksi, volume limbah yang dihasilkan, dan efisiensi penggunaan energi. Menurut Soraya *et al.* (2024), pengukuran dampak ekologis melalui akuntansi hijau tidak hanya membantu dalam mencatat biaya lingkungan tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk mengukur kontribusi keberlanjutan secara akurat. Indikator-indikator ini membantu mengkuantifikasi besarnya kerusakan lingkungan dan membandingkannya dengan target keberlanjutan yang telah ditetapkan perusahaan. Penggunaan standar pelaporan keberlanjutan seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) juga memberikan kerangka pengukuran yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengikuti standar ini, perusahaan dapat melaporkan dampak lingkungan secara konsisten dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan adopsi teknologi seperti *Big Data* dan

*Internet of Things* (IoT), pengumpulan data lingkungan dapat dilakukan secara real-time dan lebih akurat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk secara langsung memantau parameter penting seperti tingkat polusi udara, penggunaan energi, dan intensitas karbon. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat lebih responsif dan berbasis data yang valid.

**c. Mengungkapkan Dampak Ekologis secara Transparan**

Setelah dampak ekologis diukur dengan akurat, langkah berikutnya adalah mengungkapkan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Transparansi dalam pelaporan dampak ekologis bukan hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan reputasi perusahaan. Dalam praktiknya, akuntansi hijau memberikan landasan untuk mengungkapkan informasi terkait risiko lingkungan dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Laporan ini berfungsi untuk menunjukkan kepada pemegang saham, investor, dan masyarakat luas bagaimana perusahaan bertanggung jawab atas aktivitasnya yang berdampak pada lingkungan. Menurut Singh (2020), salah satu tantangan utama dalam pengungkapan dampak ekologis adalah kesulitan dalam mengomunikasikan data lingkungan secara sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyajikan informasi dalam bentuk grafik, infografis, dan visualisasi data agar lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Pelaporan keberlanjutan yang baik tidak hanya memberikan gambaran tentang biaya lingkungan tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengelola risiko ekologis. Selain itu, transparansi ini mampu meningkatkan daya saing perusahaan karena semakin banyak investor yang memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi.

#### **d. Manfaat Transparansi Dampak Ekologis bagi Bisnis**

Adopsi akuntansi hijau dengan transparansi penuh memiliki beberapa manfaat penting bagi bisnis, antara lain:

- 1) Meningkatkan Kepercayaan Publik: Pemangku kepentingan akan lebih percaya pada perusahaan yang secara terbuka melaporkan dampak lingkungannya.
- 2) Mengurangi Risiko Hukum: Dengan mengungkapkan risiko lingkungan secara jelas, perusahaan dapat menghindari litigasi atau sanksi hukum akibat pelanggaran.
- 3) Memperkuat Reputasi Korporasi: Perusahaan yang transparan dalam menangani isu keberlanjutan akan lebih dihargai oleh konsumen dan investor.
- 4) Menarik Investasi Hijau: Banyak investor sekarang mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam keputusan investasi, sehingga laporan akuntansi hijau dapat meningkatkan daya tarik investasi.

### **C. Tantangan dalam Implementasi Akuntansi Hijau**

Dalam upaya mencapai keberlanjutan bisnis yang ramah lingkungan, Akuntansi Hijau (*Green Accounting*) telah muncul sebagai pendekatan strategis yang menggabungkan aspek keuangan, lingkungan, dan sosial. Meskipun konsep ini semakin diakui secara global sebagai alat penting untuk mengukur dan melaporkan dampak ekologis, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan utama dalam penerapan akuntansi hijau meliputi kompleksitas pengukuran dampak lingkungan, kesulitan dalam adopsi standar pelaporan global, kurangnya regulasi yang seragam, dan resistensi dari perusahaan yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

**1. Kompleksitas dalam Mengukur dan Melaporkan Dampak Lingkungan secara Kuantitatif.**

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi akuntansi hijau adalah kompleksitas dalam mengukur dampak lingkungan secara kuantitatif. Dampak lingkungan dari aktivitas bisnis sering kali melibatkan berbagai variabel yang saling terkait, seperti emisi gas rumah kaca, polusi air, limbah padat, dan perubahan biodiversitas. Kesulitan muncul karena tidak semua dampak lingkungan dapat dikuantifikasi dengan mudah, terutama ketika berhubungan dengan kerusakan ekosistem atau penurunan kualitas tanah yang bersifat jangka panjang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sebastian (2022), salah satu kendala utama adalah kurangnya metodologi yang seragam dan valid dalam menghitung dampak lingkungan secara akurat. Perusahaan sering kali kesulitan mengumpulkan data primer dan sekunder yang andal, terutama jika mencakup banyak lokasi atau operasi lintas negara. Selain itu, perbedaan dalam cara pengukuran antara industri yang berbeda juga menambah kompleksitas pelaporan. Kesalahan dalam estimasi dapat mengarah pada laporan yang bias atau tidak akurat, sehingga merusak kredibilitas perusahaan dalam mengelola keberlanjutan. Selain itu, pengukuran biaya lingkungan juga membutuhkan teknik perhitungan yang cermat dan akurat, karena tidak semua biaya dapat dinilai secara langsung dalam bentuk moneter. Misalnya, kerugian akibat hilangnya biodiversitas atau dampak sosial dari polusi udara sulit dihitung secara finansial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik dan multi-disiplin yang menggabungkan ilmu lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam penyusunan laporan akuntansi hijau.

**2. Kesulitan dalam Mengadopsi Standar Pelaporan Global yang Seragam.**

Tantangan lainnya terletak pada kesulitan dalam mengadopsi standar pelaporan global yang seragam. Saat ini, terdapat berbagai kerangka pelaporan yang diterapkan oleh

perusahaan, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), dan ISO 14001. Namun, keberagaman standar ini justru menimbulkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan di lapangan. Menurut Zik-rullahi dan Jide (2023), standar pelaporan yang beragam menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memilih dan mengadopsi pendekatan terbaik untuk pelaporan akuntansi hijau. Hal ini diperburuk oleh perbedaan panduan teknis dan metodologi antar standar, sehingga perusahaan merasa sulit untuk memastikan laporan yang dihasilkan memenuhi semua persyaratan yang ada. Ketidakkonsistenan standar global juga berdampak pada kemampuan perusahaan dalam membandingkan kinerja lingkungan mereka dengan perusahaan lain. Hal ini mengurangi transparansi dan menimbulkan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan dalam menilai komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi standar global yang dapat memfasilitasi penyusunan laporan hijau secara lebih terstruktur dan konsisten.

### **3. Kurangnya Regulasi yang Seragam di Berbagai Negara.**

Di tingkat global, tantangan besar lainnya adalah ketidaksamaan regulasi terkait akuntansi hijau di berbagai negara. Setiap negara memiliki kebijakan keberlanjutan yang berbeda, tergantung pada prioritas ekonomi, sosial, dan lingkungan masing-masing. Akibatnya, perusahaan multinasional sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan akuntansi hijau secara konsisten di seluruh cabang operasional mereka. Menurut Sundarasen *et al.* (2024), beberapa negara maju seperti Eropa dan Amerika Utara telah menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait pelaporan keberlanjutan, sementara negara berkembang masih mengalami keterbatasan dalam pengawasan dan penerapan standar hijau. Perbedaan ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan akuntansi hijau, terutama bagi perusahaan yang beroperasi secara lintas

batas. Ketiadaan regulasi yang seragam juga mempengaruhi akurasi pelaporan lingkungan, karena perusahaan dapat memilih standar yang paling menguntungkan mereka atau bahkan mengabaikan standar yang dianggap membebani. Hal ini membuat upaya global untuk mencapai keberlanjutan menjadi kurang efektif dan sulit diukur secara adil.

#### **4. Resistensi Perusahaan yang Masih Berorientasi pada Keuntungan Jangka Pendek.**

Tantangan paling signifikan dalam penerapan akuntansi hijau adalah resistensi dari perusahaan yang masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Banyak perusahaan yang enggan menerapkan akuntansi hijau karena dianggap meningkatkan biaya operasional dan mengurangi margin laba. Pandangan ini sering kali berasal dari kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang dari investasi dalam keberlanjutan. Menurut Singh (2020), perusahaan cenderung mengutamakan laba dalam jangka pendek daripada memikirkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Sikap ini membuat banyak pelaku usaha enggan berinvestasi dalam infrastruktur hijau atau teknologi ramah lingkungan, karena dianggap tidak langsung menghasilkan keuntungan finansial. Selain itu, ketakutan akan peningkatan biaya produksi dan penurunan daya saing membuat perusahaan memilih untuk mempertahankan praktik tradisional yang lebih murah. Hal ini memperlambat adopsi akuntansi hijau sebagai bagian dari transformasi keberlanjutan.

Implementasi akuntansi hijau dalam bisnis modern memang penuh tantangan yang kompleks. Kompleksitas pengukuran dampak lingkungan, kesulitan dalam mengadopsi standar global, kurangnya regulasi yang seragam, serta resistensi dari perusahaan berorientasi keuntungan jangka pendek menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk mengatasi hambatan ini. Harmonisasi standar internasional, peningkatan

regulasi, serta edukasi tentang manfaat jangka panjang akuntansi hijau dapat membantu meningkatkan adopsinya secara luas dan efektif.

#### **D. Strategi Penggabungan Akuntansi Hijau dengan Keberlanjutan Bisnis**

Penggabungan akuntansi hijau ke dalam strategi bisnis bukan hanya sekadar menambahkan laporan lingkungan dalam dokumen keuangan perusahaan, melainkan merupakan transformasi menyeluruh dalam cara perusahaan menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan dimensi keberlanjutan. Akuntansi hijau sebagai bagian dari strategi jangka panjang berarti bahwa pertimbangan terhadap dampak lingkungan bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

##### **1. Integrasi ke dalam Strategi Bisnis Jangka Panjang.**

Perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau secara strategis mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi cenderung membangun model bisnis yang lebih tahan terhadap risiko iklim dan sosial. Misalnya:

- a. Penghitungan biaya lingkungan dimasukkan dalam analisis kelayakan investasi.
- b. Setiap keputusan produksi mempertimbangkan efisiensi energi dan pengelolaan limbah.
- c. Laporan kinerja perusahaan mencakup indikator keberlanjutan seperti jejak karbon, efisiensi air, dan dampak terhadap ekosistem lokal.

Integrasi semacam ini menunjukkan bahwa akuntansi hijau tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi alat proaktif dalam membentuk kebijakan dan strategi perusahaan agar lebih berkelanjutan.

##### **2. Peran Pemangku Kepentingan dalam Keberhasilan Implementasi.**

Kesuksesan implementasi akuntansi hijau sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Mereka bukan hanya penerima

laporan, tetapi juga aktor yang memiliki pengaruh terhadap praktik keberlanjutan perusahaan:

- a. Investor: Saat ini semakin banyak investor yang menaruh perhatian pada indikator ESG (Environmental, Social, Governance) dalam memilih portofolio investasi. Akuntansi hijau menyediakan informasi yang transparan tentang kinerja lingkungan perusahaan, yang menjadi dasar bagi keputusan investasi jangka panjang.
- b. Pelanggan: Konsumen semakin peduli terhadap asal-usul produk dan dampak lingkungan dari barang yang mereka beli. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap akuntansi hijau cenderung memiliki loyalitas pelanggan yang lebih tinggi karena dianggap bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.
- c. Komunitas dan LSM: Keberadaan masyarakat lokal yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan sering kali menjadi tolok ukur keberlanjutan sosial. Pelaporan akuntansi hijau yang menyentuh aspek sosial memungkinkan perusahaan untuk memperkuat relasi dan dukungan dari komunitas sekitar.

Dengan menyelaraskan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, perusahaan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

### **3. Peran Inovasi Teknologi dalam Mendukung Akuntansi Hijau**

Teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong implementasi akuntansi hijau yang efisien dan akurat. Beberapa teknologi utama yang mendukung proses ini meliputi:

- a. Big Data: Memungkinkan pengumpulan dan analisis data lingkungan secara besar dan real-time. Data ini dapat mencakup penggunaan energi, air, emisi karbon, dan limbah. Dengan big data, perusahaan dapat mengidentifikasi pola konsumsi dan dampak lingkungan secara cepat, serta membuat keputusan berbasis data.

- b. Artificial Intelligence (AI): AI membantu dalam memodelkan dampak lingkungan dari berbagai skenario bisnis, seperti perbandingan jejak karbon dari dua jenis bahan baku. AI juga bisa digunakan untuk memprediksi risiko lingkungan, memberikan saran mitigasi, dan menyusun laporan otomatis dengan efisiensi tinggi.
- c. Blockchain: Teknologi ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan, terutama dalam rantai pasok. Dengan blockchain, data pelacakan bahan baku yang ramah lingkungan atau emisi karbon dari mitra logistik dapat dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kredibilitas laporan akuntansi hijau.

Penggabungan akuntansi hijau ke dalam strategi bisnis merupakan langkah transformasional yang membawa dampak besar dalam mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dengan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dan memanfaatkan inovasi teknologi, perusahaan dapat mengubah praktik operasionalnya menjadi lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab secara ekologis. Strategi ini bukan hanya relevan untuk menghadapi tantangan lingkungan saat ini, tetapi juga sebagai landasan menuju masa depan bisnis yang resilien dan berdaya saing global.

## E. Kebijakan dan Regulasi terkait Akuntansi Hijau

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan, akuntansi hijau telah berkembang menjadi salah satu elemen penting dalam praktik bisnis modern. Implementasi akuntansi hijau tidak hanya memerlukan komitmen dari sektor swasta tetapi juga dorongan kuat dari pemerintah dan pembuat kebijakan. Kebijakan dan regulasi terkait akuntansi hijau menjadi landasan penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan.

## **1. Peran Pemerintah dalam Mendorong Implementasi Akuntansi Hijau.**

Pemerintah memainkan peran krusial dalam mendorong implementasi akuntansi hijau melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan meningkatkan transparansi pelaporan dampak lingkungan. Pemerintah dapat menerapkan peraturan yang wajibkan perusahaan untuk melaporkan dampak lingkungan mereka dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Salah satu contoh konkret adalah European Union Green Deal, yang bertujuan untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2050. Melalui kebijakan ini, Uni Eropa wajibkan perusahaan besar untuk menyusun laporan keberlanjutan dengan indikator akuntansi hijau yang spesifik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zik-rullahi dan Jide (2023), regulasi yang ketat dari pemerintah dapat memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan standar pelaporan hijau. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang secara proaktif menerapkan praktik akuntansi hijau, seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang berhasil mengurangi emisi karbon secara signifikan. Selain regulasi, pemerintah juga dapat memberikan subsidi dan bantuan teknis kepada perusahaan yang berupaya meningkatkan keberlanjutan. Sebagai contoh, beberapa negara memberikan kredit pajak untuk investasi dalam energi terbarukan atau teknologi hijau. Hal ini secara langsung mendorong lebih banyak perusahaan untuk menerapkan akuntansi hijau, mengingat adanya insentif ekonomi yang mendukung.

## **2. Kebijakan Internasional dan Nasional yang Mendukung Akuntansi Hijau.**

Di tingkat internasional, beberapa kerangka kerja dan standar telah dikembangkan untuk memastikan bahwa akuntansi hijau dapat diterapkan secara konsisten di seluruh dunia. Beberapa kebijakan dan inisiatif internasional yang paling dikenal meliputi:

- a. *Global Reporting Initiative* (GRI): GRI adalah salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. GRI menyediakan panduan tentang bagaimana mengukur dan melaporkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD): Inisiatif ini berfokus pada pengungkapkan risiko iklim yang relevan dengan keuangan perusahaan. TCFD bertujuan agar perusahaan secara terbuka mengungkapkan potensi dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan bisnis mereka.
- c. ISO 14001: Standar ini menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan yang memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka secara sistematis dan berkelanjutan.

Di tingkat nasional, beberapa negara juga telah mengadopsi kebijakan akuntansi hijau sebagai bagian dari upaya keberlanjutan mereka:

- a. Indonesia: Melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, Indonesia mewajibkan lembaga keuangan untuk menyusun laporan keberlanjutan, termasuk akuntansi hijau.
- b. Amerika Serikat: Beberapa negara bagian di AS menerapkan kebijakan pajak karbon dan mendorong perusahaan untuk melaporkan emisi mereka melalui program seperti *Carbon Disclosure Project* (CDP).
- c. Uni Eropa: Melalui Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), UE mewajibkan perusahaan besar untuk melaporkan kinerja keberlanjutan secara terstruktur.

Menurut Soraya *et al.* (2024), keberhasilan kebijakan internasional sangat bergantung pada harmonisasi standar antara berbagai negara dan industri. Harmonisasi ini

diperlukan agar laporan keberlanjutan dapat dibandingkan dan diverifikasi secara global.

### **3. Pentingnya Standar Pelaporan yang Seragam dan Panduan Penerapan Secara Global**

Pentingnya standar pelaporan yang seragam menjadi semakin jelas dalam konteks bisnis global, di mana perusahaan multinasional harus mematuhi regulasi yang berbeda di setiap negara tempat mereka beroperasi. Tanpa adanya standar global yang seragam, laporan keberlanjutan dapat berbeda-beda dalam hal metodologi, cakupan, dan validitas data. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap laporan tersebut dan menimbulkan kebingungan di kalangan investor. Menurut Singh (2020), standar pelaporan yang seragam memungkinkan perusahaan untuk melakukan benchmarking secara lebih efektif dan membantu investor dalam membandingkan kinerja keberlanjutan antar perusahaan. Selain itu, panduan penerapan secara global akan membantu menyederhanakan proses adopsi akuntansi hijau bagi perusahaan lintas negara.

Beberapa upaya harmonisasi standar yang sudah berjalan antara lain:

- a. IFRS Sustainability Disclosure Standards: Upaya dari International Financial Reporting Standards (IFRS) untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pelaporan keuangan.
- b. Sustainability Accounting Standards Board (SASB): Mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan khusus sektor industri.
- c. Integrated Reporting (IR): Menggabungkan pelaporan keuangan dan keberlanjutan dalam satu laporan terintegrasi.

Regulasi dan kebijakan terkait akuntansi hijau merupakan elemen penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis secara global. Pemerintah memainkan peran signifikan dalam mendorong adopsi akuntansi hijau melalui regulasi yang tegas dan insentif ekonomi. Selain itu,

kerangka kerja internasional seperti GRI, TCFD, dan ISO 14001 menjadi panduan utama dalam menyusun laporan keberlanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, upaya untuk mencapai standar pelaporan yang seragam masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam konteks harmonisasi antara negara dan sektor industri yang berbeda. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga internasional diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Dengan adanya regulasi yang kuat dan panduan yang seragam, akuntansi hijau dapat berkembang menjadi praktik bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan secara global.

## **F. Studi Kasus dan Implementasi Akuntansi Hijau dalam Praktik Bisnis**

Implementasi akuntansi hijau dalam dunia bisnis tidak hanya merupakan tanggung jawab sosial tetapi juga menjadi strategi bisnis yang cerdas. Akuntansi hijau membantu perusahaan menilai, mengukur, dan melaporkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Hal ini dilakukan dengan menerapkan standar pelaporan keberlanjutan seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Studi kasus dari perusahaan-perusahaan besar yang berhasil mengadopsi akuntansi hijau menunjukkan bagaimana konsep ini dapat berdampak positif pada kinerja finansial sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

### **1. Studi Kasus Implementasi Akuntansi Hijau: Unilever**

Unilever, sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia, telah mengintegrasikan akuntansi hijau dalam seluruh aspek operasionalnya. Melalui inisiatif "Sustainable Living Plan", Unilever berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari produknya sambil meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi.

**a. Pendekatan dan Strategi:**

Pemanfaatan Standar GRI dan TCFD:

Unilever menerapkan standar Global Reporting Initiative (GRI) untuk melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari seluruh rantai pasokannya. Selain itu, Unilever juga mengadopsi standar TCFD dalam pelaporan risiko iklim, memastikan bahwa informasi tentang emisi karbon dan risiko perubahan iklim dapat diakses oleh investor dan pemangku kepentingan.

**b. Pelaporan Dampak Lingkungan:**

Setiap tahunnya, Unilever merilis laporan keberlanjutan yang mencakup emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, penggunaan air, dan pengelolaan limbah. Dalam laporan ini, perusahaan menunjukkan bagaimana perubahan operasional berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya alam.

**c. Dampak Positif pada Kinerja Finansial dan Lingkungan:**

Implementasi akuntansi hijau secara konsisten membawa hasil nyata bagi Unilever. Menurut laporan keberlanjutannya pada tahun 2023, Unilever berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 31% dari tahun dasar 2010, sekaligus menghemat lebih dari €600 juta dari pengelolaan energi dan efisiensi sumber daya. Selain itu, produk dengan nilai keberlanjutan yang tinggi memberikan kontribusi hingga 70% dari total pertumbuhan pendapatan perusahaan pada periode tersebut.

Menurut Soraya *et al.*(2024) penerapan akuntansi hijau di Unilever tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat citra perusahaan sebagai pemimpin dalam keberlanjutan bisnis.

## **2. Studi Kasus: Starbucks Corporation**

Sebagai perusahaan global di sektor makanan dan minuman, Starbucks telah mengadopsi akuntansi hijau untuk memastikan operasional yang ramah lingkungan. Starbucks berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dan limbah melalui inisiatif keberlanjutan seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah kopi.

### **a. Pendekatan dan Strategi:**

Pelaporan Berbasis GRI dan SASB:

Starbucks menggunakan standar pelaporan keberlanjutan GRI dan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) untuk melaporkan data keberlanjutan secara komprehensif.

### **b. Pengelolaan Dampak Lingkungan:**

Starbucks fokus pada pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, serta pengelolaan limbah kopi melalui praktik daur ulang. Selain itu, perusahaan juga menerapkan inisiatif untuk mengurangi penggunaan plastik dengan mengganti sedotan plastik dengan alternatif ramah lingkungan.

### **c. Dampak Positif:**

Pada tahun 2022, Starbucks melaporkan penurunan emisi karbon hingga 20% dibandingkan dengan tahun 2018. Implementasi energi terbarukan di lebih dari 9.000 gerai global telah mengurangi biaya operasional hingga 15%. Menurut Oborska (2024), keberhasilan Starbucks dalam menerapkan akuntansi hijau menunjukkan bahwa integrasi antara tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung.

## **3. Studi Kasus: Patagonia Inc.**

Patagonia, perusahaan pakaian outdoor yang berbasis di Amerika Serikat, dikenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Melalui inisiatif "Worn Wear" dan pelaporan keberlanjutan, Patagonia menerapkan akuntansi hijau secara menyeluruh.

**a. Pendekatan dan Strategi:**

Pelaporan Terintegrasi dengan Standar IR (Integrated Reporting):

Patagonia menggabungkan laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan dalam satu dokumen terpadu, memberikan transparansi penuh mengenai dampak lingkungan dan keuangan.

**b. Pengelolaan Limbah dan Bahan Baku:**

Patagonia menggunakan bahan daur ulang dan organik dalam produknya, serta mempromosikan daur ulang melalui program "*Worn Wear*".

**c. Dampak Positif:**

Implementasi akuntansi hijau membuat Patagonia berhasil meningkatkan efisiensi operasional hingga 20% dan mengurangi limbah produksi secara signifikan. Penjualan produk daur ulang meningkat sebesar 35% pada tahun 2023, menunjukkan bahwa strategi keberlanjutan dapat mendorong permintaan konsumen.

Menurut Singh (2020), perusahaan yang berkomitmen pada akuntansi hijau dan keberlanjutan akan memperoleh manfaat jangka panjang dalam bentuk loyalitas pelanggan dan reputasi perusahaan yang positif.

**4. Pelajaran dari Studi Kasus: Implementasi Akuntansi Hijau yang Efektif**

Dari ketiga studi kasus tersebut, dapat diambil beberapa pelajaran penting dalam menerapkan akuntansi hijau secara efektif:

**a. Integrasi Standar Pelaporan:**

Menggunakan standar seperti GRI, TCFD, dan SASB memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keberlanjutan.

**b. Komitmen Jangka Panjang:**

Perusahaan perlu melihat keberlanjutan sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya biaya tambahan.

**c. Efisiensi Operasional dan Keuangan:**

Implementasi akuntansi hijau terbukti dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan melalui efisiensi energi dan bahan baku.

**d. Peningkatan Reputasi dan Daya Saing:**

Perusahaan yang transparan dalam melaporkan dampak ekologis akan lebih mudah memenangkan kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan.

Implementasi akuntansi hijau dalam praktik bisnis dapat membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan mengelola keberlanjutan dan tanggung jawab sosial mereka. Studi kasus dari Unilever, Starbucks, dan Patagonia menunjukkan bahwa penerapan akuntansi hijau tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga memberikan dampak positif pada kinerja finansial dan reputasi perusahaan. Melalui pendekatan terstruktur, standar pelaporan yang jelas, dan komitmen berkelanjutan, akuntansi hijau dapat menjadi landasan penting dalam mencapai bisnis modern yang bertanggung jawab dan berdaya saing.

## **G. Kesimpulan**

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis lingkungan global, akuntansi hijau telah berkembang menjadi pendekatan strategis yang esensial dalam praktik bisnis modern. Tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, akuntansi hijau kini menjadi fondasi penting bagi perusahaan yang ingin memastikan keberlanjutan jangka panjang sekaligus menjaga tanggung jawab sosial dan ekologis mereka. Di tengah meningkatnya tekanan dari pemangku kepentingan, regulasi pemerintah, dan tuntutan masyarakat akan praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab, penerapan akuntansi hijau telah menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat diabaikan.

Sebagai kerangka kerja yang menyeluruh, akuntansi hijau membantu perusahaan dalam menilai, mengukur, dan mengungkapkan dampak lingkungan dari aktivitas operasional

mereka. Dengan memasukkan aspek keuangan, sosial, dan lingkungan ke dalam sistem pelaporan, perusahaan mampu menciptakan transparansi yang lebih luas, serta meningkatkan akuntabilitas terhadap dampak nyata yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan, baik dari investor, konsumen, maupun masyarakat secara umum.

Standar pelaporan keberlanjutan seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) menjadi pedoman penting dalam penerapan akuntansi hijau. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk menyajikan informasi risiko lingkungan dan sosial secara terstruktur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya meningkatkan keterbukaan informasi, penerapan standar ini juga memperkuat proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan risiko jangka panjang.

Bukti nyata dari keberhasilan implementasi akuntansi hijau dapat dilihat dari studi kasus beberapa perusahaan global seperti Unilever, Starbucks, dan Patagonia. Ketiganya menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya lingkungan, memperkuat reputasi merek, dan menarik investasi hijau. Keunggulan kompetitif dan loyalitas konsumen menjadi nilai tambah yang diperoleh perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada prinsip keberlanjutan.

Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaannya tetap signifikan. Banyak perusahaan masih menghadapi kompleksitas dalam mengukur dampak ekologis secara kuantitatif, kesulitan mengadopsi standar pelaporan yang belum seragam secara global, serta resistensi internal dari manajemen yang masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ini menunjukkan perlunya kolaborasi lintas sektor, keterlibatan akademisi, serta dorongan regulasi yang konsisten untuk memperkuat penerapan akuntansi hijau.

Di sinilah pentingnya peran kebijakan dan regulasi, baik nasional maupun internasional. Pemerintah dapat memfasilitasi adopsi akuntansi hijau melalui regulasi yang mendukung, pemberian insentif fiskal, serta harmonisasi standar pelaporan yang lebih jelas dan terstruktur. Langkah ini tidak hanya akan memperluas adopsi akuntansi hijau, tetapi juga memastikan bahwa praktik tersebut dapat diterapkan secara konsisten lintas sektor dan negara.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa akuntansi hijau adalah lebih dari sekadar metode pelaporan, melainkan sebuah cerminan dari komitmen mendalam perusahaan terhadap keberlanjutan yang sejati. Dengan mengintegrasikan akuntansi hijau sebagai bagian inti dari strategi bisnis, perusahaan akan mampu membangun model usaha yang resilien, bertanggung jawab, dan berdaya saing, serta memastikan tercapainya keseimbangan antara profitabilitas, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, V. and L, K. (2018) 'A study on the importance of green accounting', *International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology*, 4(5), pp. 206–210.
- Hamizar, A. et al. (2024) 'Integrasi Green Accounting Dalam Strategi Pemasaran Membentuk Citra Merek Sustainability Pada Konsumen Gen-Z', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 20(1), p. 51. Available at: <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v20i1.3459>.
- Marota, R. (2024) 'Uncovering the Potential of Sustainability: Opportunities and Challenges in Applying Green Accounting for Natural Environmental Sustainability in Companies', *Journal of Sustainability Science and Management*, 19(8), pp. 89–102. Available at: <https://doi.org/10.46754/jssm.2024.08.007>.
- Oborska, A. (2024) 'The Role And Techniques Of Green Accounting In Sustainable', (58), pp. 32–40. Available at: <https://doi.org/10.22616/ESRD.2024.58.003>.
- Pratama, A.A. et al. (2024) 'Implikasi Penggunaan Metode Akuntansi Hijau dalam Praktik Bisnis', *Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 2(1), pp. 267–278. Available at: <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i1.532>.
- Sebastian, M. (2022) 'A Study On Green Accounting: Concept And Its Importance', *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, 10(8), pp. 2320–2882. Available at: [www.ijcrt.org](http://www.ijcrt.org).
- Singh, N. (2020) 'Green Accounting and its Contemporary Issues', 40, pp. 72–77.
- Soraya, B., Nurrochmah, A. and Hwihanus, H. (2024) 'Business Transformation Towards Sustainability: The Role of Green Accounting in Sustainability Management', *Journal of*

*Environmental Economics and Sustainability*, 1(3), pp. 1–8.  
Available at: <https://doi.org/10.47134/jees.v1i3.342>.

Sundarasen, S., Rajagopalan, U. and Alsmady, A.A. (2024)  
'Environmental Accounting and Sustainability: A Meta-Synthesis', *Sustainability (Switzerland)*, 16(21), pp. 1–16.  
Available at: <https://doi.org/10.3390-su16219341>.

Zik-Rullahi, A.A. and Jide, I. (2023) 'Green Accounting: A Fundamental Pillar of Corporate Sustainability Reporting', *Journal of Accounting and Financial Management*, 9(8), pp. 59–72.  
Available at: <https://doi.org/10.56201/jafm.v9.no8.2023.pg59.72>.

## TENTANG PENULIS



**Santi Rahmawaty, S.E., M.Ak.**

Penulis lahir di Tasikmalaya pada tanggal 08 Oktober 1977. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Di Universitas Abdul Azis Lamadjido. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu dengan jurusan Akuntansi, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tadulako dengan jurusan yang sama. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan S3 untuk lebih mendalami bidang Akuntansi. Motivasi penulis mengangkat tema Akuntansi Hijau: Strategi Penggabungan Bisnis dengan Kelestarian Lingkungan karena keyakinan penulis bahwa akuntansi memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam era bisnis modern, pelaporan keuangan tidak cukup hanya mencerminkan keuntungan, tetapi juga harus mencerminkan tanggung jawab ekologis. Melalui tulisan ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana akuntansi hijau dapat menjadi solusi integratif bagi perusahaan dalam mencapai profitabilitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

# BAB

# 12

## AKUNTANSI HIJAU DAN PENGHINDARAN PAJAK: KETERKAITAN, TANTANGAN, DAN SOLUSI

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ikbal, MSA., CSRA., CIAS., CTT

Universitas Mulawarman

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang Pentingnya Akuntansi Hijau dalam Dunia Bisnis dan Regulasi Pajak Lingkungan

Kondisi di beberapa dekade terakhir, kesadaran akan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis semakin meningkat, mendorong lahirnya konsep akuntansi hijau atau *green accounting*. Akuntansi hijau merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan dengan tujuan mencerminkan biaya ekologis dari operasional bisnis (Rounaghi, 2019). Dengan meningkatnya tekanan dari regulator, investor, dan masyarakat, banyak perusahaan mulai menerapkan strategi bisnis berkelanjutan, yang mencakup investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan praktik operasional yang lebih berkelanjutan (Deegan, 2013).

Penerapan akuntansi hijau juga berkaitan erat dengan regulasi perpajakan lingkungan yang bertujuan untuk mendorong bisnis menginternalisasi biaya eksternalitas negatif. Pajak lingkungan, seperti pajak karbon, pajak emisi, dan insentif pajak hijau, dirancang untuk mengurangi dampak negatif aktivitas industri terhadap lingkungan dengan memberikan disinsentif bagi polusi dan insentif bagi investasi dalam energi bersih (Shahzad, (2020). Di banyak negara, kebijakan ini menjadi alat penting dalam strategi

mitigasi perubahan iklim, sekaligus memengaruhi cara perusahaan menyusun laporan keuangan dan strategi perpajakan mereka (Carfora *et al.*, 2021). Namun, meskipun akuntansi hijau menawarkan manfaat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lingkungan, tantangan implementasi masih menjadi kendala besar. Beberapa perusahaan menggunakan standar pelaporan yang berbeda, sehingga menyulitkan perbandingan dan penilaian kinerja lingkungan secara objektif (Singh *et al.*, 2020).

## 2. Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Lingkungan

Pajak telah lama digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur perilaku ekonomi, termasuk dalam konteks lingkungan. Pajak lingkungan bertujuan untuk menginternalisasi biaya eksternal yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis, dengan cara mengenakan biaya pada pencemar dan memberi insentif kepada perusahaan yang mengurangi dampak lingkungannya (Mpofu, 2022). Teori ekonomi lingkungan menunjukkan bahwa dengan memberlakukan pajak pada emisi karbon atau konsumsi bahan bakar fosil, pemerintah dapat mengarahkan pasar menuju solusi yang lebih ramah lingkungan dengan memberikan insentif bagi inovasi teknologi bersih (Krass *et al.*, 2013).

Di banyak negara, berbagai kebijakan pajak lingkungan telah diterapkan dengan hasil yang bervariasi. Misalnya, di Uni Eropa, skema *Emissions Trading System* (ETS) diterapkan untuk mengatur emisi karbon dengan mekanisme perdagangan izin emisi, yang pada dasarnya merupakan bentuk pajak lingkungan berbasis pasar (Hughes, 2020). Di sisi lain, negara-negara seperti Swedia dan Jerman telah memperkenalkan pajak karbon langsung yang telah terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong investasi dalam energi terbarukan (Tietjen *et al.*, 2016). Namun, keberhasilan pajak lingkungan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga

pada kepatuhan perusahaan dan bagaimana mereka merespons insentif yang diberikan.

### **3. Penghindaran Pajak sebagai Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Hijau**

Meskipun pajak lingkungan dimaksudkan untuk mendorong keberlanjutan, dalam praktiknya, kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan berupa penghindaran pajak oleh perusahaan. Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal dengan mengeksplorasi celah dalam regulasi pajak (Oats & Tuck, 2019). Dalam konteks pajak lingkungan, banyak perusahaan yang menggunakan berbagai mekanisme, seperti *transfer pricing*, *offshore tax havens*, dan pelaporan yang manipulatif, untuk mengklaim insentif hijau tanpa benar-benar mengurangi dampak lingkungan mereka (Lenz, 2020).

Salah satu contoh umum adalah *greenwashing*, yaitu praktik di mana perusahaan mengklaim telah melakukan investasi hijau atau mengurangi emisi mereka, tetapi dalam kenyataannya, hanya memanfaatkan insentif pajak tanpa perubahan nyata dalam operasional bisnis (Olatubosun & Nyazenga, 2021). Praktik ini semakin sulit dideteksi ketika perusahaan menggunakan struktur keuangan yang kompleks atau melaporkan investasi hijau melalui anak perusahaan di yurisdiksi dengan regulasi pajak yang lebih menguntungkan (Aggarwal & Kadyan, 2014). Akibatnya, efektivitas kebijakan pajak hijau dalam mendorong keberlanjutan sering kali terganggu oleh strategi penghindaran pajak ini.

### **4. Tujuan dan struktur pembahasan dalam book chapter ini**

Tujuan utama penulisan book chapter ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya Akuntansi Hijau dalam dunia bisnis serta kaitannya dengan regulasi pajak lingkungan. Akuntansi hijau menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap dampak lingkungan dari

operasional mereka. Selain itu, regulasi pajak lingkungan dirancang untuk mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan penalti bagi mereka yang tidak mematuhi standar lingkungan. Namun, penerapan kebijakan ini menghadapi tantangan besar berupa penghindaran pajak, di mana beberapa perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajaknya tanpa benar-benar menerapkan praktik bisnis yang lebih hijau. Dengan demikian, memahami interaksi antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak menjadi krusial dalam memastikan keberlanjutan kebijakan lingkungan dan keadilan fiskal.

Book chapter ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian utama. Bagian *pertama* membahas konsep dasar akuntansi hijau, mencakup definisi, prinsip, serta manfaatnya bagi perusahaan dan lingkungan. Selanjutnya, akan dijelaskan konsep dasar penghindaran pajak, termasuk strategi yang sering digunakan perusahaan serta dampaknya terhadap keadilan perpajakan. Bagian berikutnya membahas keterkaitan antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak, dengan menyoroti bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan insentif pajak hijau untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan. Studi kasus dari berbagai industri akan disertakan untuk memberikan gambaran nyata bagaimana akuntansi hijau dan penghindaran pajak berinteraksi dalam praktik. Selain itu, akan dibahas regulasi internasional dan upaya yang telah dilakukan untuk mencegah penghindaran pajak hijau, termasuk kebijakan dari OECD dan Uni Eropa. Terakhir, tantangan dalam implementasi akuntansi hijau, aspek etika, serta solusi potensial akan dieksplorasi guna memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan yang lebih efektif dapat diterapkan di masa depan.

## **B. Konsep Dasar Akuntansi Hijau**

### **1. Standar Akuntansi Hijau yang Berlaku**

Akuntansi hijau bertujuan untuk mengintegrasikan informasi lingkungan ke dalam laporan keuangan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pengelolaan dampak lingkungan. Beberapa standar internasional telah dikembangkan untuk mendukung pelaporan akuntansi hijau, termasuk Global Reporting Initiative (GRI), ISO 14000, dan IFRS Sustainability Reporting. GRI Standards menyediakan pedoman bagi perusahaan dalam mengungkapkan kinerja lingkungan mereka, termasuk konsumsi energi, emisi karbon, dan pengelolaan limbah (GRI, 2021). Sementara itu, ISO 14000 adalah serangkaian standar manajemen lingkungan yang membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola dampak lingkungan mereka secara sistematis. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi lingkungan.

Di sisi lain, IFRS melalui *International Sustainability Standards Board* (ISSB) telah mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan laporan keuangan perusahaan. IFRS Sustainability Reporting bertujuan untuk menyajikan informasi lingkungan yang lebih relevan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Standar ini menekankan pada prinsip materialitas, di mana perusahaan diharapkan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan mereka. Dengan berkembangnya standar-standar ini, perusahaan di berbagai sektor semakin dituntut untuk memasukkan aspek lingkungan ke dalam strategi bisnis mereka guna meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan global.

## **2. Implementasi Akuntansi Hijau dalam Laporan Keuangan Perusahaan**

Implementasi akuntansi hijau dalam laporan keuangan mencakup pengungkapan berbagai informasi lingkungan, seperti biaya lingkungan, aset hijau, dan liabilitas terkait lingkungan. Perusahaan dapat melaporkan biaya lingkungan yang mencakup investasi dalam teknologi ramah lingkungan, biaya pengelolaan limbah, serta pengeluaran untuk memenuhi regulasi lingkungan (Maama & Appiah, 2019). Selain itu, perusahaan juga harus mencatat aset hijau, yaitu investasi dalam infrastruktur atau teknologi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan atau sistem produksi yang lebih efisien. Pengungkapan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu pemangku kepentingan dalam menilai sejauh mana perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan.

Selain biaya dan aset hijau, akuntansi hijau juga mencakup pengakuan dan pengukuran liabilitas lingkungan, seperti kewajiban atas biaya remediasi lingkungan atau penalti akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan (Lusiana, *et al.*, 2021). Misalnya, perusahaan yang terlibat dalam industri ekstraktif sering kali diwajibkan untuk mengalokasikan dana guna rehabilitasi lahan pasca-eksploitasi. Informasi ini dapat dimasukkan dalam laporan keuangan sebagai cadangan atau provisi untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan tersedia di masa depan. Dengan adanya akuntansi hijau, laporan keuangan perusahaan menjadi lebih mencerminkan dampak ekonomi dari kebijakan lingkungan yang mereka terapkan, sehingga memungkinkan investor dan regulator untuk mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan keberlanjutan perusahaan.

## C. Konsep Penghindaran Pajak

### 1. Definisi Penghindaran Pajak dan Perbedaannya dengan Penggelapan Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah praktik yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun korporasi, untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara yang sah tetapi sering kali bertentangan dengan tujuan peraturan perpajakan (Bird & Davis-Nozemack, 2018). Penghindaran pajak memanfaatkan celah hukum atau kelemahan dalam sistem perpajakan untuk meminimalkan beban pajak tanpa secara langsung melanggar hukum. Beberapa metode yang digunakan dalam penghindaran pajak termasuk penggunaan tax haven, manipulasi harga transfer (*transfer pricing*), serta pengaturan struktur modal dengan *thin capitalization*. Praktik ini sering kali menimbulkan dilema etika dan kebijakan bagi pemerintah, karena meskipun secara hukum tidak ilegal, penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur (Payne & Raiborn, 2018).

Sebaliknya, penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pembayaran pajak melalui cara-cara seperti pemalsuan laporan keuangan, tidak melaporkan pendapatan, atau membuat transaksi fiktif (Alm *et al.*, 1916). Berbeda dengan penghindaran pajak yang masih berada dalam ranah legalitas, penggelapan pajak merupakan kejahatan yang dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda dan hukuman pidana. Penggelapan pajak sering kali lebih sulit dideteksi dibandingkan penghindaran pajak karena melibatkan unsur kesengajaan dan manipulasi yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara berusaha memperkuat sistem kepatuhan dan penegakan hukum untuk menekan praktik penghindaran dan penggelapan pajak guna meningkatkan penerimaan negara secara optimal.

## **2. Strategi Umum dalam Penghindaran Pajak**

Beberapa strategi utama yang digunakan dalam penghindaran pajak melibatkan eksploitasi yurisdiksi pajak yang menguntungkan, manipulasi struktur perusahaan, dan teknik keuangan yang mengurangi beban pajak secara legal. Salah satu strategi yang paling umum adalah penggunaan *tax haven*, yaitu negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau nol serta tingkat transparansi keuangan yang rendah. Perusahaan multinasional sering mendirikan anak perusahaan di *tax haven* seperti Bermuda, Kepulauan Cayman, atau Luksemburg untuk mengalihkan keuntungan dan mengurangi kewajiban pajak mereka di negara asal (Constantin & Constanta, 2015). Hal ini menyebabkan hilangnya pendapatan pajak bagi negara dengan tarif pajak lebih tinggi dan menciptakan persaingan tidak sehat dalam sistem perpajakan global.

Strategi lain yang sering digunakan adalah *transfer pricing*, yaitu praktik penetapan harga transaksi antarperusahaan dalam satu grup bisnis yang beroperasi di berbagai yurisdiksi pajak. Dengan menetapkan harga barang atau jasa yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar dalam transaksi antar-entitas perusahaan, perusahaan dapat mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah dan mengurangi beban pajak mereka di negara dengan pajak lebih tinggi (Crofts & Sigler, 2018). Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan *thin capitalization*, yaitu strategi di mana perusahaan didanai terutama oleh utang daripada ekuitas. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengklaim bunga pinjaman sebagai pengurang pajak, sehingga mengurangi laba kena pajak secara signifikan (De Mooij, 2012). Berbagai strategi ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan mekanisme keuangan yang sah untuk meminimalkan beban pajak mereka, meskipun sering kali bertentangan dengan semangat peraturan perpajakan yang ada.

### **3. Pajak Lingkungan dan Kemungkinan Eksloitasi *Loophole* dalam Regulasi**

Pajak lingkungan (*environmental tax*) adalah instrumen kebijakan yang dirancang untuk menginternalisasi biaya eksternal dari aktivitas bisnis yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi karbon, polusi air, dan limbah industri (Nguyen *et al.*, 2016). Pajak ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku perusahaan agar lebih ramah lingkungan serta untuk mengumpulkan dana bagi program keberlanjutan dan pemulihian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering kali mencari cara untuk mengeksloitasi celah hukum (*loopholes*) dalam regulasi pajak lingkungan guna mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa benar-benar mengubah perilaku operasional mereka. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan memanfaatkan subsidi atau insentif pajak hijau secara tidak tepat, di mana perusahaan mengklaim pengurangan pajak tanpa melakukan investasi yang signifikan dalam teknologi ramah lingkungan (Eyraud *et al.*, 2013).

Selain itu, perusahaan dapat menggunakan skema perhitungan emisi yang manipulatif atau mengalihkan produksi mereka ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih lemah untuk menghindari pajak lingkungan yang tinggi di negara asal (Coste, *et al.*, 2018). Misalnya, beberapa perusahaan multinasional telah memindahkan aktivitas produksi dengan tingkat polusi tinggi ke negara berkembang dengan kebijakan pajak lingkungan yang lebih longgar, fenomena yang dikenal sebagai *carbon leakage*. Hal ini mengurangi efektivitas pajak lingkungan dalam mengurangi emisi global, karena perusahaan hanya mengalihkan dampak lingkungan mereka daripada benar-benar menguranginya. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat dan sistem pemantauan yang lebih transparan diperlukan untuk memastikan bahwa pajak lingkungan benar-benar berfungsi sebagai alat pengendalian dan bukan hanya peluang bagi perusahaan untuk menghindari pajak secara legal.

## **D. Keterkaitan Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak**

### **1. Pajak sebagai Instrumen Lingkungan: Pajak Karbon, Pajak Limbah, dan Regulasi Terkait**

Pajak lingkungan, seperti pajak karbon dan pajak limbah, merupakan instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk menginternalisasi dampak negatif aktivitas bisnis terhadap lingkungan. Pajak karbon, misalnya, mengenakan biaya atas emisi gas rumah kaca untuk mendorong perusahaan beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon mereka (Shahzad, 2020). Selain itu, pajak limbah bertujuan untuk mengurangi pembuangan limbah berlebihan dengan memberikan insentif kepada perusahaan agar mengadopsi praktik pengelolaan limbah yang lebih efisien. Regulasi terkait seperti sistem perdagangan emisi (*cap-and-trade*) juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dalam mengurangi emisi dengan biaya yang lebih efektif (Carfora, *et al.*, 2021). Namun, efektivitas pajak lingkungan sering kali bergantung pada perancangan kebijakan yang tepat serta kepatuhan perusahaan dalam menerapkan akuntansi hijau secara transparan. Beberapa perusahaan mencoba menghindari pajak lingkungan dengan mengalihkan produksi ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih lemah atau dengan melaporkan data emisi yang kurang akurat (Hughes, 2020).

### **2. Manipulasi Insentif Pajak Hijau: *Greenwashing* dan Eksloitasi Pajak Lingkungan**

Insentif pajak hijau diberikan oleh pemerintah untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Bentuk insentif ini dapat berupa kredit pajak, pengurangan tarif pajak, atau subsidi bagi perusahaan yang memenuhi standar lingkungan tertentu (Lenz, 2020). Namun, dalam praktiknya, beberapa perusahaan melakukan *greenwashing*, yaitu upaya memberikan kesan bahwa mereka peduli terhadap lingkungan melalui strategi pemasaran,

sementara secara nyata mereka tidak melakukan perubahan signifikan dalam operasionalnya (Maama & Appiah, 2019).

Selain itu, eksploitasi pajak lingkungan terjadi ketika perusahaan menggunakan celah hukum untuk mendapatkan insentif pajak hijau tanpa benar-benar memenuhi persyaratan substansial. Misalnya, perusahaan dapat mendeklarasikan penggunaan energi terbarukan dalam operasi mereka untuk mendapatkan kredit pajak, meskipun kontribusi mereka terhadap keberlanjutan masih minim. Regulasi yang lemah dan kurangnya transparansi dalam audit keberlanjutan dapat memungkinkan eksploitasi ini terjadi (Constantin & Constanta, 2015).

### **3. Transparansi dalam Laporan Keuangan: Akuntansi Hijau sebagai Solusi untuk Meminimalisir Penghindaran Pajak**

Akuntansi hijau berperan penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan dalam melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. Standar seperti *Global Reporting Initiative (GRI)*, *IFRS Sustainability Disclosure Standards*, dan **ISO 14000** mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang lebih rinci terkait konsumsi energi, emisi karbon, dan pengelolaan limbah dalam laporan keuangan mereka (Crofts, R., & Sigler, 2018). Dengan menerapkan standar ini, perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan mengurangi kemungkinan manipulasi data terkait pajak lingkungan.

Selain itu, transparansi dalam laporan keuangan dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui skema lingkungan. Dengan adanya audit lingkungan yang lebih ketat dan keterbukaan data keuangan, perusahaan yang berusaha mengeksplorasi insentif pajak hijau akan lebih mudah teridentifikasi (Singh *et al.*, 2020). Regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara rinci juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong implementasi kebijakan

perpajakan yang lebih efektif dalam mendukung upaya lingkungan.

#### **4. Dampak Ekonomi dan Sosial: Bagaimana Praktik Penghindaran Pajak Melemahkan Kebijakan Keberlanjutan**

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat melemahkan kebijakan keberlanjutan dengan mengurangi sumber daya yang tersedia bagi pemerintah untuk mendanai program lingkungan dan sosial. Pajak lingkungan yang seharusnya digunakan untuk membiayai proyek mitigasi perubahan iklim, rehabilitasi lingkungan, serta pengembangan energi terbarukan dapat mengalami defisit akibat strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (De Mooij, 2012). Selain itu, ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat muncul ketika perusahaan besar dapat menghindari pajak sementara perusahaan kecil dan masyarakat umum tetap harus membayar pajak secara penuh.

Dari perspektif sosial, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ketika perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan pajak rendah, negara asal mereka kehilangan pendapatan yang dapat digunakan untuk layanan publik, pendidikan, dan infrastruktur (Tietjen *et al.* 2016). Oleh karena itu, diperlukan reformasi perpajakan yang lebih ketat serta kerja sama internasional untuk mengatasi penghindaran pajak berbasis lingkungan dan memastikan bahwa kebijakan keberlanjutan dapat berjalan secara efektif.

#### **E. Studi Kasus: Perusahaan yang Sukses Menerapkan Akuntansi Hijau Tanpa Penghindaran Pajak**

##### **1. Unilever: Transparansi dalam Laporan Keberlanjutan**

Unilever telah lama menjadi salah satu perusahaan yang memimpin dalam praktik keberlanjutan dan akuntansi hijau. Melalui *Unilever Sustainable Living Plan* (USLP),

perusahaan ini berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan dampak sosial yang positif. Unilever menerapkan standar pelaporan keberlanjutan yang transparan dengan menggunakan *Global Reporting Initiative (GRI)* dan *IFRS Sustainability Disclosure Standards* dalam menyajikan data terkait emisi karbon, konsumsi air, dan limbah produksi. Transparansi ini memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan investor, untuk mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan secara objektif.

Selain komitmen terhadap akuntansi hijau, Unilever juga memiliki kebijakan pajak yang jelas dan transparan. Perusahaan ini tidak menggunakan strategi agresif dalam penghindaran pajak dan mematuhi kebijakan perpajakan di setiap negara tempat mereka beroperasi. Dalam *Tax Strategy Statement*-nya, Unilever menegaskan bahwa mereka tidak akan menggunakan surga pajak (*tax havens*) atau transaksi yang bertujuan hanya untuk mengurangi beban pajak tanpa aktivitas bisnis yang nyata. Dengan pendekatan ini, Unilever membuktikan bahwa perusahaan dapat menjalankan bisnis yang berkelanjutan tanpa harus menghindari kewajiban pajak yang adil.

## **2. Patagonia: Komitmen terhadap Lingkungan dan Pajak yang Adil**

Patagonia, sebuah perusahaan pakaian outdoor, dikenal sebagai salah satu pelopor dalam penerapan bisnis berbasis keberlanjutan. Perusahaan ini telah mengintegrasikan prinsip *circular economy* dengan menggunakan bahan daur ulang dan mempromosikan produk yang tahan lama untuk mengurangi limbah tekstil. Patagonia juga memiliki kebijakan terbuka mengenai jejak karbon mereka, serta menyumbangkan 1% dari pendapatan tahunan mereka untuk inisiatif lingkungan melalui program *1% for the Planet* (Peri, et al., 2020). Transparansi ini didukung dengan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi hijau global, sehingga perusahaan dapat

mempertanggungjawabkan dampak lingkungannya kepada publik.

Dalam hal perpajakan, Patagonia secara aktif membayar pajak sesuai dengan peraturan di negara tempat mereka beroperasi dan tidak memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak. Perusahaan ini bahkan secara terbuka mengkritik perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak karena dampaknya terhadap ketidakadilan ekonomi dan lingkungan (Schillmann, 2020). Patagonia meyakini bahwa membayar pajak secara adil merupakan bagian dari tanggung jawab sosial korporasi yang sejalan dengan komitmen mereka terhadap keberlanjutan.

### **3. Interface: Efisiensi Sumber Daya dan Kepatuhan Pajak Lingkungan**

Interface, sebuah perusahaan produsen karpet modular, dikenal karena strategi keberlanjutannya yang ambisius. Sejak meluncurkan *Mission Zero* pada tahun 1994, Interface telah berupaya untuk mencapai nol dampak lingkungan dalam operasionalnya. Perusahaan ini mengadopsi teknologi inovatif seperti penggunaan bahan daur ulang dalam produksi karpet serta pengurangan emisi karbon melalui energi terbarukan (Van Koert, *et al.*, 2010). Interface juga menerapkan standar akuntansi hijau dengan melaporkan dampak lingkungan mereka secara terperinci dalam laporan keberlanjutan, sesuai dengan GRI dan ISO 14000.

Dalam aspek perpajakan, Interface mengikuti kebijakan pajak lingkungan yang ketat dan tidak menggunakan skema penghindaran pajak untuk mengurangi beban keuangan mereka. Interface secara aktif membayar pajak karbon di negara-negara yang menerapkan kebijakan ini serta mematuhi pajak lingkungan lainnya yang berkaitan dengan konsumsi energi dan limbah produksi (Van Koert & Sherwood, 2019). Dengan pendekatan ini, Interface membuktikan bahwa efisiensi sumber daya dan kepatuhan

pajak lingkungan dapat berjalan beriringan untuk mendukung bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

## **F. Regulasi Internasional dan Upaya Mencegah Penghindaran Pajak Hijau**

### **1. Inisiatif OECD dan G20 dalam Mencegah Penghindaran Pajak Terkait Lingkungan**

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan G20 telah mengembangkan inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) untuk mencegah penghindaran pajak, termasuk yang berkaitan dengan pajak lingkungan. BEPS berfokus pada transparansi pajak dan pencegahan praktik manipulasi insentif pajak hijau, yang sering digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak sambil tetap mendapatkan manfaat regulasi keberlanjutan (OECD, 2021). Selain itu, OECD juga mendorong *Country-by-Country Reporting* (CbCR) yang mewajibkan perusahaan multinasional melaporkan pendapatan dan pajak yang dibayar di setiap yurisdiksi untuk menghindari praktik pengalihan laba ke negara dengan pajak rendah (*tax haven*). G20 mendukung kebijakan ini dengan mengadvokasi sistem pajak yang lebih transparan dan berkeadilan guna mencegah eksplorasi pajak lingkungan secara global (OECD, 2023).

### **2. Kebijakan Pajak Karbon Global dan Pengaruhnya terhadap Akuntansi Hijau**

Pajak karbon telah menjadi instrumen utama dalam kebijakan lingkungan global, dengan Uni Eropa dan beberapa negara maju menerapkan skema *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) untuk memastikan perusahaan membayar harga emisi karbon yang sebenarnya (European Commission, 2020). Pajak karbon memaksa perusahaan untuk memasukkan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan mereka, yang selanjutnya meningkatkan relevansi akuntansi hijau dalam mengukur dampak lingkungan. Regulasi seperti ini mendorong perusahaan

untuk mengurangi emisi karbon atau menghadapi beban pajak yang lebih tinggi. Namun, beberapa perusahaan masih mencoba mengeksplorasi celah hukum dengan menggunakan strategi transfer pricing atau offshore carbon credit untuk menghindari pajak karbon, sehingga regulasi internasional harus terus diperkuat untuk menutup kelemahan dalam sistem ini.

### **3. Peran Pemerintah dan Regulator dalam Menutup Cela hukum Penghindaran Pajak**

Pemerintah dan regulator memiliki peran kunci dalam mengatasi penghindaran pajak hijau dengan menetapkan regulasi yang lebih ketat dan sistem audit yang lebih transparan. Beberapa negara telah menerapkan pendekatan *Environmental Tax Compliance*, yang mewajibkan perusahaan melaporkan secara rinci kontribusi pajak lingkungan dan emisi karbon mereka (World Bank, 2024). Di samping itu, peran regulator seperti *Financial Action Task Force* (FATF) dalam mencegah pencucian pajak dan manipulasi insentif hijau semakin diperkuat dengan kerja sama lintas negara. Regulasi yang lebih ketat terhadap skema *tax haven* dan transaksi berbasis energi fosil juga diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan loophole pajak hijau guna menghindari kewajiban fiskal yang sebenarnya (OECD, 2023).

## **G. Tantangan dan Etika dalam Implementasi Akuntansi Hijau**

### **1. Dilema Etika Bisnis: Apakah Perusahaan yang Menghindari Pajak Bisa Dianggap Bertanggung Jawab Secara Sosial?**

Praktik penghindaran pajak menimbulkan dilema etika bisnis yang signifikan, terutama bagi perusahaan yang mengklaim memiliki tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Di satu sisi, perusahaan mungkin berinvestasi dalam proyek-proyek keberlanjutan, seperti energi terbarukan atau efisiensi sumber daya, sebagai bagian dari akuntansi hijau mereka. Namun, jika mereka secara bersamaan menghindari pajak, kontribusi mereka terhadap

pembangunan sosial menjadi dipertanyakan (Mpofu, 2022). Pajak adalah sumber utama pendanaan untuk infrastruktur publik, layanan kesehatan, dan pendidikan, sehingga penghindaran pajak dapat melemahkan manfaat yang diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, transparansi dalam pelaporan pajak dan kepatuhan terhadap kebijakan fiskal yang adil menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa akuntansi hijau benar-benar mencerminkan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial (Oats & Tuck, 2019).

## **2. Ketidakadilan Ekonomi: Penghindaran Pajak oleh Perusahaan Besar dan Dampaknya pada Usaha Kecil**

Ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh penghindaran pajak perusahaan besar telah menjadi perhatian global. Perusahaan multinasional sering kali memanfaatkan yurisdiksi pajak rendah (*tax haven*) untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, sementara usaha kecil dan menengah (UKM) tidak memiliki akses ke skema penghindaran pajak yang kompleks tersebut (Oats & Tuck, 2019). Akibatnya, UKM harus menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar, yang dapat menghambat daya saing mereka di pasar. Selain itu, dengan berkurangnya penerimaan pajak dari korporasi besar, pemerintah mungkin terpaksa meningkatkan pajak pada sektor lain atau mengurangi pengeluaran publik yang dapat mendukung usaha kecil. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa akuntansi hijau tidak hanya menjadi alat legitimasi bagi perusahaan besar untuk menghindari pajak, tetapi juga mendukung keseimbangan ekonomi yang lebih adil.

## **3. Tantangan dalam Penerapan Akuntansi Hijau: Kurangnya Transparansi dan Mekanisme Pengawasan**

Salah satu tantangan utama dalam implementasi akuntansi hijau adalah kurangnya standar transparansi dan mekanisme pengawasan yang efektif. Banyak perusahaan melaporkan kinerja lingkungan mereka melalui standar

seperti Global Reporting Initiative (GRI) atau IFRS Sustainability Reporting, tetapi tidak semua laporan ini diaudit secara independen, sehingga membuka peluang bagi praktik manipulatif seperti *greenwashing* (Aggarwal & Kadyan, 2014). Selain itu, masih ada perbedaan signifikan dalam regulasi antara negara maju dan berkembang, yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan regulasi guna menghindari kewajiban pajak lingkungan. Tanpa adanya sistem pelaporan yang seragam dan sanksi yang ketat terhadap pelanggaran, akuntansi hijau berisiko menjadi alat pencitraan daripada upaya nyata dalam keberlanjutan dan kepatuhan pajak (Tilt, 2018). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan organisasi internasional untuk meningkatkan transparansi serta memperkuat mekanisme audit akuntansi hijau.

## H. Kesimpulan

### 1. Ringkasan Utama dari Pembahasan dalam Book Chapter Ini

*Book chapter* ini membahas keterkaitan antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak dalam konteks keberlanjutan bisnis dan regulasi fiskal. Akuntansi hijau, yang bertujuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pelaporan keuangan, telah berkembang melalui standar internasional seperti GRI, ISO 14000, dan IFRS *Sustainability Reporting*. Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering kali memanfaatkan kebijakan pajak lingkungan untuk menghindari pajak secara legal, misalnya melalui *greenwashing* atau eksloitasi celah hukum (*loopholes*). Studi kasus dari perusahaan seperti Unilever, Patagonia, dan Interface menunjukkan bahwa transparansi dan kepatuhan pajak dapat berjalan beriringan dengan praktik keberlanjutan. Regulasi internasional, termasuk inisiatif OECD dan G20, berperan penting dalam memastikan bahwa pajak lingkungan tidak disalahgunakan untuk kepentingan penghindaran pajak.

## **2. Implikasi bagi Dunia Bisnis, Pemerintah, dan Akademisi dalam Mengembangkan Kebijakan Akuntansi Hijau**

Bagi dunia bisnis, penerapan akuntansi hijau yang transparan dan bertanggung jawab dapat meningkatkan reputasi perusahaan serta menarik investor yang peduli terhadap keberlanjutan. Sementara itu, bagi pemerintah, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak menjadi kunci dalam memastikan bahwa pajak lingkungan berfungsi sesuai tujuan, yakni mendorong aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Bagi akademisi, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi hubungan antara insentif pajak hijau dan perilaku perusahaan dalam menghindari pajak, serta mengembangkan kerangka kerja baru yang dapat memperbaiki sistem pelaporan akuntansi hijau. Dengan kolaborasi antara dunia bisnis, pemerintah, dan akademisi, kebijakan akuntansi hijau dapat dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan secara adil dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, P., & Kadyan, A. (2014). Greenwashing: The darker side of CSR. *Indian Journal of Applied Research*, 4(3), 61-66.
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & McClellan, C. (2016). Corruption and firm tax evasion. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 124, 146-163.
- Bird, R., & Davis-Nozemack, K. (2018). Tax avoidance as a sustainability problem. *Journal of business ethics*, 151, 1009-1025.
- Carfora, A., Pansini, R. V., & Scandurra, G. (2021). The role of environmental taxes and public policies in supporting RES investments in EU countries: Barriers and mimicking effects. *Energy Policy*, 149, 112044.
- Constantin, E., & Constanta, E. (2015). Methods of taxation in the tax havens. Examples of taxation in the bahamas, bermuda and the cayman islands. *Annals of Constantin Brancusi' University of Targu-Jiu. Economy Series/Analele Universității' Constantin Brâncuși' din Târgu-Jiu Seria Economie*.
- Coste, A., Cali, M., Cantore, N., & Heine, D. (2018). Staying competitive: Productivity effects of environmental taxes. *Fiscal policies for development and climate action*, 65.
- Crofts, R., & Sigler, T. (2018). Which tax havens are the most central? Applying social network analysis to understand firm service interactions. *Financial Geography Working Group Papers*, 20, 1-16.
- De Mooij, R. A. (2012). Tax biases to debt finance: Assessing the problem, finding solutions. *Fiscal studies*, 33(4), 489-512.
- Deegan, C. (2013). The accountant will have a central role in saving the planet... really? A reflection on 'green accounting and green eyeshades twenty years later'. *Critical perspectives on accounting*, 24(6), 448-458.

- European Commission. 2020. Supporting Sustainability Transitions under the European Green Deal with Cohesion Policy: Toolkit for National and Regional Decision-Makers Regional and Urban Policy. Luksemburg: Publikasi Uni Eropa, Luksemburg.
- Eyraud, L., Clements, B., & Wane, A. (2013). Green investment: Trends and determinants. *Energy policy*, 60, 852-865.
- Hughes, E. (2020). *Implications of application of the EU Emissions Trading System (ETS) to international shipping, and potential benefits of alternative Market-Based Measures (MBMs)*. Johannesburg, South Africa: ECSA.
- Krass, D., Nedorezov, T., & Ovchinnikov, A. (2013). Environmental taxes and the choice of green technology. *Production and operations management*, 22(5), 1035-1055.
- Lenz, H. (2020). Aggressive tax avoidance by managers of multinational companies as a violation of their moral duty to obey the law: A Kantian rationale. *Journal of Business Ethics*, 165(4), 681-697.
- Lusiana, M., Haat, M. H. C., Saputra, J., Yusliza, M. Y., Muhammad, Z., & Bon, A. T. (2021, March). A review of green accounting, corporate social responsibility disclosure, financial performance and firm value literature. In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* (pp. 5622-5640).
- Maama, H., & Appiah, K. O. (2019). Green accounting practices: lesson from an emerging economy. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(4), 456-478.
- Mpofu, F. Y. (2022). Green Taxes in Africa: opportunities and challenges for environmental protection, sustainability, and the attainment of sustainable development goals. *Sustainability*, 14(16), 10239.

- Nguyen, T. L. T., Laratte, B., Guillaume, B., & Hua, A. (2016). Quantifying environmental externalities with a view to internalizing them in the price of products, using different monetization models. *Resources, Conservation and Recycling*, 109, 13-23.
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance: is tax transparency the solution?. *Accounting and Business Research*, 49(5), 565-583.
- OECD. (2021). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021. In OECD. Publishing Paris (Issue 24)
- OECD. (2023). PISA 2022 Result (Colume I): The State of Learning and Equity in Education. Paris: OECD Publishing.
- Olatubosun, P., & Nyazenga, S. (2021). Greenwashing and responsible investment practices: empirical evidence from Zimbabwe. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(1), 16-36.
- Payne, D. M., & Raiborn, C. A. (2018). Aggressive tax avoidance: A conundrum for stakeholders, governments, and morality. *Journal of Business Ethics*, 147, 469-487.\
- Peri, P. L., Rosas, Y. M., Ladd, B., Díaz-Delgado, R., & Martinez Pastur, G. (2020). Carbon footprint of lamb and wool production at farm gate and the regional scale in Southern Patagonia. *Sustainability*, 12(8), 3077.
- Rounaghi, M. M. (2019). Economic analysis of using green accounting and environmental accounting to identify environmental costs and sustainability indicators. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 504-512.
- Schillmann, C. (2020). Patagonia Inc. under a sustainability perspective. *Nottingham University Business School China*.
- Shahzad, U. (2020). Environmental taxes, energy consumption, and environmental quality: Theoretical survey with policy implications. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(20), 24848-24862.

- Singh, S. K., Del Giudice, M., Chierici, R., & Graziano, D. (2020). Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. *Technological forecasting and social change*, 150, 119762.
- Tietjen, O., Pahle, M., & Fuss, S. (2016). Investment risks in power generation: A comparison of fossil fuel and renewable energy dominated markets. *Energy Economics*, 58, 174-185.
- Van Koert, M., & Sherwood, D. (2019). *Interface: Creating a Climate Fit for Life with Carpet Tiles*. Rotterdam School of Management, Erasmus University.
- Van Koert, M., Sherwood, D., & Kennedy, S. (2019). Interface: Creating a Climate Fit for Life through Carpet Tiles.
- World Bank. (2024). Carbon Pricing Dashboard | Up-to-date overview of carbon pricing initiatives. <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/>

## TENTANG PENULIS



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ikbal, MSA., CSRA., CIAS., CTT**

Penulis lahir di Long Iram, Kutai Barat pada tanggal 07 April 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman, S2 dan S3 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Brawijaya Malang. Selain menjadi dosen, penulis menekuni bidang Pembangunan Masyarakat di berbagai ranah riset Terapan bekerjasama dengan pemerintah dan badan usaha. Penulis termotivasi untuk menulis karena semakin *massive* kerusakan lingkungan sebagai akibat eksplorasi sumber daya alam, namun masih banyak kecurangan yang dilakukan dunia usaha, salah satunya berupaya melakukan penghindaran pajak dan enggan membayar pajak. Adapun, sejumlah karya tulis yang sudah diterbitkan di antaranya: sebagai Buku Ajar dan Buku Referensi tentang Pembangunan Daerah, berbagai Riset Terapan di hampir semua bidang, meliputi: Keuangan Daerah, Hukum, Pajak dan Retribusi Daerah, Dokumen Perencanaan Daerah, SID Optimasi Lahan Rawa dan Perencanaan Investasi.

Korespondensi melalui email : muhammad.ikbal@feb.unmul.ac.id

# BAB

# 13

## PENERAPAN AKUNTANSI HIJAU DAN ATURANNYA

Fauzan Fuadi, S.Ak, M.Sc.

Universitas Aisyah Pringsewu

### A. Pendahuluan

Akuntansi hijau (*Green accounting*), yang juga dikenal sebagai akuntansi lingkungan (*environmental accounting*), telah muncul sebagai pendekatan penting dalam mengintegrasikan biaya lingkungan dan sosial ke dalam akuntansi keuangan tradisional. Dengan memasukkan penilaian sumber daya alam, mengukur dampak lingkungan, dan menilai implikasi sosial dan ekonomi, akuntansi hijau memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai kegiatan ekonomi dan dampak keberlanjutannya (Azwin *et al.*, 2024). Penerapan akuntansi hijau semakin diakui sebagai hal yang penting bagi bisnis yang berusaha mencapai keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan.

Keberhasilan implementasi akuntansi hijau bergantung pada beberapa faktor kunci. Komitmen manajemen puncak merupakan hal yang mendasar, karena mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi perusahaan membutuhkan kepemimpinan dan dukungan yang kuat (Marota, 2024). Selain itu, kesadaran dan pemahaman karyawan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa praktik akuntansi hijau diadopsi secara efektif dalam suatu organisasi. Penggunaan teknologi pendukung, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), dapat meningkatkan akurasi data dan pengambilan keputusan, yang mengarah pada peningkatan

efisiensi dalam praktik akuntansi hijau (Khan and Gupta, 2024). Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, baik lokal maupun internasional, diperlukan untuk menstandarisasi dan mengoptimalkan penerapan akuntansi hijau. Keterlibatan pemasok dalam praktik berkelanjutan juga memperkuat tujuan lingkungan yang lebih luas, sementara transparansi dalam pelaporan menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas di antara para pemangku kepentingan (Gola *et al.*, 2022; Marota, 2024).

Terlepas dari manfaatnya, adopsi akuntansi hijau menghadirkan beberapa tantangan. Perusahaan sering mengalami kesulitan dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan karena kompleksitas data, biaya implementasi yang tinggi, dan keterbatasan sumber daya. Namun, mengatasi hambatan-hambatan ini menawarkan peluang strategis yang signifikan, termasuk efisiensi biaya, penghematan energi, peningkatan reputasi perusahaan, dan kemampuan untuk menarik konsumen yang sadar lingkungan(Stanojević, Vranes and Gökpal, 2010; Marota, 2024).

Kerangka kerja peraturan dan standar internasional memainkan peran penting dalam memandu praktik akuntansi hijau. Organisasi seperti Federasi Akuntan Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan pedoman global untuk akuntansi manajemen lingkungan (Tu, Huang and Hsu, 2015). Selain itu, banyak negara, termasuk Jepang, telah mengembangkan peraturan nasional yang spesifik untuk mendukung akuntansi lingkungan (Tu, Huang and Hsu, 2015). Standar yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti Global Reporting Initiative (GRI) semakin mendorong konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan (Machain *et al.*, 2021; Fernando *et al.*, 2024).

Dampak dari akuntansi hijau lebih dari sekadar pelaporan keuangan, dan mempengaruhi praktik bisnis dengan berbagai cara. Akuntansi hijau mendorong desain dan pengembangan produk yang berkelanjutan, menekankan pencegahan polusi dan inovasi yang ramah lingkungan (Tu, Huang and Hsu, 2015).

Akuntansi hijau juga membentuk keputusan investasi, membuat investasi dalam energi terbarukan dan inisiatif berkelanjutan lainnya menjadi lebih menarik. Selain itu, akuntansi hijau juga memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan memastikan bahwa perusahaan memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial mereka, memperkuat komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan (Adow, 2024; Huong, 2024).

Akuntansi hijau merupakan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan pertimbangan keuangan, lingkungan, dan sosial ke dalam pengambilan keputusan bisnis. Meskipun masih ada tantangan, keuntungan strategis yang ditawarkannya menjadikannya alat yang berharga untuk mempromosikan keberlanjutan dan kesuksesan bisnis jangka panjang. Mematuhi kerangka kerja peraturan internasional dan nasional sangat penting untuk memastikan implementasi akuntansi hijau yang efektif, sehingga memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi secara bermakna terhadap upaya keberlanjutan global.

## B. Peran Regulasi dalam Penerapan Akuntansi Hijau

Regulasi memiliki peran penting dalam penerapan akuntansi hijau, terutama melalui tekanan regulasi, kepatuhan dan pengungkapan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap praktik korporasi. Tekanan regulasi mendorong adopsi praktik akuntansi hijau di berbagai negara. Sebagai contoh, di Vietnam, tekanan regulasi secara positif memoderasi hubungan antara sikap manajer terhadap lingkungan dan penerapan Environmental Management Accounting (EMA) (Liem and Hien, 2024). Sementara itu, di Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03 Tahun 2017 bertujuan membimbing institusi keuangan menuju keuangan berkelanjutan, meskipun efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya peraturan spesifik dan mekanisme penegakan yang kuat (Yuspin *et al.*, 2024).

Dalam aspek kepatuhan dan pengungkapan, regulasi seperti Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Uni Eropa bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dengan mewajibkan pengungkapan praktik keberlanjutan, termasuk faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) (Contipelli, 2024). Di Prancis, undang-undang 'Grenelle 2' tahun 2010 yang mewajibkan pengungkapan akuntansi lingkungan telah meningkatkan alasan-alasan yang diberikan perusahaan atas ketidakhadiran pengungkapan tersebut, meskipun tidak secara signifikan meningkatkan jumlah perusahaan yang benar-benar melakukannya (Senn, 2018).

Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi akuntansi hijau, seperti yang terjadi di India, di mana tidak adanya persyaratan hukum yang jelas, kurangnya teori akuntansi hijau yang memadai, serta minimnya tenaga akuntan lingkungan menjadi kendala utama dalam pengungkapan akuntansi hijau (Khan, Gupta and Gupta, 2024). Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih jelas, insentif yang didanai pemerintah, serta dukungan dari organisasi non-pemerintah guna menegakkan standar akuntansi hijau yang lebih kuat (Khan, Gupta and Gupta, 2024).

Dampak regulasi terhadap praktik korporasi juga cukup signifikan. Regulasi dapat mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan akuntansi hijau ke dalam strategi bisnis mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja lingkungan serta pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (Ratmono *et al.*, 2023). Lebih jauh, penerapan akuntansi hijau terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan pembangunan berkelanjutan, seperti yang terlihat dalam industri manufaktur (Chukka, Madem and Konathala, 2024).

## **C. Kerangka Regulasi dan Standar Akuntansi Hijau**

### **1. Standar Internasional**

Regulasi dan standar akuntansi hijau memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam aspek keberlanjutan. Beberapa standar internasional yang umum digunakan meliputi Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang terkait dengan keberlanjutan.

Kerangka Global Reporting Initiative (GRI) secara luas digunakan dalam pelaporan keberlanjutan, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) (Ratmono *et al.*, 2023; Marota, 2024). Standar ini membantu organisasi mengungkapkan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat guna mendorong pembangunan berkelanjutan. Selain itu, standar GRI bersifat adaptif dan modular, memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerja keberlanjutan mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Namun, tantangan dalam penerapan GRI termasuk keterlibatan pemangku kepentingan yang kurang mendalam serta kualitas pengungkapan yang bervariasi antar wilayah dan industri.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) mengembangkan standar spesifik industri untuk akuntansi keberlanjutan, dengan fokus pada isu-isu keberlanjutan material yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Standar ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, khususnya dalam konteks etika dan kepentingan publik. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam kegiatan keberlanjutan yang material memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, terutama di negara-negara dengan orientasi kuat terhadap pemangku kepentingan. Meski

demikian, terdapat inkonsistensi dalam penerapan pedoman SASB antar perusahaan dalam industri yang sama, sehingga menyoroti perlunya praktik pelaporan yang lebih terstandarisasi.

Sementara itu, International Financial Reporting Standards (IFRS) melalui International Sustainability Standards Board (ISSB) berupaya mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan global. Standar ini bertujuan mengharmonisasi pelaporan keberlanjutan guna mengurangi fragmentasi regulasi serta meningkatkan transparansi perusahaan dan persepsi pasar. Adopsi standar IFRS terbukti meningkatkan keberlanjutan laba serta keterbandingan laporan keuangan, terutama di industri yang kompetitif. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana standar ini harus berfokus pada materialitas keuangan dibandingkan dengan materialitas dampak yang lebih luas.

## 2. Regulasi Akuntansi Hijau di Indonesia

Regulasi akuntansi hijau di Indonesia berperan penting dalam mendorong transparansi, kepatuhan, serta integrasi keberlanjutan dalam praktik bisnis. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelaporan lingkungan, keuangan berkelanjutan, kebijakan pajak hijau, hingga tantangan dalam implementasinya.

Regulasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap tujuan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan diharapkan mengungkapkan inisiatif dan tindakan mereka dalam laporan tahunan dan keberlanjutan guna meningkatkan akuntabilitas terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan (Marota, 2024). Salah satu aspek penting dalam pelaporan ini adalah pengungkapan emisi karbon. Namun, meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengungkapan ekologis, praktik pengungkapan lingkungan di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran manajemen perusahaan terhadap pengungkapan

lingkungan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada (Ratmono *et al.*, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi yang mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan dalam praktik akuntansi dan pelaporan mereka. Implementasi akuntansi hijau dan pelaporan terintegrasi, khususnya di sektor bahan dasar dan energi, telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan pasar perusahaan di Indonesia (Astari *et al.*, 2023).

Pemerintah juga menerapkan kebijakan pajak hijau atau **eco-taxes**, yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang optimal dalam ekonomi pasar dengan mengenakan pajak pada eksternalitas negatif guna menyamakan biaya pribadi dan sosial dari suatu aktivitas. Selain pajak hijau, insentif lingkungan juga berperan dalam meningkatkan transparansi perusahaan. Beberapa studi menunjukkan bahwa insentif seperti penghargaan kinerja lingkungan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan perusahaan. Penghargaan ini terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengungkapan lingkungan oleh perusahaan (Ratmono *et al.*, 2023).

Meskipun regulasi telah dibuat, implementasi akuntansi hijau di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kesadaran dan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan akuntansi hijau masih perlu ditingkatkan. Studi menunjukkan bahwa adopsi *Environmental Management Accounting* (EMA) dipengaruhi secara positif oleh tekanan regulasi dan praktik industri hijau. Untuk memastikan peningkatan kepatuhan, diperlukan penguatan regulasi serta standar pengungkapan informasi lingkungan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal juga harus lebih ketat guna meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam mengimplementasikan akuntansi hijau.

Akuntansi hijau, yang juga dikenal sebagai akuntansi lingkungan, semakin diakui sebagai praktik penting bagi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan mengatasi masalah lingkungan. Penerapannya membutuhkan pendekatan strategis yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan perusahaan.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi akuntansi hijau. Salah satu yang paling penting adalah komitmen manajemen puncak, karena dukungan penuh dari pimpinan sangat penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, kesadaran dan pemahaman karyawan juga memainkan peran penting; mengedukasi karyawan tentang praktik akuntansi hijau dapat menumbuhkan budaya keberlanjutan dalam organisasi. Penggunaan teknologi pendukung juga sangat penting, memungkinkan perusahaan untuk melacak dan melaporkan dampak lingkungan secara efektif. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan hukum dan menghindari hukuman. Di luar upaya internal, keterlibatan pemasok juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan dari rantai pasokan. Terakhir, transparansi dalam pelaporan membantu membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan dengan mengkomunikasikan secara jelas dampak lingkungan dan inisiatif keberlanjutan perusahaan.

Akuntansi hijau menawarkan berbagai keuntungan, baik finansial maupun non-finansial. Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi biaya dan penghematan energi, karena perusahaan yang mengadopsi akuntansi hijau sering kali mengalami pengurangan yang signifikan dalam konsumsi sumber daya dan limbah. Selain itu, akuntansi hijau juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja

lingkungan, yang pada gilirannya memperkuat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Manfaat penting lainnya adalah peningkatan nilai perusahaan, karena penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik akuntansi hijau cenderung mencapai stabilitas keuangan yang lebih besar, meskipun dampak pengungkapan laporan keberlanjutan dapat bervariasi. Selain itu, akuntansi hijau meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis, membantu perusahaan membangun citra publik yang positif dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang.

Terlepas dari manfaatnya, penerapan akuntansi hijau menghadirkan beberapa tantangan. Salah satu masalah utama adalah kompleksitas dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan, yang dapat memakan banyak sumber daya dan membutuhkan keahlian khusus. Biaya implementasi yang terkait dengan pengaturan sistem akuntansi hijau dan perolehan teknologi yang diperlukan juga bisa tinggi, meskipun biaya ini sering kali diimbangi dengan manfaat jangka panjang. Selain itu, perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal sumber daya keuangan dan sumber daya manusia, yang dapat menghambat adopsi praktik akuntansi hijau.

Studi empiris menyoroti dampak positif dari akuntansi hijau di berbagai industri dan negara. Penelitian terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa akuntansi hijau meningkatkan kinerja lingkungan dan pengungkapan CSR, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Di perusahaan-perusahaan Bangladesh, khususnya di industri yang sangat berpolusi, akuntansi hijau telah terbukti secara signifikan meningkatkan kemampuan pembangunan berkelanjutan. Di sektor manufaktur Indonesia, perusahaan yang telah mengadopsi praktik akuntansi hijau telah melaporkan kinerja keuangan yang lebih baik karena manajemen biaya lingkungan yang lebih baik.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perusahaan dapat mengadopsi beberapa langkah strategis. Memperkuat komitmen terhadap praktik-praktik berkelanjutan di semua tingkat organisasi memastikan bahwa akuntansi hijau tertanam dalam budaya perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, mengembangkan metodologi standar untuk akuntansi lingkungan dapat membantu mengatasi kompleksitas pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan. Terakhir, mempromosikan kesadaran dan program pelatihan dapat membantu menjembatani kesenjangan pengetahuan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan, sehingga memfasilitasi adopsi praktik akuntansi hijau yang lebih lancar.

Penerapan akuntansi hijau, yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam praktik akuntansi tradisional, menghadirkan beberapa tantangan dan hambatan. Tantangan-tantangan ini dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal, serta kesulitan konseptual dan praktis yang dihadapi perusahaan ketika mengadopsi akuntansi hijau.

Salah satu hambatan internal yang utama adalah komitmen dan dukungan manajemen. Kurangnya komitmen dari manajemen puncak dapat menghambat keberhasilan integrasi akuntansi hijau ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Dukungan penuh dari pimpinan sangat penting untuk menanamkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasi bisnis. Selain itu, kompetensi teknologi dan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri, karena perusahaan membutuhkan sistem yang canggih untuk mengukur dan melaporkan dampak lingkungan secara akurat. Teknologi dan infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat implementasi akuntansi hijau yang efektif.

Hambatan signifikan lainnya adalah kendala keuangan, karena penerapan akuntansi hijau membutuhkan investasi dalam teknologi baru, pelatihan, dan sistem

manajemen data, yang mungkin mahal bagi banyak organisasi. Selain itu, ketidakpastian manfaat ekonomi membuat perusahaan enggan untuk mengadopsi akuntansi hijau, karena mereka mungkin ragu untuk berinvestasi dalam inisiatif keberlanjutan tanpa keuntungan finansial yang jelas.

Faktor eksternal juga mempengaruhi adopsi akuntansi hijau. Salah satu penghalang tersebut adalah kepentingan pemangku kepentingan. Kurangnya tekanan dari para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan regulator, dapat mengurangi urgensi bagi perusahaan untuk mengadopsi praktik akuntansi hijau. Selain itu, dukungan peraturan seringkali tidak memadai, dengan peraturan lingkungan yang tidak memadai dan dukungan administratif yang menyulitkan perusahaan untuk menjustifikasi penerapan akuntansi hijau.

Tantangan lain terletak pada penelitian dan kolaborasi akademis, karena kelangkaan penelitian dan praktik terbaik menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pengetahuan dan strategi yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi hijau secara efektif. Selain itu, kurangnya standar dan perbandingan global mempersulit adopsi. Tidak adanya metodologi standar dan kerangka kerja peraturan yang berbeda-beda di berbagai negara menyulitkan perusahaan untuk menyelaraskan pelaporan keberlanjutan mereka dengan ekspektasi internasional (Salazar *et al.*, 2024).

Salah satu hambatan praktis yang paling signifikan terhadap akuntansi hijau adalah kompleksitas pengukuran dan pelaporan. Mengukur dampak lingkungan secara akurat membutuhkan alat dan metodologi yang canggih, termasuk menentukan skala perubahan yang diperlukan untuk mencegah degradasi lingkungan dan memasukkan metrik ini ke dalam praktik akuntansi (Greenham, 2010; Derchi, Burkert and Oyon, 2013).

Selain itu, integrasi dengan akuntansi keuangan masih menjadi tantangan, karena akuntansi hijau sering kali bersifat sukarela dan tidak diaudit. Banyak perusahaan yang memprioritaskan akuntansi keuangan, yang menyebabkan kurangnya fokus pada pelaporan dampak lingkungan. Terakhir, mencapai perubahan perilaku dalam organisasi merupakan hal yang sulit, karena pergeseran budaya perusahaan dan proses pengambilan keputusan untuk menyelaraskan dengan tujuan keberlanjutan membutuhkan waktu dan upaya.

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, perusahaan yang berhasil menerapkan akuntansi hijau dapat memperoleh keuntungan yang signifikan. Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi biaya dan penghematan energi, karena inisiatif keberlanjutan sering kali mengarah pada pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan pengurangan biaya operasional. Selain itu, akuntansi hijau dapat meningkatkan reputasi perusahaan, menarik konsumen yang sadar lingkungan dan investor yang memprioritaskan keberlanjutan.

Mengatasi hambatan terhadap akuntansi hijau juga berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis jangka panjang. Perusahaan yang berinvestasi dalam akuntansi hijau dapat mengurangi risiko lingkungan, mematuhi peraturan yang terus berkembang, dan mengamankan stabilitas keuangan jangka panjang sambil memberikan dampak positif terhadap lingkungan (Marota, 2024; Salazar *et al.*, 2024). Dengan memperkuat komitmen, meningkatkan kemampuan teknologi, dan menyelaraskan dengan standar global, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dan sepenuhnya mengintegrasikan akuntansi hijau ke dalam strategi bisnis mereka.

## D. Simpulan

Akuntansi hijau merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek keuangan, lingkungan, dan sosial dalam sistem akuntansi serta pengambilan keputusan bisnis. Penerapan konsep ini semakin diakui sebagai strategi fundamental bagi perusahaan dalam mewujudkan keberlanjutan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. Keberhasilan implementasi akuntansi hijau sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain komitmen manajemen puncak, kesadaran serta keterlibatan karyawan, pemanfaatan teknologi pendukung, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Selain itu, keterlibatan pemasok dalam praktik bisnis berkelanjutan serta transparansi dalam pelaporan turut memperkuat efektivitas penerapan akuntansi hijau.

Regulasi memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan efektivitas implementasi akuntansi hijau, baik melalui tekanan kebijakan, standar internasional, maupun regulasi nasional. Standar global seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), dan International Financial Reporting Standards (IFRS) telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan. Di Indonesia, berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai keuangan berkelanjutan serta kebijakan terkait pajak hijau, telah berkontribusi dalam mendorong adopsi akuntansi hijau di sektor bisnis.

Meskipun penerapan akuntansi hijau menawarkan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi biaya, penguatan reputasi perusahaan, serta penguatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Kesulitan dalam mengukur dampak lingkungan, tingginya biaya penerapan, serta keterbatasan sumber daya merupakan beberapa kendala utama yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, meliputi penguatan regulasi,

peningkatan kesadaran manajemen dan karyawan, serta pengembangan metodologi standar dalam pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan.

Secara keseluruhan, akuntansi hijau memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan bisnis serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat dan penerapan praktik akuntansi hijau yang semakin luas, perusahaan dapat lebih optimal dalam mengelola dampak lingkungan sekaligus memperkuat daya saing di era ekonomi berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adow, A. H. (2024) 'Green accounting standards and environmental sustainability in Alkharj: Mediating role of social performance', *Uncertain Supply Chain Management*, 12(4), pp. 2299–2308. doi: 10.5267/j.uscm.2024.6.003.
- Astari, T. A. et al. (2023) 'Green accounting and disclosure of sustainability report on firm values in Indonesia', in *E3S Web of Conferences*. EDP Sciences, p. 2024.
- Azwin, M. N. N. et al. (2024) 'Critical Insights into Green Accounting Research: A Bibliometric Review', *Technology-Driven Business Innovation: Unleashing the Digital Advantage: Volume 2*, pp. 609–620.
- Chukka, H. G. R., Madem, S. and Konathala, S. K. (2024) 'Leveraging green accounting for sustainable development: Improve financial performance in the green industry in India', in *Building Climate Neutral Economies Through Digital Business and Green Skills*, pp. 95–127. doi: 10.4018/979-8-3693-5673-9.ch004.
- Contipelli, E. (2024) 'Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): A Guide For Reporting On Sustainability In The Eu Market', *Novos Estudos Juridicos*, 29(3), pp. 843–865. doi: 10.14210/nej.v29n3.p843-865.
- Derchi, G. B., Burkert, M. and Oyon, D. (2013) 'Environmental management accounting systems: A review of the evidence and propositions for future research', *Studies in Managerial and Financial Accounting*, 26, pp. 197–229. doi: 10.1108/S1479-3512(2013)0000026006.
- Fernando, K. et al. (2024) 'The Effect of Green Accounting Disclosure on the Firm Value of Listed Mining and Agriculture Companies in Southeast Asia Countries', *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(1), pp. 377–382. doi: 10.32479/ijEEP.15151.

- Gola, K. R. *et al.* (2022) 'Green accounting and its application: A study on reporting practices of environmental accounting in India', *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 18(1-2), pp. 23-39. doi: 10.1504/WREMSD.2022.120767.
- Greenham, T. (2010) 'Green accounting: A conceptual framework', *International Journal of Green Economics*, 4(4), pp. 333-345. doi: 10.1504/IJGE.2010.037655.
- Huong, H. D. (2024) 'Green Accounting of Listed Enterprises On the Frontier Stock Market', *Quality - Access to Success*, 25(203), pp. 433-442. doi: 10.47750/QAS/25.203.47.
- Khan, S. and Gupta, S. (2024) 'Boosting the efficacy of green accounting for better firm performance: artificial intelligence and accounting quality as moderators', *Meditari Accountancy Research*. doi: 10.1108/MEDAR-02-2024-2379.
- Khan, S., Gupta, S. and Gupta, V. K. (2024) 'Unveiling the black box of green accounting information disclosure: an analysis of disclosure diversity and difficulties from a developing economy perspective', *International Journal of Disclosure and Governance*. doi: 10.1057/s41310-024-00255-2.
- Liem, V. T. and Hien, N. N. (2024) 'The impact of managers' attitudes towards environmental management accounting and green competitive advantage in Vietnam manufacturers', *Heliyon*, 10(13). doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e33565.
- Machain, G. *et al.* (2021) 'The Quality of Information of GRI Standards in an Emerging Economy: Evidence from Green Accounting Practices in Argentina', in *Sustainable Development Goals Series*, pp. 137-158. doi: 10.1007/978-3-030-76563-7\_6.

- Marota, R. (2024) 'Uncovering The Potential Of Sustainability: Opportunities And Challenges In Applying Green Accounting For Natural Environmental Sustainability In Companies', *Journal of Sustainability Science and Management*, 19(8), pp. 89–102. doi: 10.46754/jssm.2024.08.007.
- Ratmono, D. et al. (2023) 'The role of environmental performance in mediating the relationship between green accounting and corporate social responsibility', *Environmental Economics*, 15(1), pp. 46–55. doi: 10.21511/EE.15(1).2024.04.
- Salazar, J. K. F. et al. (2024) 'The Integration of Environmental Costs into Financial Statements: A Literature Review', *Journal of Educational and Social Research*, 14(5), pp. 458–472. doi: 10.36941/jesr-2024-0151.
- Senn, J. (2018) “Comply or explain” If you do not disclose environmental accounting information: Does new french regulation work?, in *Advances in Environmental Accounting and Management*, pp. 113–133. doi: 10.1108/S1479-359820180000007005.
- Stanojević, M., Vranes, S. and Gökalp, I. (2010) 'Green accounting for greener energy', *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 14(9), p. 2473. doi: 10.1016/j.rser.2010.06.020.
- Tu, J.-C., Huang, H.-S. and Hsu, C.-Y. (2015) 'The impact of green accounting on product design and development', in *Innovation in Design, Communication and Engineering - Proceedings of the 3rd International Conference on Innovation, Communication and Engineering, ICICE 2014*, pp. 755–758. doi: 10.1201/b18737-159.
- Yuspin, W. et al. (2024) 'Green Banking for Environmental Management: A Sustainable Paradigm Shift', in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. doi: 10.1088/1755-1315/1357/1/012017.

## TENTANG PENULIS



**Fauzan Fuadi, S.Ak., M.Sc.**

Penulis adalah dosen program studi S1 Akuntansi di Universitas Aisyah Pringsewu. "Awal pendidikan tinggi penulis dimulai sejak berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi Keuangan termasuk mengajar mata kuliah Akuntansi Syariah dan Pengantar Pasar Modal. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh penulis pada topik-topik yang berkaitan dengan sustainability accounting, seperti tentang Corporate Social Responsibility dan Carbon Emission Disclosure dan telah dipublikasikan di berbagai jurnal. Selain itu, penulis pernah meraih Juara 1 dalam MonsoonSIM Enterprise Resource Management Competition (MERMC) Indonesian Final di Universitas Budiluhur pada tahun 2019. Penulis juga berhasil memperoleh Juara 1 dalam ERP Competition di President University serta meraih 1st Runner Up dalam Online ERP League yang diselenggarakan oleh MonsoonSIM Indonesia pada tahun yang sama. Keberhasilan tersebut mengantarkan penulis sebagai delegasi dalam International MonsoonSIM ERM Competition di The Hong Kong Polytechnic University. Dalam bidang organisasi, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMJ) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta."

# BAB | PENERAPAN AKUNTANSI HIJAU PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN

# 14 |

Dr. Monika Handayani, S.E., A.k., C.A., M.M.

Politeknik Negeri Banjarmasin

## A. Pendahuluan

Industri perkebunan memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian global, khususnya di negara-negara berkembang yang bergantung pada produk seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Namun, industri ini juga dihadapkan pada tantangan besar terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan perkebunan, seperti deforestasi, polusi, dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Akuntansi hijau, atau green accounting, muncul sebagai alat untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pengelolaan perusahaan perkebunan (J. Bebbington and Larrinaga, 2014).

Bab ini bertujuan untuk menggali penerapan akuntansi hijau dalam perusahaan perkebunan, serta manfaat, tantangan, dan peluang yang terkait. Pembahasan dimulai dengan penjelasan dasar tentang konsep akuntansi hijau dan pentingnya penerapannya dalam sektor perkebunan.

Meningkatnya keprihatinan global mengenai degradasi lingkungan dan penipisan sumber daya telah mendorong konsep keberlanjutan ke garis depan dalam praktik bisnis, terutama dalam industri yang sangat bergantung pada sumber daya alam seperti perusahaan perkebunan. Metode akuntansi tradisional, yang terutama berfokus pada kinerja keuangan, sering kali gagal menangkap biaya dan manfaat lingkungan

yang terkait dengan operasi bisnis, sehingga menciptakan kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan (Mehta and Chugan, 2015). Akuntansi hijau, yang juga dikenal sebagai akuntansi lingkungan, muncul sebagai alat penting bagi perusahaan perkebunan untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan dampak lingkungan mereka, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pada akhirnya, praktik-praktik yang lebih berkelanjutan (Prasetyo and Djamburi, 2015). Memahami nuansa akuntansi lingkungan dan penerapannya secara spesifik di dalam perusahaan perkebunan merupakan tujuan utama, yang menjadi dasar untuk mengeksplorasi konsep, prinsip, dan strategi implementasi yang mendefinisikan bidang yang terus berkembang ini.

Akuntansi hijau adalah pendekatan akuntansi yang memasukkan biaya dan manfaat lingkungan ke dalam praktik akuntansi keuangan (Darlis *et al.*, 2024). Pendekatan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengenali, mengkuantifikasi, mengukur, dan pada akhirnya mengintegrasikan kontribusi lingkungan ke dalam proses bisnis (Anggita and Nugroho, 2022)l., 2022). Hal ini memerlukan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dampak lingkungan, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan (Giang *et al.*, 2020). Bentuk akuntansi ini bergerak melampaui metrik keuangan konvensional untuk memasukkan indikator kinerja lingkungan, menawarkan pandangan holistik tentang penciptaan dan perusakan nilai perusahaan (Chopra, et.al ., 2024). Akuntansi hijau sangat relevan bagi perusahaan perkebunan karena dampak lingkungan yang substansial yang sering dikaitkan dengan operasi mereka, termasuk deforestasi, polusi air, dan emisi gas rumah kaca. Penerapannya memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, mengurangi risiko lingkungan, dan meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka secara keseluruhan.

Prinsip utama dari akuntansi hijau terletak pada pengakuan bahwa sumber daya lingkungan bukanlah barang gratis, melainkan aset berharga yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Akuntansi hijau beroperasi berdasarkan prinsip transparansi, memastikan bahwa semua biaya dan manfaat lingkungan diungkapkan dan dipertanggungjawabkan dengan jelas. Akuntansi hijau juga menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan mereka dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi konsekuensi negatif(Darlis *et al.*, 2024). Akuntansi hijau menekankan prinsip keberlanjutan, yang mendorong praktik-praktik yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Darlis *et al.*, 2024). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini memungkinkan perusahaan perkebunan untuk membuat keputusan yang tepat yang menyeimbangkan pertimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang (Dellaconi, et.al., 2024).

Keuntungan mengadopsi praktik akuntansi hijau bagi perusahaan perkebunan sangat beragam, mulai dari peningkatan pengelolaan sumber daya hingga tanggung jawab sosial perusahaan. Pengelolaan sumber daya alam yang efisien difasilitasi melalui akuntansi hijau dengan memberikan wawasan yang terperinci mengenai pola konsumsi sumber daya, produksi limbah, dan tingkat polusi. Informasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area-area di mana penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan, limbah dapat dikurangi, dan polusi dapat diminimalkan, yang mengarah pada penghematan biaya yang signifikan dan manfaat lingkungan (Anggita and Nugroho, 2022) Perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial melalui akuntansi hijau, sehingga dapat meningkatkan reputasi mereka di antara para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan regulator. Selain itu, informasi lingkungan yang terperinci yang

disediakan oleh akuntansi hijau dapat digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan, mendorong dialog dan kolaborasi untuk mengatasi masalah lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan. Penerapan akuntansi hijau memungkinkan perusahaan perkebunan untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka, memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan (Parmar *et al.*, 2010).

### **Mengintegrasikan Pengelolaan Lingkungan melalui Inovasi Akuntansi**

Perusahaan perkebunan dapat memanfaatkan akuntansi hijau di berbagai aspek operasi mereka, memfasilitasi pengelolaan sumber daya penting seperti lahan, air, dan energi secara berkelanjutan. Praktik-praktik pengelolaan lahan mendapat manfaat dari akuntansi hijau dengan memungkinkan pelacakan dan penilaian degradasi lahan, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati (Greenham, 2010). Hal ini memungkinkan penilaian dampak lingkungan dari berbagai praktik penggunaan lahan, memandu keputusan untuk reboisasi, konservasi tanah, dan restorasi habitat. Sumber daya air dapat dikelola secara lebih efektif melalui akuntansi hijau dengan melacak konsumsi air, pembuangan air limbah, dan tingkat polusi air. Biaya dan manfaat lingkungan yang terkait dengan praktik pengelolaan air yang berbeda dievaluasi, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam konservasi air, pengolahan air limbah, dan pencegahan polusi. Selain itu, konsumsi energi dapat dioptimalkan melalui akuntansi hijau dengan melacak penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, dan dampak lingkungan dari berbagai sumber energi, memberikan wawasan tentang peningkatan efisiensi energi, adopsi energi terbarukan, dan pengurangan jejak karbon.

Penerapan akuntansi hijau memungkinkan pemantauan dan pencatatan sistematis atas pengeluaran dan pendapatan yang terkait dengan inisiatif yang bertujuan untuk memitigasi dampak lingkungan, yang memungkinkan perusahaan

perkebunan untuk menilai kinerja lingkungan mereka secara komprehensif dan secara proaktif mengatasi potensi masalah (Lestari *et al.*, 2020). Dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pelaporan keuangan, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan mereka di samping hasil keuangan. Selain itu, pencantuman informasi lingkungan dalam laporan keuangan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan, sehingga memungkinkan investor untuk mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan faktor keuangan dan lingkungan.

Penggunaan indikator kinerja utama lingkungan menjadi sangat penting dalam mengevaluasi kinerja lingkungan di sektor perkebunan (Chen, 2014). Metrik-metrik ini, yang secara khusus dirancang untuk nuansa kegiatan perkebunan, menawarkan cara untuk menilai dampak ekologis dan upaya keberlanjutan secara kuantitatif (Anggita and Nugroho, 2022). Hal ini mencakup indikator yang menyediakan data terukur terkait penggunaan sumber daya, tingkat emisi, dan efektivitas upaya konservasi, sehingga menciptakan pandangan yang jelas dan ringkas mengenai pengelolaan lingkungan (Ridlwan, Purwandari and Rahmat Syah, 2021). Indikator kinerja utama menawarkan kerangka kerja terstruktur untuk melacak, menganalisis, dan melaporkan kinerja lingkungan, memfasilitasi perbaikan dan akuntabilitas yang berkelanjutan (Nicolette, et.al., 2013).

Untuk memastikan standarisasi dan komparabilitas dalam praktik akuntansi hijau, sejumlah kerangka kerja peraturan dan standar pelaporan telah ditetapkan baik di tingkat nasional maupun internasional, yang memberikan pedoman bagi perusahaan di sektor perkebunan. Peraturan-peraturan ini sering kali mewajibkan pengungkapan informasi lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca, penggunaan air, dan timbulan limbah, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan juga diminta untuk mengadopsi praktik-praktik

berkelanjutan, seperti mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan meminimalkan polusi, yang mengarah pada hasil lingkungan yang positif.

Beberapa standar yang diakui secara global, seperti Global Reporting Initiative dan ISO 14001, menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan lingkungan dan sistem manajemen. GRI menawarkan seperangkat pedoman yang komprehensif untuk melaporkan berbagai topik keberlanjutan, termasuk kinerja lingkungan, tanggung jawab sosial, dan dampak ekonomi. ISO 14001 menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan, yang memungkinkan organisasi untuk mengendalikan dampak lingkungan mereka, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka. (Darlis *et al.*, 2024).

Penerapan akuntansi hijau melibatkan serangkaian langkah strategis, dimulai dengan perumusan kebijakan akuntansi yang jelas yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pelaporan keuangan. Kebijakan-kebijakan ini menguraikan prinsip-prinsip dan prosedur untuk mengakui, mengukur, dan melaporkan biaya dan manfaat lingkungan, memberikan kerangka kerja untuk praktik akuntansi yang konsisten dan transparan. Untuk memastikan implementasi yang efektif, sangat penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi hijau ke dalam sistem keuangan dan proses pelaporan yang ada, merampingkan pengumpulan dan analisis data.

Beberapa motivasi mendorong organisasi untuk mengadopsi kerangka kerja pelaporan keberlanjutan, karena mereka berusaha untuk mengkomunikasikan kinerja manajemen mereka dalam mencapai manfaat perusahaan jangka panjang, yang mencakup peningkatan hasil keuangan, peningkatan keunggulan kompetitif, maksimalisasi laba, dan kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan (Azzone *et.al.*, 2010). Namun, beberapa organisasi mungkin terlibat dalam "greenwashing," di mana mereka secara selektif mengungkapkan tindakan lingkungan yang positif sambil

menyembunyikan tindakan negatif untuk menciptakan kesan positif yang menyesatkan tentang kinerja lingkungan mereka (Arouri *et al.*, 2023). Para pemangku kepentingan semakin menuntut tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi dari organisasi, terutama dalam konteks ekonomi global yang didorong oleh teknologi informasi. Standar terpadu mungkin tidak diinginkan, dan memahami bagaimana standar dapat digunakan bersama merupakan solusi praktis (Adams and Abhayawansa, 2022).

Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai dalam praktik pelaporan, beberapa penelitian telah mempertanyakan kemampuan pedoman GRI untuk benar-benar meningkatkan pembangunan berkelanjutan, dengan menunjukkan potensi keterbatasan dari batasan diskriminatif dan definisi keberlanjutan yang terbatas (Journeault, et.al., 2020). Standar yang diadopsi harus sesuai dengan persyaratan audit dan pelaporan lingkungan untuk memastikan bahwa data dampak lingkungan akurat, dapat diandalkan, dan dapat diverifikasi, sehingga memperkuat kredibilitas praktik akuntansi hijau.

## B. Konsep dan Prinsip Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau adalah pendekatan akuntansi yang melibatkan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan biaya serta manfaat yang terkait dengan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan. Menurut Schaltegger and Burritt (2012), akuntansi hijau berfungsi untuk mendokumentasikan dan mengelola dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Prinsip-Prinsip Akuntansi Hijau: Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Akuntansi hijau berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Transparansi: Semua informasi terkait dengan dampak lingkungan harus dicatat dan dilaporkan dengan jelas.
2. Akuntabilitas: Perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional mereka.

3. Keberlanjutan: Pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

### C. Peran Akuntansi Hijau dalam Perusahaan Perkebunan

Akuntansi hijau berperan dalam mengelola dampak lingkungan perusahaan perkebunan melalui beberapa aspek:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Akuntansi hijau membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, termasuk air, tanah, dan energi (Jan Bebbington and Larrinaga, 2014).
2. Pengendalian Dampak Lingkungan: Akuntansi hijau berperan dalam mengukur dan mengelola dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional, seperti emisi gas rumah kaca dan deforestasi.
3. Pelaporan Lingkungan: Perusahaan perkebunan yang menerapkan akuntansi hijau diwajibkan untuk menyediakan informasi yang transparan terkait dengan kinerja lingkungan mereka dalam laporan keberlanjutan atau laporan tahunan. Pengukuran Kinerja Lingkungan: Penggunaan indikator kinerja lingkungan (KPI) yang relevan dengan sektor perkebunan.

### D. Standar dan Regulasi terkait Akuntansi Hijau pada Perusahaan Perkebunan

Untuk memastikan penerapan yang konsisten, perusahaan perkebunan harus mematuhi berbagai standar dan regulasi yang mengatur pengelolaan dampak lingkungan:

1. Regulasi Nasional dan Internasional: Negara-negara dengan industri perkebunan besar sering kali memiliki peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan yang ketat. Di tingkat internasional, ada standar seperti Global Reporting Initiative (GRI) yang mengatur pelaporan keberlanjutan (Sullivan and Mackenzie, 2015).

2. Standar Akuntansi Hijau Global: Organisasi internasional seperti ISO 14001 memberikan pedoman bagi perusahaan dalam menerapkan manajemen lingkungan secara sistematis dan terukur.

#### **E. Implementasi Akuntansi Hijau pada Perusahaan Perkebunan**

Implementasi akuntansi hijau dalam perusahaan perkebunan mencakup langkah-langkah berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Lingkungan: Perusahaan perlu merumuskan kebijakan lingkungan yang mendukung praktik akuntansi hijau.
2. Pengintegrasian dalam Laporan Keuangan: Memasukkan elemen-elemen biaya dan manfaat lingkungan dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan.
3. Pelatihan Staf: Melakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam menerapkan akuntansi hijau. Tantangan dalam Implementasi: Hambatan yang dihadapi perusahaan perkebunan dalam penerapan akuntansi hijau, seperti biaya tambahan dan kurangnya pemahaman.

#### **F. Keuntungan Penerapan Akuntansi Hijau pada Perusahaan Perkebunan**

Beberapa manfaat utama dari penerapan akuntansi hijau adalah:

1. Peningkatan Efisiensi Operasional: Akuntansi hijau membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area di mana penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan, mengurangi biaya operasional dan limbah (Kolk and Pinkse, 2010).
2. Peningkatan Reputasi Perusahaan: Perusahaan yang mengadopsi akuntansi hijau cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik, yang meningkatkan daya tarik terhadap investor dan konsumen.
3. Kepatuhan terhadap Regulasi: Dengan mematuhi regulasi terkait lingkungan, perusahaan menghindari potensi sanksi dan meningkatkan kredibilitasnya di pasar global.

## **G. Tantangan yang Dihadapi: Keterbatasan Sumber Daya, Kesulitan dalam Pengukuran Dampak Lingkungan, dan Biaya Implementasi**

Penerapan akuntansi hijau di perusahaan perkebunan menghadapi tantangan seperti:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Penerapan akuntansi hijau membutuhkan investasi awal yang cukup besar dalam pengukuran dan teknologi.
2. Kurangnya Pemahaman: Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang dari penerapan akuntansi hijau.

Solusi yang diusulkan meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada manajer dan staf tentang konsep dan praktik akuntansi hijau.
2. Penggunaan Teknologi: Mengadopsi teknologi yang mendukung pengukuran dan pengelolaan dampak lingkungan secara lebih efisien.

## **H. Kasus: Penerapan Akuntansi Hijau pada PT Perkebunan Lestari**

### **1. Latar Belakang Perusahaan**

PT Green Palm Plantation (GPP) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, Indonesia. Sebagai salah satu pemain besar di industri kelapa sawit, GPP memiliki ratusan ribu hektar lahan yang digunakan untuk menanam kelapa sawit. Meskipun perusahaan ini berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, mereka juga menghadapi kritik terkait dampak lingkungan dari operasional mereka, termasuk deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan penggunaan pestisida kimia yang berlebihan.

Pada 2019, GPP menghadapi peningkatan tekanan dari pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan organisasi lingkungan, yang mendesak perusahaan untuk mengurangi dampak ekologis mereka. Untuk itu, perusahaan memutuskan untuk mengadopsi **akuntansi hijau** dalam

upaya mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

## 2. Langkah-Langkah Penerapan Akuntansi Hijau

### a. Penyusunan Kebijakan Lingkungan

- 1) GPP mulai dengan menyusun kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan mengurangi dampak deforestasi.
- 2) Kebijakan ini mencakup penerapan praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik dan teknik pengelolaan air yang lebih efisien.

### b. Identifikasi dan Pengukuran Biaya dan Manfaat Lingkungan

- 1) **Biaya Lingkungan:** GPP mulai mengidentifikasi berbagai biaya yang terkait dengan aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti biaya restorasi lahan yang terdegradasi, biaya pengelolaan limbah, dan biaya pengurangan emisi karbon.
  - a) Misalnya, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, GPP mengeluarkan biaya untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan di pabrik kelapa sawit mereka.
  - b) Penggunaan pestisida kimia yang lebih sedikit berimbang pada biaya tambahan untuk pengendalian hama secara alami dan rotasi tanaman.
- 2) **Manfaat Lingkungan:** Selain biaya, GPP juga mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dari penerapan praktik ramah lingkungan, seperti pengurangan biaya energi, peningkatan produktivitas tanaman, dan pengurangan denda atau biaya hukum terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan.

**c. Pengintegrasian Akuntansi Hijau dalam Sistem Laporan Keuangan**

- 1) GPP mulai mengintegrasikan data lingkungan ke dalam laporan keuangan mereka. Setiap biaya yang terkait dengan mitigasi dampak lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan atau biaya restorasi lahan, dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan mereka.
- 2) Perusahaan juga membuat laporan keberlanjutan yang terpisah, yang mencakup informasi tentang kinerja lingkungan, emisi karbon yang dihasilkan, dan pengelolaan limbah.

**d. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan**

- 1) GPP melakukan pelatihan untuk manajer dan staf keuangan agar mereka memahami pentingnya akuntansi hijau dan cara memasukkan biaya serta manfaat lingkungan dalam laporan keuangan.
- 2) Perusahaan juga melibatkan seluruh karyawan dalam praktik keberlanjutan dengan memberi mereka pemahaman tentang pentingnya akuntansi hijau dan pelatihan terkait pengelolaan dampak lingkungan.

**3. Tantangan yang Dihadapi**

**a. Keterbatasan Infrastruktur untuk Pengukuran Dampak Lingkungan**

- 1) Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh GPP adalah kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mengukur dengan tepat dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Misalnya, pengukuran emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi per unit produk tidaklah mudah tanpa teknologi yang tepat.
- 2) GPP berinvestasi dalam perangkat lunak akuntansi hijau dan teknologi untuk pengukuran dampak lingkungan yang lebih akurat, tetapi investasi awal ini memerlukan biaya yang signifikan.

### **b. Perubahan Budaya Organisasi**

Perusahaan harus mengubah budaya organisasi untuk menerima akuntansi hijau sebagai bagian integral dari operasional sehari-hari. Hal ini melibatkan perubahan dalam cara perusahaan mendekati keputusan-keputusan bisnis yang sebelumnya berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang.

### **c. Kompleksitas dalam Pengukuran Biaya Lingkungan**

Menghitung biaya dan manfaat lingkungan secara akurat bisa sangat kompleks. Beberapa biaya sulit untuk dihitung secara langsung, seperti manfaat jangka panjang dari peningkatan kualitas tanah atau pengurangan dampak polusi yang lebih sulit diprediksi.

## **4. Keuntungan yang Diperoleh**

### **a. Peningkatan Efisiensi Energi dan Pengurangan Biaya**

Setelah beralih ke penggunaan energi terbarukan di pabrik pengolahan kelapa sawit, GPP berhasil mengurangi penggunaan energi fosil sebanyak 30%. Ini menghasilkan penghematan biaya energi yang signifikan dalam jangka panjang.

### **b. Peningkatan Reputasi dan Citra Perusahaan**

- 1) Dengan mulai menerapkan akuntansi hijau, GPP berhasil meningkatkan citra mereka di mata konsumen dan investor. Hal ini berkontribusi pada peningkatan loyalitas pelanggan dan daya tarik investasi, khususnya dari konsumen yang peduli dengan keberlanjutan.
- 2) Perusahaan juga mengurangi risiko reputasi yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan dan meningkatkan hubungan dengan regulator pemerintah.

**c. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Pengurangan Risiko Hukum**

Penerapan akuntansi hijau memastikan GPP mematuhi semua regulasi lingkungan yang semakin ketat. Ini membantu mereka menghindari potensi denda atau tindakan hukum dari pemerintah atau lembaga lingkungan terkait.

**d. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lebih Berkelanjutan**

- 1) Akuntansi hijau memungkinkan GPP untuk lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam mereka, termasuk air dan tanah. Dengan mengoptimalkan penggunaan air dan menerapkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan, perusahaan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan hasil pertanian mereka.
- 2) Dapat menghindari potensi denda dan meningkatkan kredibilitas mereka di pasar global.

**e. Keberlanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam:**

Salah satu aspek penting dari akuntansi hijau adalah pengelolaan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan. Perusahaan perkebunan yang menerapkan prinsip akuntansi hijau tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah jangka panjang melalui praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi hijau merupakan langkah penting bagi perusahaan perkebunan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun tantangan dalam implementasi ada, manfaat jangka panjang, baik dari segi operasional maupun reputasi perusahaan, menjadikan akuntansi hijau sebagai pendekatan yang relevan dan strategis dalam menghadapi tuntutan keberlanjutan yang semakin mendesak di industri perkebunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C.A. and Abhayawansa, S. (2022) 'Critical Perspectives on Accounting Connecting the COVID-19 pandemic , environmental , social and governance ( ESG ) investing and calls for " harmonisation " of sustainability reporting', *Critical Perspectives on Accounting*, 82, p. 102309. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102309>.
- Anggita, W. and Nugroho, A.A. (2022) 'Carbon Emission Disclosure And Green Accounting Practices On The Firm Value', *Jurnal Akuntansi*, XXVI(03), pp. 464–481. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/ja.v26i3.1052>.
- Arena, M., Arnaboldi, M. and Azzone, G. (2010) 'The organizational dynamics of Enterprise Risk Management', *Accounting, Organizations and Society*, 35(7), pp. 659–675. Available at: <https://doi.org/10.1016/j-aos.2010.07.003>.
- Arouri, M. et al. (2023) 'Greenwashing and product market competition To cite this version : HAL Id : halshs-03541663', *HAL*, 42, pp. 1–15.
- Bebbington, J. and Larrinaga, C. (2014) 'Accounting for sustainability: The changing accounting paradigm. Accounting, Organizations and Society', *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), pp. 445–455. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j-aos.2014.01.003>.
- Bebbington, Jan and Larrinaga, C. (2014) 'Accounting, Organizations and Society Accounting and sustainable development: An exploration', *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), pp. 395–413. Available at: <https://doi.org/10.1016/j-aos.2014.01.003>.
- Chen, R.J.C. (2014) 'An Integrated Sustainable Business and Development System: Thoughts and Opinions', *sustainability*, 6, pp. 6862–6871. Available at: <https://doi.org/10.3390/su6106862>.

- Chopra, S.S., Senadheera, S.S. and Dissanayake, P.D. (2024) 'Navigating the Challenges of Environmental , Social , and Governance ( ESG ) Reporting: The Path to Broader Sustainable Development', *sustainability*, 16(606), pp. 1-14. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su16020606>.
- Darlis, E. et al. (2024) 'Green Accounting , Corporate Governance and Firm Value in Southeast Asia Region', *Journal of Accounting Research, Organization, and Economics*, 7(1), pp. 15-32.
- Dellaconi, A., Espa, V. and Kurniawan, R. (2024) 'Menuju Keberlanjutan: Peran Green Accounting, Kinerja Lingkungan, dan Human capital pada Nilai Perusahaan Environmental Performance, and Human capital in Firm Value', *Journal of Accounting Research*, 5321(02).
- Giang, N.P. et al. (2020) 'Environmental accounting for sustainable development: An empirical study in Vietnam.', *Management Science Letters*, 1613.
- Greenham, T. (2010) 'Green accounting: a conceptual framework', *International Journal of Green Economics*, 4(4), p. 333. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1504/ijge.2010.037655>.
- Journeault, M., Levant, Y. and Picard, C.-F. (2020) 'Sustainability performance reporting: A technocratic shadowing and silencing. Critical Perspectives on Accounting', *Critical Perspectives on Accounting*, 74. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.102145>.
- Kolk, A. and Pinkse, J. (2010) 'A perspective on multinational enterprises and environmental management.', *Business & Society Review*, 113(3), pp. 383-412.

- Lestari, R. et al. (2020) 'Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan', *Kajian Akuntansi*, 20(2), p. 124. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/ka.v20i2.5990>.
- Mehta, K. and Chugan, P.K. (2015) 'Green HRM in Pursuit of Environmentally Sustainable Business', *Universal Journal of Industrial and Business Management*, 3(3), p. 74. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.13189/ujibm.2015.030302>.
- Nicolette, J. P., Burr, S.D. and Rockel, M. (2013) 'A Practical Approach for Demonstrating Environmental Sustainability and Stewardship through a Net Ecosystem Service Analysis.', *Sustainability*, 5(5), p. 2152. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su5052152>.
- Parmar, B.L. et al. (2010) 'Stakeholder Theory: The State of the Art', *The Academy of Management Annals*, Vol. 4(No. 1), pp. 403–445. Available at: <https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581>.
- Prasetyo, W. and Djamburi, A. (2015) 'Harmony Sale Pricing Based on Kejawen Tradition Teaching of Panca Eka Lumaksana', (132).
- Ridlwan, M., Purwandari, D.A. and Rahmat Syah, T.Y. (2021) 'The Effect of Situational Leadership and Organizational Culture on Employee Performance Through Job Satisfaction', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(3), p. 73. Available at: <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2378>.
- Schaltegger, S. and Burritt, R. (2012) *Environmental Management Accounting: Informational and Institutional Developments*. Springer.
- Sullivan, R. and Mackenzie, C. (2015) *Corporate Social Responsibility and Sustainability: Emerging Trends in Developing Economies*. Springer.

## TENTANG PENULIS



**Dr. Monika Handayani, S.E., A.k., C.A., M.M.**

Penulis lahir di Banjarbaru, Kal-Sel, tanggal 29 Agustus 1978. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di FEB ULM, S2 Magister Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara di ULM dan S3 di PDIA UNIBRAW dan menempuh PPAK tahun 2007 di ULM. Penulis menekuni profesi dosen sejak tahun 2003, selain itu penulis juga merupakan rekanan KJA. Motivasi penulis adalah sebagaimana pepatah “Jika harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, maka manusia mati meninggalkan karya (buku)”. Karya yang sudah diterbitkan adalah beberapa buku dengan judul sebagai berikut: Metodologi Penelitian Akuntansi untuk pendidikan vokasi, Akuntansi Biaya, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Manajemen Bagi Pendidikan Vokasi, Akuntansi Kewirausahaan, Akuntansi Keuangan Kontemporer, Manajemen Biaya

# BAB

# 15

## AKUNTANSI HIJAU PERTAMBANGAN

Dr. Mahsina, S.E., M.Si.  
Universitas Bhayangkara Surabaya

### A. Pentingnya Akuntansi Hijau di Sektor Pertambangan

Akuntansi hijau, yang juga dikenal sebagai akuntansi lingkungan atau akuntansi berkelanjutan adalah sebuah konsep kerangka kerja yang mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam akuntansi keuangan tradisional. Bagi industri pertambangan, pendekatan ini sangat penting karena dampak lingkungan yang besar dari sektor tersebut. Dalam konteks pada sector pertambangan, akuntansi lingkungan bertujuan untuk memastikan praktik pertambangan yang berkelanjutan dengan menilai biaya lingkungan dari operasi, seperti polusi, penipisan sumber daya, dan perusakan habitat. Akuntansi lingkungan membantu perusahaan mematuhi peraturan, meningkatkan kinerja lingkungan, dan meningkatkan transparansi ([greenwuse.co.id](http://greenwuse.co.id)). Penggunaan berbagai teknologi yang ramah lingkungan (teknologi hijau) telah dikenal luas dapat memberikan dampak bagi peningkatan kinerja perusahaan (M. Mahsina & Agustia, 2023).

Akuntansi hijau sangat penting bagi industri pertambangan karena pertimbangan dari dampak lingkungan, sosial, dan ekonominya yang sangat beresiko ([worldbank.org](http://worldbank.org), 2010). Berikut beberapa pertimbangan dan alasan akan pentingnya akuntansi hijau di sektor pertambangan:

## **1. Tanggung Jawab Lingkungan**

Aktivitas pertambangan sering kali menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan, seperti penggundulan hutan, polusi air, dan erosi tanah. Akuntansi hijau membantu melacak dampak ini dan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam langkah-langkah mitigasi, seperti rehabilitasi lahan dan pengendalian polusi.

## **2. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan**

Pemerintah semakin memberlakukan peraturan lingkungan yang ketat pada operasi pertambangan. Akuntansi hijau memastikan perusahaan mematuhi undang-undang ini dengan mengukur biaya yang terkait dengan kepatuhan dan menghindari denda.

## **3. Praktik Berkelanjutan**

Dengan menyoroti penipisan sumber daya alam dan biaya terkait, akuntansi hijau mempromosikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, menyeimbangkan ekstraksi dengan konservasi.

## **4. Efisiensi Ekonomi**

Dari perspektif ekonomi, penerapan akuntansi hijau di sector pertambangan akan memberikan wawasan tentang bagaimana biaya lingkungan memengaruhi profitabilitas, memungkinkan perusahaan pertambangan untuk mengoptimalkan operasi mereka dan mengurangi pemborosan.

## **5. Kepercayaan Pemangku Kepentingan**

Transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan menumbuhkan kepercayaan di antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini meningkatkan reputasi perusahaan dengan menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan (M. Mahsina, Agustia, Nasution, & Dianawati, 2024; S. E. Mahsina, n.d.).

## **6. Kelangsungan Hidup Jangka Panjang**

Akuntansi hijau menyelaraskan kinerja keuangan perusahaan dengan keberlanjutan lingkungan, memastikan industri pertambangan dapat beroperasi secara bertanggung

jawab tanpa mengorbankan sumber daya generasi mendatang.

**B. Beberapa Kerangka Kerja (*Framework*) dalam Akuntansi Hijau untuk Sektor Pertambangan**

Akuntansi lingkungan menggunakan berbagai kerangka kerja untuk mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak ekologis. Berikut ini beberapa kerangka kerja yang dikenal luas:

**1. Akuntansi Biaya Penuh (*Full Cost Accounting/FCA*)**

Kerangka kerja ini mempertimbangkan biaya langsung dan tidak langsung, termasuk biaya lingkungan dan sosial, untuk memberikan pandangan komprehensif tentang dampak finansial dari operasi bisnis. Perusahaan seperti Caterpillar menggunakan Akuntansi Biaya Penuh (FCA) untuk memasukkan biaya lingkungan dan sosial ke dalam proses pengambilan keputusan keuangannya.

**2. Sistem Manajemen Lingkungan (*Environmental Management Systems/ EMS*)**

EMS adalah pendekatan sistematis untuk mengelola dampak lingkungan. Ini melibatkan penetapan tujuan, penerapan program, dan pelaksanaan audit untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Perusahaan seperti IBM telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (EMS) untuk mengelola dampak lingkungannya secara sistematis dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

**3. Penilaian Siklus Hidup Life Cycle Assessment (LCA)**

LCA mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk atau layanan di seluruh siklus hidupnya, dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan.

**4. Pelaporan dan Pengungkapan Lingkungan (*Environmental Reporting and Disclosure*)**

Kerangka kerja ini berfokus pada komunikasi transparan kinerja lingkungan organisasi kepada para pemangku kepentingan melalui laporan keberlanjutan dan penilaian dampak.

**5. Indikator Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Indicators/ EPI*)**

EPI adalah metrik yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek seperti emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, dan pembangkitan limbah. Ontario Hydro adalah perusahaan yang menggunakan Indikator Kinerja Lingkungan (EPI) untuk mengukur dan melaporkan aspek-aspek seperti konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca.

**6. Audit Lingkungan (*Environmental Auditing*)**

Audit melibatkan peninjauan kinerja lingkungan suatu organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Boeing menggunakan Audit Lingkungan untuk meninjau kinerja lingkungannya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

**C. Penerapan Akuntansi Hijau di Sektor Pertambangan**

Beberapa hal pokok yang penting terkait dengan penerapan akuntansi hijau atau akuntansi lingkungan di sektor pertambangan adalah sebagai berikut

**1. Pelacakan Biaya Lingkungan**

Perusahaan pertambangan menggunakan akuntansi hijau untuk mengidentifikasi dan mengukur biaya yang terkait dengan degradasi lingkungan, seperti rehabilitasi lahan, pengendalian polusi, dan pengelolaan limbah.

**2. Pelaporan Keberlanjutan**

Membantu perusahaan pertambangan mengungkapkan kinerja lingkungan dan upaya keberlanjutan mereka kepada para pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

**3. Kepatuhan terhadap Peraturan**

Akuntansi hijau memastikan bahwa perusahaan pertambangan mematuhi peraturan lingkungan dengan melacak biaya kepatuhan dan denda.

#### **4. Manajemen Sumber Daya**

Dengan memperhitungkan penipisan sumber daya alam, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang pemanfaatan dan konservasi sumber daya.

#### **5. Membangun Citra Perusahaan**

Mengadopsi praktik akuntansi hijau dapat meningkatkan reputasi perusahaan dengan menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan.

### **D. Pelacakan Biaya Lingkungan**

Pelacakan biaya lingkungan dalam akuntansi lingkungan melibatkan proses yaitu identifikasi, pengukuran, dan pelaporan dampak finansial dari aktivitas lingkungan suatu organisasi. Dalam melakukan tracking atau penelusuran terkait biaya lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan pendekatan berikut:

#### **1. Identifikasi Biaya Lingkungan**

Akuntansi Biaya Penuh (*Full cost accounting/ FCA*) adalah metode akuntansi yang mempertimbangkan biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*) yang terkait dengan aktivitas bisnis. Biaya langsung meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya *overhead*, sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya lingkungan dan sosial. Dengan memasukkan biaya-biaya ini, FCA memberikan pandangan komprehensif tentang dampak keuangan sebenarnya dari operasi bisnis, membantu organisasi membuat keputusan yang tepat yang memperhitungkan jejak lingkungan mereka. Dalam hal ini lomponenn dari biaya langsung (*direct cost*) adalah biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah, pengendalian polusi, dan pemulihan lingkungan. Komponen biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah biaya yang timbul dari risiko lingkungan, kepatuhan terhadap peraturan, dan potensi kewajiban.

## **2. Mengelompokkan Biaya Lingkungan**

Dalam kategori proses identifikasi adalah melakukan pengelompokan biaya terkait dengan komponen biaya internal (*internal cost*) dan biaya eksternal (*external cost*). Adapun maksud dari biaya internal adalah biaya yang ditanggung langsung oleh organisasi, seperti konsumsi energi dan pembuangan limbah. Sedangkan, biaya eksternal adalah biaya yang berdampak pada masyarakat, seperti polusi udara dan air.

## **3. Mengukur Biaya Lingkungan**

Dalam melakukan pengukuran biaya lingkungan, perusahaan dapat menggunakan alat (*tools*) yaitu *Life Cycle Assesment (LCA) method* untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari produk dan proses. Metode *Life Cycle Assesment (LCA)* adalah metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk atau layanan di seluruh siklus hidupnya. Ini mencakup tahapan dari ekstraksi bahan baku hingga produksi, distribusi, penggunaan, dan pembuangan. LCA membantu mengidentifikasi peluang untuk mengurangi dampak lingkungan di berbagai tahap, mempromosikan praktik dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Dalam mengukur biaya lingkungan, selain LCA dapat dilakukan dengan menerapkan indikator kinerja lingkungan (*Environmental Performance Indicators (EPIs)*) (Azzone, Noci, Manzini, Welford, & Young, 1996; Jamous & Müller, 2013). Indikator Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Indicators (EPIs)*) adalah metrik yang digunakan untuk menilai dan melacak dampak lingkungan dari aktivitas organisasi. Indikator ini membantu mengukur kemajuan menuju tujuan keberlanjutan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Berikut ini beberapa komponen dari indikator pengukuran kinerja lingkungan (EPI):

- a. Emisi Gas Rumah Kaca (*Greenhouse Gas Emissions*), mengukur total emisi gas seperti CO<sub>2</sub> dan metana, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
- b. Konsumsi Energi (*Energy Consumption*), melacak jumlah energi yang digunakan, sering dikategorikan berdasarkan sumber terbarukan dan tak terbarukan.
- c. Pemanfaatan Air (*Water Usage*), memantau volume air yang dikonsumsi dan efisiensi penggunaannya.
- d. Pembentukan Limbah (*Waste Generation*), mengevaluasi jumlah dan jenis limbah yang dihasilkan, termasuk limbah berbahaya dan tidak berbahaya.
- e. Dampak Keanekaragaman (*Hayati Biodiversity Impact*): menilai dampak aktivitas terhadap ekosistem lokal dan keanekaragaman spesies.
- f. Kualitas Udara dan Air (*Air and Water Quality*, mengukur polutan yang dilepaskan ke udara dan air, memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Indikator-indikator diatas memberikan pemahaman tentang kinerja lingkungan organisasi dan mendukung pengambilan keputusan untuk praktik berkelanjutan (*sustainability*).

#### **4. Integrasikan Biaya ke dalam Laporan Keuangan**

Dalam konteks ini, yaitu mengintegrasikan biaya ke dalam Laporan Keuangan adalah selalu mencatatkan biaya lingkungan dalam sistem akuntansi agar dapat merefleksikan dampak dan pengelolaan lingkungan terhadap profitabilitas. Biaya lingkungan yang dimaksud adalah biaya lingkungan langsung (*direct cost*) dan biaya lingkungan tak langsung (*indirect cost*). Contoh biaya langsung (*direct cost*) antara lain pengendalian polusi (*pollution control*), pengelolaan limbah (*waste management*), dan pemulihan sumber daya alam (*natural resource restoration*). Sedangkan dalam konteks biaya tak langsung (*indirect cost*), beberapa contoh konkritnya adalah biaya-biaya yang muncul karena bertambahnya resiko lingkungan (*environmental risks*), konteks kepatuhan terhadap peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku (*regulatory compliance*), serta munculnya potensi kewajiban (*potential liabilities*).

Membebankan semua biaya yang muncul dalam nilai keuangan sebagai biaya lingkungan adalah salah satu hal yang dapat dilakukan agar semua dampak dan resiko aktivitas lingkungan dapat terrefleksi di Laporan Keuangan, Selain itu, menggunakan alat framework seperti (Life Cycle Assesment/ LCA) atau penilaian siklus hidup dalam melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang muncul akibat proses produksi produk.

## 5. Pemantauan dan Pelaporan

Melakukan pengawasan dengan *tracking* biaya lingkungan secara berkala dan mengkomunikasikan dengan melaporkan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*, melalui laporan dan pengungkapan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan (Stasiskiene, 2022).

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzone, G., Noci, G., Manzini, R., Welford, R., & Young, C. W. (1996). Defining environmental performance indicators: an integrated framework. *Business Strategy and the Environment*, 5(2), 69–80.
- Greenwise.co.id (2025), Balancing Act: Indonesia's Mining Industry and the Path to Sustainable Renewable Energy - Greenwise Official Website
- Jamous, N., & Müller, K. (2013). Environmental performance indicators. In *Organizations' environmental performance indicators: Measuring, monitoring, and management* (pp. 3–18). Springer.
- Mahsina, M., & Agustia, D. (2023). Does green innovation have an important role in the effect of board gender diversity and firm performance? *Intangible Capital*, 19(2), 146–164.
- Mahsina, M., Agustia, D., Nasution, D., & Dianawati, W. (2024). The mediating role of risk management in the relationship between audit committee effectiveness and firm sustainability performance. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*.
- Mahsina, S. E. (n.d.). Keberlanjutan Dan Pengukuran Kinerja. *Akuntansi Keberlanjutan: Teori Dan Isu Riset Terkini*, 62.
- Stasiskiene, Z. (2022). Environmental accounting: Concept, methodology, and application. In *Responsible Consumption and Production* (pp. 205–215). Springer.
- Worldbank.org (2010). Mining and the environment in Indonesia : long-term trends and repercussions of the Asian economic crisis

## TENTANG PENULIS



**Dr. Mahsina, S.E., M.Si.**

Universitas Bhayangkara Surabaya

Penulis adalah dosen di Universitas Bhayangkara Surabaya. Awal pendidikan tinggi penulis dimulai sejak berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi STIE Malangkucecwara Malang. Selanjutnya, penulis menyelesaikan studi magister di prodi ilmu manajemen Universitas Airlangga Surabaya, dan menyelesaikan studi program doktoral di prodi ilmu akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi Manajemen, Akuntansi Internasional dan Sistem Informasi Akuntansi guna menunjang karir sebagai dosen, penulis, dan peneliti. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh penulis dan telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional maupun jurnal internasional yang bereputasi. Selain sebagai peneliti, penulis juga telah menulis beberapa buku yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi dan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia akuntansi yang andal di Indonesia.

# BAB

# 16

## PERAN AKUNTANSI HIJAU: AKUNTANSI KARBON DAN ISU PERUBAHAN IKLIM

Ayu Puspita Sari, S.Ak., M.Ak.

Universitas Tanjungpura

### A. Pentingnya Akuntansi Hijau di Sektor Pertambangan

#### 1. Latar Belakang

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global yang paling mendesak di abad ke-21. Dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat semakin nyata, mulai dari peningkatan suhu global, naiknya permukaan air laut, hingga bencana alam yang semakin sering terjadi (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2023). Dalam konteks ini, dunia bisnis menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengurangi jejak karbon dan menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

Akuntansi hijau hadir sebagai solusi untuk membantu organisasi mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. Akuntansi hijau tidak hanya mencakup pencatatan biaya lingkungan tetapi juga pelaporan emisi karbon dan strategi mitigasi perubahan iklim. Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan, standar dan regulasi terkait akuntansi hijau semakin berkembang, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) (KPMG, 2022).

Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan lingkungan, peran akuntan menjadi semakin krusial. Akuntan tidak hanya berfungsi sebagai

pencatat transaksi keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membantu perusahaan menerapkan strategi keberlanjutan dan mengelola risiko lingkungan secara efektif (Bebington & Uneman, 2018).

## **2. Urgensi Akuntansi Hijau dalam Bisnis Modern**

Akuntansi hijau memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan bisnis di era modern. Beberapa faktor utama yang mendorong urgensi penerapan akuntansi hijau meliputi:

### **a. Tekanan Regulasi dan Standar Global**

Pemerintah dan lembaga internasional semakin ketat dalam menerapkan regulasi terkait pelaporan keberlanjutan dan akuntansi karbon. Misalnya, Uni Eropa telah memperkenalkan *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan dampak lingkungan mereka secara lebih rinci (European Commission, 2023).

### **b. Ekspektasi Investor dan Pemangku Kepentingan**

Investor kini lebih memperhatikan kinerja lingkungan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi salah satu faktor utama dalam analisis risiko dan peluang bisnis (Frias-Aceituno, Rodríguez-Ariza, & García-Sánchez, 2013).

### **c. Dampak Finansial dari Perubahan Iklim**

Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional akibat bencana alam, gangguan rantai pasok, serta potensi pajak karbon. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan strategis mereka (Carbon Disclosure Project [CDP], 2022).

### **d. Tuntutan Konsumen dan Keunggulan Kompetitif**

Konsumen semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan lebih memilih produk serta layanan dari perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan (Goyal & Kumar, 2021). Dengan menerapkan

akuntansi hijau, perusahaan dapat meningkatkan reputasi mereka dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global.

### **3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pembahasan**

Bab ini bertujuan untuk membahas peran akuntan dalam implementasi akuntansi hijau dengan fokus pada akuntansi karbon dan isu perubahan iklim. Secara khusus, pembahasan dalam bab ini mencakup:

#### **a. Konsep dan Prinsip Akuntansi Hijau**

Menjelaskan dasar-dasar akuntansi hijau serta peran akuntan dalam mendorong praktik keberlanjutan.

#### **b. Akuntansi Karbon**

Membahas metode pengukuran, pelaporan, serta regulasi terkait emisi karbon dalam dunia bisnis.

#### **c. Dampak Perubahan Iklim terhadap Profesi Akuntansi**

Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi akuntan dalam era keberlanjutan.

#### **d. Inovasi dalam Akuntansi Hijau**

Mengeksplorasi penggunaan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan dalam pelaporan keberlanjutan.

#### **e. Rekomendasi dan Implikasi bagi Dunia Bisnis**

Menyajikan strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dan akuntan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan bab ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran akuntan dalam era keberlanjutan serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik akuntansi hijau di masa depan.

## **B. Akuntansi Hijau dan Peran Akuntan dalam Keberlanjutan**

### **1. Konsep dan Prinsip Akuntansi Hijau**

Akuntansi hijau merupakan pendekatan dalam akuntansi yang memasukkan faktor lingkungan dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Tujuannya adalah untuk mengukur, mengelola, dan mengungkapkan dampak lingkungan dari aktivitas

perusahaan, serta mendorong keberlanjutan dalam operasional bisnis (Bebbington & Unerman, 2018).

Prinsip utama dalam akuntansi hijau meliputi:

**a. Prinsip Transparansi**

Perusahaan harus mengungkapkan informasi lingkungan secara jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan (GRI, 2023).

**b. Prinsip Akuntabilitas**

Akuntansi hijau memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya (Deegan, 2022).

**c. Prinsip Materialitas**

Informasi lingkungan yang signifikan bagi keputusan bisnis harus dilaporkan dengan tepat (SASB, 2023).

**d. Prinsip Keberlanjutan**

Perusahaan diharapkan mengadopsi strategi bisnis yang mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Akuntansi hijau berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam dunia bisnis. Konsep ini tidak hanya mencakup biaya lingkungan yang muncul akibat aktivitas perusahaan, tetapi juga strategi mitigasi risiko lingkungan yang dapat meningkatkan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingan (KPMG, 2022).

## **2. Peran Akuntan dalam Mendorong Keberlanjutan**

Akuntan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa keberlanjutan menjadi bagian integral dari proses bisnis dan pelaporan perusahaan. Beberapa peran utama akuntan dalam keberlanjutan meliputi:

**a. Menyusun dan Menganalisis Laporan Keberlanjutan**

Akuntan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar internasional, seperti Global Reporting Initiative (GRI) atau Sustainability Accounting Standards Board (SASB) (GRI, 2023).

**b. Menghitung dan Mengelola Jejak Karbon**

Dengan meningkatnya tuntutan regulasi terkait perubahan iklim, akuntan memiliki peran dalam mengukur emisi karbon perusahaan dan mengembangkan strategi pengurangan karbon (CDP, 2022).

**c. Meningkatkan Efisiensi dan Manajemen Risiko Lingkungan**

Akuntan dapat membantu perusahaan dalam menganalisis biaya lingkungan dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional, misalnya melalui penggunaan energi terbarukan atau praktik produksi yang lebih ramah lingkungan.

**d. Membantu Kepatuhan terhadap Regulasi Lingkungan**

Banyak negara telah menerapkan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan dampak lingkungan mereka. Akuntan memiliki peran dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan ini dan menghindari risiko hukum serta reputasi (European Commission, 2023).

**e. Mendukung Keputusan Investasi Berkelanjutan**

Investor semakin mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi. Akuntan dapat menyediakan data yang mendukung investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) serta memastikan bahwa informasi keuangan mencerminkan dampak lingkungan (Goyal & Kumar, 2021).

Dengan peran yang semakin luas, akuntan tidak hanya bertindak sebagai pencatat transaksi keuangan tetapi juga sebagai mitra strategis dalam upaya keberlanjutan perusahaan.

### **3. Regulasi dan Standar Internasional Terkait Akuntansi Hijau**

Seiring dengan meningkatnya fokus pada keberlanjutan, berbagai regulasi dan standar internasional telah dikembangkan untuk memastikan bahwa perusahaan melaporkan dampak lingkungan mereka secara transparan dan akurat. Beberapa regulasi dan standar utama dalam akuntansi hijau meliputi:

#### **a. Global Reporting Initiative (GRI)**

GRI merupakan salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan di dunia. Standar ini memberikan panduan bagi perusahaan dalam mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka (GRI, 2023).

#### **b. Sustainability Accounting Standards Board (SASB)**

SASB mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan yang lebih spesifik untuk berbagai industri, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan isu keberlanjutan yang material bagi sektor mereka (SASB, 2023).

#### **c. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)**

TCFD menyediakan panduan bagi perusahaan dalam mengungkapkan risiko dan peluang terkait perubahan iklim dalam laporan keuangan mereka (TCFD, 2022).

#### **d. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**

Uni Eropa telah memperkenalkan CSRD yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan dengan lebih detail dibandingkan standar sebelumnya (European Commission, 2023).

#### **e. Carbon Disclosure Project (CDP)**

CDP mengelola platform pelaporan yang memungkinkan perusahaan melaporkan emisi karbon mereka dan strategi mitigasi perubahan iklim (CDP, 2022).

Regulasi dan standar ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan, serta memberikan kerangka kerja bagi akuntan dalam mengembangkan strategi akuntansi hijau yang efektif. Dengan semakin ketatnya regulasi terkait keberlanjutan, peran akuntan dalam membantu perusahaan memenuhi standar ini menjadi semakin penting.

## C. Akuntansi Karbon: Konsep, Regulasi, dan Implementasi

### 1. Definisi dan Prinsip Akuntansi Karbon

Akuntansi karbon merupakan suatu pendekatan akuntansi yang bertujuan untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis. Akuntansi karbon berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim dan tuntutan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan jejak karbon mereka (IFRS Foundation, 2023).

Beberapa prinsip utama dalam akuntansi karbon meliputi:

- a. Prinsip Relevansi – Informasi terkait emisi karbon harus sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan digunakan dalam pengambilan Keputusan.
- b. Prinsip Akurasi – Pengukuran dan pelaporan karbon harus dilakukan dengan standar yang jelas dan dapat diverifikasi (GHG Protocol, 2022).
- c. Prinsip Konsistensi – Perusahaan harus menggunakan metode yang sama dalam pelaporan karbon agar memungkinkan perbandingan antarperiode (ISO 14064, 2023).
- d. Prinsip Transparansi – Semua asumsi dan metodologi yang digunakan dalam pengukuran karbon harus diungkapkan dengan jelas dalam laporan (IFRS Foundation, 2023).
- e. Prinsip Kelengkapan – Seluruh sumber emisi karbon yang material dalam suatu organisasi harus dicatat dan dilaporkan (GRI, 2023).

Akuntansi karbon memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya memantau emisi yang dihasilkan, tetapi juga mengembangkan strategi pengurangan emisi, seperti efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan investasi dalam kredit karbon (KPMG, 2022).

**2. Regulasi dan Kerangka Standar (IFRS, GHG Protocol, ISO 14064)**

Berbagai regulasi dan standar telah dikembangkan untuk memastikan pengukuran dan pelaporan emisi karbon dilakukan secara seragam dan akurat. Beberapa kerangka kerja utama dalam akuntansi karbon meliputi:

**a. International Financial Reporting Standards (IFRS) - ISSB Standards**

IFRS Foundation melalui *International Sustainability Standards Board* (ISSB) telah mengembangkan IFRS S1 dan IFRS S2, yang mengatur pelaporan keberlanjutan, termasuk pelaporan risiko dan peluang terkait perubahan iklim (IFRS Foundation, 2023).

**b. GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)**

*GHG Protocol* adalah standar global yang dikembangkan oleh *World Resources Institute* (WRI) dan *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) untuk mengukur dan mengelola emisi karbon perusahaan. Standar ini membagi emisi ke dalam tiga kategori utama:

- 1) Scope 1: Emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan.
- 2) Scope 2: Emisi tidak langsung dari konsumsi energi yang dibeli.
- 3) Scope 3: Emisi tidak langsung lainnya yang terjadi dalam rantai pasokan perusahaan (GHG Protocol, 2022).

c. ISO 14064 – Standar Internasional untuk Pengelolaan Emisi Karbon

ISO 14064 adalah standar internasional yang memberikan panduan dalam pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi karbon. Standar ini digunakan untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam pelaporan karbon perusahaan (ISO 14064, 2023).

Selain standar di atas, banyak negara juga telah menerapkan regulasi nasional yang mengatur kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon. Uni Eropa, misalnya, telah mewajibkan perusahaan besar untuk melaporkan emisi karbon melalui *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), sedangkan di Amerika Serikat, *Securities and Exchange Commission* (SEC) tengah mengembangkan regulasi terkait pelaporan emisi karbon untuk perusahaan publik (European Commission, 2023; SEC, 2023).

### 3. Metode Pengukuran dan Pelaporan Emisi Karbon

Untuk memastikan penghitungan emisi karbon yang akurat, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode pengukuran, antara lain:

a. Metode Berbasis Aktivitas (*Activity-Based Approach*)

- 1) Menghitung emisi berdasarkan data aktivitas spesifik, seperti konsumsi bahan bakar, listrik, atau produksi.
- 2) Diperlukan faktor emisi standar yang dapat digunakan untuk mengonversi aktivitas menjadi emisi karbon (GHG Protocol, 2022).

b. Metode Berbasis Pasar (*Market-Based Approach*)

Menggunakan harga karbon atau skema perdagangan emisi untuk mengukur dampak finansial dari emisi karbon yang dihasilkan (KPMG, 2022).

c. Metode Input-Output (*Environmental Input-Output Analysis*)

Menghitung emisi berdasarkan analisis input-output ekonomi, dengan mempertimbangkan rantai pasokan dan dampak emisi dari seluruh proses produksi.

Dalam hal pelaporan, banyak perusahaan menggunakan kerangka pelaporan berbasis standar seperti:

- a. GRI Standards (*Global Reporting Initiative*) – Digunakan untuk menyusun laporan keberlanjutan, termasuk pelaporan emisi karbon.
- b. TCFD (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*) – Memberikan panduan bagi perusahaan dalam mengungkapkan risiko dan peluang terkait perubahan iklim dalam laporan tahunan mereka (TCFD, 2022).
- c. CDP (*Carbon Disclosure Project*) – Platform pelaporan yang digunakan untuk mengungkapkan emisi karbon kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya (CDP, 2022).

Implementasi akuntansi karbon yang efektif memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya energi, dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin peduli terhadap keberlanjutan.

## D. Isu Perubahan Iklim dan Tantangan bagi Profesi Akuntansi

### 1. Dampak Perubahan Iklim terhadap Bisnis dan Akuntansi

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global terbesar yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis dan akuntansi. Dampak ini tidak hanya terbatas pada bencana alam yang semakin sering terjadi, tetapi juga mencakup perubahan dalam kebijakan regulasi, perilaku konsumen, serta ekspektasi investor terhadap praktik bisnis yang lebih berkelanjutan (Deegan, 2022).

Beberapa dampak utama perubahan iklim terhadap dunia bisnis dan akuntansi meliputi:

#### a. Risiko Fisik

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan, yang dapat menyebabkan kerugian aset

perusahaan serta gangguan pada rantai pasokan (IPCC, 2023).

**b. Risiko Transisi**

Perusahaan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan regulasi lingkungan yang semakin ketat, seperti pajak karbon dan kewajiban pelaporan emisi (IFRS Foundation, 2023).

**c. Perubahan Permintaan Pasar**

Konsumen dan investor semakin sadar akan keberlanjutan, sehingga menuntut transparansi lebih dalam pengungkapan dampak lingkungan perusahaan (CDP, 2022).

**d. Penyesuaian Nilai Aset**

Aset yang bergantung pada bahan bakar fosil berisiko mengalami penurunan nilai akibat pergeseran menuju ekonomi rendah karbon (GRI, 2023).

Dampak ini menuntut adanya respons dari profesi akuntansi dalam mengembangkan standar akuntansi yang mampu mengakomodasi informasi terkait risiko dan peluang perubahan iklim bagi bisnis.

**2. Tantangan Akuntan dalam Mengukur dan Melaporkan Emisi Karbon**

Profesi akuntan memiliki peran penting dalam memastikan pengukuran dan pelaporan emisi karbon dilakukan secara akurat dan sesuai standar. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi akuntansi karbon, antara lain:

**a. Kurangnya Standar yang Seragam**

Meskipun telah ada berbagai standar pelaporan seperti IFRS S2, GHG Protocol, dan ISO 14064, belum ada harmonisasi global yang memastikan keseragaman dalam pelaporan karbon (IFRS Foundation, 2023).

**b. Kompleksitas dalam Pengukuran Emisi Scope 3**

Emisi tidak langsung yang berasal dari rantai pasokan (Scope 3) sering kali sulit diukur karena melibatkan banyak pihak dengan sistem pencatatan yang berbeda (GHG Protocol, 2022).

**c. Biaya Implementasi yang Tinggi**

Perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), menghadapi keterbatasan dana dalam menerapkan sistem akuntansi karbon yang memadai (KPMG, 2022).

**d. Tantangan dalam Verifikasi dan Audit Emisi**

Verifikasi emisi karbon memerlukan metodologi yang transparan dan dapat diverifikasi oleh auditor independen, yang hingga kini masih menghadapi kendala dalam hal teknis dan regulasi (Deegan, 2022).

**e. Kurangnya Kapasitas dan Keahlian Akuntan**

Akuntan tradisional sering kali belum memiliki keahlian dalam akuntansi lingkungan dan karbon, sehingga membutuhkan pelatihan tambahan.

Untuk mengatasi tantangan ini, akuntan perlu meningkatkan literasi keberlanjutan dan berkolaborasi dengan ahli lingkungan serta regulator guna memastikan pelaporan emisi karbon yang lebih kredibel dan relevan.

**3. Integrasi Faktor Iklim dalam Pelaporan Keuangan**

Seiring dengan meningkatnya tekanan dari investor dan regulator, faktor perubahan iklim mulai diintegrasikan dalam pelaporan keuangan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam integrasi ini meliputi:

**a. Pelaporan dalam Laporan Keuangan Tradisional**

- 1) Pengungkapan aset dan liabilitas yang terdampak oleh risiko perubahan iklim, seperti impairment asset akibat kebijakan transisi energi (IFRS Foundation, 2023).
- 2) Estimasi pajak karbon dan dampaknya terhadap arus kas perusahaan (GRI, 2023).

**b. Penggunaan Kerangka Pelaporan Keberlanjutan**

- 1) IFRS S2: Standar yang mewajibkan pengungkapan risiko dan peluang terkait perubahan iklim dalam laporan keuangan perusahaan.
- 2) GRI 305: Standar yang mengatur pengungkapan emisi gas rumah kaca dalam laporan keberlanjutan (GRI, 2023).
- 3) Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD): Kerangka yang digunakan untuk mengintegrasikan risiko iklim dalam strategi dan pelaporan keuangan perusahaan (TCFD, 2022).

**c. Penerapan Pengukuran Nilai Ekonomi atas Dampak Iklim**

- 1) Penggunaan carbon pricing untuk menilai dampak keuangan dari emisi karbon yang dihasilkan.
- 2) Penerapan environmental, social, and governance (ESG) reporting dalam strategi perusahaan guna meningkatkan transparansi dan daya saing (KPMG, 2022).

Integrasi faktor iklim dalam pelaporan keuangan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga memberikan wawasan bagi investor dan pemangku kepentingan dalam menilai keberlanjutan bisnis di masa depan.

**4. Inovasi dan *Best Practices* dalam Akuntansi Karbon**

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan tuntutan regulasi yang semakin ketat, berbagai inovasi dan best practices telah dikembangkan dalam akuntansi karbon. Teknologi canggih seperti blockchain dan artificial intelligence (AI) telah mempercepat proses pelaporan karbon, sementara studi kasus dari perusahaan global memberikan wawasan tentang bagaimana akuntansi karbon dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, strategi bisnis berkelanjutan berbasis akuntansi hijau juga semakin diterapkan untuk

meningkatkan daya saing dan nilai jangka panjang perusahaan.

## 5. Penggunaan Teknologi dalam Akuntansi Karbon (*Blockchain, AI*)

Kemajuan teknologi telah berperan dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi pelaporan karbon. Dua teknologi utama yang banyak digunakan adalah blockchain dan artificial intelligence (AI).

### a. Blockchain dalam Akuntansi Karbon

Blockchain adalah teknologi pencatatan terdesentralisasi yang memungkinkan pelaporan karbon yang lebih transparan dan dapat diaudit dengan mudah. Beberapa manfaat blockchain dalam akuntansi karbon meliputi:

- 1) Transparansi dan Keamanan Data: Data emisi karbon yang dicatat dalam blockchain bersifat immutable (tidak dapat diubah), sehingga mengurangi risiko manipulasi data (Liu *et al.*, 2022).
- 2) Otomatisasi Pelaporan dan Audit: Smart contracts memungkinkan otomatisasi dalam verifikasi dan pelaporan emisi karbon sesuai dengan standar seperti GHG Protocol dan ISO 14064 (Nakamoto, 2021).
- 3) Kredit Karbon Digital: Blockchain dapat digunakan dalam sistem perdagangan karbon untuk memastikan keabsahan dan kepemilikan kredit karbon, seperti yang diterapkan dalam proyek ClimateChain dan Energy Web Foundation (Zhang *et al.*, 2023).

### b. Artificial Intelligence (AI) dalam Akuntansi Karbon

AI membantu perusahaan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memprediksi emisi karbon dengan lebih efisien. Penggunaan AI dalam akuntansi karbon mencakup:

- 1) Analisis Big Data: AI dapat mengolah data operasional perusahaan untuk mengidentifikasi sumber utama emisi karbon dan menyusun strategi mitigasi (Huang *et al.*, 2023).

- 2) Model Prediktif: Algoritma machine learning mampu memprediksi tren emisi karbon berdasarkan pola konsumsi energi dan kebijakan regulasi yang berlaku (Rahman *et al.*, 2022).
- 3) Otomatisasi Pelaporan: AI dapat mengintegrasikan data dari berbagai sistem perusahaan dan menghasilkan laporan keberlanjutan secara real-time (KPMG, 2022).

Implementasi teknologi ini membantu akuntan dalam memastikan pelaporan emisi karbon yang lebih akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## **6. Studi Kasus Implementasi Akuntansi Karbon di Perusahaan Global**

Beberapa perusahaan global telah menerapkan praktik akuntansi karbon yang inovatif untuk mencapai keberlanjutan bisnis. Berikut adalah beberapa contoh best practices yang dapat dijadikan referensi:

### **a. Microsoft: Target Net-Zero dengan Internal Carbon Fee**

- 1) Microsoft telah menerapkan internal carbon fee sejak 2012, yang membebankan biaya kepada setiap divisi berdasarkan jumlah emisi karbon yang dihasilkan.
- 2) Dana yang terkumpul dari carbon fee ini digunakan untuk mendukung proyek keberlanjutan dan pengurangan emisi di seluruh rantai pasokan perusahaan (Microsoft Sustainability Report, 2023).
- 3) Microsoft juga menggunakan AI untuk mengidentifikasi pola konsumsi energi yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi emisi.

### **b. Unilever: Transparansi dalam Pelaporan Emisi Scope 3**

- 1) Unilever telah mengintegrasikan data rantai pasokannya dengan teknologi blockchain untuk melacak emisi karbon dari bahan baku hingga produk akhir.

2) Perusahaan ini juga menerapkan sustainability accounting untuk mengukur dampak lingkungan dari operasionalnya dan mengomunikasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan (Unilever, 2022).

**c. Tesla: Integrasi ESG dalam Laporan Keuangan**

- 1) Tesla tidak hanya fokus pada produksi kendaraan listrik, tetapi juga telah mengembangkan sistem pelaporan emisi karbon yang mencakup Scope 1, 2, dan 3.
- 2) Dalam laporan ESG-nya, Tesla menyoroti pengurangan emisi karbon melalui inovasi energi terbarukan dan efisiensi rantai pasokan (Tesla, 2023).

Studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi karbon yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat reputasi perusahaan, dan memberikan keunggulan kompetitif.

**7. Strategi Bisnis Berkelanjutan dengan Pendekatan Akuntansi Hijau**

Untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, perusahaan perlu mengadopsi strategi bisnis berbasis akuntansi hijau. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

**a. Integrasi Akuntansi Hijau dalam Perencanaan Strategis**

- 1) Menetapkan target reduksi emisi karbon yang sejalan dengan Paris Agreement dan SDGs.
- 2) Menggunakan analisis biaya-manfaat dalam investasi teknologi ramah lingkungan (GRI, 2023).

**b. Penerapan Model Ekonomi Sirkular**

- 1) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui konsep reduce, reuse, recycle (3R).
- 2) Menerapkan akuntansi lingkungan untuk menilai efisiensi sumber daya yang digunakan (Ellen MacArthur Foundation, 2022).

**c. Kolaborasi dengan Regulator dan Investor**

- 1) Berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan seperti Science-Based Targets initiative (SBTi).

- 2) Meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan ESG guna menarik investasi hijau (TCFD, 2022).

**d. Penyusunan Laporan Keberlanjutan yang Terintegrasi**

- 1) Mengadopsi standar IFRS S2 dan GRI dalam pengungkapan informasi lingkungan dan sosial.
- 2) Memanfaatkan AI dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan audit karbon (IFRS Foundation, 2023).

Penerapan strategi ini memungkinkan perusahaan tidak hanya memenuhi kepatuhan regulasi, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

**E. Implikasi bagi Profesi Akuntansi dan Rekomendasi**

Perkembangan akuntansi hijau dan akuntansi karbon membawa dampak signifikan bagi profesi akuntansi. Akuntan tidak lagi hanya berperan dalam pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga dalam memastikan keberlanjutan bisnis melalui pelaporan emisi, transparansi data lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi hijau. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan baru, peran yang lebih luas dalam mendorong transparansi, serta kebijakan yang mendukung peningkatan akuntansi hijau.

**1. Keterampilan Baru yang Dibutuhkan Akuntan di Era Keberlanjutan**

Agar tetap relevan, akuntan perlu mengembangkan keterampilan baru yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Beberapa keterampilan yang dibutuhkan meliputi:

**a. Pemahaman tentang Akuntansi Keberlanjutan**

- 1) Akuntan harus memahami standar pelaporan keberlanjutan seperti GRI (*Global Reporting Initiative*), IFRS S2, dan ISSB (*International Sustainability Standards Board*).

- 2) Keterampilan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek keuangan dan non-keuangan.

**b. Analisis dan Pelaporan Emisi Karbon**

- 1) Kemampuan menghitung dan melaporkan emisi karbon berdasarkan GHG Protocol, ISO 14064, dan *Science-Based Targets* (SBTs).
- 2) Penggunaan perangkat lunak akuntansi karbon untuk memastikan akurasi data emisi perusahaan.

**c. Keahlian Teknologi dan *Data Analytics***

- 1) Familiar dengan *blockchain* dan AI dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan keberlanjutan.
- 2) Kemampuan menggunakan *big data analytics* untuk menganalisis dampak lingkungan dari aktivitas bisnis.

**d. Audit Keberlanjutan dan Assurance**

- 1) Akuntan harus mampu melakukan audit keberlanjutan untuk memastikan keandalan laporan ESG.
- 2) Pemahaman terhadap standar ISAE 3000 (*International Standard on Assurance Engagements*) yang digunakan dalam audit non-keuangan.

**e. Manajemen Risiko Iklim**

- 1) Kemampuan mengidentifikasi risiko iklim yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
- 2) Mengintegrasikan faktor iklim ke dalam strategi bisnis dan pelaporan keuangan.

Peningkatan keterampilan ini akan membantu akuntan beradaptasi dengan tantangan baru dalam dunia bisnis yang semakin berorientasi pada keberlanjutan.

**2. Peran Akuntan dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas**

Akuntan memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan perusahaan. Beberapa peran utama akuntan dalam konteks ini meliputi:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keberlanjutan**
  - 1) Akuntan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa laporan ESG mencerminkan data yang valid dan dapat diverifikasi.
  - 2) Mengadopsi standar pelaporan seperti IFRS S2, GRI, dan TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).
- b. Menyediakan Assurance atas Informasi ESG**

Akuntan dapat memberikan assurance independen atas laporan keberlanjutan perusahaan, memastikan bahwa informasi yang disajikan kredibel dan sesuai dengan regulasi.
- c. Membantu Perusahaan dalam Manajemen Risiko Iklim**
  - 1) Mengidentifikasi potensi risiko finansial akibat perubahan iklim, termasuk risiko transisi (misalnya perubahan regulasi karbon) dan risiko fisik (misalnya bencana alam).
  - 2) Membantu perusahaan dalam menyusun strategi mitigasi risiko yang berbasis data.
- d. Mendorong Kepatuhan terhadap Regulasi Keberlanjutan**

Akuntan berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah terkait keberlanjutan, seperti EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dan SEC Climate Disclosure Rules.
- e. Mengintegrasikan Keberlanjutan dalam Strategi Bisnis**
  - 1) Akuntan tidak hanya bertindak sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan berbasis ESG.
  - 2) Membantu manajemen dalam mengembangkan kebijakan bisnis yang ramah lingkungan.

Dengan peran ini, akuntan menjadi pilar utama dalam membangun bisnis yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

### **3. Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Akuntansi Hijau**

Untuk meningkatkan efektivitas akuntansi hijau, diperlukan kebijakan yang mendukung baik di tingkat perusahaan maupun pemerintah. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan:

#### **a. Standarisasi Pelaporan Keberlanjutan**

- 1) Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan menerapkan standar pelaporan keberlanjutan yang konsisten dan dapat dibandingkan.
- 2) Pemerintah dan regulator perlu mendorong adopsi IFRS S2, GRI, dan ISSB sebagai standar utama pelaporan ESG.

#### **b. Pelatihan dan Sertifikasi untuk Akuntan**

- 1) Lembaga profesi akuntansi, seperti IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), perlu menyediakan program pelatihan dan sertifikasi terkait akuntansi keberlanjutan.
- 2) Universitas juga perlu mengintegrasikan mata kuliah akuntansi hijau dan ESG dalam kurikulum pendidikan akuntansi.

#### **c. Incentive untuk Perusahaan yang Menerapkan Akuntansi Hijau**

- 1) Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang aktif dalam pengurangan emisi karbon dan transparansi pelaporan keberlanjutan.
- 2) Dukungan dalam bentuk pendanaan hijau atau akses ke kredit dengan bunga rendah bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

#### **d. Penggunaan Teknologi dalam Pelaporan Keberlanjutan**

- 1) Mendorong perusahaan untuk menggunakan blockchain dan AI dalam meningkatkan transparansi data emisi karbon.
- 2) Penerapan sistem digital berbasis cloud accounting untuk mempermudah pengelolaan data ESG.

**e. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta**

- 1) Regulator, perusahaan, dan akademisi perlu bekerja sama dalam mengembangkan metodologi akuntansi hijau yang lebih efektif.
- 2) Pembentukan forum keberlanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi best practices dalam akuntansi karbon dan ESG.

Dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan akuntansi hijau dapat menjadi bagian integral dalam operasional bisnis dan regulasi keuangan di masa depan.

**F. Kesimpulan**

Perkembangan akuntansi hijau dan akuntansi karbon menunjukkan bahwa dunia bisnis dan profesi akuntansi tidak lagi hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan tradisional. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan regulasi keberlanjutan yang semakin ketat, akuntan kini memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan bisnis.

**1. Ringkasan Temuan**

Dari pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa temuan utama terkait akuntansi hijau dan akuntansi karbon:

**a. Akuntansi Hijau sebagai Paradigma Baru**

- 1) Akuntansi hijau tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan, tetapi juga mencerminkan dampak lingkungan dalam laporan keuangan dan keberlanjutan.
- 2) Standar internasional seperti GRI, IFRS S2, dan TCFD semakin banyak digunakan dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan.

**b. Akuntansi Karbon sebagai Instrumen Pengelolaan Emisi**

- 1) Akuntansi karbon membantu perusahaan dalam mengukur, melaporkan, dan mengurangi emisi karbon mereka sesuai dengan GHG Protocol dan ISO 14064.

- 2) Regulasi global seperti EU CSRD dan SEC Climate Disclosure Rules mendorong transparansi dalam pelaporan karbon perusahaan.

**c. Tantangan dan Peran Akuntan dalam Keberlanjutan**

- 1) Profesi akuntansi menghadapi tantangan dalam pengukuran emisi, audit keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
- 2) Akuntan harus memiliki keterampilan baru, termasuk pemahaman terhadap teknologi seperti blockchain dan AI dalam akuntansi hijau.

**d. Inovasi dan *Best Practices* dalam Akuntansi Keberlanjutan**

- 1) Implementasi teknologi digital memungkinkan pelaporan keberlanjutan yang lebih akurat dan *real-time*.
- 2) Studi kasus dari perusahaan global menunjukkan bahwa keberhasilan dalam akuntansi karbon bergantung pada integrasi strategi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan.

**e. Kebijakan dan Rekomendasi untuk Masa Depan**

- 1) Standarisasi pelaporan keberlanjutan perlu diperkuat agar perusahaan memiliki pedoman yang jelas dan konsisten.
- 2) Pemerintah dan lembaga akuntansi perlu menyediakan insentif serta pelatihan bagi akuntan agar mereka siap menghadapi tantangan keberlanjutan.

**2. Implikasi bagi Dunia Bisnis dan Akuntansi**

Implikasi dari perkembangan akuntansi hijau dan akuntansi karbon terhadap dunia bisnis dan profesi akuntansi meliputi:

**a. Bagi Perusahaan:**

- 1) Harus lebih proaktif dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari operasional bisnisnya.

- 2) Perusahaan yang tidak mematuhi standar keberlanjutan berisiko mengalami sanksi regulasi dan kehilangan kepercayaan investor.

**b. Bagi Profesi Akuntansi:**

- 1) Akuntan harus mengembangkan keterampilan baru dalam pelaporan ESG dan audit keberlanjutan.
- 2) Kebutuhan akan auditor keberlanjutan dan akuntan karbon akan meningkat seiring dengan tuntutan transparansi dari regulator dan investor.

**c. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan:**

- 1) Regulasi keberlanjutan harus lebih jelas, harmonis, dan diterapkan secara global agar perusahaan memiliki pedoman yang seragam.
- 2) Insentif pajak dan subsidi bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis hijau dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

**3. Arah Masa Depan Akuntansi Hijau**

Melihat tren global dan regulasi yang terus berkembang, akuntansi hijau diprediksi akan terus mengalami perubahan signifikan. Beberapa arah masa depan akuntansi hijau meliputi:

**a. Integrasi Akuntansi Hijau dalam Laporan Keuangan Utama**

- 1) Ke depan, pelaporan keberlanjutan tidak lagi bersifat terpisah, tetapi akan diintegrasikan dengan laporan keuangan utama perusahaan.
- 2) Standar seperti IFRS S1 dan IFRS S2 akan menjadi acuan utama bagi perusahaan dalam menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan secara bersamaan.

**b. Penggunaan Teknologi dalam Akuntansi Keberlanjutan**

- 1) Blockchain akan digunakan untuk memastikan transparansi dan keakuratan data emisi karbon.
- 2) Artificial Intelligence (AI) akan membantu dalam analisis big data terkait dampak lingkungan suatu bisnis.

**c. Meningkatnya Permintaan akan Akuntan Keberlanjutan**

- 1) Perusahaan akan semakin membutuhkan profesional akuntansi yang memiliki keahlian dalam pelaporan keberlanjutan dan manajemen risiko iklim.
- 2) Sertifikasi khusus di bidang akuntansi hijau dan audit ESG akan menjadi standar baru bagi akuntan profesional.

**d. Regulasi yang Lebih Ketat dan Globalisasi Standar Pelaporan**

- 1) Pemerintah di berbagai negara akan semakin mengadopsi standar pelaporan ESG yang lebih ketat, sehingga perusahaan harus siap menghadapi tuntutan regulasi yang lebih kompleks.
- 2) Harmonisasi standar internasional, seperti ISSB dan GRI, akan semakin ditekankan untuk memastikan konsistensi dalam pelaporan keberlanjutan di seluruh dunia.

Dengan perkembangan ini, akuntansi hijau tidak lagi menjadi sekadar tren, tetapi menjadi kebutuhan utama dalam memastikan keberlanjutan bisnis di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, J., & Unerman, J. (2018). Advancing research into accounting and the UN Sustainable Development Goals (SDGs). *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(1), 2-24. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2929>
- Carbon Disclosure Project. (2022). *CDP global climate change report 2022*. Retrieved from <https://www.cdp.net>
- Deegan, C. (2022). *An introduction to accounting: Sustainability and social accounting*. Routledge.
- Ellen MacArthur Foundation. (2022). *Circular economy: A transformational framework for business*. Retrieved from <https://www.ellenmacarthurfoundation.org>
- European Commission. (2023). *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. Retrieved from <https://ec.europa.eu>
- Frias-Aceituno, J. V., Rodríguez-Ariza, L., & García-Sánchez, I. M. (2013). The role of the board in the dissemination of integrated corporate social reporting. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 20(4), 219-233. <https://doi.org/10.1002/csr.1294>
- Global Reporting Initiative. (2023). *GRI standards for sustainability reporting*. Retrieved from <https://www.globalreporting.org>
- Goyal, S., & Kumar, D. (2021). Consumer perspectives on green brands: A review and future directions. *Journal of Cleaner Production*, 281, 124556. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124556>
- Greenhouse Gas Protocol. (2022). *A corporate accounting and reporting standard*. Retrieved from <https://ghgprotocol.org>
- Huang, Z., Wang, L., & Li, X. (2023). AI-driven carbon accounting: A new era of sustainability reporting. *Journal of Environmental Management*, 325, 116-134.

- IFRS Foundation. (2023). *ISSB standards: IFRS S1 and IFRS S2*. Retrieved from <https://www.ifrs.org>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2023). *Panduan akuntansi keberlanjutan*.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. Retrieved from <https://www.ipcc.ch>
- ISO 14064. (2023). *Greenhouse gases – Part 1, 2, and 3*. International Organization for Standardization. Retrieved from <https://www.iso.org>
- KPMG. (2022). *The KPMG survey of sustainability reporting 2022*. Retrieved from <https://home.kpmg>
- Liu, J., Zhang, X., & Chen, Y. (2022). Blockchain for carbon accounting: Opportunities and challenges. *Sustainability*, 14(6), 3456.
- Microsoft. (2023). *Sustainability report 2023*. Retrieved from <https://www.microsoft.com/sustainability>
- Nakamoto, S. (2021). The role of smart contracts in carbon trading. *Blockchain Journal*, 9(3), 21-38.
- Rahman, M., Singh, R., & Patel, K. (2022). Machine learning for carbon footprint prediction in corporate sustainability. *Energy Policy Journal*, 118, 74-89.
- Securities and Exchange Commission (SEC). (2023). *Proposed rule on climate disclosure*. Retrieved from <https://www.sec.gov>
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB). (2023). *SASB standards*. Retrieved from <https://www.sasb.org>
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures. (2022). *Final report: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*. Retrieved from <https://www.fsb-tcfd.org>

Tesla. (2023). *Impact report 2023*. Retrieved from  
<https://www.tesla.com/sustainability>

Unilever. (2022). *Sustainability progress report*. Retrieved from  
<https://www.unilever.com>

## TENTANG PENULIS



**Ayu Puspita Sari, M.Ak.**

Penulis lahir di Pontianak, 5 Maret 1996. Saat ini, ia aktif sebagai dosen di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Tanjungpura, dengan gelar Sarjana Akuntansi (S1) dan Magister Akuntansi (S2). Bidang keahlian dan minatnya mencakup audit dan pelaporan keuangan. Selain mengajar, ia juga terlibat dalam berbagai penelitian serta kegiatan akademik, termasuk konferensi dan publikasi ilmiah di bidang akuntansi dan keuangan. Penulis juga aktif dalam organisasi akademik, seperti Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA), serta memiliki ketertarikan dalam pengembangan pendidikan dan inovasi di dunia akuntansi.

# BAB

# 17

## ISU PERBANKAN HIJAU DAN KINERJA KEUANGAN BANK

Dien Ajeng Fauziah, S.E., M.Ak., CSRS., CSRA.

Universitas Bhayangkara Surabaya

### A. Pendahuluan

Dalam era transformasi menuju pembangunan berkelanjutan, sektor keuangan dituntut untuk mengambil peran aktif dalam mendukung agenda lingkungan hidup global. Salah satu inisiatif strategis yang berkembang dalam konteks ini adalah perbankan hijau (*green banking*), yakni suatu pendekatan dalam kegiatan operasional perbankan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan keuangan (Sarah Chandran, 2024; Savitz & Weber, 2014). Perbankan hijau tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari lembaga keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah dan sumber daya alam yang bertanggung jawab (Lapinskienė & Danilevičienė, 2023).

Penerapan prinsip perbankan hijau telah menjadi isu strategis yang semakin mengemuka, baik di tingkat global maupun nasional. Organisasi seperti United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) dan Principles for Responsible Banking (PRB) mendorong bank untuk secara aktif mengelola risiko lingkungan dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis jangka panjang (UNEP FI, 2016). Di Indonesia, Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) merespons dinamika ini melalui kebijakan Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia, yang memberikan panduan bagi lembaga keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi hijau (OJK, 2021).

Meskipun implementasi perbankan hijau membawa nilai strategis dalam mendukung pembangunan rendah karbon, terdapat diskursus yang berkembang mengenai implikasinya terhadap kinerja keuangan bank. Di satu sisi, adopsi prinsip-prinsip hijau dapat memperkuat reputasi institusi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta membuka akses terhadap investor yang peduli pada aspek lingkungan dan sosial (Zhang *et al.*, 2022). Di sisi lain, biaya investasi awal yang tinggi, ketidakpastian regulasi, dan terbatasnya pemahaman teknis dapat menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi finansial jangka pendek (Miah *et al.*, 2024).

Studi-studi empiris memberikan hasil yang beragam mengenai hubungan antara inisiatif perbankan hijau dan kinerja keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara keberlanjutan dan profitabilitas bank (Cucari *et al.*, 2018), sementara penelitian lainnya menyoroti pentingnya moderasi faktor eksternal seperti dukungan regulasi dan kesiapan teknologi (Buallay, 2019). Hal ini mengindikasikan perlunya kajian yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana pendekatan hijau dalam sektor perbankan dapat secara optimal diselaraskan dengan tujuan keuangan institusional.

Bab ini bertujuan untuk mendalami keterkaitan antara perbankan hijau dan kinerja keuangan bank, baik dari perspektif teoretis maupun hasil-hasil studi empiris terkini. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung pengembangan sistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya di tengah dinamika perubahan iklim dan tuntutan transformasi ekonomi hijau.

## B. Konsep Perbankan Hijau

Perbankan hijau (*green banking*) merupakan konsep yang menempatkan dimensi keberlanjutan sebagai bagian integral dari aktivitas perbankan, baik dalam aspek operasional maupun kebijakan pembiayaan. Secara umum, perbankan hijau didefinisikan sebagai upaya lembaga keuangan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mempromosikan praktik bisnis ramah lingkungan dan mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup (Deswanto & Siregar, 2018).

Berbeda dari praktik perbankan konvensional yang semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, perbankan hijau mengintegrasikan tiga dimensi utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*). Hal ini sejalan dengan prinsip sustainable finance, di mana bank tidak hanya berperan sebagai intermediary keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Jeucken, 2010). Bentuk implementasi perbankan hijau meliputi:

1. Produk pembiayaan hijau (*green loans/green financing*): Kredit yang diberikan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, bangunan hemat energi, dan transportasi beremisi rendah.
2. *Green bonds*: Instrumen utang yang hasilnya digunakan secara eksklusif untuk mendanai proyek-proyek hijau.
3. Penilaian risiko lingkungan (*environmental risk assessment*): Penilaian dampak lingkungan sebagai bagian dari due diligence sebelum pemberian pinjaman.
4. Kebijakan kredit hijau: Pembatasan atau penolakan pembiayaan pada sektor yang merusak lingkungan seperti industri batu bara atau pembalakan liar.

Dalam praktiknya, perbankan hijau juga mengadopsi operasional kantor yang efisien energi, penggunaan dokumen digital untuk mengurangi kertas, serta program tanggung jawab sosial yang fokus pada pelestarian lingkungan.

Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim, adopsi prinsip perbankan hijau menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih bertanggung jawab dan resilien terhadap risiko lingkungan. Peran bank tidak hanya sebagai pemberi modal, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keberlanjutan jangka panjang.

### C. Regulasi dan Inisiatif Perbankan Hijau

Penerapan perbankan hijau tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kebijakan dan inisiatif di tingkat global maupun nasional. Beberapa kerangka kerja yang mendasari perbankan hijau antara lain:

#### 1. *Equator Principles*

Merupakan standar sukarela yang digunakan oleh institusi keuangan untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam proyek pembiayaan. Standar ini mendorong bank untuk menilai dampak lingkungan sejak tahap awal proyek (Euator Principles Association, 2020).

#### 2. *United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)*

UNEP FI adalah kemitraan antara PBB dan sektor keuangan global untuk mendorong praktik keuangan berkelanjutan. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pengembangan *Principles for Responsible Banking* (PRB) yang menuntut bank agar sejajar dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim (UNEP FI, 2019).

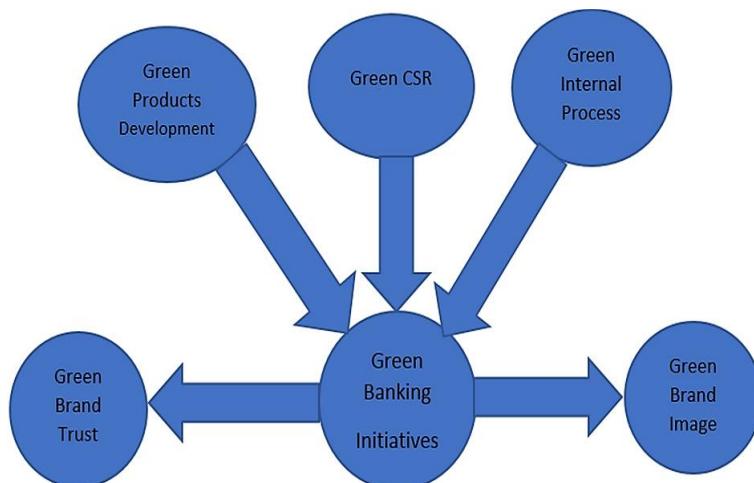
#### 3. *Taksonomi Hijau Indonesia*

Sebagai bentuk komitmen nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia Versi 1.0, yang menjadi pedoman klasifikasi aktivitas ekonomi hijau. Taksonomi ini membantu bank mengidentifikasi proyek-proyek yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon (OJK, 2021).

#### 4. Roadmap Keuangan Berkelanjutan

Roadmap ini merupakan rencana strategis OJK dalam mendorong integrasi keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan Indonesia. Fokus utamanya mencakup penguatan regulasi, pengembangan kapasitas, serta peningkatan transparansi dan pelaporan keberlanjutan (OJK, 2021).

Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa regulasi bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga menjadi katalisator bagi transformasi sistem keuangan menuju keberlanjutan.



**Gambar 17.1 Inisiatif Perbankan Hijau**

Sumber: Sharma & Choubey (2022)

Gambar 17.1 menggambarkan hubungan antar berbagai elemen dalam praktik Green Banking Initiatives atau Inisiatif Perbankan Hijau. Dalam model ini, terdapat lima faktor utama yang berhubungan langsung dengan pengembangan inisiatif perbankan hijau, yang saling mempengaruhi satu sama lain.

*Green Products Development* (Pengembangan Produk Hijau): Produk hijau adalah salah satu elemen kunci dalam perbankan hijau. Bank mengembangkan produk-produk yang berfokus pada keberlanjutan, seperti pinjaman untuk energi terbarukan atau investasi hijau lainnya, yang membantu mendukung proyek-proyek ramah lingkungan.

*Green CSR (Corporate Social Responsibility):* Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hijau mencerminkan komitmen bank terhadap keberlanjutan lingkungan dalam aktivitas sosial dan operasional . Melalui CSR hijau, bank mendukung kegiatan sosial yang terkait dengan pelestarian lingkungan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank.

*Green Internal Process (Proses Internal Hijau):* Proses internal hijau mencakup upaya bank untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional . Ini termasuk pengurangan jejak karbon, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi dalam kegiatan sehari-hari bank.

*Green Brand Image (Citra Merek Hijau):* Citra merek hijau adalah persepsi publik terhadap bank sebagai entitas yang mendukung keberlanjutan. Bank yang sukses mengimplementasikan kebijakan perbankan hijau biasanya memiliki citra merek yang positif, yang dapat meningkatkan daya tarik di pasar.

*Green Brand Trust (Kepercayaan Merek Hijau):* Kepercayaan terhadap merek hijau terbentuk ketika bank berhasil menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap keberlanjutan lingkungan. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan pemangku kepentingan.

Semua elemen ini berinteraksi dan saling mendukung dalam menciptakan *Green Banking Initiatives* yang sukses. Melalui pengembangan produk hijau, tanggung jawab sosial yang kuat, proses internal yang ramah lingkungan, citra merek hijau, dan kepercayaan merek yang terbentuk, bank dapat meningkatkan kinerja finansial sambil berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

#### D. Teori-Teori yang Relevan

Dalam memahami keterkaitan antara praktik perbankan hijau dan kinerja keuangan bank, sejumlah teori dasar dalam bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan berkelanjutan dapat digunakan sebagai landasan teoretis. Teori-teori ini

membantu menjelaskan motivasi, konsekuensi, serta respons pemangku kepentingan terhadap adopsi kebijakan hijau oleh lembaga keuangan.

### **1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)**

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa operasinya dilaksanakan dalam batasan dan norma yang dapat diterima secara sosial. Dalam konteks perbankan hijau, teori ini menjelaskan bahwa bank mengadopsi praktik keberlanjutan guna mempertahankan legitimasi sosialnya di mata publik, regulator, dan investor (Suchman, 1995). Bank yang menunjukkan komitmen pada kelestarian lingkungan cenderung memperoleh kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya (Deegan, 2014).

### **2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)**

Menurut teori ini, keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada pemegang saham, tetapi juga pada kepuasan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemerintah, LSM, dan masyarakat luas (Freeman, 1984). Dalam praktik perbankan hijau, adopsi kebijakan berkelanjutan merupakan bentuk tanggung jawab kepada berbagai kelompok yang terpengaruh oleh aktivitas bank. Respons positif dari pemangku kepentingan terhadap inisiatif hijau dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas nasabah, yang berdampak pada kinerja keuangan (Mousa, et al., 2015).

### **3. Teori Signaling (*Signaling Theory*)**

Teori ini berfokus pada bagaimana informasi asimetris antara manajemen dan pemangku kepentingan dapat dikurangi melalui sinyal-sinyal tertentu. Dalam konteks ini, komitmen terhadap perbankan hijau menjadi sinyal positif yang menunjukkan kualitas manajemen dan komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan (Spence, 1973). Bank yang secara aktif mempublikasikan laporan keberlanjutan atau terlibat dalam pembiayaan hijau mengirimkan sinyal

kredibilitas kepada investor dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan nilai pasar dan kinerja keuangan (Aerts *et al.*, 2006).

#### 4. Teori Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan (*Sustainable Competitive Advantage Theory*)

Teori ini berakar pada konsep *resource-based view* (RBV) yang menyatakan bahwa organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya yang langka, tidak dapat ditiru, dan sulit digantikan. Praktik perbankan hijau, jika dilakukan secara konsisten dan strategis, dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif melalui inovasi produk, efisiensi operasional, dan diferensiasi pasar (Hart & Dowell, 2010). Sebagai contoh, bank yang lebih awal mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan layanan digital hijau dapat memperoleh posisi unggul di pasar yang semakin peduli terhadap isu lingkungan.

Dengan menggunakan keempat teori ini, hubungan antara kebijakan hijau bank dan kinerja keuangannya dapat dianalisis secara menyeluruh, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun strategis. Integrasi teori-teori tersebut juga memungkinkan kajian multidisipliner dalam memahami dinamika green banking di tengah perubahan lingkungan bisnis global yang semakin kompleks.

### E. Isu-Isu dalam *Green Banking*

*Green banking*, meskipun sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan, sering menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh bank untuk memaksimalkan manfaatnya. Isu-isu utama yang dihadapi dalam penerapan *green banking* mencakup:

1. Regulasi yang Tidak Konsisten: Salah satu kendala utama dalam penerapan *green banking* adalah ketidakstabilitan regulasi di berbagai negara. Di banyak negara berkembang, regulasi terkait lingkungan sering kali tidak cukup ketat atau bahkan tidak ada, yang mengurangi insentif bagi bank untuk mengimplementasikan kebijakan hijau (Julia & Kassim, 2020;

Yadav *et al.*, 2018). Sebaliknya, di negara maju, regulasi yang ketat dapat memaksa bank untuk berinovasi, meskipun ini juga meningkatkan biaya operasional.

2. Kesulitan dalam Menilai Risiko Lingkungan: Banyak bank menghadapi tantangan dalam menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan investasi hijau. Risiko ini bisa berkaitan dengan ketidakpastian lingkungan dan perubahan iklim yang bisa mempengaruhi portofolio kredit (Gunawan *et al.*, 2022; Xie *et al.*, 2020). Hal ini menambah kompleksitas dalam proses evaluasi risiko dan pengambilan keputusan perbankan.
3. Biaya Implementasi yang Tinggi: Bank yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan memperbarui infrastruktur untuk mematuhi standar green banking mungkin menghadapi biaya tinggi yang tidak selalu menghasilkan keuntungan jangka pendek. Meskipun di masa depan dapat meningkatkan profitabilitas, pada awalnya ini bisa membebani kinerja keuangan bank (Agarwal, 2024).
4. Kurangnya Kesadaran Pasar: Banyak konsumen dan perusahaan yang belum sepenuhnya menyadari manfaat dari produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan. Ini membuat bank kesulitan untuk memasarkan produk green banking secara efektif. Padahal, untuk meningkatkan penetrasi pasar produk-produk hijau, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan (Ratnasari *et al.*, 2021).

#### F. Pengaruh *Green Banking* terhadap Kinerja Keuangan Bank

Meskipun tantangan yang dihadapi bank dalam menerapkan *green banking* cukup besar, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan hijau dapat memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial bank. Berikut adalah beberapa cara *green banking* mempengaruhi kinerja bank:

1. Peningkatan Profitabilitas: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bank yang mengadopsi praktek *green banking* mengalami peningkatan profitabilitas dalam jangka panjang. Salah satu alasan utama adalah berkurangnya biaya

operasional akibat pengurangan penggunaan energi dan sumber daya lainnya (M. Sharma & Choubey, 2022). Selain itu, produk finansial hijau seperti green bonds dan pinjaman untuk proyek ramah lingkungan sering kali menarik premi yang lebih tinggi, yang berpotensi meningkatkan pendapatan bank.

2. Penurunan Risiko Kredit: Investasi dalam proyek hijau dapat mengurangi risiko kredit bagi bank. Proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan seringkali lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, bank yang mendukung proyek hijau juga berisiko lebih rendah terkait dengan perubahan regulasi lingkungan yang semakin ketat (Bukhari *et al.*, 2020).
3. Peningkatan Reputasi dan Daya Tarik Investor: Bank yang menerapkan kebijakan *green banking* dapat meningkatkan reputasi di pasar. Reputasi yang baik dalam hal keberlanjutan dapat menarik lebih banyak investor yang berfokus pada dampak sosial dan lingkungan. Di sisi lain, perusahaan yang berinvestasi dalam produk finansial ramah lingkungan sering kali mendapat perhatian lebih dari para pemangku kepentingan yang semakin menyadari pentingnya keberlanjutan (E. S. Sharma *et al.*, 2020).
4. Stabilitas Keuangan Jangka Panjang: *Green banking* dapat membantu menciptakan stabilitas keuangan bank dalam jangka panjang. Dengan mendiversifikasi portofolio pinjaman ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan, bank dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang lebih rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga energi (Aslam & Jawaid, 2023).

#### G. Studi Kasus Bank-Bank yang Mengadopsi *Green Banking*

Beberapa bank besar di dunia telah menjadi pelopor dalam menerapkan *green banking* dan telah menunjukkan dampak positif baik dalam hal kinerja finansial maupun kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah

contoh beberapa bank yang telah berhasil mengadopsi *green banking*:

HSBC: HSBC merupakan salah satu bank yang secara aktif mengintegrasikan green banking ke dalam strategi bisnis. Dengan fokus pada pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan dan pinjaman untuk infrastruktur hijau, HSBC telah melihat peningkatan dalam pangsa pasar dan reputasi global (Zhang *et al.*, 2022).

State Bank of India (SBI): SBI adalah salah satu bank yang sukses mengimplementasikan *green banking* di India. SBI menawarkan berbagai produk keuangan hijau, termasuk pinjaman untuk proyek energi terbarukan dan kendaraan listrik, yang telah membantu meningkatkan daya tarik di pasar dan memperkuat stabilitas keuangan (Putri *et al.*, 2023).

Bank of America: Bank of America juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon dengan memodernisasi kantor dan mempromosikan produk hijau. Ini membantu menarik investor yang berfokus pada keberlanjutan dan meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang (Bukhari *et al.*, 2020).

## H. Simpulan

*Green banking* tidak hanya menjadi tren, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi bank yang ingin beradaptasi dengan tantangan ekonomi dan lingkungan global saat ini. Meskipun terdapat banyak tantangan dalam implementasinya, *green banking* dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi bank, baik dari sisi profitabilitas, reputasi, maupun stabilitas finansial. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk terus mengevaluasi dan mengintegrasikan kebijakan hijau dalam operasional guna meraih kesuksesan berkelanjutan.

Perbankan hijau merupakan pendekatan strategis dalam sistem perbankan modern yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses operasional dan pembiayaan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam aktivitas

perbankan, serta menuntut perubahan paradigma dari *profit-oriented* menjadi *planet-conscious* dan *socially responsible*.

Dukungan terhadap perbankan hijau juga terlihat dari berbagai regulasi dan inisiatif baik di tingkat global maupun nasional. Kebijakan seperti Equator Principles, Principles for Responsible Banking, dan Taksonomi Hijau Indonesia menjadi landasan penting bagi lembaga keuangan untuk menilai dan mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara teoretis, hubungan antara implementasi perbankan hijau dan kinerja keuangan bank dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Teori Legitimasi menekankan pentingnya memperoleh penerimaan sosial; Teori Pemangku Kepentingan menyoroti pentingnya mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak; Teori Signaling menekankan nilai strategis dari pengkomunikasian komitmen keberlanjutan; dan Teori Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan menunjukkan potensi keuntungan jangka panjang dari praktik hijau yang terintegrasi. Keempat teori tersebut memberikan fondasi yang kuat untuk menganalisis bagaimana strategi perbankan hijau dapat mempengaruhi performa keuangan dan keberlanjutan jangka panjang lembaga perbankan.

Dengan pemahaman konseptual, regulatif, dan teoretis tersebut, kajian tentang isu perbankan hijau dan kinerja keuangan bank dapat dilanjutkan pada pembahasan kerangka pemikiran dan hasil studi empiris yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aerts, W., Cormier, D., & Magnan, M. (2006). Intra-industry imitation in corporate environmental reporting: An international perspective. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(3), 299–331.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.03.004>
- Agarwal, M. (2024). "Exploring the Relationship between Green Banking Practices and Customer Loyalty ." 30(11), 80–86.  
<https://doi.org/10.53555/kuey.v30i11.8357>
- Aslam, W., & Jawaid, S. T. (2023). Green banking adoption practices: improving environmental, financial, and operational performance. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(4), 820–840. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2022-0125>
- Buallay, A. (2019). Is sustainability reporting (ESG) associated with performance? Evidence from the European banking sector. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 30(1), 98–115. <https://doi.org/10.1108/MEQ-12-2017-0149>
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., & Amran, A. (2020). Green Banking: a road map for adoption. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 371–385. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2019-0177>
- Deswanto, R. B., & Siregar, S. V. (2018). The associations between environmental disclosures with financial performance, environmental performance, and firm value. *Social Responsibility Journal*. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2017-0005>
- Gunawan, J., Permatasari, P., & Sharma, U. (2022). Exploring sustainability and green banking disclosures: a study of banking sector. In *Environment, Development and Sustainability* (Vol. 24, Issue 9). Springer Netherlands.  
<https://doi.org/10.1007/s10668-021-01901-3>

- Hart, Stuart L, & Dowell, Glen. (2010). Invited Editorial: A Natural-Resource-Based View of the Firm: Fifteen Years After. *Journal of Management*, 37(5), 1464–1479. <https://doi.org/10.1177/0149206310390219>
- Jeucken, M. (2010). Sustainable Finance and Banking: The Financial Sector and the Future of the Planet. Routledge.
- Julia, T., & Kassim, S. (2020). Exploring green banking performance of Islamic banks vs conventional banks in Bangladesh based on Maqasid Shariah framework. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 729–744. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0105>
- Lapinskienė, G., & Danilevičienė, I. (2023). Assessment of Green Banking Performance. *Sustainability*, 15(20), 14769. <https://doi.org/10.3390/su152014769>
- Miah, M., Szabó-Szentgróti, G., & Walter, V. (2024). A systematic literature review on green human resource management (GHRM): an organizational sustainability perspective. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371983>
- Mousa, et. al., G. A. (2015). Legitimacy Theory and Environmental Practices: Short Notes. *International Journal of Business and Statistical Analysis*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.12785/ijbsa/020104>
- OJK. (2021). Taksonomi Hijau Indonesia Versi 1.0. Otoritas Jasa Keuangan.
- Putri, Vidiyanna Rizal, Zakaria, Nor Balkish, Said, Jamaliah, & Azis, Maz Ainy Abdul. (2023). Do Foreign Ownership, Executive Incentives, Corporate Social Responsibility Activity and Audit Quality Affect Corporate Tax Avoidance? *Indian Journal of Corporate Governance*, 16(2), 218–239. <https://doi.org/10.1177/09746862231205648>

- Rakhmat, A. S. (2020). Analisis Daya Saing Antara Bank Bumn Dengan Bank Non Bumn Indonesia. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 3(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v3i1.2816>
- Ratnasari, T., Surwanti, A., & Pribadi, F. (2021). Implementation of Green Banking and Financial Performance on Commercial Banks in Indonesia. In W. A. Barnett & B. S. Sergi (Eds.), *Recent Developments in Asian Economics International Symposia in Economic Theory and Econometrics* (Vol. 28, pp. 323–336). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1571-038620210000028018>
- Sarath Chandran, M. C. (2024). Eco-friendly finance: the role of green CSR, processes, and products in enhancing brand trust and image. *Environment, Development and Sustainability*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-05748-2>
- Savitz, A., & Weber, K. (2014). *The Triple Bottom Line How Today's Best-Run Companies Are Achieving Economic, Social, and Environmental Success – and How You Can Too.*
- Sharma, E. S., Goyal, A., Singh, S., & Sharma, P. C. (2020). The Role of Information Technology in the Business Sector. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH IN TECHNOLOGY*, 6(8), 189–197.
- Sharma, M., & Choubey, A. (2022). Green banking initiatives: a qualitative study on Indian banking sector. *Environment, Development and Sustainability*, 24(1), 293–319. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01426-9>
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1882010>
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571. <https://doi.org/10.2307/258788>

- UNEP FI. (2016). Principles for Positive Impact Finance: A Common Framework to Finance the Sustainable Development Goals. United Nations Environment Programme Finance Initiative.
- Xie, Q., Qian, L., Liu, S., Wang, Y., Zhang, Y., & Wang, D. (2020). Assessment of long-term effects from cage culture practices on heavy metal accumulation in sediment and fish. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 194(December 2019), 110433. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110433>
- Yadav, N., Gupta, K., Rani, L., & Rawat, D. (2018). Drivers of Sustainability Practices and SMEs: A Systematic Literature Review. *European Journal of Sustainable Development*, 7(4), 531–544. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2018.v7n4p531>
- Zhang, X., Wang, Z., Zhong, X., Yang, S., & Siddik, A. B. (2022). Do Green Banking Activities Improve the Banks' Environmental Performance? The Mediating Effect of Green Financing. *Sustainability (Switzerland)*, 14(2), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su14020989>

## TENTANG PENULIS



**Dien Ajeng Fauziah, S.E., M.Ak., CSRS., CSRA.**

Lahir di Bengkulu pada tanggal 17 November 1990 merupakan Dosen Tetap di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya sejak Juli 2023. Pada tahun 2008 menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi tingkat Strata 1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu sampai tahun 2012. Pada tahun 2013 hingga April 2017 bekerja sebagai Frontliner Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Palangkaraya dan Kantor Cabang Pembantu Kahayan, Kalimantan Tengah. Pada Juli 2017 hingga 2018 melanjutkan studi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) FEB UB serta melanjutkan studi Strata 2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2019 mengikuti Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS) dilanjutkan tahun 2020 pelatihan Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA) yang diberikan oleh The Institute of Ceritified Sustainability Practitioners (ICSP).

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC002025079859, 1 Juli 2025

Pencipta

: Erlyna Tri Rohmiyatun, Syifa Vidya Sofwan dkk

Nama

: Dsn Krajan, RT 003 RW 002, Kelurahan Desa Bangumulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66273, Pakel, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, 66273

Alamat

: Indonesia

Kewarganegaraan

: Erlyna Tri Rohmiyatun, Syifa Vidya Sofwan dkk

Pemegang Hak Cipta

: Dsn Krajan, RT 003 RW 002, Kelurahan Desa Bangumulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66273, Pakel, Kab. Tulungagung, Jawa Timur, 66273

Nama

: Indonesia

Alamat

: Indonesia

Kewarganegaraan

: Buku

Jenis Ciptaan

: Akuntansi Hijau

Judul Ciptaan

: 12 Juni 2025, di Kab. Purbalingga

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Jangka waktu pelindungan

: 000920120

Nomor Pencatatan

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.  
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan ketegaran tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keaslinya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.